

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR : 15 TAHUN 2019
 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
 DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-6
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.4. Maksud dan Tujuan	I-9
1.5. Sistematika Dokumen RKPD.....	I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi.....	II-1
2.2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-16
2.2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-31
2.2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-110
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-126
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-138
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bukittinggi.....	III-1
3.1.1. Arah Kebijakan ekonomi Nasional Tahun 2020.....	III-2
3.1.2. Arah Pengembangan wilayah Sumatera	III-4
3.1.3. Arah Kebijakan ekonomi Propinsi Sumatera Barat Tahun 2020.....	III-9
3.1.4. Arah Kebijakan ekonomi Berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021	III-16
3.1.5. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Tahun 2020	III-17
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-20
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-20
3.2.2. Kebijakan Belanja daerah	III-21
3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-24
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2020.....	IV-9
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional	IV-9
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	IV-9
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi	IV-15

BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI-1
	6.1. Indikator Kinerja Utama	VI-1
	6.2. Indikator Kinerja Daerah	VI-8
BAB VII	PENUTUP.....	VII-1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1.	Pembagian Wilayah Administrasi Kota Bukittinggi.....	II-2
Tabel 2.2.	Proporsi Luasan Lahan di Kota Bukittinggi Berdasarkan Klasifikasi Kelerengan Lahannya.....	II-5
Tabel 2.3.	Sungai/Batang yang Melalui Bukittinggi	II-8
Tabel 2.4.	Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi (Luas).....	II-10
Tabel 2.5.	Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tanah Longsor.....	II-12
Tabel 2.6.	Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 s/d 2018	II-15
Tabel 2.7.	Kepadatan Penduduk Kota Bukittinggi.....	II-16
Tabel 2.8.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d. 2017 Atas Dasar Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 Kota Bukittinggi (Juta).....	II-18
Tabel 2.9.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d. 2017 atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi (Juta).....	II-20
Tabel 2.10.	Perkembangan Kontribusi Sektor PDRBTahun 2013 s.d. 2017 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kota Bukittinggi	II-22
Tabel 2.11.	Pertumbuhan Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2017 Kota Bukittinggi	II-23
Tabel 2.12.	Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2013 s.d. 2017 Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi	II-24
Tabel 2.13.	Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2014 s.d 2018.....	II-26
Tabel 2.14.	Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2013 s.d. 2017	II-27
Tabel 2.15.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 s.d 2018	II-28
Tabel 2.16.	Kelompok Seni Tradisional yang ada di kota Bukittinggi	II-31
Tabel 2.17.	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi	II-34
Tabel 2.18.	Angka Kelulusan (AL) Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi	II-34
Tabel 2.19.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi	II-36
Tabel 2.20.	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi	II-37
Tabel 2.21.	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi	II-38
Tabel 2.22.	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi	II-39
Tabel 2.23.	Angka Kematian Bayi Tahun 2013 s.d 2018 Kota Bukittinggi.....	II-40
Tabel 2.24.	Angka Kematian Ibu Tahun 2013 s.d 2018 Kota Bukittinggi.....	II-42
Tabel 2.25.	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Bukittinggi.....	II-44
Tabel 2.26.	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2018 Kota Bukittinggi.....	II-45

Tabel 2.27.	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi	II-46
Tabel 2.28.	Jumlah Rumah Sakit Menurut Kecamatan Tahun 2018 Kota Bukittinggi	II-47
Tabel 2.29.	Jumlah Dokter Tahun 2018 Kota Bukittinggi.....	II-47
Tabel 2.30.	Jumlah Tenaga Medis Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi	II-48
Tabel 2.31.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi	II-49
Tabel 2.32.	Rasio Jaringan Irigasi Kota Bukittinggi Tahun 2013 s.d 2017	II-50
Tabel 2.33.	Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk Tahun 2017	II-51
Tabel 2.34.	Rasio Tempat Ibadah Kota BukittinggiTahun 2013 s.d 2017.....	II-51
Tabel 2.35.	Rasio RTH per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi	II-52
Tabel 2.36.	Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi.....	II-53
Tabel 2.37.	Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survey Foto Udara terhadap Luas Daratan Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi	II-54
Tabel 2.38.	Rasio Rumah Layak Huni KotaBukittinggi Tahun 2013 s.d 2018	II-54
Tabel 2.39.	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan.....	II-55
Tabel 2.40.	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan.....	II-56
Tabel 2.41.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Tahun 2014-2018.....	II-56
Tabel 2.42.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2014-2018.....	II-58
Tabel 2.43.	Persentase Penegakan Perda Tahun 2014-2018	II-59
Tabel 2.44.	Cakupan Layanan Bencana Kebakaran Kota Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi	II-59
Tabel 2.45.	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Tahun 2013 s.d 2018 Kota Bukittinggi	II-60
Tabel 2.46.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Bukittinggi	II-62
Tabel 2.47.	Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 dan 2018 Kota Bukittinggi	II-63
Tabel 2.48.	Ketersediaan Pangan Utama Kota Bukittinggi Tahun 2013 s.d. 2017	II-64
Tabel 2.49.	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi	II-66
Tabel 2.50.	Daerah Pelayanan Sektor Persampahan Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi	II-67
Tabel 2.51.	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi	II-67
Tabel 2.52.	Rasio Penduduk yang Telah Memiliki KTP dan Penduduk Yang Wajib Tahun 2013 s.d 2018 Kota Bukittinggi.....	II-71
Tabel 2.53.	Jumlah Kelompok Dasa Wisma Tahun 2013 s.d 2018 Kota Bukittinggi	II-72
Tabel 2.54.	Rasio Akseptor KB Mneurut Kecamatan Tahun 2017 s.d 2018 Kota Bukittinggi	II-75
Tabel 2.55.	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2014 s.d 2018 Kota	

	Bukittinggi	II-76
Tabel 2.56.	Rasio Izin Trayek Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi	II-78
Tabel 2.57.	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi	II-78
Tabel 2.58.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi	II-79
Tabel 2.59.	Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi.....	II-79
Tabel 2.60.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi	II-80
Tabel 2.61.	Cakupan Pengembangan KIM Tahun 2018	II-81
Tabel 2.62.	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi ...	II-82
Tabel 2.63.	Jumlah UKM Non BPR/LKM Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi	II-82
Tabel 2.64.	Jumlah BPR/LKM Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi	II-83
Tabel 2.65.	Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	II-83
Tabel 2.66.	Jumlah Investasi PMDN/PMA Sampai Tahun 2018 Kota Bukittinggi	II-84
Tabel 2.67.	Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi.	II-85
Tabel 2.68.	Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi .	II-86
Tabel 2.69.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi.....	II-87
Tabel 2.70.	Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi...	II-88
Tabel 2.71.	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Statistik Kota Bukittinggi Tahun 2014 s.d 2018	II-88
Tabel 2.72.	Pemanfaatan Persandian Tahun 2018 Kota Bukittinggi	II-88
Tabel 2.73.	Festival Seni dan Budaya yang Diikuti oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018	II-89
Tabel 2.74.	Kelompok Seni Tradisi yang Ada diKota Bukittinggi	II-90
Tabel 2.75.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kota Bukittinggi	II-91
Tabel 2.76.	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	II-92
Tabel 2.77.	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018	II-92
Tabel 2.78.	Jumlah Perpustakaan Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi	II-94
Tabel 2.79.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi	II-95
Tabel 2.80.	Jumlah Perpustakaan Tahun 2017 dan 2018 Kota Bukittinggi.....	II-95
Tabel 2.81.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi	II-95
Tabel 2.82.	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi	II-96
Tabel 2.83.	Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi	II-96
Tabel 2.84.	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi.....	II-97

Tabel 2.85.	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi	II-97
Tabel 2.86.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi	II-98
Tabel 2.87.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi	II-98
Tabel 2.88.	Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi ...	II-99
Tabel 2.89.	Kontribusi Swektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Bukittinggi Atas Harga Berlaku dan harga konstan 2010 Tahun 2011 s.d 2015...	II-100
Tabel 2.90.	Produktivitas Padi Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi	II-101
Tabel 2.91.	Produktivitas Jagung Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi.....	II-101
Tabel 2.92.	Produktivitas Ketela Rambat Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi	II-101
Tabel 2.93.	Produktivitas Ketela Pohon Tahun 2014 s.d. 2017 Kota Bukittinggi.	II-102
Tabel 2.94.	Kontribusi Kategori Pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 s.d. 2017	II-102
Tabel 2.95.	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2013 s.d. 2017.....	II-103
Tabel 2.96.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 s.d. 2017	II-103
Tabel 2.97.	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2013 s.d. 2017	II-104
Tabel 2.98.	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2013 s.d. 2017	II-104
Tabel 2.99.	Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2018	II-105
Tabel 2.100.	Indikator Urusan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2018	II-105
Tabel 2.101.	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi	II-106
Tabel 2.102.	Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi	II-108
Tabel 2.103.	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah di Kota Bukittinggi Tahun 2017 dan 2018.....	II-108
Tabel 2.104.	Indikator Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2018	II-109
Tabel 2.105.	Indikator Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2018	II-109
Tabel 2.106.	Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2018	II-110
Tabel 2.107.	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah tangga Kota Bukittinggi 2013-2017.....	II-111
Tabel 2.108.	Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kota Bukittinggi Tahun 2012-2016.....	II-112
Tabel 2.109.	Rasio Luas wilayah Produktif dan Luas Seluruh Wilayah Budidaya...	II-113
Tabel 2.110.	Angka Kriminalitas yang Tertangani Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi	II-114
Tabel 2.111.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Bukittinggi.....	II-116
Tabel 2.112.	Rasio Ketergantungan Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi.....	II-116
Tabel 2.113.	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian	

	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bukittinggi.....	II-117
Tabel 2.114.	Jumlah program dan Kegiatan SKPD Hasil Monitoring dan evaluasi Tahun 2018.....	II-127
Tabel 2.115.	Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018...	II-136
Tabel 3.1.	Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2020.....	III-3
Tabel 3.2.	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi.....	III-17
Tabel 3.3.	Proyeksi Pendapatan Daerah.....	III-21
Tabel 3.4.	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2020	III-23
Tabel 3.5.	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2017 s.d. 2018 dan Proyeksi/ Target Tahun 2019 dan 2020.....	III-26
Tabel 4.1.	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.....	IV-4
Tabel 4.2.	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	IV-7
Tabel 4.3.	Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-10
Tabel 4.4.	Keterkaitan Misi dan Prioritas Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	IV-16
Tabel 4.5.	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	IV-17
Tabel 5.1.	Alokasi Anggaran Belanja Langsung Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	V-1
Tabel 6.1.	Indikator Kinerja Utama Kota Bukittinggi	VI-3
Tabel 6.2.	Target Kinerja Tahunan Indikator Kinerja Utama Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021	VI-5
Tabel 6.3.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kota Bukittinggi Tahun 2018	VI-7
Tabel 6.4.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bukittinggi	VII-8

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Proses Penyusunan Dokumen RKPD.....	I - 3
Gambar 1.2. Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (SIMDA) Integrated Kota Bukittinggi.....	I - 4
Gambar 1.3. Menu Sistem Informasi manajemen Pemerintah daerah (SIMDA) Integrated Kota Bukittinggi.....	I - 5
Gambar 1.4. Hubungan Antar Dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD.....	I - 6
Gambar 1.5. Hubungan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya sebagai Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Sistem Keuangan	I - 8
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Bukittinggi.....	II- 3
Gambar 2.2 Peta Topografi Kota Bukittinggi.....	II- 5
Gambar 2.3 Peta Goncangan Tanah Kota Bukittinggi.....	II-14
Gambar 3.1 Arah Kebijakan Makro 2020.....	III-4

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah ini merupakan awal dari pelaksanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai penting, antara lain:

- a. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD;
- b. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;
- c. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
- d. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD;
- e. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, serta pendanaan. Penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 dilakukan dengan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top down* dan *bottom-up*. Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan metoda dan kerangka berpikir yang merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Pendekatan politis adalah pendekatan

perencanaan pembangunan yang berupa kebijakan-kebijakan kepala daerah, disamping itu juga mengedepankan proses politik di lingkungan pemerintah Kota Bukittinggi sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan mengakomodir kehendak dan kepentingan masyarakat yang direpresentasikan oleh wakil rakyat yang duduk sebagai anggota DPRD Kota Bukittinggi.

Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dalam RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) dilakukan dengan memperhatikan usulan dari kelurahan dan kecamatan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah. Hasil Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), akan diselaraskan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

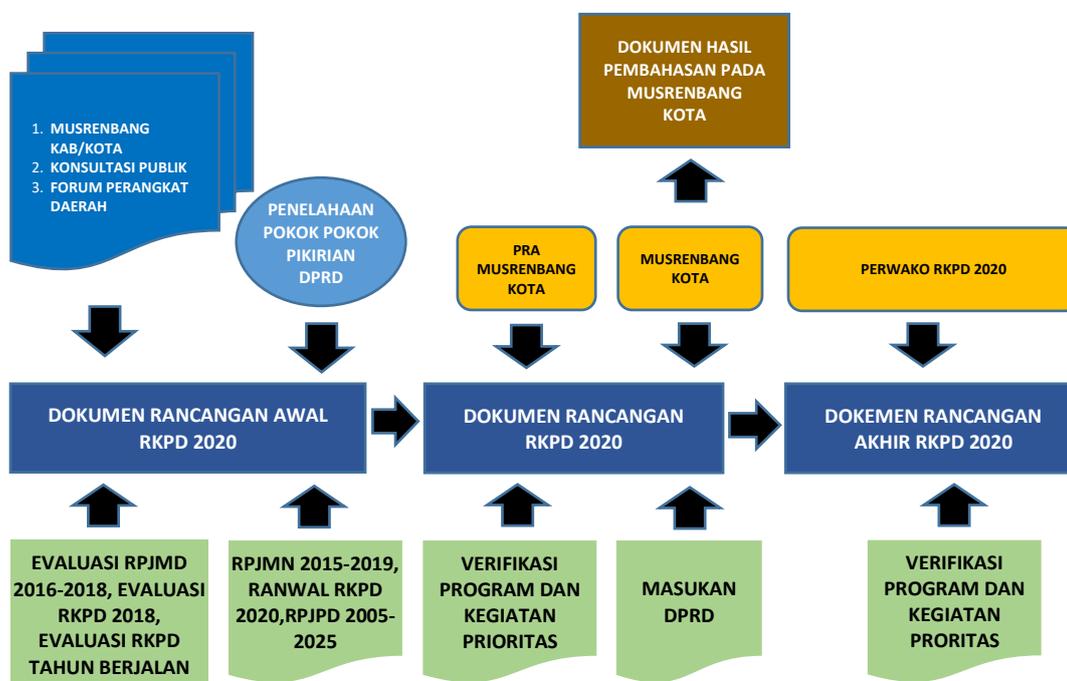
Pada orientasi substansi, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan spasial dilakukan sebagai upaya dimana program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan dijabarkan secara fungsional dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 dengan berpedoman kepada sasaran-sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, evaluasi RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 dan evaluasi RKPD Kota Bukittinggi tahun berjalan. Dalam penyusunan rancangan awal RKPD Kota Bukittinggi, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

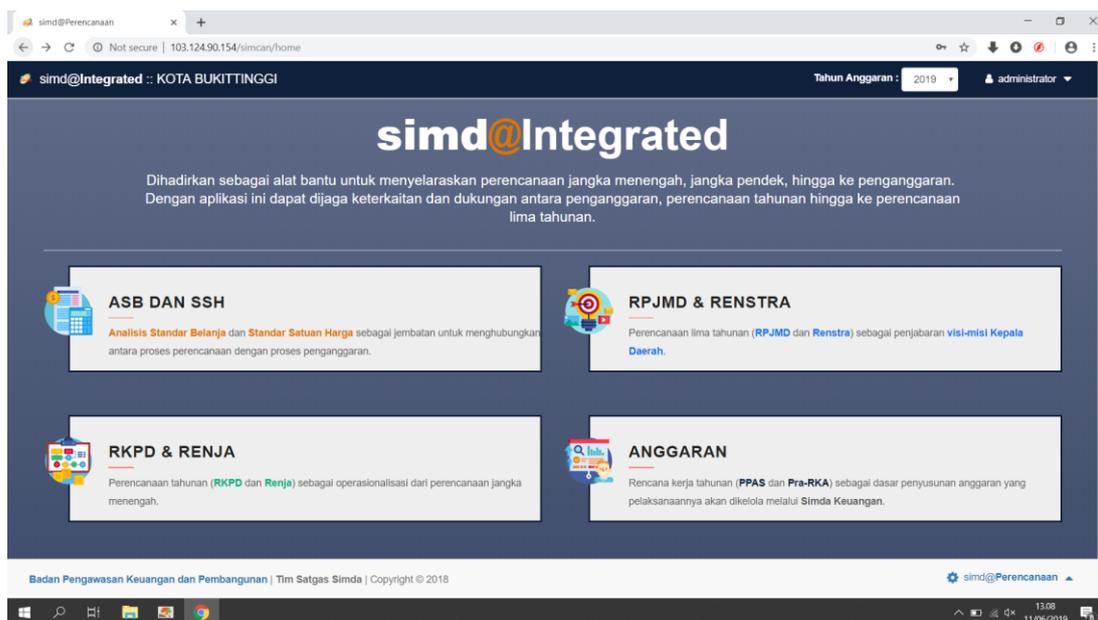
2. Penyusunan Rancangan RKP Kota Bukittinggi Tahun 2020 dilakukan melalui tahapan-tahapan mulai dari tahapan awal dimana Rancangan awal RKP dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, untuk selanjut nya dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan RKP merupakan penyempurnaan rancangan awal RKP berdasarkan:
 - a. rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi; dan
 - b. hasil penelaahan terhadap rancangan RKP provinsi, RKP dan program strategis nasional.
3. Penyusunan Rancangan Akhir RKP Kota Bukittinggi Tahun 2020, Perumusan rancangan akhir RKP merupakan proses penyempurnaan rancangan RKP menjadi rancangan akhir RKP berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKP untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama seluruh Perangkat Daerah, fasilitasi Rancangan Peraturan Walikota oleh Gubernur yang setelah itu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi. Adapun proses penyusunan dokumen RKP dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Dokumen RKP



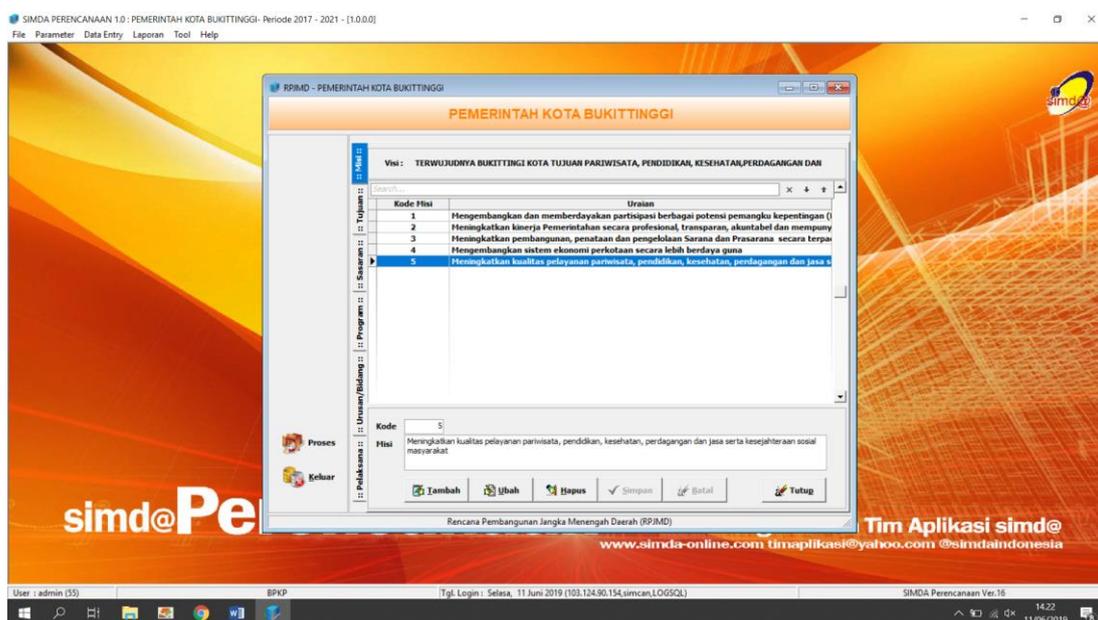
Untuk memudahkan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah dan memperkuat pendekatan perencanaan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi menerapkan sistem informasi perencanaan dan penganggaran (*e-planning* dan *e-budgeting*) yang terintegrasi menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (SIMDA) *Integrated*. Melalui implementasi SIMDA Perencanaan berbasis web diharapkan terwujud keselarasan, baik antar dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD/Renstra, RKPDP/Renja), maupun keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran keuangan daerah (APBD dan DPA). SIMDA Perencanaan untuk pembuatan RPJMD dibuat per 5 tahunan, sedangkan untuk pembuatan APBD dibuat per tahun. Keunggulan utama yang ada pada SIMDA Perencanaan adalah adanya penerapan Analisa Standar Biaya (ASB) dan Standar Satuan Harga (SSH), dengan penerapan ini dapat meminimalkan kesalahan maupun penyelewengan keuangan daerah. Sistem ini berfungsi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Gambar 1.2
Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (SIMDA) Integrated Kota Bukittinggi



Disamping itu, penerapan sistem *e-planning* bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, kegiatan dan pagu anggaran yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah benar-benar dihasilkan melalui proses perencanaan yang transparan mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kota serta melalui penjangkaran aspirasi masyarakat pada saat anggota DPRD melakukan kegiatan reses dan kecamatan.

Gambar 1.3
Menu Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (SIMDA) Integrated Kota Bukittinggi



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 selanjutnya disebut dengan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 merupakan implementasi tahun kelima atau tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021. Tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 merupakan tahap pematapan sekaligus konsolidasi untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada bidang/sector yang masih perlu ditingkatkan pencapaiannya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 4 (empat) tahun terakhir. Arah kebijakan pada sektor infrastruktur diarahkan pada pengembangan infrastruktur serta peningkatan cakupan pelayanannya. Pada sektor penataan ruang dan lingkungan hidup, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan serta perencanaan dan pemanfaatan ruang kota yang berkelanjutan. Sedangkan arah kebijakan pada bidang sosial budaya difokuskan pada peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatnya *good governance*.

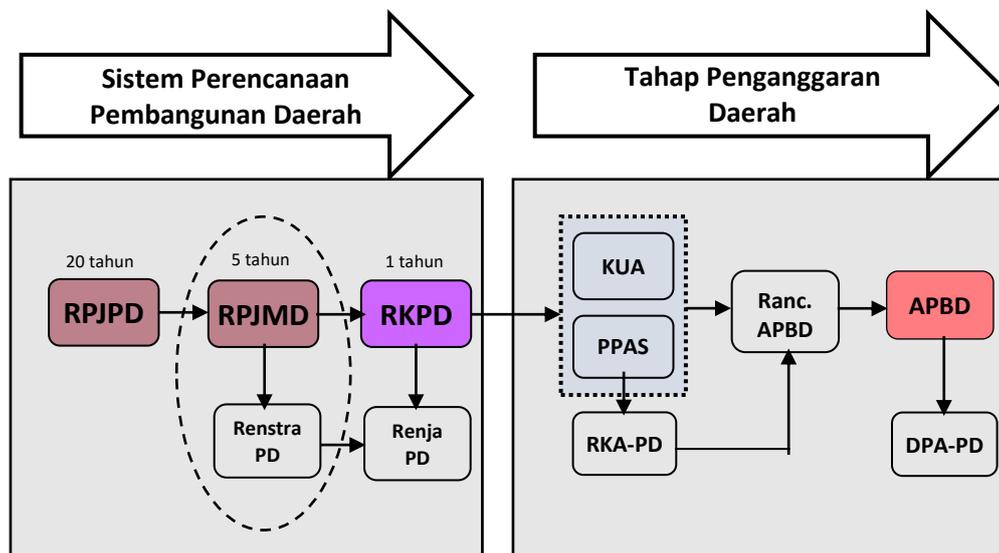
Selain itu, capaian pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar (*baseline*) untuk penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan jangka menengah pada periode Tahun 2021-2025. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun kelima tetap diarahkan pada upaya untuk

mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sector dengan memperhatikan program-program prioritas yang perlu dipercepat pencapaian target kerjanya.

RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan WaliKota merupakan rencana kerja yang menjadi pedoman utama dalam proses penganggaran penyusunan Rancangan APBD, dan juga digunakan oleh Perangkat Daerah untuk menyesuaikan Rancangan Renja menjadi Renja. Renja yang telah disahkan akan dijadikan pedoman dalam menyusun RKA, yang nantinya akan dijabarkan dalam R-APBD. Dalam penyusunan Rancangan Renja berpedoman pada Renstra yang merupakan dokumen rencana pembangunan masing-masing SKPD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Renja merupakan operasionalisasi RKPD oleh SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, RKPD memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen rencana maupun anggaran terutama RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah, dan RAPBD. Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar berikut :

Gambar 1.4
Hubungan Antar Dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kota Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tahun 2006-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tahun 2016 Nomor 9);

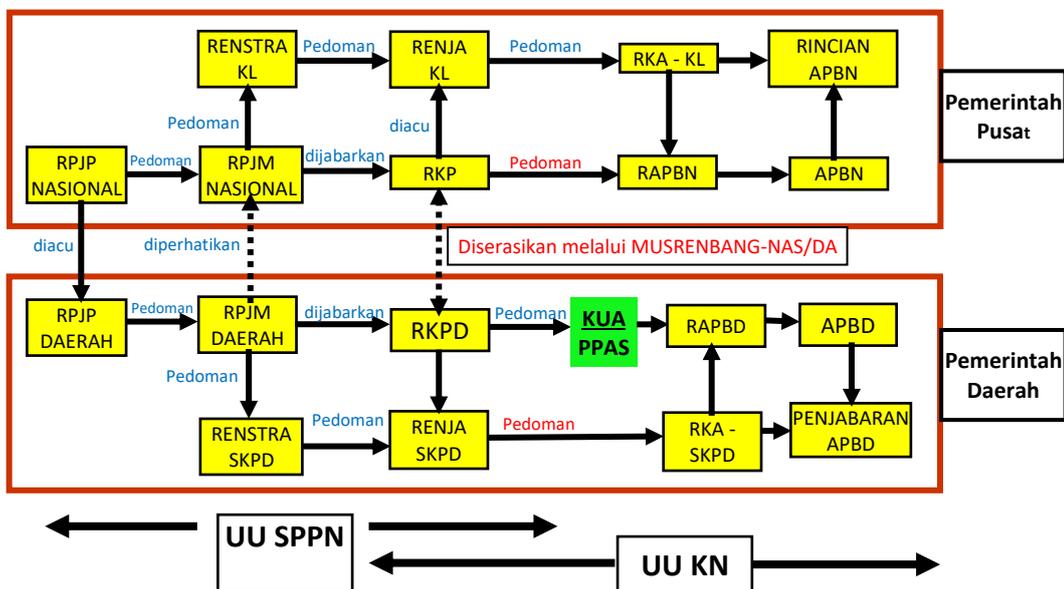
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD Kota Tahun 2016-2021. RKPD Kota disusun dengan mengacu pada RPJPD Kota Tahun 2006-2025, RPJMD Provinsi, RPJMN serta diselaraskan dengan RKP Tahun 2020, RKP Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 serta memperhatikan masterplan tingkat kota dan rencana induk pengembangan sektoral yang dimiliki Pemerintah Kota Bukittinggi .

RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan kota. Selanjutnya Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Gambaran tentang hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar 1.5
Hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan



Sumber : Undang-undang No.25 tahun 2004

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 disusun agar terwujudnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah :

1. Untuk mewujudkan program pembangunan yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Tahun 2016-2021;
2. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2019;
3. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tahun Anggaran 2020;
4. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;
5. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
6. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD;
7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.6. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kota Tahun 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat Kondisi Umum Kondisi Daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing

daerah; Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; Permasalahan pembangunan daerah yang meliputi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Mengemukakan tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Arah kebijakan keuangan daerah berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan tahun 2020. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bukittinggi.

BAB VII Penutup

Berisi penegasan bahwa RKPD merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menjabarkan rencana kerja melalui program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2020.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Secara geografis Kota Bukittinggi membentang antara 100°20' - 100°25' Bujur Timur dan antara 00°16' - 00° 20' Lintang Selatan. Posisi ini menjadikan iklim di Bukittinggi masuk kedalam iklim tropis. Letak Bukittinggi pada ketinggian antara 780 - 950 meter diatas permukaan laut, menyebabkan udara di Bukittinggi relatif sejuk dan cocok untuk tempat peristirahatan dan tujuan wisata. Letak geografis ini cukup strategis, terutama bila dikaitkan dengan posisi sentral Bukittinggi terhadap lintasan regional antar ibukota provinsi, seperti lintasan dari Padang ke Medan, dan lintasan dari Padang ke Pekanbaru.

Kota yang terkenal dengan Jam Gadang ini terletak di tengah Provinsi Sumatera Barat dengan luas hanya 0,06 persen dari Provinsi Sumatera Barat atau setara dengan 25,239 Km². Kondisi geografis yang berbukit dan mempunyai lembah maka luas daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perkotaan menjadi sangat terbatas. Selain itu, Kota Bukittinggi juga tidak memiliki sumber daya alam yang bisa di eksploitasi secara fisik, baik berupa hutan, mineral, gas bumi, serta perikanan laut. Potensi yang dimiliki oleh Bukittinggi hanyalah lingkungan alam yang indah, sejuk, bersih, dan letaknya strategis serta nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan nilai agama dan nilai adat, memperkaya asset Kota Bukittinggi.

Dengan kondisi tersebut di atas, menjadikan Kota Bukittinggi menjadi daerah tujuan wisata utama di Provinsi Sumatera Barat, disamping sebagai kota pendidikan, kota pelayanan kesehatan dan kota perdagangan dan jasa serta tempat peristirahatan. Kota Bukittinggi menjadi pusat pengembangan pariwisata di Sumatera Barat karena karakteristik alam dan budayanya serta lokasinya yang strategis dan menjadi *home base* bagi wisatawan yang hendak mendatangi objek- objek wisata yang ada di Sumatera Barat yang jaraknya relatif dekat dan mudah dicapai dari Kota Bukittinggi.

Data dan informasi yang berhubungan dengan gambaran umum kondisi daerah mencakup data kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing Kota Bukittinggi.

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi

Aspek geografis dan demografi menggambarkan tentang karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana dan demografi Kota Bukittinggi.

A. Karakteristik lokasi dan wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah menjelaskan tentang luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan Kota Bukittinggi.

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kota Bukittinggi adalah 25,239 Km², yang merupakan 0,06 persen luas Provinsi Sumatera Barat. Posisi Kota Bukittinggi sangat strategis karena terletak pada lintasan regional yang menghubungkan Kota Bukittinggi - Kota Padang Panjang dan Kota Padang, serta Kota Bukittinggi – Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Batusangkar, Kota Lubuk Sikaping dan Kota Lubuk Basung.

Disamping itu Kota Bukittinggi juga berada di jalur perlintasan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

Bukittinggi memiliki wilayah administratif yang terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan dan 24 (dua puluh empat) Kelurahan, dengan luas masing-masing wilayah sebagai berikut :

1. Kecamatan Guguk Panjang dengan luas areal 6,831 km² (683,10 Ha) atau 27,07 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 7 kelurahan.
2. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan luas areal 12,156 km² (1.215,60 Ha) atau 48,16 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 9 kelurahan.
3. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas areal 6,252 km² (625,20 Ha) atau 24,77 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 8 kelurahan.

Tabel 2.1.
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Bukittinggi

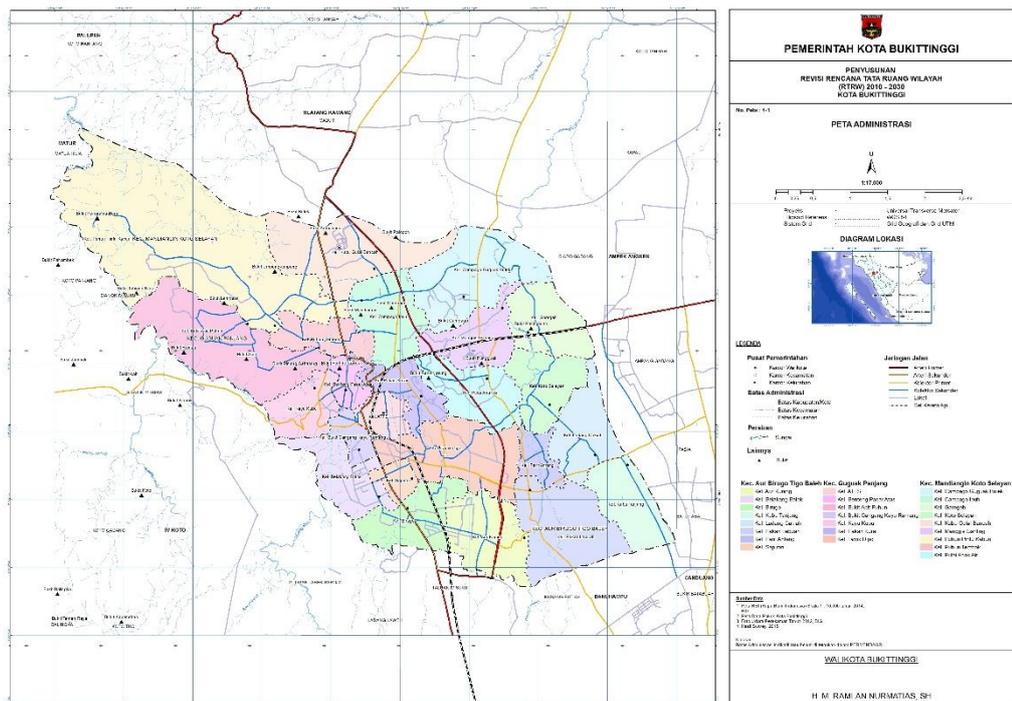
No.	Kecamatan / Kelurahan	Luas & Persentase Terhadap Kota	
		(Ha)	(%)
I	GUGUK PANJANG	683,10	27,07
1.	Bukit Cangang K. Ramang	47,00	1,86
2.	Tarok Dipo	148,00	5,86
3.	Pakan Kurai	87,00	3,45
4.	Aur Tajungkang T. Sawah	69,00	2,73
5.	Benteng Pasar Atas	56,00	2,22
6.	Kayu Kubu	91,00	3,61
7.	Bukit Apit Puhun	185,10	7,33
II	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	1.215,60	48,16
1.	Pulai Anak Air	88,20	3,49
2.	Koto Selayan	73,00	2,89
3.	Garegeh	65,00	2,58
4.	Manggis Ginting	65,10	2,58
5.	Campago Ipuh	139,30	5,52
6.	Puhun Tembok	71,00	2,81
7.	Puhun Pintu Kabun	361,00	14,30
8.	Kubu Gulai Bancah	181,00	7,17
9.	Campago Guguk Bulek	172,00	6,81
III	AUR BIRUGO TIGO BALEH	625,20	24,77
1.	Belakang Balok	50,40	2,00
2.	Sapiran	25,70	1,02
3.	Birugo	94,00	3,72

No.	Kecamatan / Kelurahan	Luas & Persentase Terhadap Kota	
		(Ha)	(%)
4.	Aur Kuning	90,00	3,57
5.	Pakan Labuah	118,00	4,68
6.	Kubu Tanjung	91,10	3,61
7.	Ladang Caklah	74,00	2,93
8.	Parit Antang	82,00	3,25
JUMLAH		2.523,90	100,00

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka, 2018

Kondisi alam Kota Bukittinggi berupa perbukitan dengan lapisan *Tuff* dari lereng Gunung Marapi sehingga tanahnya subur, namun luas daerah yang dimanfaatkan untuk pertanian sedikit sekali. Hal ini disebabkan karena sebagian besar digunakan untuk pemukiman penduduk, hotel, dan pasar. Lokasi pasar yang terluas terdapat di Kecamatan Guguk Panjang yaitu Pasar Simpang Aur Kuning, Pasar Atas dan Pasar Bawah.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Bukittinggi



Secara administratif, Wilayah Kota Bukittinggi dikelilingi oleh Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
- Sebelah Barat dengan Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam; dan
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam.

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kota Bukittinggi berada dalam lingkup Kabupaten Agam, serta terletak pada posisi sentral dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat maupun antar provinsi terdekat. Letak geografis ini cukup strategis terhadap lintasan regional, seperti lintasan dari Padang ke Medan, dan lintasan dari Padang ke Pekanbaru. Kota Bukittinggi telah menjadi kota titik perlintasan dari Jalur Lintas Tengah Sumatera serta jalur penghubung antara Jalur Lintas Tengah dengan Jalur Lintas Timur Sumatera.

a. Posisi Astronomis

Secara astronomis, Kota Bukittinggi membentang antara 100°20' - 100°25' BT dan antara 00°16' - 00°20' LS.

b. Posisi Geostrategis

Bukittinggi dengan posisi geostrategisnya, mempunyai dataran yang tinggi dan bergelombang serta mempunyai udara yang sejuk, memungkinkan untuk menarik kunjungan wisatawan ke Bukittinggi. Oleh karena itu dalam lingkup Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi menjadi orientasi pelayanan utama perdagangan, dan pariwisata.

c. Kondisi/Kawasan Kota Bukittinggi

Bukittinggi dengan wilayah yang dimilikinya merupakan kategori Kota Kecil, dan dari segi jumlah penduduk merupakan kategori Kota Sedang, sehingga dapat dikatakan cukup padat untuk sebuah kota kecil. Kota Bukittinggi tidak mempunyai daerah Pedalaman, Terpencil, Pesisir, Pegunungan dan Kepulauan.

3. Topografi

Kota Bukittinggi terletak pada ketinggian antara 756-960 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan kemiringan yang sangat bervariasi dan dapat dibagi menjadi topografi yang relatif datar, berbukit-bukit dan terjal. Wilayah yang berada di kawasan Ngarai Sianok (15,38%), sementara daerah perbukitan (9,79%) berada disekitar ngarai, kawasan Gulai Bancah, Campago Ipuh, Campago Guguak Bulek, Benteng Pasar Atas, serta Kubu Tanjung. Lahan yang memiliki kemiringan relatif datar (74,83%) terdapat sebagian besar di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh bagian barat, Kecamatan Guguk Panjang bagian barat dan Kecamatan Mandiangan Koto Selayan bagian tengah dan timur. Adapun proporsi luasan lahan di Kota Bukittinggi berdasarkan klasifikasi kelerengannya adalah sebagai berikut:

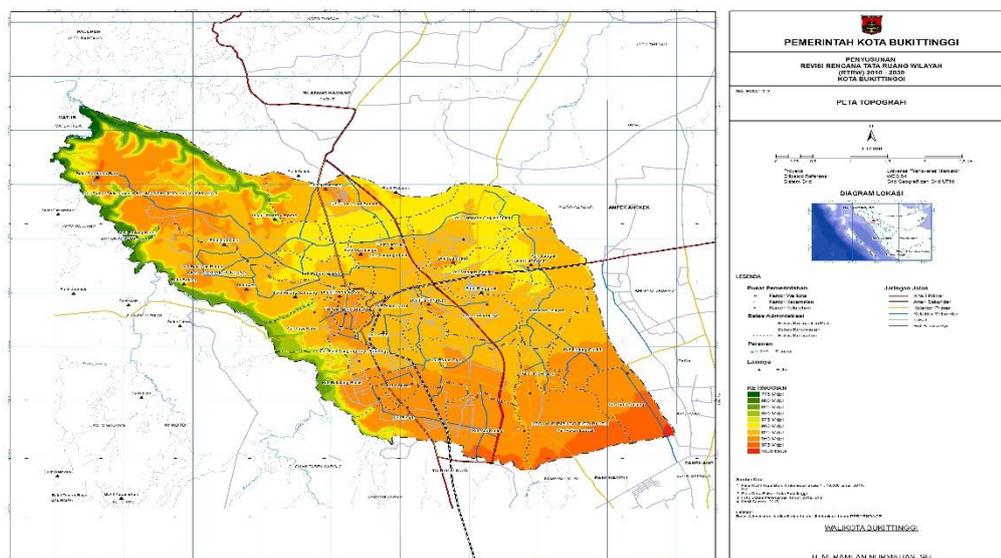
Tabel 2.2.
Proporsi Luasan Lahan di Kota Bukittinggi
Berdasarkan Klasifikasi Kelerengan Lahannya

No	Lereng	Kecamatan						Jumlah (Ha)	%
		ABTB		GP		MKS			
		Ha	%	Ha	%	Ha	%		
1.	0-2%	430,22	68,81	369,77	54,313	584,27	49,06	1.384,26	54,59
2.	3-8%	88,57	14,17	96,70	14,16	71,47	5,88	256,74	9,79
3.	9-15%	25,60	4,09	52,95	7,75	180,63	14,86	259,18	10,60
4.	16-25%	9,73	1,56	23,66	3,46	94,74	7,79	128,13	5,27
5.	26-40%	4,86	0,78	29,93	4,38	73,75	6,07	108,54	4,37
6.	>40%	66,22	10,59	110,09	16,12	210,75	17,34	387,05	15,38
JUMLAH		625,20	100	683,10	100	1.215,60	100	2.523,90	100

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kota Bukittinggi, Tahun 2017

Kota Bukittinggi dikelilingi oleh perbukitan di sebelah Utara, Timur dan Barat, serta pegunungan di sebelah Selatan dengan topografi wilayah pada umumnya bergelombang. Dengan kondisi demikian, berakibat terhadap terbatasnya pemanfaatan ruang kota untuk pemukiman dan kegiatan pembangunan perkotaan. Untuk lebih jelasnya mengenai topografi Kota Bukittinggi dapat dilihat pada peta Topografi Kota Bukittinggi di bawah ini:

Gambar 2.2
Peta Topografi Kota Bukittinggi



Berdasarkan kemampuan umum morfologinya, Kota Bukittinggi dan sekitarnya dapat dibedakan menjadi empat satuan morfologi, yaitu :

a. Satuan Morfologi Dataran

Kemiringan lereng umumnya 10%, dengan ketinggian berkisar antara 865-920 mdpl. Penggunaan lahan umumnya untuk persawahan, kebun/ladang dan permukiman, daerah ini dibentuk oleh endapan vulkanik

muda berupa tufa apung.

b. Satuan Morfologi Berelief Halus

Kemiringan lereng antara 10-15 % dengan ketinggian 850-920 mdpl, umumnya merupakan kebun/ladang belukar, permukiman dan perwasahan. Daerah ini dibentuk oleh batuan tufa apung dan sebagian oleh metamorf.

c. Satuan Morfologi Berelief Kasar

Dibentuk oleh batuan tufa apung dengan ketinggian daerah antara 650-900 mdpl, medan cukup terjal, kemiringan lebih dari 60% satuan morfologi ini merupakan tebing Ngarai Sianok.

d. Satuan Morfologi Tubuh Gunung Berapi

Kemiringan medan antar 10 -20% dengan kemiringan tempat 900 mdpl, penggunaan lahan pada satuan ini berupa semak/belukar, dan sebahagian persawahan. Daerah dengan satuan morfologi ini sangat subur, karena dibentuk oleh hasil endapan Gunung Merapi dan Gunung Singgalang berupa lava.

4. Geologi

Ground Kota Bukittinggi tersusun dari material padat alam, yang terdiri dari batuan dasar, tanah, dan humus sebagai hamparan tempat tumbuhnya aneka tumbuhan. Di area Kota Bukittinggi, hanya terdapat sejenis batuan dasar yang tersingkap (exposed), yaitu Tufa Batuapung, hasil dari proses kegunungapian (volkanisme). Pada peta geologi resmi yang dipublikasikan Kementrian ESDM, Tufa Batuapung itu disimbolkan sebagai "Qpt". Secara aktual, terdapat batuan Qpt segar, dan Qpt lapuk menjadi tanah residual (hasil pelapukan). Tampilan fisik dari Qpt segar adalah: "kuning kelabu jika basah dan kuning keputihan jika kering". Terdapat partikel hitam ukuran 1 mm, serabut kaca putih mengkilat, kwarsa putih susu, partikel kuning karat 1 mm, dan gumpalan-gumpalan amorf silika. Partikel-partikel itu satu sama lain terikat lemah. Secara menyeluruh sebagai massa material, Qpt bersifat kohesif namun lunak (soft), porous dan kenyal (Stiff). Di beberapa lokasi lain, Qp mengandung kepingan welded tuff 50 mm dan kepingan lava 40 mm, dengan komponen penyusun mayoritas berupa partikel halus berukuran lempeng (kurang dari 0,2 mm). Qpt segar dapat ditemukan pada lereng alam Ngarai Sianok atau lereng-lereng galian di Kota Bukittinggi. Uji coba lapangan terhadap singkapan Qpt segar, dengan metode uji pantulan (impact test) menunjukkan "tumbukan bergedebuk, meninggalkan tapak palu dan terjadi keteretakan di sekitar tapak palu". Hasil "impact test" itu menunjukkan skala kekuatan Qpt segar adalah "cukup kuat". Dengan metode peremasan tangan, material Qpt memungkinkan peremasan secara normal, menunjukkan kekuatan geser relatif di kelas "kokoh" dengan nilai 36 s/d 72 kPa. Pengukuran berat satuan $\sigma = 18$ kN/m³, dan perkiraan porositas $n = 0,5$

Tanah sebagai bentukan dari pelapukan batuan dari pelapukan batuan secara fisika dan kimia, terdiri dari dua jenis, yaitu 1) tanah endapan, dan 2) tanah residu. Untuk Kota Bukittinggi, tanah endapan terdapat di dasar ngarai sepanjang alur Batang Sianok, sebagai hasil erosi, transportasi dan pengendapan oleh air sungai

(aluvium) dan oleh longsoran tebing (koluviium). Tanah residu sebagai hasil pelapukan kimiawi terhadap batuan dasar, terutama ada di dataran dan lekuk perbukitan di Kota Bukittinggi (contohnya di hamparan sawah dan pemukiman). Bagian paling atas dari hamparan tanah yang diselimuti tumbuhan (vegetasi) merupakan humus. Ketebalan tanah dan humus bervariasi mencapai beberapa meter.

Kawasan Bukittinggi, terletak pada suatu zona yang dikenal sebagai jalur utama Sistem Sesar Sumatera yaitu pada segmen Central Barisan Fault Zone (CBFZ, Possavec et al, 1973 & Hahn & Weber, 1981). CBFZ merupakan komponen utama dari Sistem Sesar Sumatera dan kerap juga disebut sebagai "Patahan Semangko" yang membentang sepanjang tengah daratan Pulau Sumatera. Lembah yang berderet paralel dengan barisan bukit-bukit sepanjang tengah Pulau deretan lembah mulai dari Muara Labuh, terus ke Gumanti dan Solok terus ke Marapi, terus ke Palupuh dan Rao di Pasaman Timur. Kota Bukittinggi, terletak 1250 meter di timur dari jalur CBFZ. Untuk skala regional, jarak tersebut relatif dekat. Segmen CBFZ itu satu-satunya struktur geologi yang signifikan untuk dinamika tektonik Kota Bukittinggi masa kini, karena jalur secara sesar aktif itu kerap merupakan lokasi dari episentrum gempa bumi di Pulau Sumatera.

D. Hidrologi

Kota Bukittinggi terletak di dalam dua Wilayah Aliran Sungai (WAS), yaitu WAS Masanghulu yang berada di bagian Barat dan mengalir ke arah Samudera Indonesia, dan WAS Batang Agam yang mengalir ke arah bagian Timur. Sungai-sungai yang relatif lebar di Kota Bukittinggi merupakan sungai-sungai dengan lebar 6 sampai 12 meter, serta terdapat juga sungai-sungai kecil (raven) yang merupakan tempat aliran air permukaan menuju ke pola aliran sungai. Sungai-sungai yang relatif besar di Bukittinggi adalah sebagai berikut :

- Batang Sianok dengan lebar 12 meter.
- Batang Tambuo dengan lebar 7 meter.
- Batang Agam dengan lebar 6 meter.

Kota Bukittinggi dilewati oleh Batang Tambuo dan Batang Sianok. Batang Tambuo memiliki lebar lembah 7 meter dan melalui Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Sedangkan Batang Sianok memiliki lebar lembah yang lebih besar yaitu 12 meter dan melewati Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Aur Birugo Tigo Baleh dan Kecamatan Guguk Panjang.

Kemudian terdapat beberapa sungai yang tidak secara langsung mengalir dalam wilayah Kota Bukittinggi tetapi masih dalam lingkup WAS Masanghulu dan Batang Agam, yaitu:

- Sungai Batang Air Katiak.
- Sungai Batang Serasah.
- Sungai Batang Agam.

Kecuali berfungsi sebagai outlet hidrologi kawasan, sungai ini berperan sebagai jaringan drainase primer yang merupakan muara distribusi pembuangan air dari kawasan perencanaan yang berasal dan jaringan drainase sekunder dan tersier. Untuk lebih jelasnya keadaan hidrologi dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.3.
Sungai/Batang yang Melalui Bukittinggi

No	Nama Sungai / Batang	Lebar (m)	Kec. Yang Dilalui
1.	Batang Tambuo	7	<ul style="list-style-type: none"> • Aur Birugo Tigo Baleh • Mandiangin Koto Selayan
2.	Batang Sianok	12	<ul style="list-style-type: none"> • Aur Birugo Tigo Baleh • Guguk Panjang • Mandiangin Koto Selayan

Sumber: Dinas PUPR Kota Bukittinggi, 2019

Untuk pengembangan wilayah di sekitar sungai perlu memperhatikan garis sempadan sungai. Pembangunan hanya ilegal dilakukan di luar garis sempadan sungai. Garis sempadan sungai ini adalah 100 meter dari garis pasang terluar. Untuk lebih jelasnya panjang garis sempadan sungai di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Tipologi hidrologi wilayah Bukittinggi merupakan tipologi wilayah aliran pada dataran tinggi. Mayoritas merupakan daerah hulu sungai (up stream) dengan pola Dendrtik, aliran air yang relatif deras. Selain itu kondisi kelerengan Kota Bukittinggi yang banyak membentuk aliran-aliran air (raven) menyebabkan banyak terjadi penyusupan air melalui aliran bawah tanah.

Permunculan air tanah (mata air) yang berasal dari satuan tufa batu apung banyak terdapat di kaki Gunung Singgalang dan Gunung Merapi, yaitu di daerah dataran timur laut Kota Bukittinggi, diantaranya mata air Sungai Tanang (150 l/detik) dan mata air Bulan Gadang (150 l/detik).

Karakter air tanah wilayah Bukittinggi mengacu kepada peta Hidrologi lembar Padang, Sumatera Barat yang di publikasi oleh Direktorat Tata Lingkungan, menjelaskan bahwa Aquifer dengan aliran melalui ruang antar butir dan tekanan batuan/tanah. Potensi air tanah termasuk dalam klasifikasi sedang sampai tinggi. Tingkat serahan air tanah dapat mencapai 5 – 10 l/detik. Kedalaman air tanah dangkal lebih kurang 3 meter, sedangkan air tanah dalam/ artesis mencapai kedalaman 100 meter.

E. Klimatologi

Kondisi iklim Kota Bukittinggi termasuk tropis basah dengan Hidrologi dan reaksinya dengan lingkungan Kota Bukittinggi diuraikan sebagai berikut:

a. Daerah Aliran Sungai

Kota Bukittinggi dialiri sungai kecil, yaitu Batang Tambuo di sebelah timur dengan lebar 5-7m, Batang Sianok di sebelah Barat dengan lebar 12-15m, dan Batang Agam di wilayah Kota dengan lebar 5-7m. Sepanjang perbatasan sebelah Barat Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam membentang lembah dalam yang disebut dengan Ngarai Sianok, yang dibawahnya mengalir Sungai Batang Sianok. Kondisi air

semakin mempercantik Kota Bukittinggi untuk menjadi Kota kunjungan dengan objek wisata alamnya.

b. Tipe

Kota Bukittinggi beriklim basah yang termasuk tipe iklim B yang menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi sangat sejuk dan sangat cocok untuk pertanian terutama untuk tanaman hias, disamping juga untuk tempat peristirahatan.

c. Curah Hujan

Curah hujan Kota Bukittinggi berkisar antara 2.300 - 2.500 mm/tahun, pada umumnya rata-rata berkisar 2.381 mm/tahun dengan jumlah hujan rata-rata 193 hari/tahun.

d. Suhu

Kota Bukittinggi terkenal sebagai kota wisata yang berhawa sejuk dengan suhu berkisar antara suhu udara minimum 16,10° C dan maksimum mencapai 24,90° C dan tekanan udara berkisar antara 22–25 knots. Kondisi agroklimat di atas menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi sangat cocok untuk tempat peristirahatan.

e. Kelembaban

Bukittinggi mempunyai kelembaban minimum 63% dan maksimum 90,8%, dengan kelembaban rata-rata 82% setiap tahunnya.

F. Penggunaan Lahan

Pengembangan pola ruang Kota Bukittinggi sendiri didasarkan pada beberapa pendekatan utama, yaitu:

- a. Struktur ruang yang dikembangkan;
- b. Evaluasi kesesuaian dan daya dukung lahan;
- c. Kondisi penggunaan lahan saat ini serta kecenderungan perkembangannya.

Prinsip dasar perencanaan pemanfaatan ruang adalah penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2007, PP Nomor 26 Tahun 2008, dan Keppres Nomor 32 Tahun 1990 dengan batasan sebagai berikut:

- a. Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya binaan, nilai sejarah, dan budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya binaan, dan sumber daya manusia.

Dalam menyeimbangkan kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyalurkan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumber daya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Rencana pola ruang wilayah Kota Bukittinggi merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Gambaran rencana pola ruang di Kota Bukittinggi secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.
Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi (Luas)

POLA RUANG		ABTB (ha)	GP (ha)	MKS (ha)	TOTAL (ha)
Semua Kawasan		652,569	567,215	1.303,750	2.523,900
Kawasan Lindung		85,169	135,978	327,765	549,012
1, Kawasan Lindung Setempat		56,687	77,103	195,654	329,444
1,1	Kawasan Ngarai Sianok	56,687	77,103	195,654	329,444
2, Ruang Terbuka Hijau		28,482	58,875	132,111	219,568
2,1	RTH Taman	3,624	11,640	44,963	60,327
	Taman Kota	2,232	6,528	21,188	29,948
	Hutan Kota	1,392	5,112	23,775	30,279
2,2	RTH Fungsi Tertentu	22,013	42,992	81,731	146,736
	Sempadan Ngarai Sianok	13,858	31,693	56,285	101,836
	Sempadan Sungai	5,032	4,899	15,268	25,200
	Taman Pemakaman Umum	3,124	6,399	10,177	19,700
2,3	RTH Jalur Hijau Jalan	2,845	4,243	5,417	12,505
	RTH Jalur Hijau dan Pejalan Kaki	1,520	1,200	2,345	5,065
	RTH Ruang Di Bawah Jalan Layang	1,325	3,043	3,072	7,440
Kawasan Budidaya		567,399	431,238	975,986	1.974,888
1, Kawasan Perumahan		320,376	211,357	624,927	1156,927
1,1	Perumahan Kepadatan Tinggi	112,985	104,362	298,424	515,771
1,2	Perumahan Kepadatan Sedang	194,511	96,928	326,503	617,942
1,3	Perumahan Kepadatan Rendah	12,879	10,067	0	22,946
2, Kawasan Perdagangan dan Jasa		32,759	131,424	78,229	242,411
3, Kawasan Perkantoran		8,555	10,989	19,402	38,945
4, Kawasan Pariwisata		0	4,021	0	4,021
5, Kawasan Peruntukan Lainnya		205,520	74,003	253,428	532,951
5,1	Pertanian Lahan Basah	183,390	0	106,948	290,338
5,2	Pertanian Lahan Kering	0	33,337	111,458	144,795
5,3	Sarana Pelayanan Umum	19,345	40,110	33,906	93,361
5,4	Pertahanan dan Keamanan	2,974	0,556	1,116	4,090

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Keterangan: ABTB (Aur Birugo Tigo Baleh); GP (Guguk Panjang); MKS (Mandiingin Koto Selayan)

G. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Bukittinggi tidak memiliki kekayaan berupa sumberdaya alam berupa hutan, mineral, gas bumi, serta perikanan laut yang dapat dieksploitasi sebagai sumber perekonomian kota. Namun Kota Bukittinggi memiliki alam yang indah dan posisi yang sangat strategis, yakni berada pada posisi silang lintas ekonomi Barat-Timur dan Utara-Selatan wilayah regional Sumatera. Kondisi yang demikian menjadikan Kota Bukittinggi

potensi sebagai sentra perekonomian tidak hanya Provinsi Sumatera Barat tetapi mencakup wilayah Sumatera Bagian Tengah. Bila dilihat dari karakteristik alam, kemiringan lereng Kota Bukittinggi yang sebagian wilayahnya merupakan bukit dan lembah (mencapai 25% dari kota) menyebabkan terbatasnya daya dukung pengembangan wilayah Kota Bukittinggi. Namun hal ini tidak menghambat pembangunan di Kota Bukittinggi dan itu merupakan suatu peluang dan tantangan bagi Kota ini untuk lebih mengembangkan ekonominya disektor perdagangan dan jasa, yang salah satu sektor unggulannya yaitu kepariwisataan. Objek wisata yang ada saat ini yang telah ada saat ini antara lain, seperti Jam Gadang, Istana Bung Hatta, Rumah Adat Baanjuang, Mesjid Jami', panorama, lobang jepang, Benteng Fort de Kock, Kebun Binatang dan lain lain.

Permasalahan kepariwisataan saat ini adalah minimnya daya tarik objek wisata tersebut, atraksi yang masih kurang untuk menarik peminat para wisatawan. Tidak adanya kegiatan-kegiatan atau program-program baru yang dapat menambah nilai daya tarik objek wisata ini. Atraksi budaya salah satu alternatif untuk meningkatkan dan menambah daya tarik wisata ini, seperti penampilan tari-tarian tradisional dipelataran Jam Gadang, serta pelaksanaan event-event daerah dikawasan objek wisata yang dapat menjadi sarana promosi kepariwisataan secara tidak langsung.

Untuk Pengembangan kepariwisataan di Kota Bukittinggi harus dilakukan pengembangan dari segi fisik dan non-fisik. Dari segi fisik yaitu dengan pembangunan infrastruktur pendukung seperti sarana prasana air bersih, air limbah, persampahan, parkir dan pengembangan kawasan pedestrian terutama di kawasan Jam Gadang yang merupakan icon Kota Bukittinggi. Pengembangan kawasan pedestrian ini sangat mendukung terhadap kepariwisataan karena hal ini didukung oleh kondisi alam yang indah dan udaranya yang sejuk menyebabkan para pengunjung akan betah berjalan kaki menikmati objek wisata yang ada di Kota Bukittinggi.

Sedangkan dari segi non fisik, perlu adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengembangan baik dari segi regulasi, peningkatan Sumber Daya Manusia, penambahan daya tarik wisata serta penambahan objek wisata baru.

H. Wilayah Rawan Bencana

Kota Bukittinggi yang memiliki morfologi permukaan yang berbukit serta berada pada jalur Patahan Sesar Semangko, mengakibatkan kota ini memiliki kerentanan terhadap bencana alam (gempa bumi dan tanah longsor). Dengan kondisi tersebut, maka harus ada kebijakan yang tepat dalam pembangunan wilayah kota serta perencanaan terhadap mitigasi bencana. Kawasan rawan bencana gempa bumi meliputi ketiga kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi dan daerah rawan longsor berada sepanjang bibir Ngarai Sianok yang juga meliputi ketiga kecamatan yang ada seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.5.
Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tanah longsor

Rawan Gempa Bumi				
No	Zona	Kecamatan		
		ABTB	GP	MKS
1.	Zona Rawan Tinggi	Belakang Balok Birugo Ladang Cakiah Kubu Tanjung Pakan Labuah Sapiran Aur Kuning Parit Antang	Kayu Kubu BCKR Pakan Kurai ATTS Tarok Dipo Benteng Pasar Atas Bukit Apit Puhun	Koto Selayan Garegeh Campago G.Bulek Campago Ipuh Kubu Gulai bancah Puhun Tembok Manggis Ganting Pulai Anak Air Puhun P.Kabun
Kerawanan Goncangan Tanah				
1.	Zona Rawan rendah	Kubu Tanjung Pakan Labuah Aur Kuning Birugo Sapiran Parit Antang Ladang Cakiah	BCKR Tarok Dipo ATTS BPA Pakan Kurai Bukit Apit Puhun ATTS	Koto Selayan Campago Ipuh Puhun Tembok Puhun Pintu Kabun
2.	Zona Rawan Sedang	Kubu Tanjung Pakan Labuah Aur Kuning Birugo Belakang Balok Sapiran Parit Antang	BCKR Tarok Dipo ATTS BPA Bukit Apit Puhun ATTS	Pulai Anak Air Koto Selayan Garegeh Manggis Ganting Campago Guguk Bulek Campago Ipuh Puhun Pintu Kabun Kubu Gulai Bancah
3.	Zona Rawan Tinggi	Birugo Belakang Balok	BCKR Tarok Dipo ATTS Kayu Kubu ATTS	Pulai Anak Alr Koto Selayan Garegeh Manggis Ganting Campago Guguk Bulek Puhun Plntu Kabun Kubu Gulai Bancah

Sumber : Analisa Revisi RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030

Keterangan: ABTB (Aur Birugo Tigo Baleh); GP (Guguk Panjang); MKS (Mandiingin Koto Selayan)

Berdasarkan tabel diatas, kondisi alam dan lingkungan wilayah Kota Bukittinggi termasuk daerah/kawasan rawan bencana berupa gempa bumi dan longsor.

Berdasarkan jenis bencana alamnya, zona kerawanan bencana di Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1. Zona rawan bencana gempa bumi. Zona Rawan Bencana Gempa Bumi pada umumnya dibagi menjadi 3 daerah zona yaitu zona rawan rendah, zona rawan menengah dan zona rawan tinggi. Pembagian zona rawan ini didasarkan kepada:
 - Zona Rawan Rendah biasanya didasari oleh batuan berumur tersier yang relatif kompak, namun masih berpotensi terjadi longsor apabila terjadi gempa.
 - Zona Rawan Menengah, biasanya didasari oleh endapan tufa, pasir, lempung dan lanau hasil pengendapan material gunung api yang relatif kompak.
 - Zona Rawan Tinggi, biasanya didasari oleh endapan aluvium, rawa basah dan daerah aliran sungai dengan potensi terjadi pelulukan (*liquefaction*) apabila terjadi gempa.
2. Zona Kerawanan Gerakan Tanah. Tingkat kerentanan gerakan tanah dapat dibagi atas empat tingkat yaitu: (1) Sangat rendah, gerakan tanah jarang terjadi. (2) Rendah, gerakan tanah bisa terjadi bila ada gangguan. (3) Menengah, gerakan tanah berpotensi terjadi bila curah hujan tinggi dan ada gangguan pada lereng. (4) Tinggi, sering terjadi gerakan tanah bila musim hujan dan gerakan tanah lama aktif kembali.

Kota Bukittinggi terdiri perbukitan dengan kemiringan yang beragam. Pembagian zona kerentanan gerakan tanah ini didasarkan dari kemiringan lereng sehingga dapat dibagi menjadi 4 zona yaitu :

1. Zona Kerentanan Amat Rendah, merupakan zona dataran rendah dengan kemiringan lereng < 3%, sepanjang lembah Sungai Agam.
2. Zona Kerentanan Rendah, merupakan daerah dengan dataran dengan litologi endapan Tufa Maninjau dengan kemiringan antara 3-15%,
3. Zona Kerentanan Menengah, merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan lereng antara 15-30% dengan litologi endapan gunung api yang relatif kompak namun dekat dengan sumber gempa atau terkena struktur geologi.
4. Zona Kerentanan Tinggi, mempunyai kemiringan lebih besar dari 30% didasari oleh litologi Tufa sepanjang Ngarai Sianok dengan lereng terjal, dekat dengan sumber gempa bumi dan terkena struktur geologi.

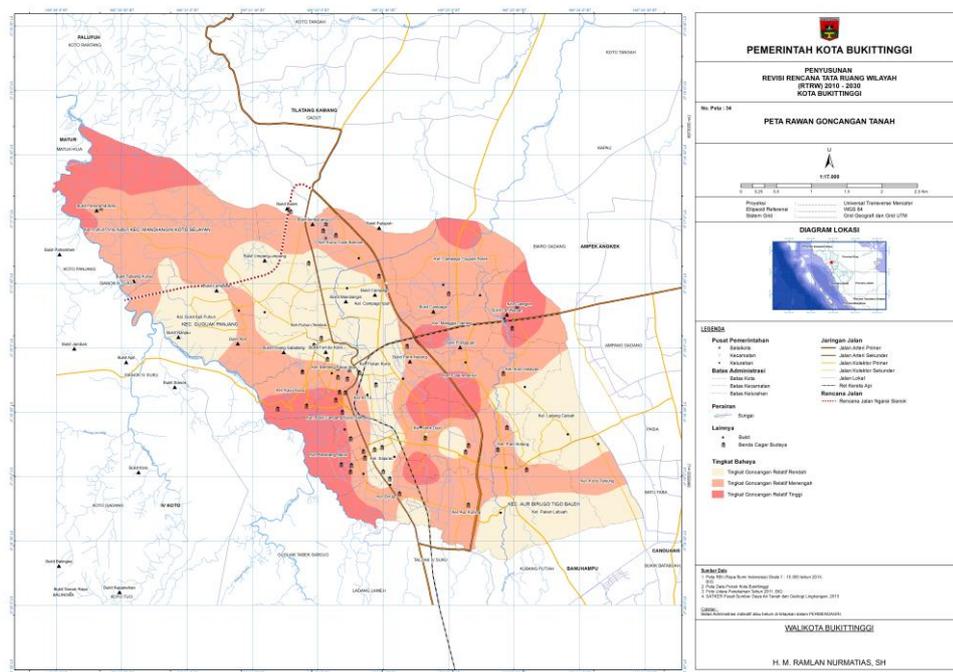
I. Bencana yang timbul akibat kesalahan manusia

Untuk bencana yang timbul akibat kesalahan manusia, teridentifikasi sebagai berikut:

1. Daerah rawan kecelakaan lalu lintas (karena daerahnya yang padat)
2. Daerah rawan kebakaran

Untuk lebih jelasnya mengenai kerawanan guncangan tanah di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada peta Rawan Guncangan Tanah di Kota Bukittinggi di bawah ini:

Gambar 2.3
Peta Goncangan Tanah Kota Bukittinggi



J. Demografi

Kondisi dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

Sebaran penduduk di Kota Bukittinggi terbesar adalah di Kecamatan Mandiangin Kota Selatan, yaitu 40,98% dari seluruh penduduk Kota Bukittinggi, diikuti oleh Kecamatan Guguk Panjang, yaitu 36,75% dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebesar 22,27%. Kepadatan penduduk Kota Bukittinggi secara umum semakin lama semakin naik, ini dapat dibuktikan, dimana pada tahun 2012 adalah sebesar 4.533 jiwa/km², dan pada Tahun 2013 sebesar 4.607 jiwa/km², Tahun 2014 sebesar 4.774 jiwa/km² dan pada tahun 2015 sebesar 4.898 jiwa/km², dan pada tahun 2018 sebesar 5.103 jiwa/km².

Tabel 2.6.
Jumlah penduduk Kota Bukittinggi menurut jenis kelamin
Tahun 2013 s/d 2018

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Laju Pertumbuhan
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	2018	62.484	66.299	128.783	1,56
2.	2017	61.588	65.216	126.804	1,68
3.	2016	61.163	63.552	124.715	1,71
4.	2015	59.419	63.202	122.621	1,77
5.	2014	58.408	62.083	120.491	1,88

Sumber : Badan Pusat Statistik 2019

Jika dirinci dan dikaji lagi tentang jumlah penduduk sebagaimana terlihat pada tabel diatas, maka dapat dilakukan pemilahan data tersebut tentang kondisi kepadatan penduduk, berdasarkan lokasi dan tempat tinggal. Dengan luas Kota Bukittinggi hanya 25,239 Kilometer persegi (Km²) dan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2017 sejumlah 126.804 jiwa berarti kepadatan penduduk adalah sejumlah 5.024 jiwa/Km². Ini Artinya disetiap 1 Km² terdapat penduduk sebanyak 5.024 jiwa. Namun sebaran penduduk tersebut tidak merata disetiap wilayah kecamatan. Dari data Stastistik 2018, kepadatan penduduk di Kota Bukittinggi tahun 2018 adalah 5.103 Jiwa /Km². Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepadatan penduduk perkilometernya. Hal ini merupakan tugas dari pemerintah dan semua stake holder untuk memperhatikan bagaiman kepadatan penduduk ini tidak terus meningkat karena pertambahan penduduk di Kota Bukittinggi tidak diikuti oleh pertambahan lahan pemukiman sehingga semakin hari kepadatan penduduk ini semakin meningkat.

Untuk melakukan pemerataan sebaran dan kepadatan penduduk terlebih dahulu harus memperhatikan tentang pengaturan kawasan pemukiman. Langkah yang dilakukan antara lain adalah memperhatikan kawasan pemukiman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW). Jika kepadatan penduduk tidak dikendalikan akan berdampak kepada peningkatan permasalahan sosial, kurangnya keamanan dan ketertiban, kemungkinan terjadi wilayah daerah kumuh, serta meningkatnya angka kemiskinan. Selanjutnya tingkat kepadatan penduduk dapat kita lihat sebagai tabel berikut :

Tabel 2.7.
Kepadatan Penduduk Kota Bukittinggi

No.	Tahun	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa)
1.	2018	25.239	128.783	5.103
2.	2017	25.239	126.804	5.024
3.	2016	25.239	124.715	4.941
4.	2015	25.239	122.621	4.898
5.	2014	25.239	120.491	4.774

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Kepadatan penduduk tidak merata untuk 3 (tiga) Kecamatan, kepadatan penduduk yang paling tinggi terdapat pada di Kecamatan Guguk Panjang, disebabkan karena wilayah Guguk Panjang adalah pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata. Hal ini memang sudah harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah, sebab jika persebaran penduduk tidak merata walaupun laju penduduk terkendali, maka akan menimbulkan masalah baru.

Untuk melakukan pemerataan sebaran dan kepadatan penduduk terlebih dahulu harus memperhatikan tentang pengaturan kawasan pemukiman. Langkah yang dilakukan antara lain adalah memperhatikan kawasan pemukiman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW). Jika kepadatan penduduk tidak dikendalikan akan berdampak kepada peningkatan masalah sosial, kurangnya keamanan dan ketertiban, kemungkinan terjadi wilayah daerah kumuh, serta meningkatnya tingkat kemiskinan.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

A. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi merupakan tujuan dari pembangunan suatu negara dan daerah. Indikator kesejahteraan ekonomi dan pemerataan ekonomi diantaranya dapat dilihat dari data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), PDRB perkapita dan indeks Gini/Koefisien Gini.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan suatu wilayah. Dengan demikian PDRB dapat menggambarkan kegiatan roda perekonomian yang dilakukan masyarakat suatu daerah yang pada akhirnya menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Namun demikian, pertumbuhan PDRB yang cukup tinggi belum menjamin tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi masyarakat. Hal ini terkait dengan laju pertumbuhan penduduk dan sifat kegiatan perekonomiannya.

a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam pembangunan daerah khususnya bidang ekonomi, salah satu yang menjadi indikator guna melihat perkembangan perekonomian adalah data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain :

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi;
2. Untuk mengetahui struktur perekonomian;
3. Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan;
4. Untuk mengetahui tingkat inflasi / deflasi, berdasarkan pertumbuhan/perubahan harga produsen.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama suatu periode tertentu tidak terlepas dari sumbangan masing-masing sektor ekonomi atau subsektor ekonomi yang ikut berperan dalam membentuk nilai tambah perekonomian suatu wilayah secara keseluruhan. Disamping itu tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah, juga sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam meningkatkan produksi sektoralnya.

Perkembangan PDRB atas dasar harga Konstan Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 secara nominal PDRB atas dasar harga konstan Kota Bukittinggi sebesar Rp. 4.324.423,59, pada tahun 2017 PDRB atas dasar harga konstan Kota Bukittinggi telah mencapai angka Rp. 5.483.598,44. Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan Kota Bukittinggi dari tahun 2013 s.d. 2017 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

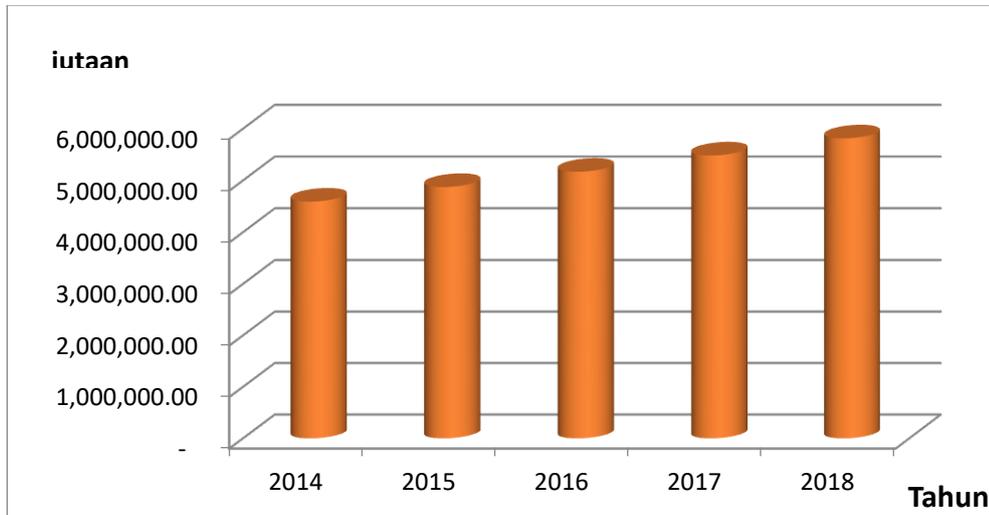
Tabel 2.8.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2014 s.d 2018
Atas Dasar Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 Kota Bukittinggi (Juta)

No.	LAPANGAN USAHA	2014		2015		2016		2017		2018	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	65,043.29	1.42	66,721.87	1.37	67,822.77	1.31	69,420.86	1.27	68,805.60	1.18
2	Pertambangan dan Penggalian	126.47	0.00	125.80	0.00	125.03	0.00	124.41	0.00	123.92	0,00
3	Industri Pengolahan	358,082.78	7.80	369,139.12	7.57	373,267.84	7.22	376,397.39	6.86	370,170.28	6.37
4	Pengadaan Listrik dan Gas	34,471.30	0.75	35,632.11	0.73	39,249.16	0.76	41,303.96	0.75	42,950.77	0.74
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	7,318.00	0.16	7,656.82	0.16	7,923.28	0.15	8,216.44	0.15	8,397.29	0.14
6	Konstruksi	295,207.09	6.43	312,594.78	6.41	331,162.91	6.41	359,860.60	6.56	385,174.81	6.62
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1,501,989.36	32.71	1,601,978.47	32.87	1,699,443.88	32.88	1,802,831.77	32.88	1,926,642.24	33.14
8	Transportasi dan Pergudangan	507,448.07	11.05	543,771.28	11.16	584,086.70	11.30	638,262.16	11.64	694,604.40	11.95
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	203,479.56	4.43	219,500.54	4.50	235,736.77	4.56	253,442.64	4.62	273,127.74	4.70
10	Informasi dan Komunikasi	348,117.66	7.58	375,058.61	7.69	402,406.54	7.79	439,185.51	8.01	474,171.43	8.16
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	277,515.62	6.04	288,870.24	5.93	313,318.30	6.06	313,463.23	5.72	315,767.82	5.43
12	Real Estat	159,133.65	3.47	167,519.99	3.44	175,761.98	3.40	183,495.50	3.35	190,792.22	3.28
13	Jasa Perusahaan	32,074.94	0.70	33,461.26	0.69	34,876.67	0.67	36,702.35	0.67	38,464.42	0.66
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	270,863.46	5.90	281,454.22	5.77	292,374.64	5.66	304,946.75	5.56	322,699.14	5.55
15	Jasa Pendidikan	222,940.31	4.85	239,477.97	4.91	257,079.60	4.97	279,445.53	5.10	298,040.25	5.13
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	139,852.95	3.05	151,302.29	3.10	163,489.34	3.16	177,876.40	3.24	190,543.69	3.28
17	Jasa lainnya	168,813.70	3.68	179,989.16	3.69	190,850.45	3.69	198,622.93	3.62	213,959.05	3.68
PDRB		4,592,478.19	100.00	4,874,254.56	100.00	5,168,975.87	100.00	5,483,598.44	100	5,814,435.07	100.00

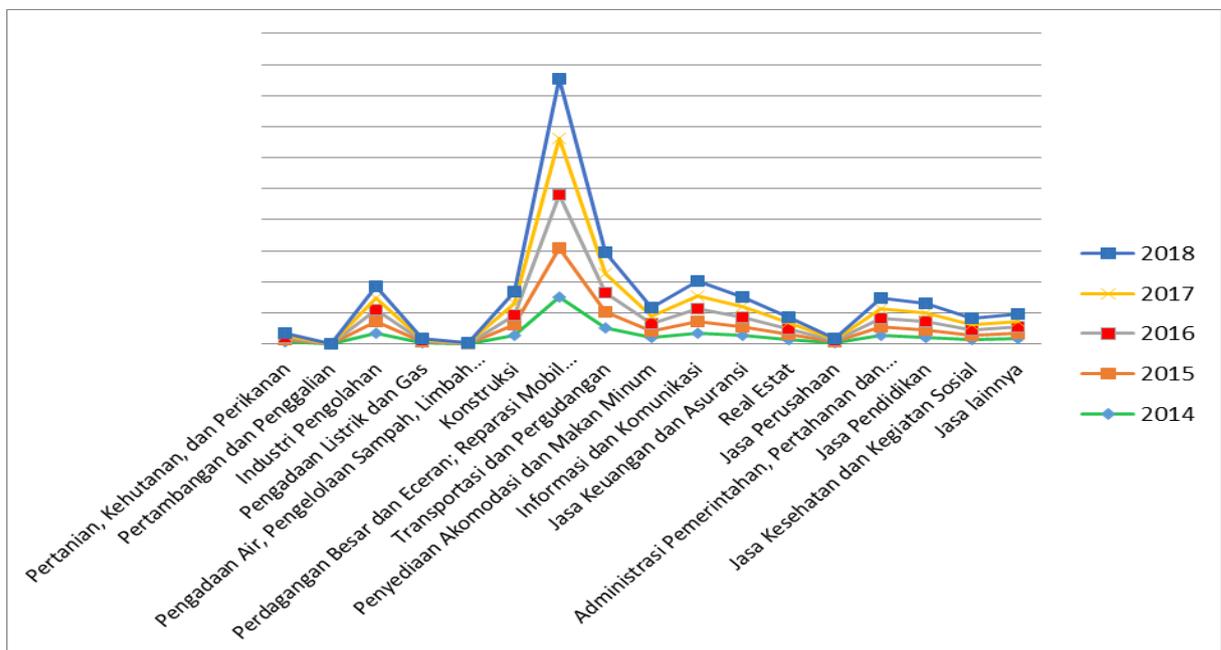
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwasanya sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi tahun 2018 adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni dengan angka Rp. 1.926.642,24 atau dengan persentase sebesar 33,14% dan diikuti oleh sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 694.604,40 atau dengan persentase 11,95%. Kedua sektor ini selalu tumbuh positif jika dilihat perkembangannya dari tahun 2014. Hal ini sesuai dengan salah satu pilar dalam pembangunan Kota Bukittinggi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa. Dilihat dari sektor primer, kontribusi sektor pertanian tidak mempunyai peranan yang dominan dan setiap tahun selalu mengalami penurunan. Demikian juga halnya dengan sektor Pertambangan dan Penggalian, karena Kota Bukittinggi tidak memiliki pertambangan, maka sektor ini juga tidak mempunyai kontribusi yang dominan dalam pembentukan PDRB.

Grafik 2.1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Bukittinggi Tahun 2014-2018



Grafik 2.2
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta) Kota Bukittinggi Tahun 2014-2018



Sejalan dengan PDRB atas dasar Harga Konstan, PDRB atas dasar Harga Berlaku juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan PDRB atas dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi Tahun 2014 s.d. 2018 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

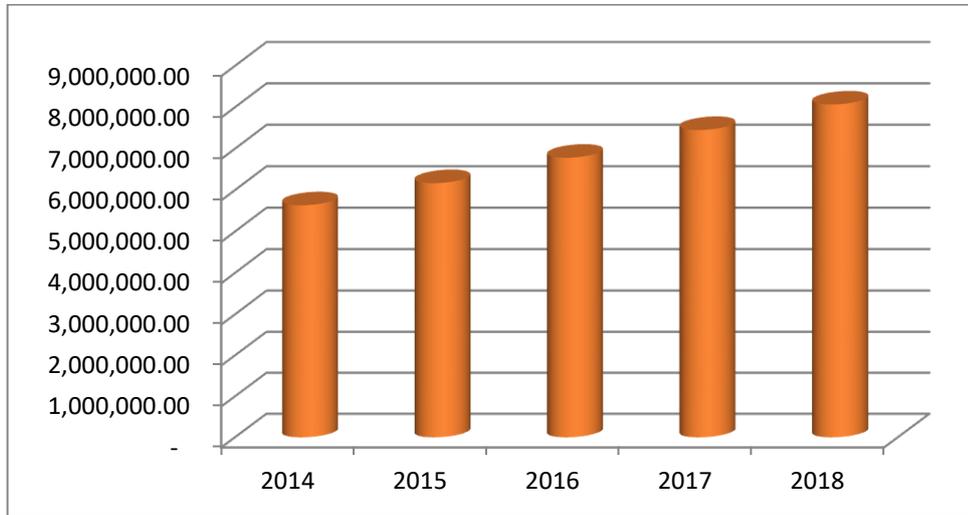
Tabel 2.9.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2014 s.d. 2018
Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi (Juta)

NO	Lapangan Usaha	2014		2015*		2016**		2017**		2018	
		(Rp)	%								
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	82.195,05	1,46	87.468,91	1,42	92.970,90	1,37	96.650,87	1,30	99.709,8	1.24
2.	Pertambangan dan Penggalian	180,19	0,00	194,86	0,00	187,97	0,00	190,5	0,00	193,78	0.00
3.	Industri Pengolahan	409.898,56	7,27	417.403,13	6,77	437.706,04	6,45	453.203,15	6,08	454.629,3	5.63
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	29.584,46	0,52	41.339,95	0,67	47.377,68	0,70	53619,5	0,72	57.729,94	0.72
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.211,77	0,15	9.144,44	0,15	10.163,85	0,15	11.035,67	0,15	11.678,96	0.14
6.	Konstruksi	360.907,48	6,40	393.719,07	6,38	422.171,48	6,22	486.029,6	6,52	532.259,13	6.60
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.843.230,93	32,71	2.091.429,56	33,90	2.304.338,39	33,98	2.524.056,86	33,87	2.743.606,81	34.00
8.	Transportasi dan Pergudangan	617.352,39	10,95	665.354,45	10,83	719.657,59	10,61	799.518,9	10,73	874.304,6	10.84
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	277.747,52	4,93	334.075,06	5,41	387.302,14	5,71	433.568,27	5,82	482.167,15	5.98
10.	Informasi dan Komunikasi	371.189,36	6,59	365.362,91	5,92	400.451,04	5,90	460.744,43	6,18	507.686,44	6.29
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	347.132,05	6,16	375.575,11	6,09	420.792,93	6,20	432.853,32	5,81	449.211,32	5.57
12.	Real Estat	197.955,11	3,51	217.265,82	3,52	241.591,62	3,56	258.774,84	3,47	276.048,60	3.42
13.	Jasa Perusahaan	37.922,89	0,67	41.544,01	0,67	44.805,36	0,66	48.298,26	0,65	51.999,59	0.64
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	364.380,58	6,47	379.930,77	6,16	414.835,05	6,12	451.816,62	6,06	491.279,74	6.09
15.	Jasa Pendidikan	295.104,65	5,24	324.925,94	5,27	363.667,98	5,36	415.625,87	5,58	453.109,72	5.62
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	175.148,84	3,11	186.125,92	3,02	207.306,12	3,06	241.571,22	3,24	264.642,99	3.28
17.	Jasa lainnya	217.786,15	3,86	238.891,06	3,87	266.559,93	3,93	285.548,92	3,83	318.623,82	3.95
	PDRB	5.635.927,99	100,00	6.169.750,95	100,00	6.781.886,09	100,00	7.453.106,84	100,00	8.068.881,71	100,00

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2019

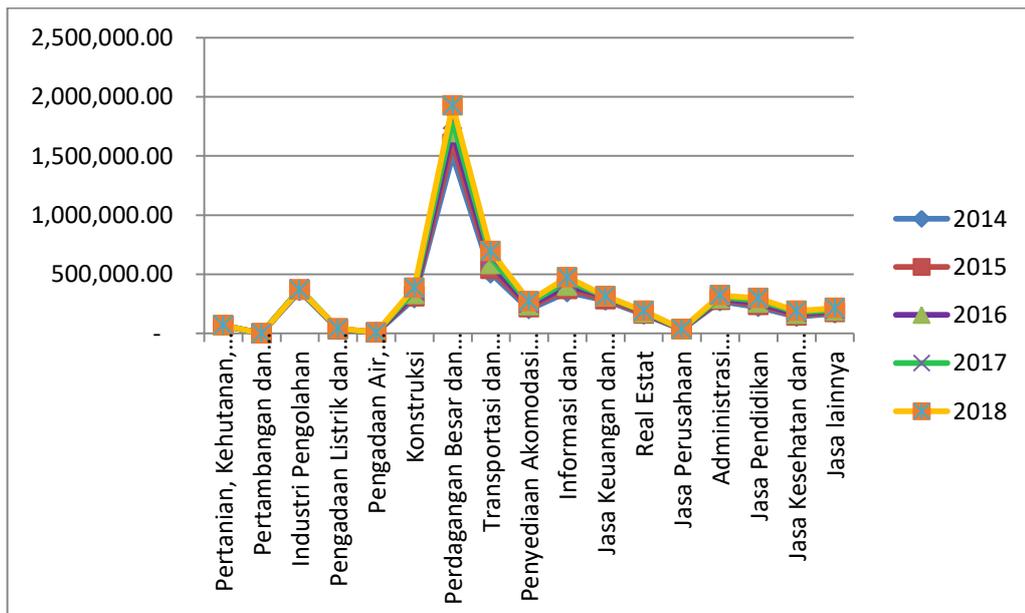
Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa kelompok sektor primer yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan kontribusi setiap tahunnya, dimana pada tahun 2014 masih berkontribusi 1,45% namun pada tahun 2018 hanya berkontribusi sebesar 1,24%. Jika dilihat secara nominal sektor pertanian memang mengalami kenaikan, namun kenaikan tersebut tidak berpengaruh besar terhadap peningkatan kontribusi pembentukan PDRB Kota Bukittinggi. Demikian juga halnya dengan sektor Pertambangan dan Penggalian yang tidak terlalu berkontribusi dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi.

Grafik 2.3
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Bukittinggi Tahun 2013-2017



Sektor yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kota Bukittinggi dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Transportasi dan Pergudangan. Dimana sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2017 berkontribusi sebesar Rp. 2.524.056,86 dan Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 799.518,9, dimana kedua sektor ini membentuk PDRB Kota Bukittinggi sebesar 44,6%.

Grafik 2.4
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta) Kota Bukittinggi Tahun 2014-2018



Guna melihat peranan masing-masing sektor dalam perekonomian suatu daerah, maka penyajian PDRB dalam bentuk persentase distribusi sektoral terhadap total PDRB sangat penting. Persentase distribusi sektoral terhadap total PDRB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10.
Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2014 s.d. 2018
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kota Bukittinggi

NO	Kategori	2014		2015		2016		2017		2018	
		Hb	Hk								
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,46	1,42	1,42	1,37	1,37	1,31	1,29	1,27	1,24	1,26
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3.	Industri Pengolahan	7,27	7,80	6,77	7,57	6,45	7,22	6,07	6,86	5,63	6,75
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,52	0,75	0,67	0,73	0,70	0,76	0,72	0,75	0,72	0,78
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,16	0,15	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,15
6.	Konstruksi	6,40	6,43	6,38	6,41	6,22	6,41	6,22	6,56	6,60	7,02
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32,71	32,71	33,90	32,87	33,98	32,88	33,87	32,88	34,00	35,12
8.	Transportasi dan Pergudangan	10,95	11,05	10,83	11,16	10,61	11,30	10,73	11,64	10,84	12,67
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,93	4,43	5,41	4,50	5,71	4,58	5,84	4,62	5,98	4,98
10.	Informasi dan Komunikasi	6,59	7,58	5,92	7,69	5,90	7,78	6,18	8,01	6,29	8,66
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,16	6,04	6,09	5,93	6,20	6,06	5,81	5,72	5,57	5,76
12.	Real Estate	3,51	3,47	3,52	3,44	3,56	3,40	3,47	3,35	3,42	3,48
13.	Jasa Perusahaan	0,67	0,70	0,67	0,69	0,66	0,67	0,65	0,67	0,64	0,7
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,47	5,90	6,16	5,77	6,12	5,66	6,06	5,56	6,09	5,88
15.	Jasa Pendidikan	5,24	4,85	5,27	4,91	5,36	4,97	5,58	5,10	5,62	5,43
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,11	3,05	3,02	3,10	3,06	3,16	3,24	3,24	3,28	3,47
17.	Jasa lainnya	3,86	3,68	3,87	3,69	3,93	3,69	3,83	3,62	3,95	3,89
PDRB		100,00									

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka 2019

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dari tahun 2014 s.d. 2018 kelompok sektor primer yakni Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan kontribusi setiap tahunnya. Baik dilihat berdasarkan atas dasar Harga Berlaku maupun atas dasar Harga Konstan. Seiring dengan sektor primer, sektor sekunder pun terjadi penurunan kontribusi dalam pembentukan PDRB setiap tahunnya. Sektor yang dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi dari tahun 2014 s.d. 2018 adalah pada sektor tersier khususnya Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta Transportasi dan Pergudangan.

Jika dilihat dari pertumbuhan masing-masing lapangan usaha pada tahun 2018 atas dasar Harga Konstan, hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan kecuali pada kategori Pertambangan dan Penggalian. Jika dilihat dari PDRB atas dasar Harga Berlaku perkembangan masing-masing kategori terjadi pertumbuhan dan juga penurunan. Perkembangan kontribusi masing-masing sektor PDRB sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11.
Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB
atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018
Kota Bukittinggi

NO	Kategori	Pertumbuhan	
		Hk	Hb
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,6	1,61
2.	Pertambangan dan Penggalian	-0,39	0
3.	Industri Pengolahan	-1,60	19,89
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,99	8,33
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,2	7,14
6.	Konstruksi	7,03	6,36
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,81	3,29
8.	Transportasi dan Pergudangan	8,83	16,88
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,77	-16,72
10.	Informasi dan Komunikasi	8,09	37,68
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,74	3,41
12.	Real Estate	3,98	1,75
13.	Jasa Perusahaan	4,8	9,38
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,82	-3,44
15.	Jasa Pendidikan	6,65	-3,38
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,12	5,79
17.	Jasa lainnya	7,72	-1,52
PDRB		6,03	8,26

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka 2019

Kategori pembentuk PDRB tahun 2018 atas dasar Harga Konstan yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Kategori Transportasi dan Pergudangan dengan pertumbuhan 8,83% serta kategori Informasi dan Komunikasi dengan pertumbuhan 8,09% dan yang mengalami penurunan adalah kategori Industri Pengolahan dengan angka penurunan sebesar -1,60%. Jika dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, pertumbuhan tertinggi berada pada kategori Informasi dan Komunikasi dengan kenaikan sebesar 37,68%. Sedangkan kategori yang mengalami pertumbuhan negatif adalah pada kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan penurunan kontribusi sebesar -16,72%.

Melihat angka pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2018 baik atas dasar Harga Konstan maupun atas dasar Harga Berlaku, pertumbuhan tertinggi pada pembentukan PDRB adalah pada kategori

Transportasi dan Pergudangan serta kategori Informasi dan Komunikasi, sementara sektor yang paling kecil kontribusinya adalah sektor pertambangan dan penggalian.

b. PDRB Perkapita

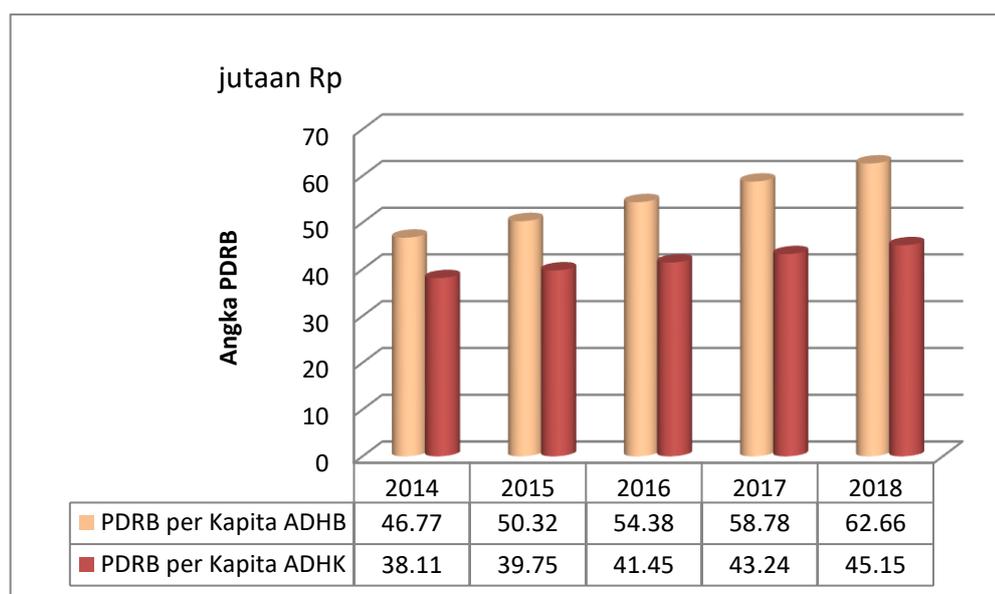
PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan pada tahun yang sama. PDRB Perkapita Kota Bukittinggi memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, hal ini tentu disebabkan karena cukup tingginya peningkatan nilai nominal PDRB dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Perkembangan PDRB Perkapita Kota Bukittinggi tahun 2014 s.d. 2018 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12.
Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2014 s.d. 2018
Berdasarkan Dasar Harga Konstan dan atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Nilai PDRB (dalam juta Rp) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	5.635.927,99	6.169.750,95	6.781.886,09	7.453.106,84	8.068.881
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	4.592.478,19	4.874.254,56	5.169.275,87	5.483.598,44	5.814.435
Jumlah Penduduk (jiwa)	120.491	122.621	124.715	126.804	128.783
PDRB perkapita (juta rupiah)					
PDRB per Kapita ADHB	46,77	50,32	54,38	58,78	62,66
PDRB per Kapita ADHK	38,11	39,75	41,45	43,24	45,15

Sumber: BDA dan PDRB Kota Bukittinggi 2019

Grafik 2.5
Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2014 s.d. 2018



PDRB Perkapita Kota Bukittinggi selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2014 s.d. 2018. Pada tahun 2015 PDRB Perkapita Kota Bukittinggi tumbuh sebesar 7.05% dari Tahun 2014, kemudian pada tahun 2016 naik sebesar 7,47%, dan tahun 2017 naik sebesar 7,48%. PDRB Perkapita Kota Bukittinggi Tahun 2018 sebesar Rp.49.888.932,- perjiwa berada diatas PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat yang hanya Rp.34.410.000,- perjiwa.

c. Laju Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) /Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kemampuan daya beli yang dimiliki masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Tingkat perubahan IHK (inflasi/deflasi) yang terjadi akan mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya belinya.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Oktober 2018 secara umum menunjukkan kenaikan pada semua kelompok pengeluaran. Di Kota Bukittinggi pada bulan Oktober 2018 terjadi Inflasi sebesar 0,92 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 129,04 persen pada bulan September 2018 menjadi 130,23 persen pada bulan Oktober 2018. Laju inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai bulan Oktober 2018 sebesar 1,73 persen dan untuk laju inflasi *year on year* (Oktober 2018 terhadap Oktober 2017) sebesar 2,43 persen. Inflasi Kota Bukittinggi terjadi karena adanya kenaikan indeks pada 7 (tujuh) kelompok pengeluaran yaitu : Kelompok Bahan Makanan sebesar 2,05 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,16 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 1,42 persen, kelompok sandang sebesar 0,31 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,03 persen, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,19 persenan kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,31 persen.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga selama bulan Oktober 2018 antara lain: Cabai merah, Bahan Bakar Rumah tangga, Beras, Jeruk, Bensin, Sewa rumah, Ikan Tongkol/Ambu ambu, emas perhiasan, ikan dencis, batu bata, kue kering berminyak, Kopi bubuk dan komoditas lainnya. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga selama bulan Oktober 2018 antara lain: Bawang merah, Belut, Daging Ayam Ras, Telur Ayam ras, Apel, Kelapa, Sepat siam, ketimun dan komoditas lainnya. Nilai inflasi Kota Bukittinggi dari Tahun 2014 s/d Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

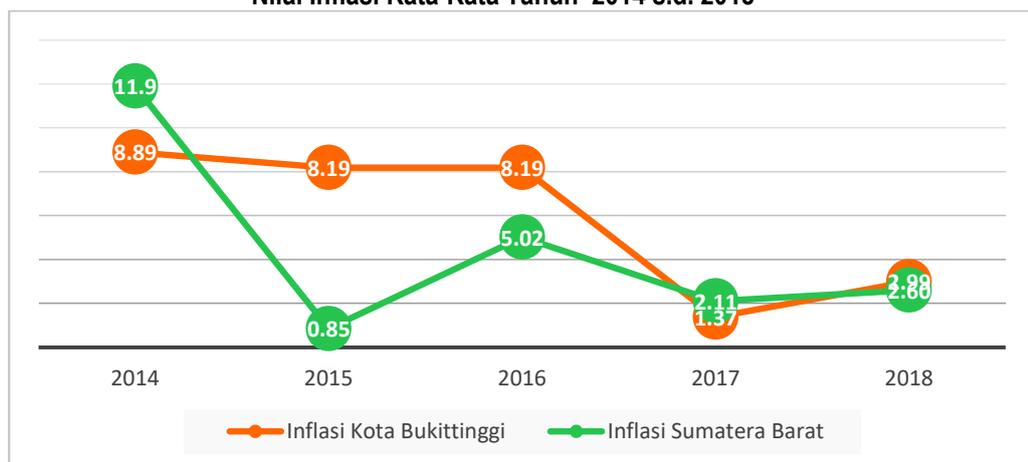
Tabel 2.13.
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2014 s.d. 2018

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Inflasi Kota Bukittinggi	8.89	8.19	8.19	1.37	2.99
Inflasi Sumatera Barat	11,90	0,85	5,02	2.11	2,60

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

Laju inflasi Sumatera Barat tahun 2018 tercatat sedikit di atas rata-rata Kawasan Sumatera yang sebesar 2,41 persen (yoy), namun lebih rendah dibandingkan capaian nasional sebesar 3,13 persen (yoy). Capaian inflasi Sumatera Barat tahun 2018 masih dalam kisaran sasaran inflasi nasional yang sebesar $3,5 \pm 1$ persen (yoy). Realisasi inflasi tahunan tersebut menempatkan Sumatera Barat sebagai provinsi dengan laju inflasi terendah ke-5 di Kawasan Sumatera, dan terendah ke-7 secara nasional. Secara spasial, laju inflasi kedua kota sampling inflasi yakni Kota Padang dan kota Bukittinggi sampai akhir 2018 terkendali, dengan besaran masing-masing 2,55 persen (yoy) dan 2,90 persen (yoy)

Grafik 2.6
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2014 s.d. 2018



d. Indeks Gini/Koefisien Gini

Untuk melihat distribusi pendapatan dapat dilihat dari 3 ukuran yaitu distribusi ukuran (distribusi pendapatan perseorangan) atau distribusi ukuran pendapatan, Kurva Lorentz dan Indeks Gini/Koefisien Gini. Indeks Gini (*Gini Ratio*) merupakan suatu ukuran pemerataan atau ketimpangan distribusi pengeluaran. *Gini Ratio* berkisar antara 0 dan 1 dengan klasifikasi antara lain:

- Ketimpangan Rendah (g 0,3)
- Ketimpangan Sedang (0,3 g 0,5)
- Ketimpangan Tinggi (g 0,5)

Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana dan yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dihitung dengan Koefisien Gini. Koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan Koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi. “0” berkaitan dengan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis), dan “1” berkaitan dengan ketidaksetaraan sempurna (dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol).

Indeks Gini Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2013 s.d. 2017 berada pada ketimpangan sedang. Dimana pada kurun waktu tersebut, hanya pada tahun 2013 ketimpangan Kota Bukittinggi yang mencapai 0,37, dimana pada tahun 2014 dan 2015 kembali meningkat pemerataan pendapatan yang mencapai angka 0,34. Perkembangan Indeks Gini Kota Bukittinggi dari tahun 2013 s.d. 2017 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14.
Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2013 s.d. 2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Gini	0,33	0,31	0,37	0,34	0,31

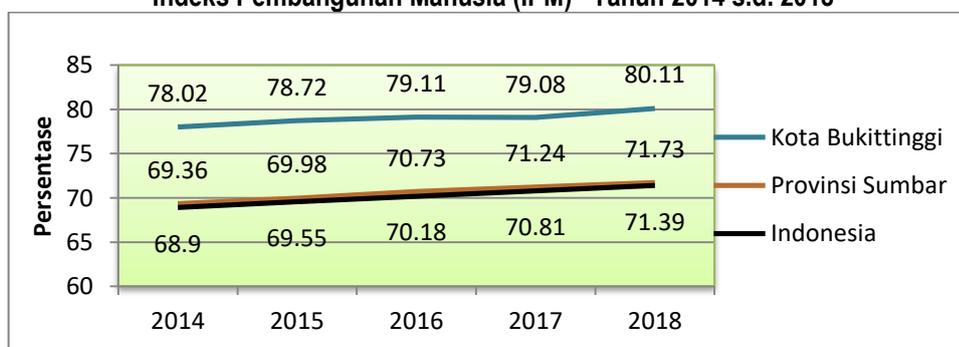
Sumber: BPS Kota Bukittinggi

e. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia akan menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM tersebut dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu : Umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak. Angka melek huruf awalnya juga menjadi indikator terhadap Indeks Pembangunan Manusia akan tetapi angka melek huruf ini sudah menjadi tidak relevan karena angka melek huruf ini tidak menggambarkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu untuk mengukur IPM ini Angka harapan lama sekolah lebih tepat dijadikan indikatornya.

Dari tahun-ke tahun IPM di Kota Bukittinggi semakin menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.7
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2014 s.d. 2018



Sumber : Biro Pusat Statistik

Dari grafik perkembangan indeks pembangunan manusia diatas dapat dilihat bahwa IPM kota Bukittinggi jauh berada diatas IPM Rata-rata Propinsi Sumatera Barat dan juga jauh diatas rata-rata indonesia secara keseluruhan. Indeks Pembangunan manusia Kota Bukittinggi pada tahun menunjukkan trend meningkat dari tahun 2014 sampai 2018, meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2016.

A. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Pendidikan

Pendidikan memiliki peran aktif yang sangat besar bagi perkembangan komunitas suatu bangsa. Tanpa adanya pendidikan yang terencana dengan baik, maka akan memberikan pengaruh buruk bagi setiap individu dalam negara tersebut, tentu saja hal ini juga akan mempengaruhi kualitas bangsa itu sendiri

Strategi dalam pendidikan adalah suatu rencana tentang cara-cara pendayagunaan dan penggunaan potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui 4 (empat) sendi pokok yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan dan efisiensi pengelolaan.

Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata yang berarti bahwa semua penduduk usia sekolah harus memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama. Disamping itu pemerataan pendidikanpun harus diiringi oleh adanya peningkatan kualitas pendidikan sehingga pendidikan ini nantinya benar-benar dapat menghasilkan masyarakat dan generasi yang berkualitas.

2. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun keatas.

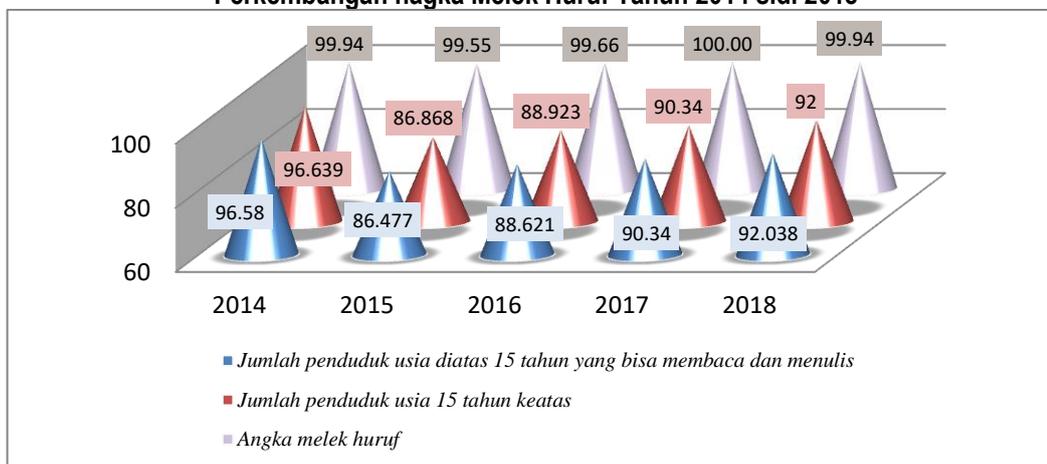
Tabel 2.15.
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2014 s.d. 2018
Kota Bukittinggi

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	96,580	86,477	88,621	90.340	92.038
2.	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	96.639	86.868	88.923	90.340	92.094
3.	Angka melek huruf (No 1/ no 2) X 100	99.94	99,55	99,66	100	99,94

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

Apabila digambarkan dalam sebuah diagram, maka perkembangan angka melek huruf dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik 2.8
Perkembangan angka Melek Huruf Tahun 2014 s.d. 2018



Kota Bukittinggi memiliki 45 Sekolah Dasar Negeri dan 11 sekolah Dasar Swasta, 8 SMP dan 5 SMA, serta sekolah madrasah baik ditingkat SD, SMP atau SMA. Pada tahun 2016 terjadi Pemindahan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun yang beralih hanyalah kewenangan penyelenggaraan SMA saja sedangkan Kota Bukittinggi tetap menjadi Kota Pendidikan dengan semua fasilitas sekolah yang ada pada wilayah administratifnya.

Tentunya diharapkan setiap penduduk Kota Bukittinggi dalam usia sekolah, agar tepat waktu mengikuti pendidikan dibangku sekolah sesuai dengan umur yang ditetapkan. Salah satu alat ukur atau indikator tingkat kecerdasan siswa didik adalah sejauh mana kemampuan mereka untuk dapat membaca dan menulis, atau yang lebih dikenal dengan angka melek huruf. Angka melek huruf ini juga merupakan proporsi penduduk berusia 10 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca. Semakin tinggi Angka Melek Huruf, membuktikan semakin tinggi mutu pendidikan di daerah tersebut.

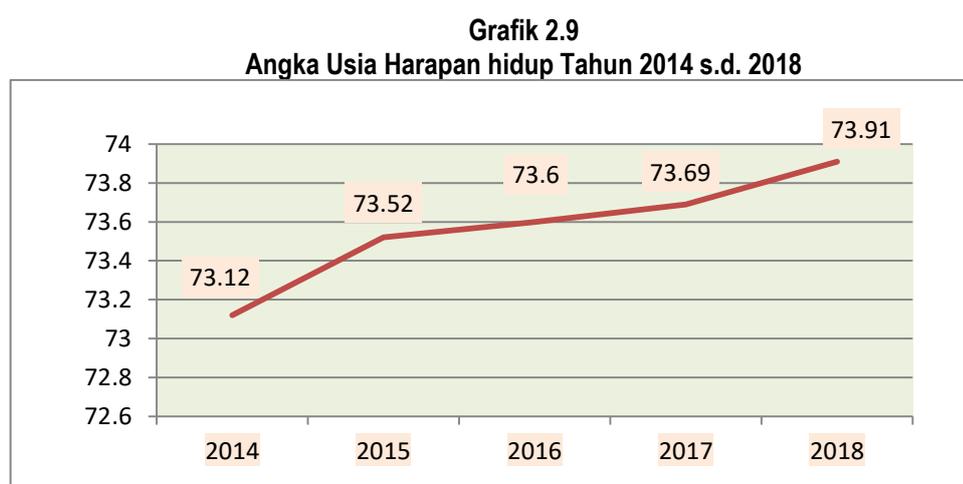
Sesuai dengan data yang diperoleh tahun 2014, angka melek huruf di Kota Bukittinggi mencapai 99,94 %. Ini artinya hampir 100 persen penduduk Bukittinggi di usia sekolah telah mampu tulis baca. Hal ini juga menggambarkan bahwa masyarakat dapat paham dan mengerti atas informasi atau pesan yang disampaikan serta dapat mengembangkan pengetahuan. Data-data Angka Melek Huruf ini dapat juga digunakan dalam mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, menunjukkan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi dari berbagai media, serta mampu berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Pada tahun 2015 dan 2016 Angka Melek Huruf di Kota Bukittinggi sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 yaitu 99,41 dan 99,77. Artinya Penduduk usia 10 tahun keatas di kota Bukittinggi tetap hampir 100% telah mampu tulis baca. Sedangkan pada Tahun 2017 Angka Melek Huruf sudah mencapai angka 100%, artinya tidak

ada lagi penduduk Kota Bukittinggi yang mengalami buta huruf, dan pada Tahun 2018 Angka Melek Huruf adalah 99,94%.

3. Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Secara umum angka harapan hidup di Kota Bukittinggi sudah tergolong tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Kota lainnya di Sumatera Barat dan berada diatas atas rata-rata Usia harapan hidup di Indonesia. Berikut gambaran perkembangan angka harapan hidup di Kota Bukittinggi tahun 2014-2018 :



Dari grafik diatas terlihat bahwa Angka harapan hidup di Kota Bukittinggi memperlihatkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup sehingga menghasilkan umur yang panjang dan standar kesehatan masyarakat dan pengetahuan. Pada tahun 2018 angka harapan hidup di kota Bukittinggi mencapai 73,91. Trend Angka Harapan hidup ini meningkat tahun ke tahunnya. Artinya dari sudah terjadi peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pengetahuan dan ditentukan juga oleh pendapatan masyarakat itu sendiri.

B. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Kebudayaan

Pembangunan bidang seni, budaya dan olah raga sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu 1) mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral etika, berbudaya dan beradab serta 2) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Seni budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Kota Bukittinggi selama ini telah dikenal sebagai salah satu kota seni dan budaya. Kesadaran akan pentingnya seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul di tengah-tengah masyarakat, pemerintah dan stake holder lainnya di Kota Bukittinggi.

Sebagai Kota Pariwisata, Kota Bukittinggi tidak hanya senantiasa melestarikan dan mengembangkan kebudayaan agar tetap lestari dan terjaga namun lebih dari itu budaya lokal yang ada di Kota Bukittinggi di jual dan dijadikan atraksi pada event-event pariwisata. Oleh karena itu diperlukan sarana dan prasarana seni dan budaya yang lebih representatif. Selain itu apresiasi generasi muda terhadap seni dan budaya daerah dirasa masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan.

Disamping penyelenggaraan dan melestarikan kegiatan-kegiatan budaya, pelestarian benda, situs dan kawasan budaya juga mendapat perhatian pemerintah Kota Bukittinggi.

Berikut jumlah kelompok seni tradisional yang ada di Kota Bukittinggi yang terus selalu dibina dan dikembangkan :

Tabel 2.16.
Kelompok Seni Tradisional yang ada di Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok Seni
1	Mandiingin Koto Selayan	26
2	Guguk Panjang	15
3	Aur Birugo Tigo Baleh	15
	Jumlah	56

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, 2018

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

A. Layanan Urusan Wajib Dasar

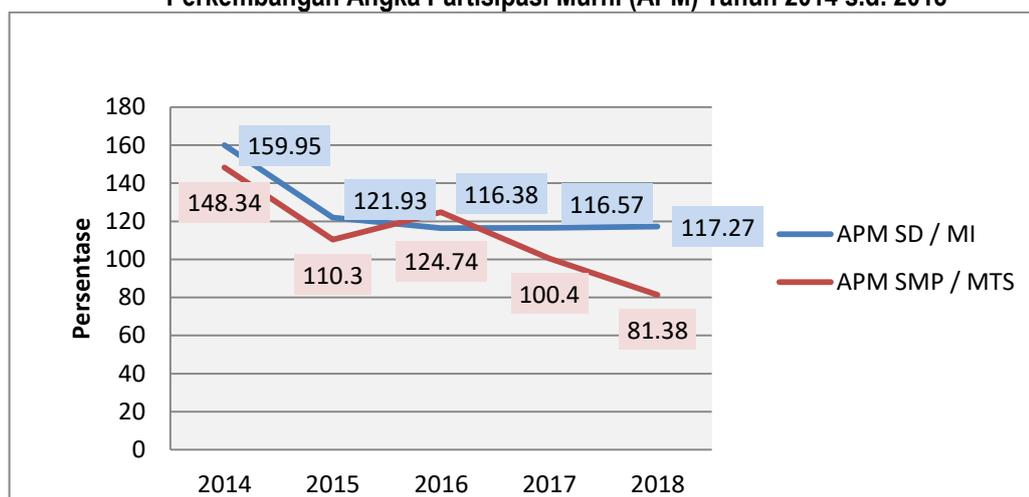
1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka Partisipasi Murni atau APM juga merupakan

salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan atas pelaksanaan program pendidikan di suatu daerah. APM ini diukur berdasarkan pengelompokan umur penduduk menurut jenjang pendidikan dan berdasarkan jumlah siswa di kelompok jenjang pendidikan tersebut. Kelompok APM tersebut adalah Tingkat SD untuk kelompok di usia 7-12 tahun dan tingkat SMP untuk kelompok usia 13-15 tahun. Semakin tinggi persentase APM di suatu wilayah, maka semakin tinggi mutu pendidikan di wilayah tersebut.

Grafik 2.10
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2014 s.d. 2018



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi

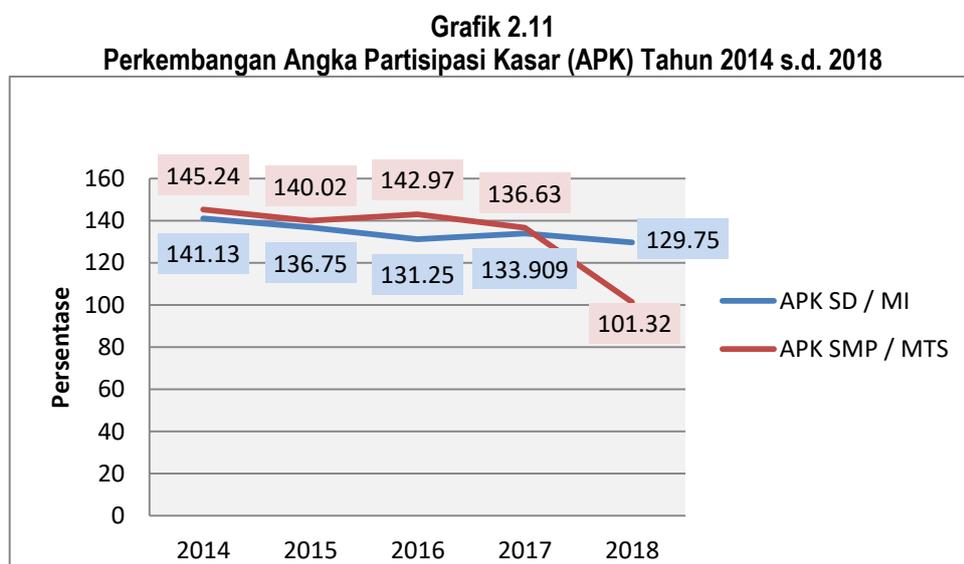
Dari grafik diatas terlihat, di Kota Bukittinggi pada tingkat SD untuk kelompok usia 7-12 tahun, Angka Partisipasi Murni pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun 2017 yaitu 117,27%. Ini berarti seluruh penduduk diusia sekolah tingkat SD telah terdaftar dan tepat usia sebagai pelajar yang tersebar di 45 Sekolah Dasar di Kota Bukittinggi. Kesadaran dan ketepatan waktu sesuai usia wajib belajar diusia 7-12 tahun di tingkat dasar telah sepenuhnya dimengerti oleh para orang tua, sehingga mereka mendaftarkan anak anak mereka ke sekolah formal. Hal ini telah terlihat pada data selama 5 (lima) tahun terakhir, APM kelompok usia ini sukses terlaksana di Kota Bukittinggi.

APM pada tingkat SMP/MTs menunjukkan penurunan, dan tetap lebih rendah dibanding APM pada tingkat SD namun secara rata-rata sudah baik dan mengindikasikan bahwa angka partisipasi penduduk pada usia pendidikan SMP/MTs untuk bersekolah sudah baik.

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD / SLTP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 16 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar juga merupakan indikator dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Oleh sebab itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan semaksimal mungkin, agar

seluruh masyarakat jadi cerdas. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas di setiap tingkat pendidikan, salah satunya adalah dengan menghitung Angka Partisipasi Kasar (APK), yakni presentase angka dimana jumlah penduduk yang sedang sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah. Data perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

Secara keseluruhan APK untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kota Bukittinggi melebihi angka 100% . Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya anak didik yang melebihi usia terlambat masuk sekolah, atau karena tinggal kelas, dan anak yang berasal dari luar Kota Bukittinggi. Hal ini juga mengindikasikan betapa besarnya minat dan perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap kemajuan pendidikan. Data ini pun membuktikan keberadaan Kota Bukittinggi sebagai Kota Pendidikan dimana terlihat bahwa angka partisipasi melebihi jumlah penduduk pada masing-masing usia sekolah.

b. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

Bangunan merupakan salah satu syarat untuk dapat terlaksananya proses belajar mengajar dengan baik. Kondisi bangunan yang baik akan menambah kenyamanan bagi peserta didik dalam menerima pembelajaran. Kondisi Bangunan Baik untuk Sekolah SD/MI dan SMP/MTs dari Tahun 2014 s/d 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.17.
Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik
Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
I.	SD/MI					
1	Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	34	34	37	43	24
2	Jumlah seluruh sekolah SD/MI	61	61	61	61	62
3	Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik (No 1/ no 2) X 100	55,74	55,74	60,66	70,49	38,71
II.	SMP/MTs					
1.	Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	12	13	14	15	7
2.	Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik	17	19	19	19	21
3.	Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik (No 1/ no 2) X 100	70,59	68,42	73,68	78,95	33,3

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

Pada tahun 2018 jumlah sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki kondisi bangunan baik jauh lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, untuk itu pada tahun 2018 dilakukan pembangunan kembali beberapa bangunan sekolah dan rehab yang sudah dilakukan telah menunjukkan hasil yang sangat signifikan dalam rangka menyediakan sarana prasana pendidikan dalam kondisi baik.

c. Angka Kelulusan (AL) Jenjang Pendidikan Dasar

Angka Kelulusan (AL) Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 Kota Bukittinggi sebagai berikut:

Tabel 2.18.
Angka Kelulusan (AL) Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
I.	SD/MI					
1.	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	2.243	2.467	2.543	2.554	2.671
2.	Jumlah Siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	2.243	2.475	2.553	2.557	2.671
3.	AL SD/MI	100	99,67	99,61	99,88	100
II.	SMP/MTs					
1.	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	1.042	1.729	2.137	2.847	3.000
2.	Jumlah Siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya	1.042	1.731	2.140	2.848	3.000
3.	AL SMP/MTs	100	99,88	99,86	99,96	100

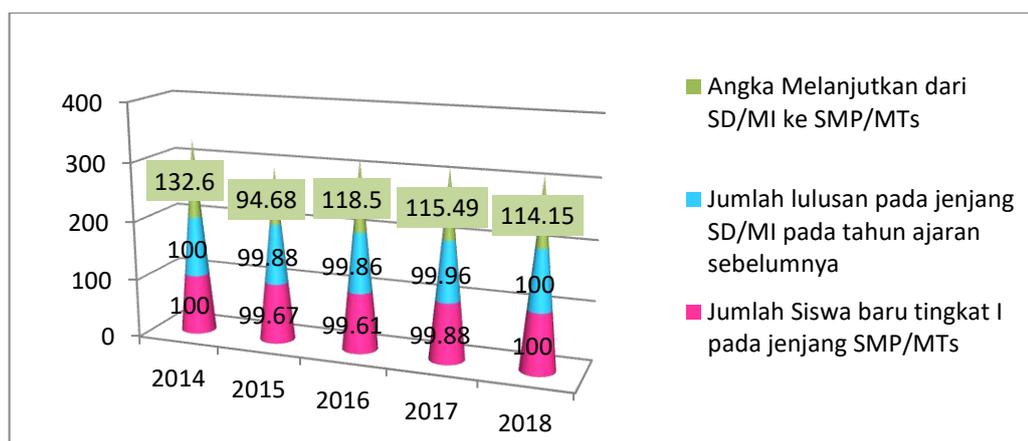
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2013 s/d 2018 Angka Kelulusan Siswa SD/MI dan SMP/MTs selalu menunjukkan angka hampir 100 %. Ini menunjukkan bahwa sekolah-sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Bukittinggi sudah menunjukkan angka yang signifikan kalau dilihat dari jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada tahun sebelumnya. Disamping itu tingginya angka kelulusan ini juga memperlihatkan kualitas belajar mengajar yang sudah semakin baik di kalangan dunia pendidikan di Kota Bukittinggi.

d. Angka Melanjutkan Pendidikan Jenjang Pendidikan SD/MI ke SMP/MTs

Jenjang pendidikan SD dan SLTP merupakan jenjang pendidikan yang merupakan jenjang pendidikan dasar yang harus ditempuh oleh anak usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Dalam hal Angka Melanjutkan Pendidikan Jenjang Pendidikan SD/MI ke SMP/MTs Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi digambarkan pada bagan dibawah ini :

Grafik 2.12
Angka Melanjutkan (AM) dari Jenjang Pendidikan SD/MI ke SMP/MTs Tahun 2014 s.d. 2018



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

Grafik diatas menunjukkan bahwa Angka Melanjutkan dari Jenjang Pendidikan SD/MI ke SMP/MTs dari Tahun 2014 s.d 2018 terjadi fluktuasi turun naik, namun secara keseluruhan masih menunjukkan angka yang memuaskan karena adanya kesadaran untuk melanjutkan sekolah ke pendidikan yang lebih tinggi serta adanya kesadaran bahwa seorang anak usia sekolah jenjang pendidikan ini harus menamatkan jenjang pendidikan dasar SD dan SLTP. Disamping tingginya diatas menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan jenjang SD dan SMP pun sudah semakin meningkat.

e. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Angka pendidikan yang ditamatkan ini selain melihat keberhasilan seseorang menyelesaikan pendidikannya, yang dibuktikan dengan

ijazah, juga berguna untuk melihat perencanaan tenaga kerja. Perusahaan atau industri dapat mempedomani angka pendidikan yang ditamatkan ini untuk mengembangkan usahanya pada suatu daerah. Jika pada suatu industri membutuhkan banyak tenaga tamatan SD atau SMP, maka salah satu indikator untuk pengembangan usahanya adalah melihat angka partisipasi yang ditamatkan ini. Selain itu juga melihat secara keseluruhan tingkat pendidikan yang ada di suatu daerah, sehingga keberhasilan suatu pendidikan dapat dilihat dari angka pendidikan yang ditamatkan tersebut. Berikut digambarkan perkembangan APT di Kota Bukittinggi tahun 2014- s/d 2018.

Grafik 2.13
Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) Tahun 2014 s.d. 2018



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

Dari gambar diatas terlihat bahwa suksesnya program wajib belajar 9 tahun di Kota Bukittinggi salah satunya dilihat dari angka pendidikan ditamatkan ini yaitu dengan meningkatnya Angka Pendidikan Yang Ditamatkan pada Tahun 2018.

f. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Namun hal ini bukan berarti bahwa jika APS tinggi maka daya serap dan partisipasi sekolah juga tinggi. Namun kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan bertambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Berikut tabel Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Bukittinggi :

Tabel 2.19.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	14.408	15.207	15.565	15.047	15.375

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	11.759	12.472	12.478	12.908	13.111
1.3.	APS SD/MI	122,53	121,93	124,74	116,57	117,27
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	6.798	7.175	7.271	6.729	5.570
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6.189	6.505	6.610	6.702	6.795
2.3.	APS SMP / MTs	109,84	110,30	110,00	100,4	81,38

Sumber: Profil Pendidikan Tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Dari data pada periode tahun 2014-2018 terlihat bahwa angka partisipasi sekolah sedikit terjadi naik turun. Kondisi ini perlu dicermati dan dicari langkah-langkah sehingga APS ini hendaknya meningkat dan diharapkan semua siswa pada usia pendidikan ini dapat semuanya diserap pada sekolah-sekolah yang ada di Kota Bukittinggi.

Terlepas dari adanya sedikit naik turun APS pada tingkat SD/MI, sebenarnya angka ini sudah cukup bagus untuk melihat partisipasi Penduduk usia 7-12 tahun untuk bersekolah. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah sudah semakin baik nya kebijakan dan tingginya perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan sehingga daya serap siswa pada jenjang pendidikan ini juga meningkat.

g. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

Dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan maka ketersediaan sarana pendidikan merupakan faktor pendukung yang sangat menentukan. Ketersediaan sarana pendidikan yang memadai dapat memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka menunjang program Wajib Belajar 9 tahun. Dinamika ini dapat dilihat dari rasio dalam pelayanan penduduk usia sekolah sebagai berikut:

Tabel 2.20.
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD / MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	61	61	61	61	62
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	11.759	12.472	12.478	12.908	13.111
1.3.	Rasio	55,28	48,91	48,89	47,26	47,29
2	SMP / MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	16	17	19	19	21
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6.189	6.505	6.610	6.702	6.795
2.3.	Rasio	25,85	26,13	28,74	28,35	30,90

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

Sarana pendidikan di Kota Bukittinggi pada tingkat SD/ SDLB/MI serta SMP/MTs hampir semuanya telah memenuhi kewajiban dalam pemenuhan standar minimum terhadap pengadaan sarana dan prasarana

yang diwajibkan undang-undang. Pemerintah kota Bukittinggi telah melakukan beberapa upaya dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sesuai SNP diantaranya dengan pelaksanaan Rehab dan RKB serta pengadaan peralatan.

Sebagian besar sekolah baik di tingkat SD/SDLB//MI, SMP/MTs telah memenuhi sarana prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Pencapaian indikator kinerja pada sasaran diatas dengan predikat baik dan mengalami kenaikan. Hal ini ditunjang oleh semakin besarnya anggaran daerah yang di alokasikan untuk membenahi sarana prasarana sekolah baik tingkat SD/SDLB//MI, SMP/MTs. Disamping itu alokasi dana dari Pemerintah Pusat dibidang pendidikan turut menunjang meningkatnya pencapaian sasaran ini dari tahun ke tahun.

h. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru sesuai tingkat pendidikan per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Disamping ketersediaan sarana sekolah, ketersediaan guru sebagai pengajar merupakan faktor pendukung yang tak kalah pentingnya dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Tenaga Pendidik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan adalah pendidik yang harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud diatas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan perbandingan jumlah guru dengan murid untuk tingkat pendidikan dasar dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.21.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD / SLB/MI					
1.1.	Jumlah Guru	822	884	815	900	883
1.2.	Jumlah Murid	16.579	16.414	16.237	17.285	17.222
1.3.	Rasio	49,6	53,9	50,19	52,07	51,27
2	SMP / SMPLB/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	603	451	659	582	598
2.2.	Jumlah Murid	7.715	6.399	9.157	9.137	8.947
2.3.	Rasio	78,2	70,5	71,97	63,70	66,84

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

Tenaga Pendidik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan adalah pendidik yang harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud diatas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah

dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari tabel diatas terlihat bahwa rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SD/MI rendah selama kurun waktu 2014-2018. Angka ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi masih kekurangan guru pada jenjang pendidikan ini seperti halnya Guru Kelas. Tidak jauh berbeda dengan jenjang pendidikan SD/MI, rasio yang juga terbilang rendah dapat dilihat pada jenjang pendidikan SMP/MTs.

Dikaitkan dengan capaian indikator kinerja Persentase SD/SDLB/MI yang telah memiliki tenaga pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan, Kota Bukittinggi masih memperoleh capaian sebesar 78,06%. Dari capaian tersebut dapat dilihat bahwa Kota Bukittinggi belum mencapai 100% dalam pemenuhan tenaga pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan. Oleh sebab itu indikator kinerja terhadap persentase tenaga pendidik SD / SDLB / MI yang telah sesuai Standar Nasional Pendidikan masih menjadi agenda pokok dari pendidikan dasar. Masih banyak tenaga pengajar yang belum sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional yang tersebar di seluruh SD/SDLB/MI yang berada di Kota Bukittinggi.

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2017 dan 2018 pada SMP/SMPLB/MTs terlihat penurunan hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah siswa yang cukup besar namun tidak sebanding dengan penambahan jumlah guru. Salah satu penyebab pertumbuhan jumlah guru tidak bisa mengimbangi pertumbuhan jumlah siswa pada jenjang pendidikan ini adalah adanya kebijakan moratorium penerimaan ASN yang tidak dikecualikan untuk guru di Pemerintah Kota Bukittinggi. Untuk memenuhi standar ketersediaan guru terhadap kelangsungan pendidikan, Pemerintah Kota Bukittinggi telah melaksanakan kebijakan dengan tetap memberdayakan guru-guru honoror.

Dengan kebijakan ini diharapkan kekurangan guru tidak menimbulkan kendala terhadap kemajuan pendidikan di Kota Bukittinggi.

i. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Dari segi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.22.
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV				1.350	1.364
2.	Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs	1.453	1.431	1.474	1.480	1.436
3.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV				91,22%	94,99%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah guru SD/MI dan SMP/MTs dari tahun 2014 s.d 2018 terjadi fluktuasi bahkan di tahun 2018 merupakan jumlah guru yang paling sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi dari data yang ada, terjadi peningkatan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, ini menunjukkan kualitas dan kompetensi guru di Kota Bukittinggi sudah baik. Hal ini sesuai dengan Peraturan

Menteri pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dinyatakan bahwa kualifikasi akademik Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Adapun kualifikasi akademik guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja sektor kesehatan semata melainkan juga sangat dipengaruhi oleh hasil kerja keras dan kontribusi positif dari berbagai sektor pembangunan. Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan pada tahun 2016 telah mampu mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu aspek yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu derajat kesehatan masyarakat merupakan hal yang harus diperhatikan karena dijadikan salah satu indikator terhadap kualitas hidup masyarakat.

Gambaran umum tentang mortalitas, usia harapan hidup, status gizi akan memberikan penjelasan dan mencerminkan status kesehatan masyarakat.

a. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kesakitan maupun kematian. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Angka Kematian Bayi di Kota Bukittinggi tahun 2018 yaitu 3 per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian bayi di Kota Bukittinggi pada tahun 2013-2015 mengalami kenaikan jumlah yang signifikan sedangkan di tahun 2016 – 2018 mengalami penurunan. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23.
Angka Kematian Bayi Tahun 2013 s.d 2018
Kota Bukittinggi

NO	Tahun	Jumlah kematian bayi (>1 tahun)	Jumlah kelahiran hidup	Angka kematian bayi
1	2013	19	2.338	8
2	2014	19	2.405	8
3	2015	26	2.407	8
4	2016	12	2.465	5
5	2017	7	2.427	3
6	2018	3	2.460	3

Sumber : Dinas Kesehatan

Berbagai faktor dapat menyebabkan adanya penurunan AKB diantaranya dukungan peningkatan akses pelayanan kesehatan antara lain peningkatan cakupan imunisasi dan pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya. Hal ini disebabkan AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan.

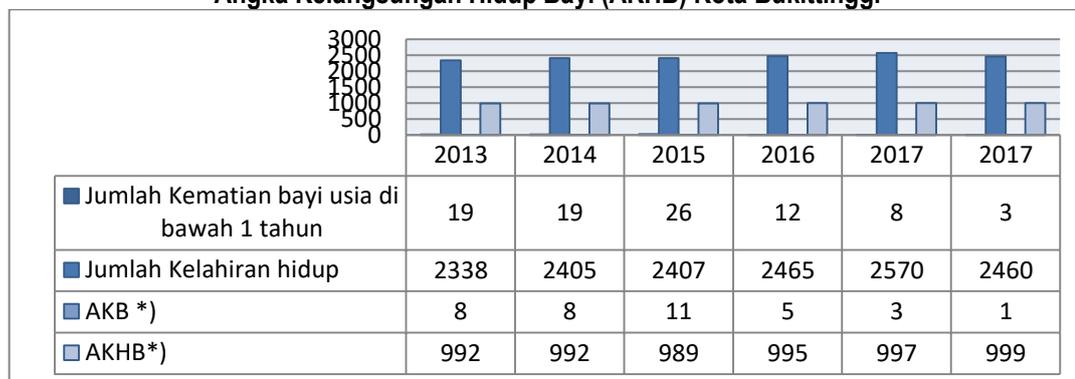
Selain itu, perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat yang meningkat juga dapat berkontribusi melalui perbaikan gizi yang berdampak positif pada daya tahan bayi terhadap infeksi penyakit. Perlu juga adanya kesediaan masyarakat untuk merubah kehidupan tradisional ke normal kehidupan modern dalam bidang kesehatan.

b. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) merefleksikan kondisi social, ekonomi, lingkungan tempat tinggal, ketersediaan layanan kesehatan. Indikator yang terkait langsung dengan angka kelangsungan hidup bayi adalah angka kematian bayi (*infant mortality rate*) yaitu suatu angka yang menunjukkan jumlah bayi yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. Angka ini merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum

Dengan memperhatikan Angka Kematian Bayi karena indikator ini berkaitan langsung dengan Angka Kelangsungan Hidup Bayi, dapat tergambar Angka Kelangsungan Hidup Bayi sebagai berikut :

Grafik 2.14
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Bukittinggi



Sumber : Dinas Kesehatan

Dari grafik diatas terlihat bahwa kelangsungan hidup bayi selalu bervariasi dari tahun ketahun. Angka kelangsungan hidup bayi ini mengalami sedikit naik turun namun variasi ini tetap dalam rentang dan kategori baik. Artinya ibu-ibu melahirkan telah mampu menjaga kehamilannya dengan baik serta memberikan asupan gizi yang baik kepada bayi, baik selama masa dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Sebagaimana telah diuraikan diatas, hal ini mengindikasikan bahwa derajat kesehatan penduduk di Kota Bukittinggi secara umum juga telah meningkat.

c. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator penting dari derajat kesehatan masyarakat. Menurut Budi Utomo yang dimaksud dengan kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain. WHO memperkirakan bahwa sekitar 15-20 persen ibu hamil, baik di negara maju maupun berkembang akan mengalami risiko tinggi dan/atau komplikasi. Angka Kematian Ibu juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan.

Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitivitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan kesehatan. Salah satu cara untuk menurunkan angka kematian adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih.

Angka Kematian Ibu Kota Bukittinggi tahun 2018 yaitu sebanyak 2 jiwa dari jumlah lahir hidup sebanyak 2.460 jiwa. Terjadi peningkatan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 7 Jiwa meninggal, dan menurun pada tahun 2016 menjadi 3 jiwa, dan menurun lagi sebanyak 1 Jiwa tahun 2017, penurunan ini berkat usaha pemerintah bersama masyarakat yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, mulai dari saat hamil, peningkatan gizi ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, dan perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi. Namun kembali meningkat menjadi 2 jiwa pada tahun 2018, namun peningkatan ini masih dalam kadar hal yang tidak mengkhawatirkan, pada umumnya angka kematian ibu di Kota Bukittinggi masih dalam angka yang tidak mengkhawatirkan. Walaupun demikian diharapkan Angka Kematian Ibu di Kota Bukittinggi tidak ada lagi, sehingga pembangunan kesehatan di Kota Bukittinggi dapat berhasil sesuai dengan target RPJMD Kota Bukittinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24.
Angka Kematian Ibu Tahun 2013 s.d 2018
Kota Bukittinggi

No.	Tahun	Jumlah ibu hamil yang meninggal	Jumlah kelahiran hidup	Jumlah kematian ibu
1	2013	0	2.338	0
2	2014	1	2.405	0.00042
3	2015	7	2.407	0.00291
4	2016	3	2.465	0.00122
5	2017	1	2.427	0.00041
6	2018	2	2.460	0.00081

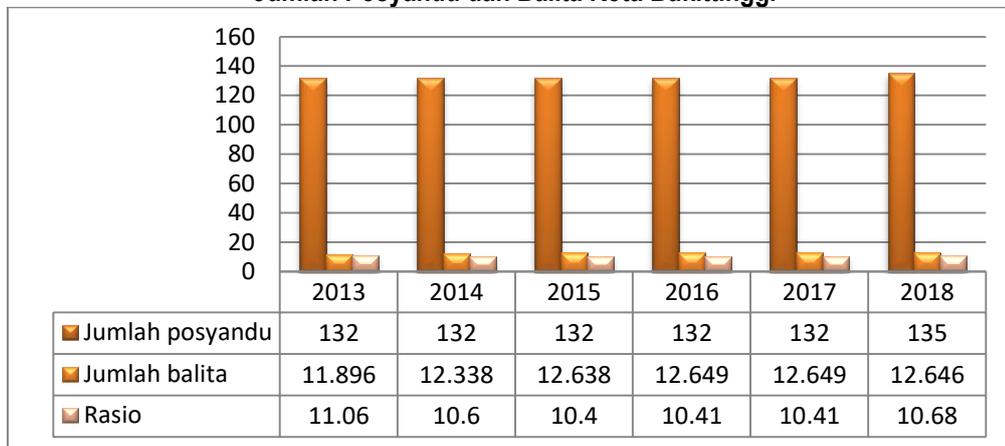
Sumber : Dinas Kesehatan

d. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Pembangunan Kesehatan dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. Kerja sama tersebut berbentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Salah satu UKBM tersebut adalah posyandu. Rasio posyandu per satuan balita menggambarkan jumlah balita yang dapat dilayani oleh satu posyandu. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Berikut jumlah posyandu dan jumlah balita adalah sebagai berikut :

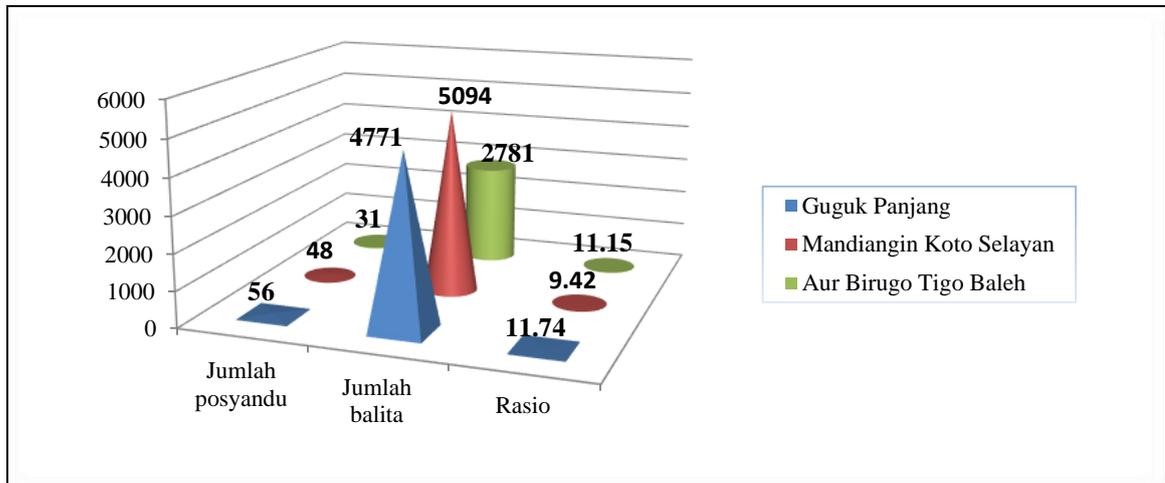
Grafik 2.15
Jumlah Posyandu dan Balita Kota Bukittinggi



Sumber : Dinas Kesehatan

Dari tabel diatas terlihat bahwa rasio posyandu terhadap balita tahun 2016 dan 2017 adalah 10,4 artinya dalam 1000 balita dilayani oleh 10,4 posyandu, maka 1 Posyandu di Kota Bukittinggi melayani sebanyak 96 – 97 balita. Angka ini sudah bagus karena sudah berada diatas standar, menurut standar idealnya 1 posyandu dapat melayani 100 balita. Dalam kurun waktu diatas terlihat bahwa rasio semakin menurun yang artinya tingkat pertumbuhan balita lebih cepat dari tingkat pertumbuhan posyandu sehingga satu posyandu melayani lebih banyak anak sehingga kualitas pelayanan bisa berkurang. Berikut jumlah posyandu dan balita menurut kecamatan :

Grafik 2.16
Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2018 Kota Bukittinggi



Sumber: Dinas Kesehatan

e. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama saat ini dimana Puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25.
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Puskesmas	7	7	7	7	7	7
2.	Jumlah Poliklinik	2	2	1	12	12	14
3.	Jumlah Pustu	14	14	14	14	14	14
4.	Jumlah Penduduk	118.260	120.491	122.621	124715	126805	128783
5.	Rasio Puskesmas persatuan penduduk *)	0.059	0.058	0.057	0.056	0.055	0.05
6.	Rasio Poliklinik persatuan penduduk *)	0,017	0,016	0,008	0.096	0.094	0.11
7.	Rasio Pustu persatuan penduduk *)	0,118	0,116	0,114	0.112	0.11	0.11

Sumber : Dinas Kesehatan

Di kota Bukittinggi, sarana kesehatan berupa puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dalam kondisi jumlah yang sama setiap tahunnya, beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi khususnya Dinas Kesehatan adalah meningkatkan pelayanan dengan melengkapi sarana dan prasarana serta SDM yang langsung melayani.

Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk pada tahun 2017 adalah 0.055 itu berarti dari 1 puskesmas yang ada melayani penduduk, sedangkan untuk tahun 2018 rasio puskesmas adalah 0.05, memang

mengalami sedikit penurunan, namun angka tersebut masih dalam standar yang baik dimana standar nasional 1 Puskesmas dapat melayani 30.000 penduduk.

Sementara untuk jumlah poliklinik untuk tahun 2017 dan 2018 masih tetap sama, ini berarti layanan yang diberikan sesuai rasio poliklinik persatuan penduduk masih bagus, untuk tahun 2017 1 poliklinik melayani 10.638 penduduk. Dan untuk Puskesmas Pembantu juga tidak mengalami pergerakan untuk tahun 2017 dan 2018 masih sama dengan jumlah puskesmas pembantu sebanyak 14. Dengan rasio 0.110 dimana 1 puskesmas melayani 9.090 penduduk.

Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu menurut kecamatan tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.26.
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Menurut Kecamatan Tahun 2018 Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jml	Rasio*	Jml	Rasio*	Jml	Rasio*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7=6/3)	(8)	(9=8/3)
	Tahun 2018							
1	Guguk Panjang	48583	2	0.041	6	0.123	3	0.062
2	Mandiingin Koto Selayan	51852	4	0.078	3	0.058	8	0.154
3	Aur Birugo Tigo Baleh	28348	1	0.035	5	0.176	3	0.106
	Jumlah	128783	7	0.054	14	0.109	14	0.109

Sumber : Dinas Kesehatan

Pada tabel di atas tergambar penyebaran sarana kesehatan untuk tingkat kecamatan tidak merata. Namun walaupun demikian pelayanan kesehatan di setiap kecamatan masih berjalan dengan maksimal. Kecamatan mandiingin Kota Selayan adalah daerah yang mempunyai banyak pelayanan kesehatan yaitu sebanyak 14, hal ini sejalan dengan jumlah penduduknya yang paling banyak diantara kecamatan yang lain.

f. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk.

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Pelayanan Fasilitas kesehatan dapat diukur kinerjanya antara lain dengan melihat Rasio Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik, Dokter dan Tenaga Medis per satuan penduduk. Rumah Sakit Milik Pemerintah Kota Bukittinggi memang belum ada, akan tetapi pembangunan RSUD Kota Bukittinggi sedang dilaksanakan dan akan dioperasikan tahun 2021. Namun secara umum pelayanan kesehatan bagi penduduk di tingkat lanjutan telah dilakukan oleh rumah sakit – rumah sakit yang ada di Kota Bukittinggi. Jumlah rumah sakit yang ada di Kota Bukittinggi :

Tabel 2.27.
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
Tahun 2013 s.d 2018 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	3	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	-	1	1	1	1	1
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	1	1	1	1	1	1
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	-	0	0	0	0	0
5.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	3	3	3	2	2	2
6.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	6	6	6	5	5	5
7.	Jumlah Penduduk	118.260	120.491	122.621	124715	126805	128783
8.	Rasio*)	0,051	0,050	0,049	0.040	0.039	0.039

Sumber : Dinas Kesehatan

Sesuai dengan tabel di atas dapat kita lihat jumlah Rumah Sakit mengalami penurunan, yaitu Rumah Sakit Sitawa Sidingin yang izinnya sudah dicabut karena ada permasalahan dalam pelaksanaan, dan sekarang statusnya menjadi klinik. Rasio Rumah sakit adalah gambaran ketersediaan dan cakupan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Rasio Rumah sakit persatuan penduduk berkisar pada angka 0.039 dan sama untuk 2017 dan 2018, Jumlah Rumah Sakit di Kota Bukittinggi saat ini adalah sebanyak 5 Rumah sakit yang terdiri dari:

1. Pemerintah Pusat, RSUP yang sekarang menjadi RSSN (Rumah Sakit Strike Nasional)
2. Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat yaitu Rumah Sakit Achmad Muchtar.
3. Rumah Sakit Swasta Ibnu Sina
4. Rumah Sakit Swasta Madina
5. Rumah sakit TNI AD Tk.IV

Dalam pelayanan Rumah sakit di Kota Bukittinggi mempunyai sebanyak 767 tempat tidur yang tersebar di seluruh Rumah Sakit dan di dukung oleh fasilitas sarana dan prasarana. Dan jumlah penderita yang dirawat inap menurut jenis penyakit pada tahun 2017 sebanyak 40.953 pasien. Sedangkan jumlah penderita yang dirawat menurut daerah asal pada tahun 2017 adalah sebanyak 20.472 pasien . Sesuai dengan rasio yang ada dapat dilihat jika 1 Rumah sakit bisa melayani 25.641 pasien. Angka ini dapat menggambarkan dengan jumlah rumah sakit yang ada masih bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien yang datang ke rumah sakit di Bukittinggi. Jumlah rumah sakit yang ada menurut kecamatan adalah :

Tabel 2.28.
Jumlah Rumah Sakit
Menurut Kecamatan Tahun 2018 Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)		RS Jiwa/Paru & penyakit khusus lainnya milik pemerintah		Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI		Rumah Sakit Daerah		Rumah Sakit Swasta		Total	
			Jmlh	Rasio*	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio*	Jlh	Rasio	Jlh	Rasio	Jmlh	Rasio
1	Guguk Panjang	48.583	1	0.021	0	0	0	0	0	0	2	0.041	3	0.062
2	Mandiingin Koto Selayan	51.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Aur Birugo Tigo Baleh	28.348	0	0	1	0.035	1	0.035	0	0	0	0	2	0.071

Sumber : Dinas Kesehatan

Dari tabel diatas tergambar penyebaran jumlah rumah sakit tidak sama untuk masing-masing kecamatan. Jumlah rumah sakit banyak terdapat pada kecamatan Guguk Panjang dengan jumlah rumah sakit sebanyak 3 (tiga) unit, kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 2 (dua) unit, sementara belum tersedianya rumah sakit pada kecamatan Mandiingin Koto Selayan.

g. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Dokter adalah seorang tenaga kesehatan yang menjadi tempat kontak pertama pasien untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, organology, golongan usia dan jenis kelamin, sedini dan sedapat mungkin, secara menyeluruh paripurna, bersinambung dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan professional kesehatan lainnya. Pelayanan kesehatan ditingkat primer yang dilakukan di Puskesmas dilakukan oleh Dokter Umum dan Dokter Gigi. Namun pada tingkat lanjutan di Rumah Sakit dapat dilakukan oleh Dokter Umum dan Dokter Spesialis.

Indikator dokter persatuan jumlah penduduk menggambarkan tingkat pelayanan yang diberikan oleh Dokter. Jumlah Dokter dan rasionya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.29.
Jumlah Dokter Tahun 2018 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Dokter	187	212	264	264	153	290
2	Jumlah Penduduk	118.260	120.491	122.621	124.715	126.805	128.783
3	Rasio	1.56	1.76	2.15	2.11	1.21	2.252

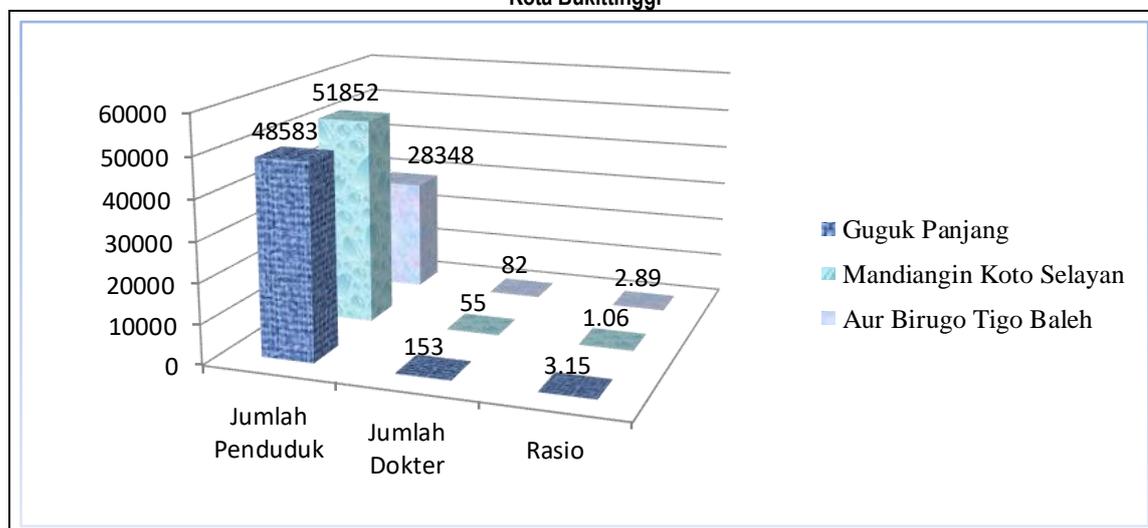
Sumber : Dinas Kesehatan

Sesuai dengan data dari Dinas Kesehatan Jumlah Dokter di Kota Bukittinggi pada tahun 2018 adalah sebanyak 290 orang yang tersebar pada Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Institusi Dinas Kesehatan lainnya. Rasio Jumlah Dokter terhadap jumlah penduduk pada tahun 2018 adalah 2.25 untuk idealnya rasio dokter terhadap penduduk adalah 1 : 2500 (Standar dari WHO sebesar 40 per 100.00 penduduk).

Dengan tabel yang tergambar di atas dapat dilihat bahwa Kota Bukittinggi telah mempunyai dokter sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Jumlah Dokter yang terdapat masing-masing kecamatan adalah :

Grafik 2.17
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2018
Kota Bukittinggi



Sumber : Dinas Kesehatan

Jika data tersebut dibagi menurut kecamatan, maka pada tahun 2018 didapat data rasio dokter per 1000 penduduk di kecamatan Guguk panjang adalah 3,15, kecamatan mandiangin Kota selayan 1,06 dan kecamatan aur birugo tigo baleh 2,89. Faktor penyebab tingginya rasio untuk kecamatan abtb adalah jumlah penduduk sedikit ditangani dengan jumlah dokter yang cukup banyak.

h. Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Tenaga medis yang ada di Kota Bukittinggi terdiri dari tenaga analisis labor, temperatur dan pengaturan rontgen, anestesi, fisioterapi, rekam medic, refoptisien yang tersebar diseluruh puskesmas, rumah sakit dan institusi.

Jumlah tenaga medis per satuan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30.
Jumlah Tenaga Medis Tahun 2014 s.d 2018
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Tenaga Medis	273	236	236	253	249
2	Jumlah Penduduk	120.491	122.621	124.715	126.804	128.783
3	Rasio	2,26	1,92	1.892	1.995	1.933

Sumber : Dinas Kesehatan

Rasio tenaga medis digunakan untuk mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis yang ada disuatu wilayah. Untuk tahun 2018 rasio tenaga medis mengalami penurunan dari 1,995 menjadi 1,933, hal ini disebabkan karena penurunan jumlah tenaga medis, oleh karena itu untuk mencapai suatu kondisi yang idela perlu menambah tenaga medis untuk kebutuhan masyarakat Kota Bukittinggi.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu urusan wajib bagi pemerintah Kabupaten / Kota. Dalam upaya menyediakan infrastruktur bagi peningkatan pelayanan dan kualitas hidup masyarakat maka pemerintah harus selalu meningkatkan kinerja pembangunan terkait jaringan jalan, peningkatan ini salah satunya dapat diukur dari proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik yang dipantau perkembangannya setiap tahun.

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Sebagai kawasan yang memprioritaskan pembangunannya di sektor pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan perdagangan dan jasa, maka sektor transportasi di Kota Bukittinggi mempunyai peran penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Dalam hubungan sistem aktivitas sistem transportasi, perkembangan fasilitas transportasi disebabkan oleh perkembangan guna lahan, pola aktivitas maupun keputusan lokasional. Jalan merupakan salah satu infrastruktur transportasi yang menghubungkan berbagai pusat-pusat kegiatan serta sebagai sarana distribusi barang dan jasa untuk menunjang perekonomian. Dalam mendesain jalan, hal yang harus dipertimbangkan adalah antisipasi terhadap kondisi lalu lintas dimasa yang akan datang. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.31.
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Km)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jalan kota dalam kondisi baik	168,76	164,34	164,96	157,06	116,12
2.	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)	198,18	194,11	192,99	192,99	164,48
3.	Proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik	0,85	0,85	0,85	0,87	0,75

Sumber: Dinas PUPR Kota Bukittinggi, 2018

Dari total panjang jalan di Kota Bukittinggi sebesar 180,169 km, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 168,76 km pada tahun 2013.

b. Rasio Jaringan Irigasi

Irigasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sedangkan jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi. Dengan adanya irigasi maka kebutuhan akan air pada sebidang lahan tetap terpenuhi sekalipun kondisi lengas tanah tidak mencukupi sehingga tanaman tetap bisa tumbuh secara normal.

Jaringan irigasi yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap. Rasio Jaringan irigasi dapat menggambarkan efisiensi dan efektifitas operasional jaringan irigasi yang ada dalam mengairi petak sawah / areal tanam yang ada. Tabel berikut menyajikan Rasio Jaringan Irigasi Kota Bukittinggi.

Tabel 2.32.
Rasio Jaringan Irigasi Kota Bukittinggi
Tahun 2013 s.d. 2017

NO	Pasokan Irigasi	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Panjang Saluran Irigasi (km)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
2.	Luas Areal Tanam (Ha)	823	762	759	759	588
3.	Rasio Jaringan Irigasi	0,0015	0.0016	0.0015	0.0015	0,0015

Sumber: Dinas PUPR Kota Bukittinggi, 2018

Dilihat dari tabel diatas, panjang saluran irigasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tidak terdapat penambahan, sedangkan luas areal tanam terjadi penurunan. Penurunan areal tanam salah satunya disebabkan oleh meningkatnya kegiatan pembangunan perumahan. Kondisi ini harus dikawal secara baik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan pola ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota Bukittinggi sehingga produksi padi tetap dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan secara maksimal.

c. Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk

Tempat Pemakaman Umum biasa disingkat TPU merupakan kawasan tempat pemakaman yang biasanya dikuasai oleh pemerintah daerah dan disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkannya. TPU ini berada dalam pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah itu sendiri.

Rasio tempat pemakan umum per satuan penduduk adalah sebagai berikut :

Tabel 2.33.
Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk
Tahun 2017

No	Uraian	2017
1	Jumlah daya tampung TPU	19,7Ha
2	Jumlah Penduduk	119.183
3	Rasio	0,0165

Sumber: Dinas PUPR Kota Bukittinggi, 2018

Dalam penggunaan lahan TPU untuk makam dikelompokkan berdasarkan agama yang dianut oleh orang yang meninggal tersebut. Kemudian ukuran tanah untuk makam disediakan maksimal 2,50 x 1,50 m dengan kedalaman sekurang-kurangnya 1,50 m dari permukaan tanah. Dari tabel diatas rasio tempat pemakaman umum per jumlah penduduk yaitu sebesar 0,0165

d. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Kota Bukittinggi memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. Sehingga jumlah Masjid dan Mushalla sangat menonjol dari pada jumlah tempat beribadah lainnya. Tempat ibadah yang tidak ada di Kota Bukittinggi adalah Pura (tempat beribadah agama Hindu).

Bukittinggi juga terkenal dengan toleransi antar umat beragamanya, dan masing-masing agama bebas menjalankan peribadatan dengan nyaman. Rasio masing-masing tempat ibadah terhadap jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.34.
Rasio Tempat Ibadah Kota Bukittinggi
Tahun 2013 s.d. 2017

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Mesjid	44	44	44	45	45
2.	Jumlah Mushalla menurut BDA	50	146	146	148	105
3.	Jumlah Penduduk beragama Islam	115.244	117.421	119.497	121.560	115.980
4.	Rasio Masjid Per satuan penduduk	0,38	0,37	0,37	0,37	0,39
5.	Rasio Mushalla Per satuan penduduk	0,43	1,24	1,22	1,22	0,91
6.	Jumlah Gereja Katholik	1	1	1	1	1
7.	Jumlah Penduduk beragama Katholik	1.104	1119	1.139	1.160	1.132
8.	Rasio Gereja Katholik Per satuan penduduk	0,91	0,89	0,87	0,86	0,88
9.	Jumlah Gereja Protestan	1	1	1	1	1
10	Jumlah Penduduk Beragama Protestan	1.686	1.723	1.754	1.758	1,882
11	Rasio Gereja Protestan Per satuan penduduk	0,59	0,58	0,57	0,57	0,53

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2017

Peningkatan jumlah tempat ibadah di Kota Bukittinggi tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk, sehingga rasio tempat ibadah dari tahun ke tahun cenderung menurun namun diperkirakan hal ini

tidak akan mempengaruhi kualitas ibadah umat beragama. Hal ini terbukti dengan tidak adanya kerusuhan yang terjadi antar umat beragama di Kota Bukittinggi.

e. Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

Ruang terbuka hijau merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau yang ada di Kota Bukittinggi merupakan lahan yang terdiri dari lahan pertanian/perkebunan milik masyarakat, fasilitas umum berupa lapangan olah raga dan lahan pekarangan.

Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.35.
Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2014	2015	2016	2017*)	2018*)
1	Luas RTH	*	*	*	212,128	212,163
2	Luas wilayah ber HPL/HGB	*	*	*	2523,9	2523,9
3	Rasio	*	*	*	1 : 0,084	1 : 0,084

*Keterangan: * data tidak tersedia
) data RTH Publik

Dari tabel diatas terlihat masih belum mencukupinya ruang terbuka hijau di Kota Bukittinggi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang tentang penataan ruang, mengingat Bukittinggi daerah perkotaan yang semakin padat jumlah bangunan dan fasilitas lainnya sehingga banyak terjadi perubahan fungsi lahan dari pertanian menjadi lahan pemukiman.

Jika mengacu pada ketentuan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota yang meliputi 20 % Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10 % Ruang Terbuka Hijau Privat. Ruang Terbuka Hijau dapat berfungsi sebagai paru-paru kota, penyejuk dan memperindah wajah kota, sekaligus menjadi tempat bersantai, berinteraksi sosial bagi warganya maupun bagi siapa saja yang berkunjung ke Bukittinggi.

Pada Tabel diatas terlihat dimana luas RTH yang ada pada tahun 2018 adalah 212,163 Ha (8,4%) dari luas RTH publik yang seharusnya tersedia yaitu sebesar 506 Ha (20%). Sehingga untuk persyaratan luas minimal 20 % RTH Publik dari luas wilayah yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang belum tercapai.

Tabel 2.36.
Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Luas RTH public yang tersedi di akhir tahun pencapaian SPM (M2)	*	*	*	2.121.280	2.194.680
2	Luas RTH public yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kaw	*	*	*	5.047.800	5.047.800
3	Persentase	*	*	*	42%	43.47%

Sumber : DIKPLH tahun 2018

Oleh karena itu harus terus ada usaha dari pemerintah dan masyarakat untuk menambah ruang terbuka hijau ini guna menjaga keseimbangan lingkungan alam dan lingkungan buatan serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Tak cuma itu, Ruang terbuka hijau juga berfungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara, tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati dan pengendali tata air serta tak ketinggalan sebagai sarana estetika kota. Keberadaan ruang ini tak hanya menjadikan kota menjadi sekedar tempat yang sehat dan layak huni tapi juga nyaman dan asri.

Ruang terbuka hijau juga membawa begitu banyak manfaat yang terkandung didalamnya. Mulai dari sarana untuk mencerminkan identitas daerah, menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, sebagai sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, memperbaiki iklim mikro hingga meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan dan tak ketinggalan bermanfaat bagi meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan. Bahkan terkandung pula manfaat yang lebih bernilai sosial seperti sebagai sarana rekreasi aktif dan pasif serta interkasi sosial atau sebagai sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula. Bisa dibilang kebutuhan akan adanya ruang semacam ini di kota-kota besar tak hanya sekedar perlu namun kebutuhan.

f. Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 bahwasanya Kota Bukittinggi tidak memiliki Kawasan Hutan, namun hanya memiliki beberapa kawasan yang memiliki lindung yaitu Kawasan Ngarai Sianok Sempadan Ngarai Sianok dan Sempadan Sungai serta Kawasan Ruang Terbuka hijau (RTH) dengan fungsi Hutan Kota yang merupakan kawasan konservasi dan penyangga lingkungan kota (pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati). Selain itu hutan kota juga dimanfaatkan sebagai aktivitas sosial masyarakat (duduk, beristirahat, olah raga ringan).

Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.37.
Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan
Citra Satelit dan Survey Foto Udara Terhadap Luas Daratan
Tahun 2014 s.d 2017 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2014	2015	2016	2017)*	2018)*
1	Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara (Ha)	*	*	*	67,99	61.74
2	luas daratan	*	*	*	2523Ha	2523Ha
3	Rasio	*	*	*	1 : 0,026	1 : 0,024

Sumber:)* Data Diolah oleh Bapelitbang
 CTT: Beberapa pohon di kawasan Jam gadang ditebang

Berdasarkan tabel diatas yang merupakan hasil perhitungan Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil analisis foto udara Kota Bukittinggi Tahun 2014 di dapat luasan kawasan yang tertutup pepohonan seluas 67, 99 Ha dari luas daratan Kota Bukittinggi, dengan perbandingan rasio 1 : 0, 02 . Besaran Luasan ini masih jauh dari luasan ideal yaitu 30 % dari luasan daratan. Untuk itu perlu dilakukan penanaman pohon kembali di berbagai kawasan karena pohon memiliki fungsi vital bagi masyarakat. Sebagai fungsi pelestarian misalnya, dapat menyegarkan udara sebagai paru-paru kota, karena dalam fotosintesis tanaman akan menyerap CO2 terutama dari gas buang yang dikeluarkan kendaraan bermotor. Selain itu keberadaan pohon pelindung juga menurunkan suhu kota dan meningkatkan kelembapan kota. Sekaligus sebagai pemandangan alami perkotaan dan mengurangi polusi udara.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Setiap orang berhak hidup sejahtera secara lahir dan bathin, mempunyai tempat tinggal serta mendapatkan lingkungan yang sehat dan layak. Hal ini merupakan kebutuhan dasar manusia dimana pemerintah berkewajiban untuk mewujudkannya. Pemerintah mempunyai peran dalam memberikan kemudahan dan bantuan perumahan bagi masyarakat untuk dapat menempati rumah layak huni. Rasio rumah layak huni untuk Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38.
Rasio Rumah Layak Huni Kota Bukittinggi
Tahun 2013 s.d 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah rumah Layak Huni					17.914	20.089
2	Jumlah penduduk	118.260	120.491	122.621	124.715	126.804	128.783
3	Rasio					14,12	15, 59

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2018

Jumlah rumah layak huni di Kota Bukittinggi pada tahun 2018 adalah sekitar 20. rumah. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 yang berjumlah sekitar 128.783 jiwa, maka rasio rumah layak huni di Kota Bukittinggi pada tahun 2017 adalah sekitar 1 : 7,19.

Upaya penanganan rumah tidak layak huni telah dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam berbagai macam program dan kegiatan, diantaranya adalah program bedah rumah. Disamping itu juga terdapat program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang merupakan salah satu program pemerintah pusat dalam mencapai *universal acces* yang salah satunya adalah pengurangan kawasan kumuh perkotaan menjadi 0% pada tahun 2019.

Luas permukiman kumuh pada tahun 2014-2017 di Kota Bukittinggi adalah seluas 30,6 Ha. Dari luas tersebut, luas permukiman kumuh yang tertangani adalah 8,81 Ha pada tahun 2017, sehingga persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan pada tahun 2017 adalah sekitar 28,79 %. Persentase ini terus diupayakan berkurang dengan adanya kelanjutan program KOTAKU pada tahun 2018, sehingga diharapkan pada tahun 2019, persentase luasan permukiman kumuh di Kota Bukittinggi dapat berkurang menjadi 0%. Persentase luasan permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39.
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Luas permukiman kumuh yang tertangani (Ha)	Belum ditetapkan	0	0	0	8,81	27,37
2	Luas permukiman kumuh (Ha)	Belum ditetapkan	30,6 Ha	30,6 Ha	30,6 Ha	30.6 Ha	30.6Ha
3	Persentase	Belum ditetapkan	0%	0%	0%	28,79%	89,44 %

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pada tabel diatas terlihat luas pemukiman kumuh yang tertangani pada tahun 2017 yakni sebesar 8,81 Ha dengan persentase 28,79 % dan pada tahun 2018 persentase penanganan kawasan kumuh meningkat menjadi 89,44% dengan luasan yang ditangani sebesar 27,37 Ha.

Disamping itu, penanganan rumah tidak layak huni juga dilakukan pemerintah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat, serta dana dari sumber-sumber lainnya baik di pusat maupun daerah melalui APBD.

a. Persentase Areal Kawasan Kumuh

Secara umum, daerah kumuh (*slum area*) diartikan sebagai suatu kawasan permukiman atau pun bukan kawasan permukiman yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang bangunan-bangunannya berkondisi substandar atau tidak layak yang dihuni oleh penduduk miskin yang padat. Kawasan yang sesungguhnya tidak diperuntukkan sebagai daerah permukiman di banyak kota besar, oleh penduduk miskin yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap diokupasi untuk dijadikan tempat tinggal, seperti bantaran sungai, di pinggir rel kereta api, tanah-tanah kosong di sekitar pabrik atau pusat kota, dan di bawah jembatan. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.40.
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Luas Kawasan Kumuh	Belum ditetapkan	30,6 Ha	30,6 Ha	30,6 Ha	21,79	4 Ha
2.	Luas Wilayah	Belum ditetapkan	2523,9 Ha				
3.	Persentase	Belum ditetapkan	1,21%	1,21%	1,21%	0,9%	0,15%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Dari tabel diatas persentase luas pemukiman kumuh di kawasan perkotaan untuk tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 21,79 Ha atau sebesar 0,9 %. Pada tahun 2018 luas kawasan kumuh berkurang menjadi 0,15% atau 4 Ha. Hal ini merupakan gambaran berhasilnya program terhadap pemukiman kumuh yang telah dilaksanakan, baik kegiatan yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kinerja pelayanan urusan tersebut dapat dilihat pada beberapa indikator. Adapun indikator sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

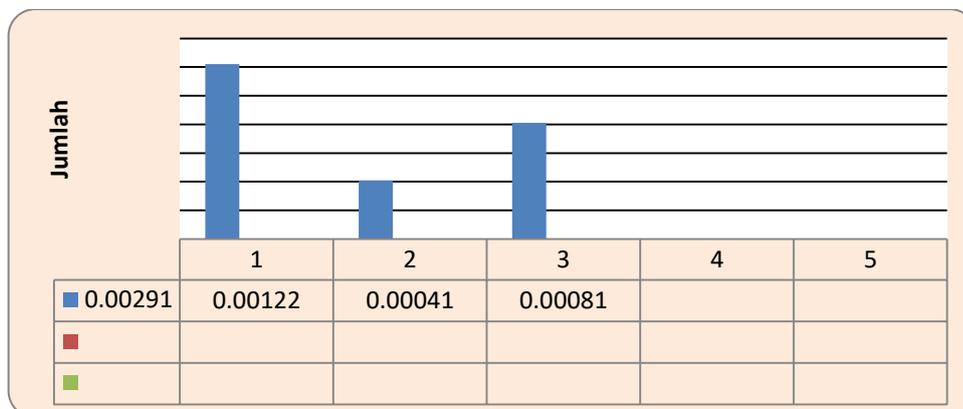
Selama Periode 2014-2018, cakupan petugas perlindungan masyarakat dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.41.
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat tahun 2014-2018

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Linmas	240 orang	704 orang	120 orang	120 orang	120 orang
2.	Jumlah RT	338	338	338	338	338
3.	Cakupan Petugas Linmas	0.71	2.08	0.36	0.36	0.36

Sumber: Dinas Satpol PP, diolah

Gambar 2. 18
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat tahun 2014-2018



Berdasarkan table/Grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2015 terjadi kenaikan cakupan petugas Linmas yang cukup signifikan menjadi 2,08. Kondisi ini disebabkan karena adanya Pemilihan umum yang mengharuskan petugas linmas di masing-masing TPS harus tersedia. Selanjutnya pada tahun 2016 terjadi penurunan kembali petugas linmas hingga mencapai angka cakupan 0,36% dan kondisi ini berlanjut terus hingga memasuki tahun 2018.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota maka kondisi idealnya petugas LINMAS itu ada 1 orang per RT. Sehingga jumlah yang ideal untuk kota Bukittinggi untuk petugas linmas adalah sebanyak RT yang ada yaitu 338 orang. Jadi untuk kondisi saat ini petugas linmas yang ada belum cukup memadai. Diperlukan sosialisasi mengenai peran fungsi Linmas mulai tingkat kecamatan maupun kelurahan.

b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 4 menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas penegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Untuk tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan keindahan merupakan salah satu indikator dalam pelayanan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Capaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dapat diukur dari tingkat penyelesaian pelanggaran K3 yang telah dilaksanakan. Selama periode Tahun 2014-2018, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.42.
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pelanggaran K3 yang terselesaikan	952	722	657	1.494	1.944
2	Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	952	722	657	1.494	2.131
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	100%	100%	100%	100%	91%

Sumber: Dinas Satpol PP

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran K3 cenderung meningkat. Namun tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ditahun 2018 sebesar 91%, hal ini disebabkan karena sebanyak 187 kasus masih dalam proses penyelesaian pelanggaran Perda. Ada beberapa faktor penyebab antara lain menunggu proses sidang, tidak sanggup membayar biaya penegakan Perda, atau tidak/belum diselesaikan oleh pihak pelanggar Perda.

c. Penegakan PERDA

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas satuan polisi pamong praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut PERDA dan Peraturan Kepala Daerah.

Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota satuan polisi pamong praja.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan *preventif non yustisial* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, satuan polisi pamong praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Persentase penegakan PERDA dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.43.
Persentase Penegakan PERDA Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	952	722	657	1.494	1944
2	Jumlah Pelanggaran PERDA	952	722	657	1.494	2.131
3	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	91%

Sumber: Dinas Satpol PP

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran Perda dengan jumlah penyelesaian pelanggaran K3 sama nilainya, karena yang baru dikerjakan oleh Satpol PP baru Perda Trantibum saja. Sementara itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Satpol PP bukan hanya ditugaskan untuk penegakan Perda Trantibum saja, namun idealnya Satpol PP menegakkan seluruh Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang ada.

a. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran (selanjutnya disingkat WMK) oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdiksi urusan pemerintahannya. PPK adalah salah satu alat ukur akses dan mutu pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah.

Wilayah Manajemen Kebakaran atau WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan resiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain : pemukiman di perkotaan dan perdesaan, perindustrian / pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu pertambangan, depo bahan bakar minyak dan/atau bahan yang sangat mudah terbakar, pelabuhan, bandara dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya.

Jumlah mobil pemadam kebakaran yang ada di Kota Bukittinggi per tahun 2018 sebanyak 6 unit, berdasarkan standar *International Fire Chiefs Association of Asia* (IFCAA) yang menetapkan bahwa setiap 10.000 penduduk dilayani 1 (satu) unit mobil. Jika Penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 2017 adalah sebanyak 119.183 jiwa, maka idealnya Kota Bukittinggi memiliki 12 unit mobil pemadam kebakaran. Walaupun demikian, Dinas Kebakaran selalu berusaha memaksimalkan sarana yang ada untuk mencapai hasil yang maksimal. Cakupan layanan bencana kebakaran dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 adalah :

Tabel 2.44.
Cakupan Layanan Bencana Kebakaran Kota
Tahun 2013 s.d. 2018 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	4	4	5	6	6	6
2.	Jumlah Penduduk	118.260	120.491	122.621	124.715	126.804	121.590
3.	Rasio (1:2 x 100%)	33,82%	33,19%	32,62%	48,31%	47,31%	49,35%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2019

Jumlah mobil pemadam kebakaran ini masih separuh dari jumlah ideal kendaraan pemadam kebakaran yang seharusnya, berdasarkan penjelasan diatas masih terdapat kekurangan sebanyak 7 unit lagi. Kekurangan ini diharapkan dapat segera dipenuhi sehingga Cakupan Layanan Bencana Kebakaran di Kota Bukittinggi juga dapat ditingkatkan.

b. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK. Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran adalah :

Tabel 2.45.
Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran
Tahun 2013 s.d. 2018 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	TAHUN					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan Pemadam Kebakaran	53	98	116	115	121	77
2.	Jumlah Kejadian Kebakaran	53	98	116	115	121	77
3.	Rasio (1:2 x 100%)	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kebakaran, 2019

Berdasarkan Permendagri nomor 69 tahun 2012, Target pelaksanaan Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota sampai pada tahun 2016 minimal 75% (tujuh puluh lima persen). Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Bukittinggi telah 100%, jauh diatas target. Walaupun target telah terpenuhi, namun tetap perlu ditingkatkan kuantitas dan mutu kualitas pelayanannya dari tahun ke tahun berikutnya.

6. Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun social secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS sebagai berikut :

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak terlantar
3. Anak berhadapan dengan hukum
4. Anak jalanan.
5. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
6. Lanjut usia terlantar
7. Penyandang disabilitas
8. Tuna susila
9. Gelandangan
10. Pengemis
11. Pemulung
12. Kelompok minoritas
13. Bekas warga binaan pemasyarakatan (BWBP)
14. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
15. Korban penyalahgunaan NAPZA
16. Korban trafficking
17. Korban tindak kekerasan
18. Pekerja migran bermasalah (PMBS)
19. Korban bencana alam
20. Korban bencana sosial
21. Perempuan rawan sosial ekonomi
22. Fakir miskin
23. Keluarga bermasalah sosial psikologis
24. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni
25. Komunitas Adat Terpencil

Namun untuk saat ini kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bukittinggi hanya ditemui sebanyak 20 jenis PMKS di luar Gelandangan, Korban Trafficking, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial, Korban Bencana Sosial, keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, dan Komunitas Adat Terpencil.

Jumlah pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Bukittinggi pada tahun 2018 adalah sebanyak 20.852 Jiwa, yang telah dijadikan di beberapa intervensi program bantuan sosial, pemberdayaan, rehabilitasi, dan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi.

Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Tenaga Tenaga kerja sebagai salah satu sumber daya yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan merupakan faktor pendukung perekonomian di instansi pemerintah maupun swasta. Daya saing dan produktivitas tenaga kerja saat ini relatif masih rendah, salah satu penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah dengan keterampilan dan keahlian yang juga masih minim. Selain itu kualitas tenaga kerja yang rendah juga dilatarbelakangi oleh faktor kondisi internal tenaga kerja seperti motivasi kerja, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan, inisiatif dan kreatifitas. Perkembangan lulusan S1/S2/S3 dari tenaga kerja kita lihat pada uraian tabel berikut :

Tabel 2.46.
Rasio Lulusan S1 / S2 / S3 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah lulusan S1	6.328	7.443	8.544	10.063	9.622	10.454
2.	Jumlah lulusan S2/S3	140	812	978	1.322	893	956
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	6.468	8.255	9.522	11.385	10.515	11.410
5.	Jumlah penduduk	118.260	120.491	122.621	124.715	126.804	128.783
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	5,47	6,85	7,77	9,13	8,29	8,86

Sumber: Dinas PMPTSP

Dari tabel diatas tergambar bahwa rasio lulusan S1, S2, dan S3 sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas tenaga kerja di Kota Bukittinggi sudah semakin meningkat dan diharapkan bahwa mereka adalah tenaga-tenaga terampil yang tidak hanya mempunyai ilmu akademis namun juga memiliki keterampilan dan pengalaman kerja.

Kualitas tenaga kerja di Kota Bukittinggi didasarkan pada jumlah tamatan S1, S2 dan S3 yang bekerja pada instansi pemerintah maupun swasta. Secara data dapat terlihat penduduk Kota Bukittinggi dari kualitas tenaga kerja adalah tamatan S1 dari berbagai disiplin ilmu. Disusul jumlah lulusan S2 namun dengan perbandingan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan antara lain, angkatan kerja pada tamatan S1, sangat terbatas untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan S2, karena sangat terbatasnya perguruan tinggi yang mempunyai program study S2 di Kota Bukittinggi.

Salah satu cara yang harus diterapkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja antara lain dengan mendirikan berbagai pusat pelatihan tenaga kerja. Hal ini dimaksudkan untuk melatih seseorang menjadi manusia terampil, berinisiatif dan berkarakter serta kreatif.

Kesempatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja aktif dan penduduk yang sedang mencari pekerjaan yang merupakan pengangguran terbuka. Diluar dari itu adalah merupakan bukan angkatan kerja yang merupakan penduduk yang masih bersekolah, rumah tangga, purnakarya dan lain-lain. Untuk pembangunan kesempatan kerja sasaran yang ingin dicapai adalah terbukanya informasi seluas luasnya mengenai ketenagakerjaan dan ketersediaan lapangan kerja yang dapat diisi bagi masyarakat Kota Bukittinggi yang belum mendapatkan pekerjaan/tenaga kerja produktif untuk menurunkan tingkat pengangguran.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat dan juga merupakan sebagai sumber daya insani, potensi yang dimiliki perempuan dalam hal kuantitas maupun kualitas dibawah laki-laki. Salah satu indikator Pemberdayaan perempuan adalah dengan melihat Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan proporsi yang diduki perempuan di DPRD.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Indikator terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.47.
Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2016 dan 2018 Kota Bukittinggi

NO	URAIAN	2016	2017	2018
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	46,04%	59,37%	8,92%
2.	Proporsi kursi yang di duduki perempuan di DPRD	8%	8%	8%
3.	Rasio KDRT	0,03%	0,02%	5,59%
4.	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Di Bawah Umur	0,07%	0,06%	4,5%
5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	60,10%	60,10%	54,68%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2018

Berdasarkan tabel di atas untuk partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2018 menurun jadi 8,92, salah satu penyebab karena sudah banyaknya pegawai pemerintah yang pensiun. Sedangkan untuk proporsi kursi yang di duduki perempuan di DPRD Kota Bukittinggi tetap sama dari tahun 2016 sampai tahun 2018, dan keterlibatan perempuan di DPRD masih tergolong sedikit. Dari 25 orang anggota DPRD hanya 2 orang perempuan yang menjadi anggota DPRD.

Untuk Rasio KDRT di Kota Bukittinggi, dapat dilihat meningkat dengan persentase 5,59%, hal ini disebabkan karena sudah banyaknya pengaduan yang disampaikan kepada P2TP2A sekaitan terhadap KDRT

yang terjadi di masyarakat Kota Bukittinggi. Ini pun tidak lepas dari peran P2TP2A dan Dinas P3APPKB yang telah melaksanakan fungsinya dengan melaksanakan fungsinya dengan melaksanakan sosialisasi mengenai KDRT yang dialami dan hal apa saja yang harus dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya untuk partisipasi angkatan kerja perempuan berada di angka 54,68%. Dari keseluruhan angka indikator tabel di atas dapat dilihat secara umum keterlibatan perempuan di berbagai unsur sudah mulai banyak, hal ini menandakan bahwa pemberdayaan perempuan di Kota Bukittinggi sudah cukup baik.

c. Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dari pengertian tersebut maka menjadi kewajiban Negara dalam mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya.

Ketersediaan Pangan Utama

Sebagai daerah perkotaan, Kota Bukittinggi masih memiliki lahan untuk pertanian meskipun agak terbatas luasnya. Dari 3 (tiga) kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi, kecamatan Mandiangin Koto Selayan yang mempunyai lahan pertanian yang lebih luas dibanding 2 (dua) kecamatan lainnya.

Ketersediaan pangan utama (beras) Kota Bukittinggi untuk tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.48.
Ketersediaan Pangan Utama
Kota Bukittinggi Tahun 2013 s.d. 2017

NO	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah penduduk	118.260	120.469	122.621	124.715	119.183
2.	Produksi Padi	4.463,33	5.053,18	4.200	5.227	5.444,82
3.	Ketersediaan pangan utama (rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)/jumlah penduduk x 10%)	3,77	4,19	3,43	4,19	4,57

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2018

Dari tabel diatas jumlah Produksi Padi pada tahun 2017 di Kota Bukittinggi sebanyak 5.444,82 Ton/tahun, jumlah ini sebagian besar diproduksi dari sentra pertanian yang masih cukup luas yaitu berada di kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

Namun ketersediaan pangan di Kota Bukittinggi sekitar 75%-78% masih tergantung dari daerah di luar Kota Bukittinggi, hanya 21%-24% berasal dari produksi sendiri. Untuk menjaga ketahanan pangan di Kota Bukittinggi, sejak tahun 2011 Pemerintah Kota telah melaksanakan berbagai kegiatan baik dengan cara mandiri maupun bekerjasama dengan daerah sekitar. Selain sebagai salah satu upaya ketahanan pangan, sawah abadi juga diperuntukan bagi perluasan ruang terbuka hijau. Penyediaan pangan di Kota Bukittinggi hingga saat ini masih terkendala oleh beberapa faktor diantaranya: (i) keterbatasan lahan, (ii) anomali iklim dan (iii) bencana banjir.

Dalam upaya penyediaan pangan secara mandiri dan keberlanjutan, diperlukan adanya terobosan program melalui konsep berkebun di pekarangan rumah atau pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami tanaman produktif (*Urban Farming* atau Kawasan Rumah Pangan Lestari), intensifikasi lahan, menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Selain itu juga yang harus menjadi perhatian adalah mengenai pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan terpenuhinya cadangan pangan di kota Bukittinggi.

d. Pertanahan

Urusan pertanahan merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi. Sebagai unit kerja baru, bidang pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pelayanan dan penyelenggaraan di bidang pertanahan. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur capaian sasaran urusan pertanahan antara lain adalah persentase tanah bersertifikat, penyelesaian permasalahan/ sengketa tanah dan penyelesaian izin lokasi. Per 31 Desember 2018 tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebanyak 424 persil tanah dengan luas 4.248.361.859,76 M2 berupa tanah bangunan gedung, tanah jalan dan tanah kosong yang tidak dimanfaatkan. Dari total 424 persil tanah yang dikuasai, sebanyak 171 persil dengan luas 358,215 .M2 telah memiliki sertifikat dan sebanyak 253 persil dengan luas 4.248.003.644,76 M2 belum memiliki sertifikat.

e. Lingkungan Hidup

Kinerja pembangunan di Kota Bukittinggi pada pelayanan urusan lingkungan hidup di Kota Bukittinggi dapat dilihat dari indikator penanganan sampah dan persentase penduduk berakses air minum. Semakin besarnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat menuntut peran serta masyarakat untuk dapat memusnakan sampah dengan cara yang ramah lingkungan. Berikut gambaran perkembangan pelayanan bidang lingkungan hidup sebagaimana uraian berikut:

1) Persentase penanganan sampah

Sampah merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh setiap kota yang sedang berkembang. Penanganan sampah yang tidak tepat dan tidak terkendali akan menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus konsisten dan memiliki komitmen yang

tegas terhadap pengelolaan sampah tersebut. Upaya yang dilakukan secara rutin yaitu penyuluhan kepada masyarakat, pemasangan spanduk, billboard di lokasi TPS dan di kelurahan, bahkan razia yang dilakukan bersama tim Gabungan. Kondisi kota Bukittinggi yang memiliki 3 Pasar yang cukup besar serta jumlah penduduk yang cukup padat untuk skala kota kecil, memiliki volume sampah yang cukup banyak setiap harinya yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.49.
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah
Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah sampah yang ditangani (m3)	271.089	*	412	426	578,96
2.	Jumlah volume produksi sampah (m3)	108.73	*	432	448	682,16
3.	Persentase	90	*	95,37 %	95,08%	84,87 %

Sumber: Dokumen Review Master Plan Persampahan 2018

* Data tidak tersedia

Dilihat dari tabel di atas, semenjak tahun 2014 volume sampah cenderung meningkat setiap tahunnya. Peningkatan volume sampah ini terjadi karena produksi sampah tersebut tidak hanya berasal dari masyarakat Kota Bukittinggi itu sendiri tapi juga merupakan sampah “ekspor” dari masyarakat yang ada disekitar Kota Bukittinggi, seperti daerah tetangga.

Penyebab lain dari tingginya produksi sampah ini adalah produk yang dikonsumsi masyarakat semuanya memakai kemasan baik itu berupa plastik, kertas, karton dll. Dilihat dari Jumlah persentase produksi sampah yang selalu meningkat setiap tahunnya. Untuk itu di Kota Bukittinggi diperlukan peran serta masyarakat dalam penanganan sampah terutama pengolahan sampah organik menjadi kompos dan daur ulang sampah dan organik menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis sehingga bisa menambah income/pendapatan masyarakat.

Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam penanganan sampah karena masyarakat itu sendiri belum disiplin terhadap penanganan sampah, seperti tidak disiplin membuang sampah pada jam-jam yang sudah ditentukan pada setiap TPS, membuang sampah tidak meletakkan pada bak yang sudah disediakan. Disamping itu budaya malu untuk membuang sampah sembarangan juga belum ada baik masyarakat kota Bukittinggi maupun pengunjung yang masuk ke Kota Bukittinggi.

2) Persentase cakupan area pelayanan

Sumber timbulan sampah Kota Bukittinggi ada beberapa macam yaitu sampah rumah tangga, sampah taman, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah kawasan wisata, sampah terminal, dan sampah pusat keramaian lain. Penanganan sampah di Kota Bukittinggi masih menjadi permasalahan karena Kota Bukittinggi tidak memiliki TPA sendiri dan memanfaatkan TPA regional yang lokasinya berada di Kota Payakumbuh dengan

jarak lebih kurang 45 Km dari Kota Bukittinggi dengan jarak tempuh sekitar 1 jam perjalanan. Sistem pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi menggunakan cara:

1. Pengumpulan, pewadahan, dan pengangkutan ke TPA Regional.
2. Pengumpulan, kegiatan yang dilakukan masyarakat mengangkut sampah dari rumah ke TPS/kontainer sebagai wadah sampah, kemudian pengumpulan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan di jalan dan tempat-tempat umum.
3. Pengangkutan dari TPS/ kontainer sampah oleh petugas kebersihan dengan kendaraan truk sampah.
4. TPA adalah tempat pembuangan akhir sampah di Kota Payakumbuh dalam upaya pelayanan dibidang persampahan

Daerah pelayanan untuk persampahan Kota Bukittinggi adalah semua cakupan wilayah pemerintah Kota Bukittinggi. Untuk area daerah pelayanan sektor persampahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.50.
Daerah Pelayanan Sektor Persampahan
Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km ² /Ha)	2523,9 Ha				
2.	Luas area kota (Ha)	2523,9 Ha				
3.	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa cakupan pelayanan persampahan sudah menjangkau 24 kelurahan.

3) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Rasio Tempat Pembuangan sampah menunjukkan perbandingan jumlah tempat pembuangan sampah dan daya tampungnya terhadap jumlah penduduk. Semakin tinggi rasionya berarti kinerja pembangunan Dinas Lingkungan Hidup serta SKPD terkait lainnya dalam penyediaan sarana persampahan semakin baik dalam meningkatkan keindahan dan kenyamanan kota. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.51.
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk
Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah daya tampung TPS	262,5	405,1	243,1	136,72	186,6
2	Jumlah Penduduk	120.491	122.621	124.715	126.804	129.521
3	Persentase	0,22%	0,33%	0,19%	0,10 %	0,144%

Sumber: BDA 2017

Berdasarkan tabel diatas rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk pada tahun

2014-2018 ada kecenderungan menurun sebagai akibat pengolahan sampah oleh masyarakat terutama untuk sampah rumah tangga menjadi sampah organik justru mulai meningkat karena adanya program pengolahan sampah rumah tangga dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian Kota Bukittinggi, namun pada tahun 2018 ada peningkatan jumlah daya dukung TPS terutama daya tampung TPS kembar Fiber yang ditempatkan di fasilitas umum.

Berdasarkan kondisi dilapangan pada 2014-2015 terakhir ini yaitu adanya pengurangan jumlah TPS dilapangan serta adanya razia terhadap masyarakat yang membuang sampah diluar jadwal yang telah ditetapkan. Pembongkaran TPS ini dilakukan karena adanya keresahan masyarakat terhadap perilaku warga yang berasal dari luar Kota Bukittinggi yang membuang sampah ke TPS secara sembarangan, sehingga banyak sampah yang berserakan dan bertaburan hingga ke jalan yang membuat pemandangan kurang baik di sekitar TPS. Selain itu dengan adanya razia-razia yang dilakukan oleh petugas dan warga disekitar TPS diharapkan tidak ada lagi warga yang membuang sampah sembarangan dan memberikan efek jera terhadap warga yang berasal dari luar Kota Bukittinggi. Untuk kedepannya diharapkan adanya kerjasama antara pemerintah Kota Bukittinggi dengan pemerintah Kabupaten Agam dalam penanganan sampah untuk daerah disekitar Kota Bukittinggi

Namun pada tahun 2018 adanya penambahan beberapa TPS kembar Fiber yang tersebar pada fasilitas umum, seperti disepanjang trotoar/pendestrian jalan utama dan pada Ruang Terbuka Publik (Taman Kota), dengan adanya penambahan TPS Kembar Fiber ini sangat membantu dalam pengelolaan sampah terutama di fasilitas umum.

4) Kualitas Air Sungai

Pada tahun 2017 Dinas Lingkungan Kota Bukittinggi melakukan pemantauan terhadap 2 (dua) sungai yakni Sungai Batang Agam dan Sungai Batang Tambuo masing-masingnya pada hulu dan hilir. Batang Agam merupakan salah satu sungai di Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan status mutunya melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penetapan Klasifikasi Mutu Air Sungai Batang Agam, Batang Pangian, dan Batang Lembang. Berdasarkan Pergub tersebut, mutu air Batang Agam dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu mutu kelas I yakni pada segmen hulu dan rentang sungai, dan mutu kelas II, pada segmen hilir sungai.

Berdasarkan analisis laboratorium ditemukan hasil analisis yang tidak memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penetapan Kriteria Mutu Air Sungai di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 17.1. Hasil analisa sampel air yang dilakukan di laboratorium dan pengujian langsung di lapangan, dapat dilakukan evaluasi sesuai baku mutu air. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa sungai-sungai yang mengalir di Kota Bukittinggi telah menunjukkan indikasi pencemaran, terutama untuk parameter mikrobiologi.

Hal ini mengindikasikan adanya tekanan yang tinggi dari sektor domestik. Pengukuran status mutu air sungai di Kota Bukittinggi dilakukan terhadap 8 (delapan) parameter, yaitu TSS, TDS, BOD, COD, Total Phospat, Fenol, E.Coli dan Total Coliform. Penentuan status mutu air sungai mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Berdasarkan Metode Storet diketahui status mutu air sungai Batang Agam dan Batang Tambuo sudah dalam kondisi Cemar Berat dengan skor mutu Batang Agam -59 dan Batang Tambuo adalah -52.

Hampir di semua titik pengambilan sampel kualitas BOD Sungai Batang Agam berada di atas baku mutu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008, baik di bagian hulu sungai maupun hilir sungai kecuali pemantauan pada periode IV (11 Desember 2017). Titik pantau yang memiliki kualitas paling buruk dilihat dari parameter BOD adalah hilir sungai (by Pass) pada periode pemantauan II (25 Juli 2017) yakni dengan hasil analisis 18,1 mg/l sedangkan baku mutu BOD adalah 3 mg/l, sedangkan kandungan BOD terendah yakni pada hilir sungai (by Pass) pada periode pemantauan II dengan kandungan BOD 1,02 mg/l.

Sedangkan kualitas Batang Tambuo menunjukkan hampir di semua titik pengambilan sampel kualitas BOD memenuhi baku mutu yang diperbolehkan, baik di bagian hulu sungai maupun hilir sungai. Badan air yang memiliki kualitas paling buruk dilihat dari parameter BOD adalah Sungai Batang Tambuo di daerah Kelurahan Aur Kuning yaitu 3,12 mg/L.

Seiiring dengan kandungan BOD, kandungan COD yang dianalisa pada hampir semua periode pengambilan sampel air sungai Batang Agam di Kota Bukittinggi menunjukkan hasil melebihi baku mutu, kecuali pemantauan pada periode III (4 Oktober 2017). Kandungan COD tertinggi ditemukan pada pemantauan periode II (25 Juli 2017) di lokasi pemantauan hilir (by pass). Berdasarkan analisis laboratorium diketahui kandungan COD pada titik tersebut adalah 65,8 mg/l sedangkan baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 adalah 25 mg/l. Kandungan COD pada periode ini terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan hasil analisis bagian hulu sungai.

Tingginya pertumbuhan penduduk maka akan menyebabkan tekanan terhadap kualitas lingkungan juga semakin tinggi. Hal ini tentunya juga berdampak terhadap peningkatan pemanfaatan sumber daya air. Pemanfaatan sumber daya air ini akan menimbulkan permasalahan baru yaitu dengan adanya limbah cair yang dihasilkan. Selain peningkatan jumlah penduduk yang berbanding lurus dengan jumlah limbah cair yang dihasilkan sebagai akibat dari adanya kegiatan domestik rumah tangga, juga terdapat kegiatan-kegiatan lainnya yang berperan dalam penurunan kualitas air seperti aktifitas pertanian, rumah sakit, puskesmas, sekolah, rumah makan/restoran, perbengkelan, pasar dan kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di Kota Bukittinggi. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas menghasilkan limbah cair dan padat yang masuk ke lingkungan dalam hal ini masuk ke sungai sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran air.

5) Kualitas Udara

Udara merupakan suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi. Udara merupakan sumber daya alam yang berpengaruh bagi kehidupan di bumi yang harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya. Pencemaran udara dapat terjadi apabila terdapat satu atau lebih kontaminan atau substansi fisik, kimia, atau biologi (debu, jelaga, gas, kabut, bau, asap, uap dll) di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan, juga mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti.

Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional, maupun global. Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.

Kualitas udara ambien adalah kadar zat, energi dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas. Kualitas udara ambien tergantung konsentrasi zat- pencemar baik berupa gas maupun partikel debu di udara. Penurunan kualitas udara ambien, terutama pada jam-jam sibuk di jalan padat lalu-lintas. Pencemaran udara dapat berasal dari sumber pencemar seperti:

- a. Sumber pencemar yang bergerak (aktifitas transportasi)
- b. Sumber pencemar yang tidak bergerak (aktifitas kegiatan usaha/ industri)
- c. Sumber pencemar dari pembakaran sampah
- d. Sumber pencemar aktifitas rumah tangga

Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Perlindungan mutu udara ambien adalah upaya yang dilakukan agar udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya.

Untuk mengetahui terjadinya pencemaran udara yang mengakibatkan turunnya kualitas udara perlu dilakukan upaya pemantauan kualitas udara secara berkala dan terus menerus sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pemantauan kualitas udara ambien tahun 2016 telah dilaksanakan oleh Bapedalda Provinsi Sumatera Barat. Kota Bukittinggi merupakan salah satu kabupaten/kota yang menjadi titik pantau. Titik pantau di Kota Bukittinggi berlokasi di Tugu Monumen Polisi Wanita mewakili kawasan padat lalu lintas. Pemantauan dilakukan terhadap 5 (lima parameter pada masing-masing titik pantau yaitu SO₂, NO₂, CO, O₃ dan TSP dan Pb (untuk kawasan padat lalu lintas).

Berdasarkan hasil analisa laboratorium, kondisi udara di Kota Bukittinggi untuk semua parameter baik SO₂, NO₂, CO, O₃ dan TSP dan Pb masing tergolong baik karena hasil analisa laboratorium untuk masing-masing parameter berada dibawah baku mutu.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Pemerintah Kota Bukittinggi berada dibawah kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas ini telah dibentuk sejak tahun 2008, dimana sebelumnya hanya merupakan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selama 5 (lima) tahun terakhir penduduk Kota Bukittinggi selalu meningkat. Begitu juga dengan perkembangan penduduk laki-laki, yang cenderung selalu melihatkan angka kenaikan. Kelompok umur mayoritas terlihat pada kelompok umur laki laki 0-4 tahun, yakni 6.400 jiwa dan disusul kelompok umur laki laki usia 15-19 tahun, yaitu sejumlah 5.921 jiwa. Jika kita kaji pada dua kelompok tersebut, maka ini artinya, bahwa pemerintah daerah harus banyak memberikan perhatian pada ibu dan bayi. Memperbanyak fasilitas pendidikan kelompok usia dini agar semua murid laki laki tersebut dapat mengikuti pendidikan di usia dini, yang akan menjadi cikal bakal kelompok produktif sebagaimana terkenal dengan bonus demografi.

1) Rasio Penduduk yang ber-KTP per satuan Penduduk

Dari Sistem aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) secara online dan berbasis internet serta *Single Identity Number* dapat digunakan sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat atas berbagai macam kebutuhan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Kartu tanda penduduk yang mempunyai nomor induk kependudukan tunggal merupakan salah satu bukti kependudukan suatu wilayah. Salah satu indikator dalam pengendalian penduduk adalah seberapa jauh kesadaran masyarakat untuk memiliki dan melengkapi administrasi kependudukannya antara lain dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk. Untuk itu Pemerintah Pusat telah menetapkan KTP secara elektronik yang terkoneksi dalam *data based* di tingkat nasional.

Jumlah penduduk yang memiliki KTP dan jumlah penduduk yang wajib KTP dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.52.
Rasio Penduduk yang Telah Memiliki KTP dan Penduduk yang Wajib Tahun 2013 s.d 2018 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Penduduk yang telah memiliki KTP	30.645	48.108	66.375	73638	78141	81723
2	Penduduk wajib KTP	53.294	85.071	85.666	81.345	82.723	84.845
3	Rasio	57,50	56,55	77,48	90.5	94.5	96.32

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dari data yang ada terlihat, bahwa dari tahun ke tahun masih ada penduduk usia wajib KTP yang belum mempunyai KTP, dengan rasionya relatif meningkat setiap tahun. Idealnya penduduk yang wajib KTP sama dengan penduduk yang telah memiliki KTP. Pada tahun 2017 dan 2018 tergambar bahwa rasio penduduk

yang telah memiliki KTP terhadap penduduk yang wajib KTP semakin meningkat. Pada tahun 2018 terlihat rasionya adalah 96,32.

Untuk menindaklanjuti hal di atas, peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus ditingkatkan. Dalam hal ini, dengan memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya melengkapi administrasi kependudukan antara lain KTP, melakukan razia kependudukan, serta memperbanyak himbauan kepada seluruh stakeholder kota agar menyertakan persyaratan KTP dalam setiap pengurusan administrasi. Kerjasama seluruh elemen kota sangat diperlukan dan saling bersinergi untuk meningkatkan kesadaran tentang wajib KTP bagi setiap penduduk usia wajib KTP dimaksud. Jika hal ini telah terlaksana dengan baik maka siapa dan dimanapun berada dapat dipantau dengan adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan basis nomor induk kependudukan secara tunggal.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki tujuan untuk meningkatkan peran sarana dan prasarana yang ada, meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga miskin, meningkatkan sumber daya manusia dan memberdayakan masyarakat secara aktif untuk bergotong royong.

1) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis.

Perkembangan lebih lengkap dasa wisma dapat dilihat ada tabel berikut :

Tabel 2.53.
Jumlah Kelompok Dasa Wisma Tahun 2013 s.d. 2018
Kota Bukittinggi

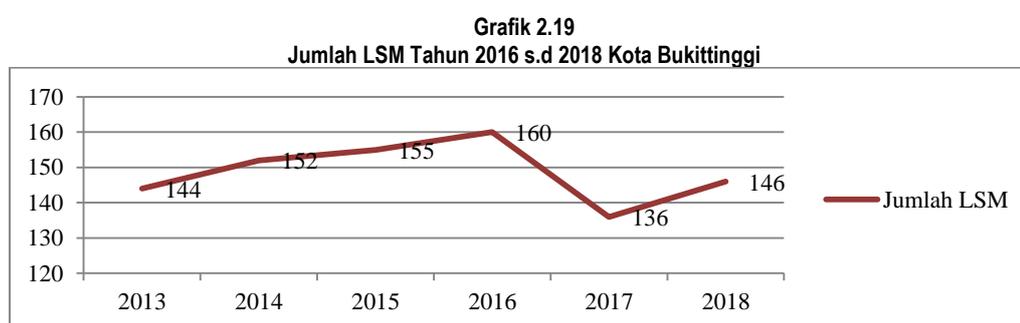
NO	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Mandiangan Koto Selayan	425	425	425	425	425	425
2.	Guguak Panjang	388	388	388	388	388	388
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	288	288	288	288	288	288

Sumber: TP PKK Kota Bukittinggi

Kelompok Dasawisma inilah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dibawah naungan PKK untuk menyampaikan pesan program dan kegiatan. Untuk mengaktifkan fungsi dan kualitas Dasawisma ini diperlukan peran masyarakat dan pemerintah. Perkembangan kelompok dasawisma dari tahun ketahun di Kota Bukittinggi relatif tetap, dan sesuai dengan jumlah penduduk, maka kelompok dasawisma terbanyak terdapat ada Kecamatan Mandiangin Koto Salayan yakni 425, disusul Kecamatan Guguk Panjang 388 dan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 288. Kelompok ini dibentuk dalam 10 rumah tangga menjadi 1 Dasawisma pada setiap kelurahan. Peran wanita sebagai ibu rumah tangga diupayakan untuk terus meningkat dan berperan sebagai mitra sejajar pria dalam pembangunan, maka melalui kelompok dasawisma ini merupakan salah satu bentuk peningkatan peran perempuan.

2) Jumlah LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat (disingkat LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari Bahasa Inggris dikenal juga sebagai Organisasi Non Pemerintah (Ornop). LSM menjalankan berbagai jasa dan fungsi kemanusiaan, membawa keprihatinan dalam masyarakat kepada pemerintah, memonitor berbagai kebijakan dan mendorong partisipasi politik dalam tataran masyarakat. Berikut data Jumlah LSM yang ada di Kota Bukittinggi.



Sumber : Dinas Kesbangpol

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah LSM mengalami peningkatan pada tahun 2018, hal ini dikarenakan pada tahun 2018 Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik menerima banyak permintaan untuk pendaftaran LSM baru yang muncul. Sehingga berdampak terhadap peningkatan jumlah LSM di Kota Bukittinggi.

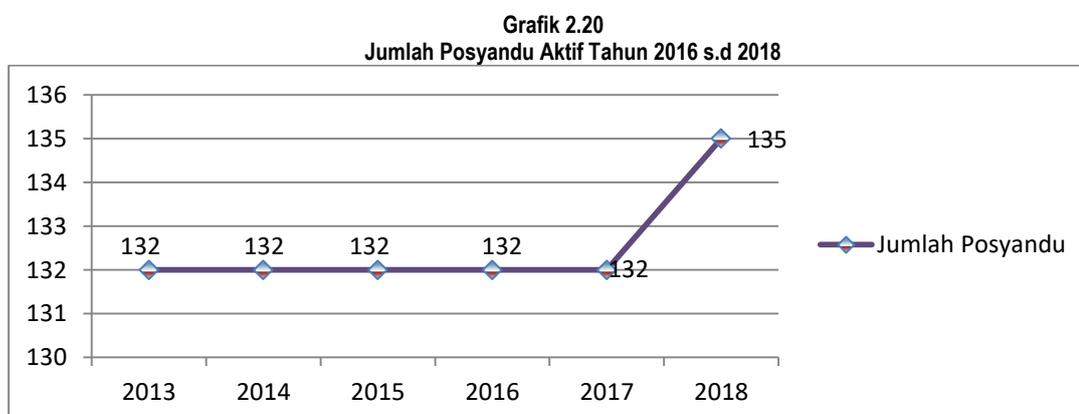
3) PKK Aktif

Tim Pengerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) merupakan partner Pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat. Jangkauan wilayah kerja PKK mulai di tingkat Kota sampai dengan Dasawisma. Dalam hal pemberdayaan kesejahteraan keluarga, PKK bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Jumlah Tim Pengerak PKK di Kota Bukittinggi berjumlah 28 (dua puluh delapan), yang terdiri dari 1 (satu) TP PKK tingkat Kota, 3 (tiga) TP PKK tingkat kecamatan dan 24 (dua puluh empat) TP PKK tingkat kelurahan. Semua TP PKK yang ada di Kota Bukittinggi berjalan dengan aktif dan lancar.

4) Posyandu Aktif

Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu adalah kegiatan kesehatan yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat, yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu ini merupakan kegiatan swadaya masyarakat dibidang kesehatan yang berada pada kelurahan-kelurahan. Posyandu ini lebih difokuskan kepada pelayanan kesehatan balita meliputi imunisasi, timbang berat badan, menyediakan makan suplemen dll. Hal ini sangat penting dilakukan dalam meningkatkan angka harapan hidup bayi. Tenaga kesehatan atau sukarelawan pada posyandu telah mendapat pelatihan dari Dinas Kesehatan untuk memberikan pelayanan dan panduan bagi ibu hamil, bayi dan ibu menyusui. Selain itu Posyandu juga memberikan makanan suplemen kepada bayi dan Balita. Posyandu ini juga berfungsi sebagai pendeteksi dini terhadap perkembangan kesehatan ibu, bayi dan anak.

Jumlah pos yandu aktif yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan adalah sebagai berikut :



Sumber : Dinas Kesehatan

Terlihat pada data berikut, jumlah pos yandu aktif konstan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, jumlah yang konstan lebih diarahkan dengan peningkatan kualitas dari pos yandu yang telah ada. Harapan yang terpenting adalah bagaimana kelompok Dasawisma dapat meningkatkan dan menggerakkan kegiatan posyandu, agar kualitas posyandu dapat maksimal, dan berdampak pada peningkatan perkembangan kesehatan ibu, bayi dan anak. Namun sedikit peningkatan terjadi di tahun 2018 yaitu menjadi sebanyak 135 posyandu. Terbentuknya tambahan posyandu ini adalah bertujuan untuk maksimalnya layanan kesehatan ibui dan anak yang diterima oleh masyarakat.

f. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga merupakan salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana. Rata-rata jumlah anak juga menentukan tingkat kesejahteraan keluarga. Menurut data statistik Kota Bukittinggi tahun 2016 jumlah anak-anak sebanyak 29.375 jiwa dan jumlah rumah tangga adalah 28.616 jiwa, rata-rata

jumlah anak per keluarga adalah 1 s.d. 2 orang per keluarga. Besarnya jumlah masyarakat yang berhasil diajak berkeluarga berencana merupakan salah satu sasaran program KB. Hal ini menggambarkan bahwa program keluarga berencana telah hampir mencapai sasarnya yaitu 2 orang anak lebih baik. Selain itu juga digalakkannya program KB untuk laki-laki, merupakan salah satu faktor dalam keberhasilan dalam menurunkan angka pertambahan penduduk.

2) Rasio Akseptor KB

Rasio Akseptor KB menggambarkan adanya pengendalian terhadap jumlah penduduk. Rasio Akseptor KB dihitung dengan membandingkan jumlah akseptor KB dengan pasangan usia subur mulai dari umur dibawah 20 tahun sampai umur 49 tahun.

Tabel 2.54.
Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2017 dan 2018
Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	Jumlah PUS	Peserta KB Baru	Rasio (%)	Peserta KB Aktif	Rasio
	Tahun 2017					
1	Guguk Panjang	5932	1550	26.13	3784	63.79
2	Mandiingin Koto Selayan	6943	1382	19.90	4325	62.29
3	Aur Birugo Tigo Baleh	3580	932	26.03	2387	66.68
	Total	16455	3864	23.48	10496	63.79
	Tahun 2018					
1	Guguk Panjang	5927	1461	24.65	3834	64.69
2	Mandiingin Koto Selayan	7049	1743	24.72	4448	63.10
3	Aur Birugo Tigo Baleh	3445	377	10.94	2363	68.6
	Total	16421	3581	21.81	10645	64.83

Sumber : Dinas DP3APPKB

Pada tahun 2018 tercatat jumlah akseptor KB yang aktif sebanyak 10.645 orang, sedangkan jumlah pasangan usia subur berjumlah 16.421 pasang. Rasionya adalah 64,83. Dapat diartikan bahwa terdapat sebanyak 64,83% Pasangan Usia Subur menjalani program KB dan aktif menjadi akseptor KB. Semakin tinggi persentase angka absolutnya berarti program KB semakin dipahami dan dibutuhkan oleh masyarakat. Namun sebenarnya program KB ini harus dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat secara maksimal. Agar usaha ini berhasil maka program KB perlu didukung dengan kegiatan-kegiatan tambahan lainnya yang lebih efektif.

h. Perhubungan

Transportasi merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam menentukan laju pertumbuhan soaial dan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu pengelolaan sarana transportasi menjadi sektor penunjang berkembangnya sektor-sektor lainnya. Kelancaran, kenyamanan, biaya yang terjangkau serta aksesibilitas tinggi merupakan aspek pelayanan transportasi yang diharapkan masyarakat. Berdasarkan alasan diatas, maka kinerja pelayanan urusan perhubungan di kota Bukittinggi tahun 2019 dapat dilihat dari beberapa

indikator yaitu jumlah arus penumpang angkutan umum, Rasio Izin Trayek, Jumlah Uji Keur Angkutan Umum, Jumlah Terminal Bis, Pemasangan rambu-rambu dan Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan.

1) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Dengan wilayah seluas ± 25 Km², dalam pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa angkutan telah dibentuk/ditetapkan trayek angkutan kota sebanyak 24 trayek dengan 539 unit kendaraan yang melayani trayek dalam Kota Bukittinggi. Untuk angkutan pedesaan yang memasuki Kota Bukittinggi yang diberikan dispensasi perpanjangan izin karena masyarakat Agam Timur pada umumnya beraktifitas di Kota Bukittinggi dan pertumbuhan angkutan pedesaan ini sangat sulit dikendalikan. Sedangkan untuk kendaraan angkutan barang Bukittinggi belum mempunyai terminal angkutan barang sampai saat ini, angkutan barang memanfaatkan Jalan M. Syafei dan sepanjang jalan By Pass untuk melakukan aktivitas bongkar muat. arus penumpang angkutan umum Kota Bukittinggi dapat kita lihat dalam tabel berikut:

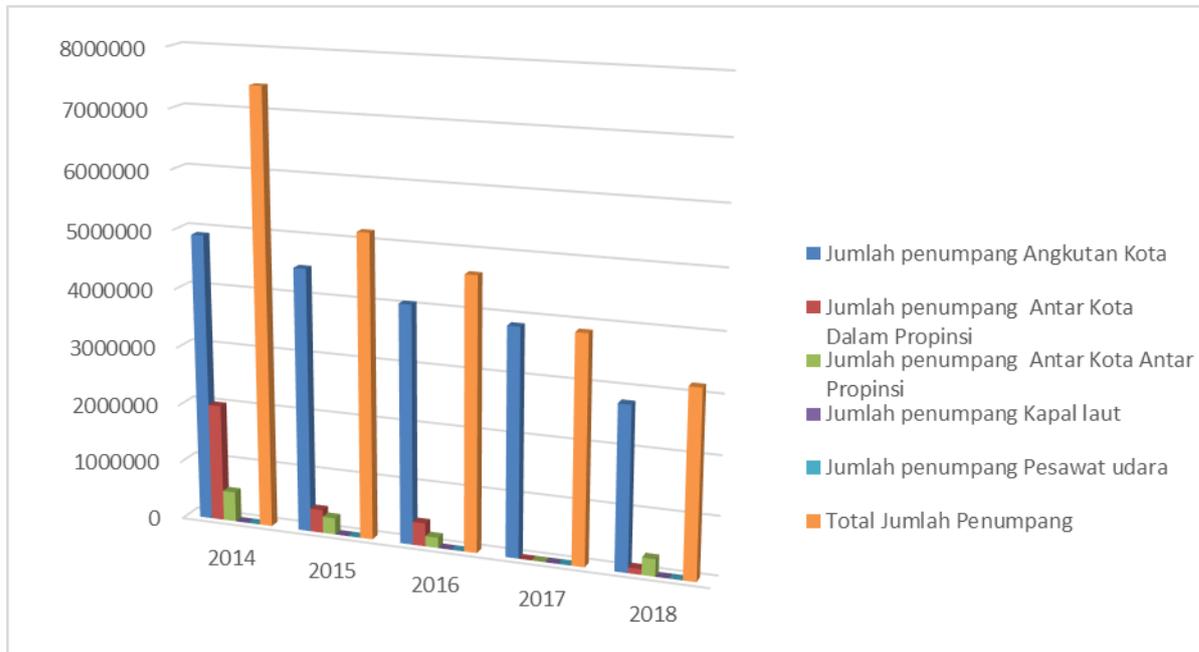
Tabel 2.55.
Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2014 s.d. 2018
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah penumpang Angkutan Kota	4.904.600	4.496.800	4.062.450	3.869.000	2.788.740
2.	Jumlah penumpang Antar Kota Dalam Propinsi	2.005.866	396.846	396.846	-	96.336
3.	Jumlah penumpang Antar Kota Antar Propinsi	514.725	284.528	284.528	-	294.098
4.	Jumlah penumpang Kapal laut	0	0	0	0	0
5.	Jumlah penumpang Pesawat udara	0	0	0	0	0
6.	Total Jumlah Penumpang	7.425.191	5.178.174	4.636.973	3.869.000	3.179.174

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2019, Dinas Perhubungan Tahun 2019 dan Terminal Tipe A Tahun 2019

Di Kota Bukittinggi terdapat 1 terminal tipe A yang melayani penumpang bus antar kota dan antar provinsi pada satu terminal dengan penumpang bis yang pada tahun 2016 telah diambil alih pengelolaannya oleh Kementerian Perhubungan, sementara itu untuk melayani angkutan kota dan angkutan pedesaan yang berasal dari utara Kota Bukittinggi memiliki Terminal Tipe C yang berada di Wowo yang lebih dikenal dengan Terminal Wowo.

Grafik 2.21
Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2014-2018



Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2018, Dinas Perhubungan Tahun 2019 dan Terminal Tipe A Tahun 2019

Penumpang angkutan umum Antar Kota Dalam Propinsi dan Antar Kota Antar Propinsi tidak dapat di data pada tahun 2017 karena transisi kewenangan pengelolaan terminal Tipe A antara Kota Bukittinggi dan Kementerian Perhubungan.

Kecenderungan penurunan jumlah penumpang angkutan Umum dipengaruhi oleh menjamurnya angkutan Daring dan taxi online seperti Gojek dan Grab, yang sampai saat ini belum ada aturannya angkutan daring terdaftar sebagai angkutan umum resmi.

Pelayanan urusan perhubungan di Kota Bukittinggi hanya melayani angkutan darat saja sementara untuk angkutan kereta api, kapal laut dan pesawat udara tidak ada di Bukittinggi. Disamping angkutan umum juga ada angkutan sewa pribadi berupa travel / carteran yang juga berkembang pesat di Kota Bukittinggi.

2) Rasio Izin Trayek

Untuk melayani masyarakat Kota Bukittinggi, semenjak tahun 2013-2018 tidak terdapat penambahan jumlah trayek, walaupun terjadi penambahan jumlah penduduk. Hal ini disebabkan luas wilayah perkotaan kecil, sehingga sudah terlayani dengan trayek yang ada. Jumlah trayek dan perkembangan jumlah penduduk semenjak tahun 2013-2018 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56.
Rasio Izin Trayek Tahun 2014 s.d. 2018
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Izin Trayek perkotaan	24	24	24	24	24
2.	Jumlah penduduk	120.469	122.621	124.715	126.804	121.590
3.	Rasio Izin Trayek	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2019

Dari tahun 2014 hingga tahun 2018 tidak terjadi peningkatan izin trayek yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Perhubungan, ini berarti tidak ada pembukaan trayek angkutan umum baru di dalam Kota Bukittinggi.

3) Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Pengawasan dan penerapan pengujian KIR angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi merupakan serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Uji KIR kendaraan umum ini dilakukan setiap 6 bulan sekali atau dengan artian 1 (satu) kendaraan umum akan melakukan uji KIR sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

Uji KIR ini harus diperketat demi mengantisipasi terjadinya kecelakaan angkutan umum. Hal ini untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan angkutan umum. Angkutan umum ini yang wajib uji KIR meliputi mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang yang digunakan untuk transportasi umum yang ditandai dengan warna kuning pada plat kendaraan. Perkembangan angkutan umum melakukan uji KIR dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.57.
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum
Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Angkutan umum	742	917	1.218	1.177	1.088
2.	Jumlah Uji Kir	917	1.218	1.177	1.088	1.077
RASIO		123,58	132,82	96,63	85,64	106,85

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2019

Dari tabel diatas dengan membandingkan jumlah kendaan umum yang melaksanakan uji KIR pada tahun sebelumnya dengan yang melaksanakan uji KIR pada tahun berjalan, terlihat bahwa persentase kendaraan umum yang melakukan uji kir pada tahun 2018 adalah sebanyak 106,85%. Dalam hal ini terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR di UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi merupakan bukti

tingginya partisipasi warga Kota Bukittinggi dalam memeriksakan kelayakan kendaraannya. Peningkatan jumlah kendaraan yang uji KIR juga akibat adanya kendaraan yang numpang uji dari Kabupaten Kota lain ke UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang uji KIR ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan raya.

4) Jumlah Pelabuhan Laut / Udara / Terminal Bis

Di Kota Bukittinggi tidak terdapat pelabuhan laut dan pelabuhan udara, sementara untuk terminal bis hanya terdapat 1 (satu) terminal, yaitu terminal tipe A Simpang Aur, dan Terminal tipe C di Wowo yang merupakan terminal angkutan kota dan angkutan pedesaan. Jumlah terminal bis, Pelabuhan Laut dan udara dari tahun 2013–2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58.
Jumlah Pelabuhan Laut / Udara / Terminal Bis
Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah pelabuhan laut	-	-	-	-	-
2.	Jumlah pelabuhan udara	-	-	-	-	-
3.	Jumlah terminal bis	1	1	1	1	1
JUMLAH		1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2019

Semenjak tahun 2016 terminal Simpang Aur telah diserahkan ke Pemerintah Pusat karena Terminal Tipe A merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga pada tahun 2018 memiliki 1 (satu) terminal yaitu terminal tipe C di Wowo yang merupakan kewenangan kota Bukittinggi.

5) Jumlah Pemasangan Rambu-rambu

Rambu-rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2014.

Tabel 2.59.
Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah pemasangan rambu-rambu	350	423	608	621	956
2.	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	600	600	1.000	1.500	1.500
Persentase		58%	71%	61%	41,4%	44%

Sumber: Dinas Perhubungan tahun 2019

Jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas di kota Bukittinggi yang tercatat menurut data-data dari Dinas Perhubungan adalah 956 untuk Jumlah pemasangan rambu-rambu, 1,500 untuk Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia.

6) Rasio Panjang Jalan Per jumlah Kendaraan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Dibawah ini adalah tabel yang menampilkan panjang jalan yang adalah di kota Bukittinggi dengan jumlah kendaraan yang melewatinya.

Tabel 2.60.
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Panjang jalan	198,18	198,18	198,18	155.683	180.17
2.	Jumlah kendaraan	34.238	35.897	42.680	38.941	38.300
Persentase		0.58	0.55	0.46	0.40	0.47

Sumber: : Bukittinggi Dalam Angka 2015-2017, Dinas Perhubungan Tahun 2019

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan yang melintasi ruas jalan di kota Bukittinggi di tahun 2018 adalah 0,47 % dengan panjang jalan 180.17 km dan Jumlah kendaraan 38.300 unit.

i. Komunikasi Dan Informatika

Komunikasi dan Informatika merupakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi. Penyelenggaraan urusan ini telah menunjukkan capaian kinerja seperti yang sudah diprogramkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan program tahunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.

7) Kelompok Informasi Masyarakat

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat yang dibentuk oleh Masyarakat dan di SK kan melalui Keputusan Lurah. Pembinaan untuk meningkatkan kualitas kelompok baik dalam hal peningkatkan SDM maupun dalam mengelola informasi. Sebagai

Salah satu kebijakan pemerintah Kota Bukittinggi dalam penyebaran informasi Pemerintah Kota Bukittinggi baik melalu media elektronik maupun media tradisional dan juga melibatkan lembaga komunikasi social. Keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ini juga mendukung terciptanya keterbukaan informasi sesuai dengan amanat UU No. 14 tahun 2008 dan Peraturan Menkominfo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dibuat secara mandiri dan kreatif dalam mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna bertukar informasi serta membuka peluang kemitraan dengan Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kota. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang masih eksis ini tak hanya bertukar informasi antara pemerintah dan masyarakat saja. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) juga berperan sebagai penyebar (diseminator) informasi kepada masyarakat untuk mengakses informasi seputar pembangunan.

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk Kota Bukittinggi sampai tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61.
Cakupan Pengembangan KIM Tahun 2018

NO	Kecamatan	Jumlah KIM	Jumlah Kelurahan	% Pengembangan/ kecamatan
1.	Mandiangan Koto Selayan	6	9	66,67
2.	Guguak Panjang	4	7	57,14
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	5	8	62,50

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2019

Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat di Kota Bukittinggi sampai Tahun 2018 hampir mencakup seluruh Kecamatan, untuk Kecamatan Mandiangan Koto Selayan telah dibentuk di Kelurahan Koto Selayan, Gulai Bancah, Garegeh, Campago Ipuah, Puhun Pintu Kabun, dan Manggis Gantiang, untuk tahun selanjutnya perlu pengembangan ke Kelurahan Pulai Anak Aia, Kubu Gulai bancah dan Campago Guguak Bulek. Pengembangan KIM di Kecamatan Guguak Panjang meliputi Kelurahan Kayu Kubu, Bukik Cangang Kayu Ramang, Benteng Pasar Ateh, dan Bukik Apit Puhun, dan untuk tahun selanjutnya perlu pembentukan KIM di Kelurahan Tarok Dipo, Pakan Kurai dan Aua Tajungkang Tengah Sawah. Sementara itu Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh telah membentuk KIM di Kelurahan Aua Kuning, Ladang Cakiah, Sapiran, dan Belakang Balok, dan ditahun berikutnya perlu dibentuk di Kelurahan, Birugo, Pakan Labuah dan Parit Antang.

j. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

Salah satu pelaku ekonomi yang berperan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah adalah keberadaan dari Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM). Keberadaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, dimana pada masa krisis pun KUKM mampu bertahan dan tetap tumbuh.

1) Persentase Koperasi aktif

Salah satu indikator untuk menentukan berkembang atau tidaknya Koperasi pada suatu wilayah atau daerah yaitu dengan melihat jumlah koperasi aktif pada daerah tersebut. Koperasi aktif adalah koperasi dalam 2 (dua) tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau koperasi yang dalam 2 (dua) tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Perkembangan koperasi di Kota Bukittinggi tahun 2013 s.d. 2017 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.62.
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2013 s.d. 2017
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2013	2014	2015*	2016*	2017*
1.	Jumlah koperasi aktif	82	81	84	87	87
2.	Jumlah koperasi	101	100	100	105	92
3.	Persentase koperasi aktif	81,18	81,00	82,00	82,8	94,6%

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka 2015

*Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi

Keberadaan koperasi di Kota Bukittinggi cukup banyak, dimana pada tahun 2013 terdapat 101 koperasi yang terdaftar di Kota Bukittinggi, kemudian pada tahun 2014 dan 2015 terjadi kekurangan satu koperasi sehingga koperasi yang ada di Kota Bukittinggi sebanyak 100 koperasi. Pada tahun 2016 terjadi penambahan Koperasi di Kota Bukittinggi menjadi 105 koperasi, akan tetapi pada tahun 2017 jumlah koperasi mengalami penurunan kembali. Sehingga persentase koperasi aktif untuk tahun 2017 sebesar 94,6 %.

2) Jumlah UKM Non BPR / LKMUUKM

Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri. Perkembangan jumlah UKM di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.63.
Jumlah UKM Non BPR/LKM Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah seluruh UKM/UMKM	7.803	9.433	9.527	9.302	9.302
2.	Jumlah BPR/LKM	49	49	49	49	49
3.	Jumlah UKM non BPR/LKM	7.754	9.384	9.478	9.253	9.253

Sumber: Bagian Perekonomian Kota Bukittinggi

Jumlah UKM di Kota Bukittinggi cukup banyak, hal ini dipicu oleh keberadaan Kota Bukittinggi sebagai kota Perdagangan dan Jasa serta pariwisata. Dilihat dari kontribusi pembentukan PDRB Kota Bukittinggi, sektor Perdagangan besar dan eceran merupakan sektor yang paling dominan. Perkembangan UKM di Kota Bukittinggi selalu meningkat setiap tahunnya, selain permintaan pasar, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan juga sangat intensif dalam menumbuh kembangkan UKM tersebut melalui pembinaan dan pendampingan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Perkembangan UKM non BPR/LKM pada tahun 2013 sebanyak 7.754 pada tahun 2017 menjadi 9.253 unit.

3) Jumlah BPR/LKM

Salah satu penunjang pengembangan usaha masyarakat dalam akses permodalan adalah keberadaan BPR dan LKM. Jumlah BPR dan LKM di Kota Bukittinggi tahun 2013 s.d. 2017 tidak mengalami perubahan, dimana jumlah BPR sebanyak 3 BPR dan Jumlah LKM sebanyak 46 LKM.

Tabel 2.64.
Jumlah BPR / LKM Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah BPR	3	3	3	3	3
2.	Jumlah LKM	46	46	46	46	46
JUMLAH		49	49	49	49	49

Sumber: Bagian Perekonomian Setda

k. Penanaman Modal

Penanaman modal (investasi) merupakan faktor yang sangat penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Peningkatan penanaman modal akan memacu peningkatan produktifitas dan juga penyerapan tenaga kerja. Kinerja pembangunan pada urusan wajib penanaman modal dilihat dari beberapa indikator berikut.

1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN / PMA)

Penanaman modal dapat dibagi atas 2 (dua) bagian utama yaitu penanaman modal swasta (*private investment*) dan penanaman modal pemerintah (*public investment*). Penanaman modal swasta merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta seperti pendirian pabrik baru, peralatan dan penambahan faktor produksi baru. Penanaman modal ini bisa dilakukan oleh pihak swasta dalam negeri (PMDN), swasta asing (PMA) dan rumah tangga. Sedangkan penanaman modal pemerintah merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk infrastruktur, transportasi, komunikasi, listrik, irigasi, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Pada tahun 2018 di Kota Bukittinggi terdapat 26 investor yang terdiri dari 19 Penanaman Modal Dalam Negeri dan 7 Penanaman Modal Asing. Jumlah ini meningkat dari tahun 2017 yang berjumlah 20, dimana peningkatan terjadi pada Penanaman Modal Asing. Kondisi ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.65.
Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Bukittinggi Tahun 2018

Tahun	PMDN	PMA	Total
Akumulasi sampai Tahun 2018	19	7	26

Sumber: Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi

2) Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Pada tahun 2018, jumlah investasi di Kota Bukittinggi dari 19 investor PMDN tercatat sebesar Rp. 16.881.607.317.722 dan dari 7 investor PMA tercatat sebesar US\$250.638.200.000. Dalam rangka meningkatkan investasi di Kota Bukittinggi telah dilakukan berbagai upaya seperti promosi investasi dan juga meningkatkan iklim investasi serta peningkatan pelayanan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tabel 2.66.
Jumlah Investasi PMDN/PMA sampai tahun 2018 Kota Bukittinggi

Tahun	PMDN		PMA	
	Jumlah Perusahaan	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Perusahaan	Nilai Investasi (US\$)
Akumulasi Sampai Tahun 2018	19	16.881.607.317.722	7	50.638.200.000

Sumber: DPMPPTSPPTK

I. Kepemudaan dan Olah Raga

Kinerja pembangunan pada urusan kepemudaan dan olahraga selama periode 2013–2017 di Kota Bukittinggi terdapat beberapa indikator yaitu jumlah organisasi pemuda, jumlah organisasi olahraga, kegiatan kepemudaan dan jumlah kegiatan olahraga. Untuk kedepannya berkaitan dengan pelayanan olahraga dan kepemudaan adalah upaya pembinaan dini terhadap pemuda melalui pendekatan institusional baik melalui institusi pendidikan, sekolah dan pramuka maupun institusi kepemudaan seperti KNPI dan karang taruna. Sedangkan untuk ketersediaan sarana dan prasarana olah raga dengan standar nasional saat ini masih terbatas dan belum terkelola dengan baik. Oleh karena itu upaya yang dilakukan dengan perbaikan dan peningkatan sarana yang ada serta pembangunan pusat olahraga (*sport center*) yang baru.

1) Jumlah Organisasi Pemuda

Kelompok pemuda yang kreatif biasanya sering berkumpul hingga membentuk organisasi sesuai dengan kreatifitas mereka dan menyusun suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu organisasi pemuda juga merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat melalui organisasi kepemudaan. Semakin banyak organisasi kepemudaan di suatu wilayah maka menggambarkan bahwa tingginya peran serta pemerintah daerah dalam membina organisasi kepemudaan. Jika banyaknya aktifitas pemuda yang terorganisir akan mengurangi permasalahan sosial di kalangan pemuda.

Tahun 2018 jumlah organisasi pemuda yang terdaftar di Kota Bukittinggi sebanyak 24 yang tersebar pada 3 kecamatan. Organisasi terbanyak terdapat pada wilayah kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan jumlah penduduk yang paling banyak. Disini terlihat tingginya minat pemuda untuk berorganisasi dan tingginya peran pemerintah dalam memfasilitasi aktifitas pemuda sehingga mereka eksis pada setiap kegiatan. Pada Kecamatan ABTB dan Guguk Panjang juga hampir merata, (7 dan 8 organisasi pemuda). Namun demikian diharapkan peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan pada khususnya berupaya mengajak para

pemudanya untuk berorganisasi sehingga program pemerintah juga dapat tersalur melalui program organisasi mereka. Secara data dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.67.
Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Mandiingin Koto Selayan	10	10	25	9	9
2.	Guguk Panjang	14	14	19	7	7
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	6	6	24	8	8
JUMLAH		30	30	30	24	24

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Kota Bukittinggi

2) Jumlah Organisasi Olahraga

Organisasi olah raga yang ada di Kota Bukittinggi tersebar di setiap kecamatan yang ada, organisasi dari sekolah dan dari organisasi olahraga dari masyarakat itu sendiri. Untuk jumlah organisasi olahraga dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.68.
Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Mandiingin Koto Selayan	3	3	1	4	7
2.	Guguk Panjang	3	3	2	4	5
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	5	5	1	4	6
JUMLAH		11	11	11	12	18

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda & Olahraga Kota Bukittinggi

Organisasi olah raga yang ada di sekolah–sekolah pembinaan langsung dibina oleh sekolah itu sendiri dibawah bimbingan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi, sedangkan pembinaan organisasi olah raga masyarakat langsung dibina oleh ketua pemuda yang ada disetiap kelurahan. Organisasi olah raga yang ada di Kota Bukittinggi pada tahun 2018 terdapat 18 organisasi olahraga. Kecamatan Mandiingin Koto Selayan memiliki 7 organisasi, serta Kecamatan Guguk Panjang dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh memiliki masing-masing 5 dan 6 organisasi olahraga. Dari jumlah organisasi olahraga yang ada, dapat dilihat keaktifannya dalam mengikuti kegiatan keolahragaan di Bukittinggi ataupun ke luar Bukittinggi, namun demikian masih perlu perhatian yang lebih dari pemerintah Kota Bukittinggi untuk dapat memberikan bimbingan ataupun pembinaan serta bantuan dalam melengkapi sarana dan prasarana dalam meningkatkan aktifitas organisasi olah raga tersebut.

3) Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Kegiatan kepemudaan adalah *event* kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Kepemudaan sendiri bermakna segala hal tentang pemuda. Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SKPD yang membidangi keolahragaan di Kota Bukittinggi harus meningkatkan pembinaan, kepedulian dan meningkatkan koordinasi dengan organisasi kepemudaan, sehingga Kota Bukittinggi betul-betul mempunyai pemuda yang berpendidikan dan kreatif. Jika pemuda selalu melaksanakan kegiatan positif maka apapun program pemerintah yang ditujukan untuk pembangunan akan cepat dan dapat diterima oleh pemuda karena pemuda juga memberikan peran serta untuk mencapai tujuan.

Perkembangan jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Bukittinggi dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.69.
Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Mandiangan Koto Selayan	2	2	2	3	3
2.	Guguk Panjang	2	2	2	3	3
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	2	2	2	4	4
JUMLAH		6	6	6	10	10

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda & Olahraga Kota Bukittinggi

4) Jumlah Kegiatan Olahraga

Organisasi yang ada, jika kurang atau tidak ada melakukan kegiatan, sama saja dengan organisasi yang sia-sia. Harapan kita tentunya setiap organisasi yang ada selalu beraktifitas sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh organisasi tersebut. *Event* yang paling sering dilakukan oleh organisasi pemuda adalah di bidang keolahragaan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis.

Sangat banyak *event* keolahragaan yang dilakukan sampai ketingkat nasional bahkan internasional. Jika kita selalu melakukan pembinaan yang rutin terhadap kegiatan olahraga dan dalam mencari bibit dan bakat seseorang di bidang keolahragaan, niscaya di Kota Bukittinggi akan bertaburan insan olahraga yang berprestasi.

Selama 4 (empat) tahun terakhir terlihat dari data bahwa di Kota Bukittinggi cukup banyak kegiatan keolahragaan yang dilaksanakan dari organisasi kepemudaan yang ada. Jika diambil rata-rata perbulan maka

terdapat 2 *event* olahraga yang dilakukan masing-masing kecamatan untuk memberdayakan para pemuda dibidang olahraga. Selain bakat mereka tersalur, maka yang paling penting adalah para pemuda di Kota Bukittinggi selalu disibukkan dengan kegiatan positif sehingga diharapkan pengaruh negatif terhadap lingkungan akan dapat ditekan terus.

Sarana dan prasarana olah raga juga harus menjadi perhatian pemerintah. Meningkatkan dan memperbaharui sarana yang ada sesuai dengan perkembangan keolahragaan juga menjadi prioritas program dan kegiatan selanjutnya. Perkembangan kegiatan keolahragaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.70.
Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Mandiangan Koto Selayan	3	3	1	4	7
2.	Guguk Panjang	3	3	2	4	5
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	5	5	1	4	6
JUMLAH		11	11	11	12	18

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda & Olahraga Kota Bukittinggi

Dilihat pada tabel di atas kegiatan olahraga yang dilaksanakan pada tahun 2018 sebanyak 18 kegiatan, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun hal ini perlu dilakukan peningkatan yang lebih baik lagi, agar Bukittinggi dapat memiliki nama baik di bidang olahraga. Untuk itu perlu adanya Monitoring dan evaluasi yang lebih aktif lagi dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan aktifitas olah raga yang dilaksanakan oleh pemuda dan disamping itu juga diperlukan dukungan dana untuk pembinaan serta *reward* untuk yang telah memberikan hasil yang terbaik dalam bidang keolahragaan

m. Statistik

Statistik merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten atau daerah kota yang merupakan urusan yang berskala kabupaten atau kota. Dari beberapa dokumen dan data tentang informasi pembangunan di Kota Bukittinggi yang selama ini dikerjasamakan penyusunannya oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Badan Pusat Statistik antara lain Buku Bukittinggi Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Inflasi Kota Bukittinggi dan Statistik Daerah. Mulai tahun 2014 sudah merupakan produk yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi dan tidak lagi dikerjasamakan dengan Pemerintah Kota Bukittinggi, sedangkan untuk kebutuhan data masih didukung oleh dinas instansi lainnya dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Semua dokumen dan data tersebut merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik untuk menyusun sekaligus mempublikasikannya setiap tahun.

Perkembangan dari indikator urusan wajib statistik, secara umum dapat dikatakan sudah memenuhi standar pelayanan umum daerah, hal ini tercermin dari tersedianya Buku Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kota setiap tahunnya dari tahun 2014-2018.

Tabel 2.71.
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Statistik Kota Bukittinggi
Tahun 2013 s.d 2017

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Buku "Kota dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BPS Kota Bukittinggi

n. Persandian

Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Dalam hal ini untuk Kota Bukittinggi Urusan persandian ini merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi. Dalam pelaksanaan kegiatannya Kota Bukittinggi memiliki 2 (dua) alat sandi yaitu Email Sandi dan Kriptografi.

Email sandi adalah system/ perangkat lunak yang digunakan untuk mengirim dan menerima berita yang bersifat rahasia yang mana email ini langsung dipantau oleh BSSN. Kriptografi adalah cara untuk mengamankan informasi dengan menggunakan kode atau sistem atau ilmu untuk tulisan rahasia dengan pertimbangan bahwa komunikasi dan data dapat dikodekan untuk mencegah agar orang lain tidak dapat mengetahui. Persentase pemanfaatan Persandian oleh perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.72.
Pemanfaatan Persandian Tahun 2018

NO	Nama Alat Sandi	SKPD pemanfaat	Jumlah Total SKPD	% Pemanfaatan	Keterangan
1.	Email Sandi	7	28	29,7%	Terantau BSSN
2.	Kriptografi	1	28	3,6%	Hanya digunakan oleh Pimpinan Daerah

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi

Perangkat daerah yang telah menggunakan alat sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah yang menjadi sasaran oleh alat sandi yang merupakan tanggung jawab dan dioperasikan oleh seksi persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi baru sebanyak 7 (tujuh) perangkat daerah yaitu: Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penanaman Modal, Pelayanan Satu

Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Alat sandi yang digunakan adalah Email Sandi, sementara untuk Kriptografi sampai saat ini hanya dimanfaatkan oleh Kepala Daerah.

o. Kebudayaan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 menegaskan bahwa kebudayaan merupakan urusan pemerintahan baik urusan pemerintah maupun urusan wajib pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh sebab itu melestarikan nilai sosial budaya merupakan kewajiban pemerintah/daerah.

Dalam konteks ini pemerintah berfungsi sebagai pengayom dan pelindung bagi warganya, sekaligus sebagai penjaga tata hubungan interaksi antar kelompok-kelompok kebudayaan yang ada di Indonesia/daerah.

Bukittinggi selain terkenal dengan obyek wisata alamnya, juga dikenal sebagai salah satu Kota Seni dan Budaya, dengan adat istiadat khas dan kemajemukan penduduk yang ikut memberi warna bagi kebudayaan yang ada, karena selain suku Minangkabau, penduduk Kota Bukittinggi berasal dari suku Jawa, Sunda, Batak, Cina, Arab dan lainnya.

Peran pemerintah dalam hal ini, adalah memfasilitasi keanekaragaman kebudayaan yang ada agar tetap lestari dengan tidak meninggalkan nilai tradisi didalamnya namun tetap dapat mengikuti perkembangan zaman. Hal yang dilakukan adalah dengan mengadakan pagelaran seni budaya yang menampilkan atraksi seni budaya masing-masing.

1) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Dalam rangka mempromosikan dan memperkenalkan seni budaya Kota Bukittinggi, pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berpartisipasi dalam berbagai event seni dan budaya dengan mengikut sertakan sanggar atau kelompok seni yang ada di Kota Bukittinggi baik di tingkat regional maupun nasional. Festival atau pagelaran seni budaya yang telah diikuti sebagai berikut:

Tabel 2.73.
Festival Seni dan Budaya yang Diikuti oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

No	Uraian	Tanggal	Tempat	Kelompok Seni
1	Audisi Duta Budaya Minang	18 Mei 2018	Kota Padang	Pelaku Seni
2	Gita Bahana Nusantara	09 Juli 2018	Kota Padang	Pelaku Seni
3	Pendokumentasian Pakaian Minang	03/04 November 2018	Kota Padang	Ibu Pejabat BKT/Bundo Kandung
4	Pawai Budaya	15 Desember 2018	Kota Solok	Tim Disdikbud

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

Dari tabel diatas, promosi kebudayaan Kota Bukittinggi khususnya seni tradisional Minangkabau telah dilakukan, namun dengan keterbatasan anggaran pada pemerintah kota, tidak semua event seni budaya yang diadakan dapat diikuti.

Namun Pemerintah Kota Bukittinggi memberi perhatian terhadap keberadaan sanggar atau kelompok seni budaya yang ada ditengah masyarakat, dimana hingga saat ini tercatat 56 kelompok seni ada di Kota Bukittinggi, yaitu :

Tabel 2.74.
Kelompok Seni Tradisional yang ada di Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok Seni
1	Mandiingin Koto Selayan	26
2	Guguk Panjang	15
3	Aur Birugo Tigo Baleh	15
	Jumlah	56

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

Keberadaan kelompok seni tradisional tersebar di 3 (tiga) kecamatan, dengan jumlah terbesar yaitu pada kecamatan Mandiingin Koto Selayan. Peran Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal meningkatkan dan mengembangkan seni budaya antara lain memberi bantuan pengadaan peralatan kesenian, pelatihan seni budaya (*panitahan*) dan fasilitasi kegiatan lainnya.

2) Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang ada di Kota Bukittinggi antara lain *Medan Nan Balinduang* yang terletak di belakang Hotel Jogja, dan *Medan Nan Bapaneh* di daerah Panorama secara berkala menampilkan atraksi seni budaya Minangkabau, sedangkan sarana lainnya yang sering digunakan dalam penyelenggaraan atraksi budaya masih memanfaatkan gedung atau areal terbuka seperti *Sport Hall*, lapangan kantin/Wirabraja, PGSD IKIP dan Aula Perpustakaan Bung Hatta.

Selama tahun 2016 pemerintah Kota Bukittinggi melaksanakan pagelaran atau atraksi seni dan budaya bertempat di pelataran Jam Gadang setiap malam minggu, yang menampilkan kelompok seni yang ada di Kota Bukittinggi. Dengan adanya *event* ini selain mengembangkan bakat dan kemampuan masyarakat terutama generasi muda dibidang seni budaya, diharapkan memberi hiburan baru bagi pengunjung dan memberi tempat bagi kelompok seni dalam mengembangkan kemampuan dibidang seni budaya. Pada tahun 2017 dan 2018 kegiatan ini tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

3) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka mewujudkan kebudayaan Nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Upaya melestarikan benda cagar budaya dan situs yang ada baik bersifat fisik (*tangible*) maupun non fisik (*Untangible*) diawali dengan pendataan benda cagar budaya berupa pendokumentasian (tulisan dan gambar), dilanjutkan dengan pendaftaran, penetapan, serta zonasi Kawasan Cagar Budaya.

Pemerintah Kota Bukittinggi dalam melindungi, melestarikan, memanfaatkan dan mengembangkan Benda Cagar Budaya ini secara umum telah menetapkannya dalam

Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2011 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Bukittinggi dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah di Kota Bukittinggi.

Berdasarkan lampiran Peraturan Walikota Bukittinggi tersebut terdapat 42 benda cagar budaya dan peninggalan sejarah, diantaranya Jam Gadang, Istana Bung Hatta, Gua Jepang Panorama (Lobang Jepang), Benteng *Fort de Kock* dan Rumah Kelahiran Bung Hatta, Masjid Surau Gadang (Masjid Jami'), Bangunan Sekolah Rajo (SMA Negari 2 Bukittinggi) dan beberapa rumah tinggal.

Untuk Zonasi Kawasan Cagar Budaya Kota Bukittinggi telah dilakukan deliniasi zona inti dan zona penyangga pada *Masterplan* Kota Pusaka Bukittinggi namun hal ini belum berupa ketetapan Walikota.

4) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kota Bukittinggi

Adapun benda dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Bukittinggi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.75.
Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kota Bukittinggi

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	42
2	Total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah	11
3	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	42

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

Dari data di atas dapat terlihat bahwa jumlah benda, situ dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Bukittinggi berjumlah 42 buah, total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah sebanyak 11 buah dan benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan adalah sebanyak 381.818 buah. Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.76.
Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

No	Uraian	Asal
1	AMRIL	PELAKU SENI (SILEK)
2	HENDRI ADEK	PELAKU SENI (SILEK)
3	RAMLI	PELAKU SENI (SILEK)
4	SOFYAN NADAR	PELAKU SENI (SILEK)
5	HENDRA	PELAKU SENI (SILEK)
6	TIM RANDAI BINAAN DISDIKBUD	RABUANG KUNIANG
7	BERLIANSYAH PUTRI	SMA 1 BUKITTINGGI
8	RIO SAPUTRO	SMK 1 BUKITTINGGI

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

Dari data diatas terlihat jumlah karya budaya yang telah direvitalisasi dan diinventarisasi adalah 8 (delapan) buah, yang merupakan karya seni dari anak bangsa yang merupakan pelaku seni di Kota Bukittinggi dan para pelajar dari SD, SMP, MTSn maupun SMA dan SMK yang diseleksi pada saat dilaksanakannya event penampilan karya seni di Kota Bukittinggi.

5) Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu

Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.77.
Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

No	Uraian	Lokasi
1	SMU N 2 BUKITTINGGI	Jl. Sudirman no. 5 kelurahan sapiran kecamatan ABTB Bukittinggi
2	BANGUNAN KANTOR DISDIKBUD KOTA BUKITTINGGI	Jl. Sudirman no. 9 kelurahan belakang balok, kecamatan ABTB Bukittinggi
3	JAM GADANG	Jl. Istana Kelurahan Bukit Cangang kayu Ramang Kecamatan Guguak Pangjang Bukittinggi

No	Uraian	Lokasi
4	SD N 14 BUKIT CANGANG	Jl. Panorama no. 12 A Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi
5	LOBANG JEPANG	Jl. Panorama Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi
6	RUMAH DINAS WAKIL WALIKOTA (SEKARANG RUMAH DINAS SEKDAKO)	Jl. Dr. A. Rivai No 16 C Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi
7	SMP 4	Jl. Dr. A. Rivai Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi
8	BENTENG FORT DE KOCK	Jl. Benteng Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi
9	CEROBONG ASAP	Jl. H. Miskin No 101 Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi
10	LEMBAGA PERMASYARAKATAN BUKITTINGGI	Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi
11	RUMAH KELAHIRAN BUNG HATTA	Jl. Soekarno Hatta No 37 Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

Terlihat ada 11 buah Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018, data ini sesuai dengan Perwako Nomor 2 tahun 2012 dan menjadi aset yang harus selalu dijaga dalam rangka pelestarian benda-benda budaya dan meupakan juga sebagai sarana daya tarik wisata.

p. Perpustakaan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perpustakaan selama periode 2014-2018 di Kota Bukittinggi tergambar pada beberapa indikator yaitu Jumlah perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan. Indikator tersebut digambarkan sebagai berikut:

1) Jumlah perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat yang didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Perkembangan jumlah perpustakaan tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 termasuk perpustakaan sekolah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.78.
Jumlah Perpustakaan Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Perpustakaan Milik Pemerintah Daerah (Pusat)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Perpustakaan Milik Pemerintah Daerah	*)	*)	185	185	136
3.	Jumlah Perpustakaan Milik Non Pemerintah Daerah	*)	*)	49	52	103
TOTAL PERPUSTAKAAN (1+2)		1	1	1	235	239

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka kota Bukittinggi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi
*) Data tidak tersedia

Kota Bukittinggi mempunyai 1 (satu) Perpustakaan Umum Daerah yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi. Perpustakaan ini baru membuka pelayanan pengunjung mulai pada tahun 2015. Disamping itu juga terdapat 1 (satu) buah perpustakaan milik pemerintah pusat, yakni UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta (PPBH). Aset tersebut murni adalah milik pemerintah pusat termasuk seluruh karyawannya. Masyarakat tidak peduli apakah sebuah perpustakaan milik pemerintah pusat atau tidak, yang penting kebutuhan dalam meningkatkan pengetahuan melalui penyaluran minat baca dapat tersalur melalui sebuah perpustakaan. Tentunya kebutuhan dan budaya minat baca diharapkan tetap meningkat di Kota Bukittinggi.

2) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Bukittinggi hanya mempunyai 1 (satu) perpustakaan daerah yaitu Perpustakaan Umum Daerah yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi dan 1 (satu) perpustakaan milik Perpustakaan Nasional, yaitu Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Perpustakaan tersebut disediakan untuk memenuhi kebutuhan minat baca bagi masyarakat Kota Bukittinggi dan sekitarnya. Perpustakaan Umum Daerah kita masih dalam kondisi keterbatasan, yaitu keterbatasan koleksi dan keterbatasan sarana dan prasarana, yaitu belum adanya gedung yang representatif untuk sebuah Perpustakaan Daerah. Namun Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang merupakan milik pemerintah pusat sudah sangat representatif, pada lingkungan yang asri dan nyaman, sehingga memberi ketenangan dan konsentrasi pengunjung dalam membaca lebih fokus.

Semenjak tahun 2012, Perpustakaan Proklamator Bung Hatta telah diserahkan kepada pemerintah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Nasional Bung Hatta. Pemerintah Kota Bukittinggi mulai merintis membuat perpustakaan daerah dimulai dengan persiapan dan pengelolaan sampai tahun 2014. Pada tahun 2015 baru secara resmi membuka pelayanan untuk perpustakaan daerah yang dibuka untuk umum.

Kalau dilihat dari jumlah pengunjung dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 terjadi peningkatan yang signifikan pada Tahun 2018, ini dapat menggambarkan semakin tingginya minat baca warga masyarakat bukittinggi, yang dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.79.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2014 s.d. 2018
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	*)	3.750	3.801	5.749	10.310
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	*)	*)	*)	*)	*)
Total pengunjung Perpustakaan (1+2)		*)	3.750	3.801	5.749	10.310

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

*) Data tidak tersedia

3) Jumlah perpustakaan

Jumlah perpustakaan yang ada di Kota Bukittinggi, baik itu milik pemerintah pusat maupu daerah dan perpustakaan milik non Pemda dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.80.
Jumlah Perpustakaan Tahun 2017 dan 2018 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2017	2018
1.	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)/pusat	186	136
2.	Jumlah Perpustakaan milik non pemda	52	103
3.	Total Perpustakaan (1+2)	238	239

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pada tahun 2018 terdapat peningkatan jumlah perpustakaan di Kota Bukittinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tabulasi perpustakaan ini berasal dari sekolah-sekolah (145), PT (23), organisasi masyarakat (5), kecamatan (3), kelurahan (24), SKPD (24), instansi vertikal (10), BUMN/BUMD (3), pondok pesantren (2), mesjid (25), mushalla (10) dan gereja (2).

4) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Jumlah pengunjung pertahun dan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.81.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun		3.750	3801	5.749	10.310
2.	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	120.491	122621	124.715	126.804	128.783
3.	Total pengunjung Perpustakaan		3.750	3801	5.749	10.310

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dari gambar di atas terlihat bahwa dari sejak dibukanya perpustakaan daerah milik Pemerintah Kota Bukittinggi, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2018 jumlah pengunjung perpustakaan meningkat drastis dari 5.749 menjadi 10.310 pengunjung, menunjukkan semakin meningkatnya minat literasi masyarakat Kota Bukittinggi. Akan tetapi kalau dilihat dari populasi yang harus dilayani baru 8% yang memiliki minat baca (minat literasi). Jadi masih sebagian kecil saja penduduk Kota Bukittinggi yang memanfaatkan perpustakaan daerah ini.

5) Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi buku yang tersedia pada Perpustakaan Daerah Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.82.
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	4.938	8.012	8.618	9.881	9.637
2.	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	9.083	11,073	18.326	20.511	18.339
3.	Total pengunjung Perpustakaan	-	3.750	3.801	5.749	10.310

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dari tabel di atas terlihat dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, terjadi peningkatan jumlah koleksi buku. Dengan meningkatkan koleksi buku akan menambah minat baca seseorang, karena semakin banyaknya pilihan buku yang tersedia.

6) Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk

Rasio Perpustakaan Persatuan Pendudukan merupakan jumlah perpustakaan dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 1000. Adapun di Kota Bukittinggi rasio perpustakaan Per Satuan Penduduk dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.83.
Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk
Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah perpustakaan	-	1	235	238	239
2.	Jumlah penduduk	120.491	122.621	124.715	126.804	128.783
3.	Rasio	-	0,082	1,88	1,88	1,86

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dari data diatas, terlihat jumlah rasio perpustakaan dari tahun 2016 dan 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan karena pertumbuhan penduduk yang pesat tidak diimbangi oleh pertumbuhan jumlah perpustakaan.

7) Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun

Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun adalah :

Tabel 2.84.

Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rata-rata pengunjung pertahun	-	3.750	3.801	5.749	10.310

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dari data tersebut menggambarkan bahwa dari tahun ketahun memang terjadi peningkatan dalam jumlah pengunjung perpustakaan, dan meningkat drastis pada Tahun 2018. Akan tetapi, kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dilayani, mencerminkan masih rendahnya daya minat baca masyarakat.

8) Jumlah koleksi judul buku perpustakaan

Jumlah koleksi buku sangat menentukan jumlah pengunjung pada perpustakaan, semakin banyak jumlah buku maka semakin banyak jumlah pengunjung yang datang pada perpustakaan. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.85.

Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	4.938	8.012	6.618	9.881	9.637

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jumlah koleksi perpustakaan dari tahun ketahun juga mengalami kenaikan, tapi masih belum cukup mampu untuk menarik minat masyarakat Kota Bukittinggi dalam membaca. Sehingga perlu usaha yang lebih keras dalam rangka peningkatan minat budaya baca (minat literasi) ditengah-tengah masyarakat Kota Bukittinggi.

q. Kearsipan

Adapun persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku di Kota Bukittinggi dari Tahun 2014 s/d Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.86.
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku
Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	2	2	4	7	13
2.	Jumlah perangkat daerah	29	29	29	29	29
3.	Persentase	6,90	6,90	13,79	24,14	44,80

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dari tabel di atas terlihat bahwa Tahun 2018 terjadi peningkatan tajam dalam jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku, sehingga dalam hal persentase dapat digambarkan bahwa telah terjadi peningkatan dan upaya dalam memperbaiki sistem kearsipan pada perangkat daerah di Kota Bukittinggi.

1) Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Pengelola Kearsipan yang kompeten akan dapat meningkatkan pengelolaan kearsipan yang efektif dan efisien. Kalau dilihat peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Bukittinggi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.87.
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	1	1	2	2	2

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, belum terlihat peningkatan yang signifikan dalam upaya peningkatan sumberdaya manusia pengelola kearsipan. Hal ini mengakibatkan dalam kualitas dan pelayanan pengelolaan kearsipan di Kota Bukittinggi. Begitu pula pada Tahun 2018 malah tidak ada peningkatan SDM Pengelola Kearsipan yang disebabkan karena keterbatasan anggaran.

B. Layanan Urusan Pilihan

1. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang mempunyai *multiflier effect* tinggi dalam pembangunan perekonomian. Selain berdampak positif dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi, juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Dewasa ini banyak daerah yang menetapkan sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam meningkatkan pendapatan daerah, termasuk Kota Bukittinggi.

Kunjungan Wisata

Kota Bukittinggi yang dianugerahi sang pencipta dengan pesona alam dan iklim yang sejuk serta didukung dengan pengembangan berbagai destinasi wisata telah bertopang kepada sektor ini dalam pembangunan daerahnya. Hal ini disebabkan juga karena Kota Bukittinggi tidak memiliki sumber kekayaan alam berupa pertambangan dan juga terbatasnya lahan pertanian.

Salah satu indikator guna melihat kinerja pembangunan Kota Bukittinggi di bidang pariwisata adalah kunjungan wisata. Kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik ke Kota Bukittinggi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisata ke Kota Bukittinggi berjumlah 577.857 wisatawan yang terdiri dari 31.841 wisatawan mancanegara dan 546.016 wisatawan domestik. Meningkat 1,05% dari tahun 2017, dimana jumlah kunjungan wisatanya sebanyak 546.895. perkembangan jumlah kunjungan wisata tahun 2014 s.d. 2018 ke Kota Bukittinggi terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.88.
Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2014 s.d. 2018

No.	Wisatawan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Mancanegara	32.501	25.970	27.516	30.412	31.841
2.	Domestik	400.538	434.935	443.244	516.483	546.016
JUMLAH		436.212	433.039	460.905	546.895	577.857

Sumber: Bukittinggi Dalam angka 2019 & Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dilihat melalui peranan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Bukittinggi dilihat atas dasar Harga Berlaku maupun atas dasar Harga Konstan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini didukung dengan keberadaan hotel dan restoran serta sarana pendukung lainnya di Kota Bukittinggi. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pada tahun 2016 telah mencapai 5,46% untuk PDRB atas dasar Harga Berlaku dan 4,53% untuk PDRB atas dasar Harga Konstan. Perkembangan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Bukittinggi kurun waktu lima tahun terakhir terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.89.
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Bukittinggi
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan
Tahun 2011 s.d. 2015

No	Kontribusi Sektor Pariwisata	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	4,13	4,43	4,75	4,94	5,46
2.	Atas Dasar Harga Konstan	4,05	4,26	4,38	4,45	4,53

Sumber: PDRB Bukittinggi 2011-2015.

2. Pertanian

Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikrobia) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, pertanian juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.

Usaha pertanian diberi nama khusus untuk subjek usaha tani tertentu. Kehutanan adalah usaha tani dengan subjek tumbuhan (biasanya pohon) dan diusahakan pada lahan yang setengah liar atau liar (hutan). Peternakan menggunakan subjek hewan darat kering (khususnya semua vertebrata kecuali ikan dan amfibia) atau serangga (misalnya lebah). Perikanan memiliki subjek hewan perairan (termasuk amfibia dan semua non-vertebrata air). Suatu usaha pertanian dapat melibatkan berbagai subjek ini bersama-sama dengan alasan efisiensi dan peningkatan keuntungan.

Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Sektor pertanian tidak terlalu berperan di Kota Bukittinggi, hal ini sesuai dengan karakteristik kota yang pemanfaatan lahannya lebih mengarah kepada jasa usaha dan permukiman. Produksi pertanian di Kota Bukittinggi didominasi oleh produksi padi, ketela rambat, ketela pohon dan jagung yang merupakan bahan pangan utama lokal lainnya selain padi. Produktivitas padi Kota Bukittinggi setiap tahunnya rata-rata masih di atas 60 kw/ha. Pada tahun 2016, dengan luas area tanaman 809 ha dapat memproduksi padi sebanyak 5.227 ton atau dengan tingkat produktivitas 64,33 kw/ha. Produktivitas tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, dimana tingkat produktivitasnya 66,7 kw/ha dari hasil produksi padi 4.200 ton dengan luas area tanaman 633 ha. Perkembangan produktivitas padi Kota Bukittinggi tahun 2014 s/d 2018 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.90.
Produktivitas Padi Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi

No	Tahun	Produksi Tanaman (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2018			
2.	2017	5.480,46	807	67,66
3.	2016	5.227	809	65,33
4.	2015	4.200	633	66,70
5.	2014	5.063	763	64,53

Sumber: Dinas Pertanian

Produktivitas Jagung di Kota Bukittinggi pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2015, produktivitas tanaman jagung mencapai 67 kw/ha dari luas area tanaman seluas 50 ha dengan produksi tanaman sebanyak 104,84 ton. Pada tahun 2016 terjadi penurunan produktivitas menjadi 45,38 kw/ha dari luas area tanaman 32 ha dan jumlah produksi tanaman jagung sebanyak 77 ton. Perkembangan produktivitas jagung tahun 2014 s.d. 2018 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.91.
Produktivitas Jagung Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi

No.	Tahun	Produksi Tanaman (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2018			
2.	2017	73,61	38	43,30
3.	2016	77	32	45,38
4.	2015	104,84	50	67
5.	2014	111,06	58	61,67

Sumber: Dinas Pertanian

Produktivitas Ketela Rambat di Kota Bukittinggi pada tahun 2017 menurun dibandingkan tahun 2016. Tahun 2016 produktivitas Ketela Rambat sebesar 307,95 Kw/Ha dari luas area tanaman 44 Ha dengan jumlah produksi 1.355 Ton. Sedangkan pada tahun 2017 produktivitas Ketela Rambat sebesar 272,61 Kw/Ha dari luas area tanaman seluas 31 Ha dan jumlah produksi sebanyak 1.008,66 Ton.

Tabel 2.92.
Produktivitas Ketela Rambat Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi

No,	Tahun	Produksi Ketela Rambat (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2018			
2.	2017	1.008,66	31	272,61
3.	2016	1.355	44	307,95
4.	2015	907,20	39	245,19
5.	2014	1.324,18	48	245,19

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2019 dan Dinas Pertanian

Produktivitas Ketela Pohon di Kota Bukittinggi Tahun 2014 s.d. 2018 berfluktuatif karena dipengaruhi dengan luas area tanaman Ketela Pohon tersebut. Pada tahun 2016 dengan luas area tanaman 12 Ha mampu memproduksi sebanyak 784 Ton atau dengan tingkat produktivitas 326,67 Kw/Ha. Pada tahun 2017, produktivitas Ketela Pohon mencapai 218,89 Kw/Ha dari luas area tanaman seluas 13 Ha dengan jumlah produksi sebanyak 284,56 Ton. Perkembangan produktivitas Ketela Pohon Kota Bukittinggi tahun 2014 s.d. 2017 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.93.
Produktivitas Ketela Pohon Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi

No,	Tahun	Produksi Tanaman (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2018			
2.	2017	284,56	13	218,89
3.	2016	784	12	326,67
4.	2015	367,50	14	367,50
5.	2014	587,92	26	367,50

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2019 dan Dinas Pertanian

Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Bukittinggi baik dilihat melalui atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar Harga Konstan terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini merupakan karakteristik sebuah kota, dimana struktur perekonomiannya tidak lagi bertopang kepada kelompok primer.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi pada tahun 2013 masih berkontribusi sebesar 1,42%, seiring bertambahnya tahun terus tergerus sampai pada tahun 2017 hanya berkontribusi sebesar 1,30%. Perkembangan kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB atas dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi tahun 2014 s.d. 2018 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.94.
Kontribusi Kategori Pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 s.d 2018

No	Kategori	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,46	1,42	1,37	1,29	1,24

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2019

Sejalan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar Harga Berlaku, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar Harga Konstan pun mengalami penurunan setiap tahunnya. Dari Tahun 2014-2018 kontribusi sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami penurunan, hal ini terjadi karena adanya konversi lahan pertanian ke lahan perumahan. Perkembangan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar Harga Konstan Kota Bukittinggi terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.95.
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB
Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2014 s.d. 2018

No	Sub Sektor	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,42	1,37	1,31	1,27	1,26

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2019

3. Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu sektor yang menjadi unggulan Kota Bukittinggi dalam pembangunan daerah. Sektor perdagangan Kota Bukittinggi ditopang dengan keberadaan pasar simpang aur, pasar atas, dan pasar bawah. Pasar Simpang Aur Kuning merupakan pasar grosir terbesar di Sumatera sehingga pasar simpang Aur Kuning disebut juga sebagai Tanah Abang II. Hal ini menyebabkan Bukittinggi bukan saja sebagai sentral perdagangan yang berskala lokal, tapi juga regional.

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dilihat melalui peranan sektor perdagangan besar dan eceran dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi. Peranan sektor ini dalam pembentukan PDRB sangat dominan dimana pada tahun 2018 kontribusinya sebesar 34,00% naik dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 33,87%.

Tabel 2.96.
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 s.d. 2018

No	Sub Sektor Lapangan Usaha	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1,	Perdagangan Besar dan Eceran	32,71	33,90	33,98	33,87	34,00

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2019

4. Perindustrian

Pengertian industri menurut undang-undang tentang perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB yang dilihat melalui peranan sektor industri pengolahan mempunyai kecenderungan penurunan setiap tahunnya baik dilihat melalui atas dasar Harga Berlaku

maupun atas dasar Harga Konstan. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB atas dasar Harga Berlaku pada tahun 2018 sebesar 5,63% terjadi penurunan 22,56% dalam kurun waktu lima tahun, dimana pada tahun 2014 kontribusinya masih 7,27% sedangkan Tahun 2018 menjadi 5,63%. Perkembangan peranan sektor perindustrian terhadap PDRB tahun 2014 s.d. 2018 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.97.
Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 s.d. 2018

No.	Sektor Lapangan Usaha	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Industri Pengolahan	7,27	6,77	6,45	6,07	5,63

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2019

Tabel 2.98.
Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB
Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2014 s.d. 2018

No.	Sektor Lapangan Usaha	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Industri Pengolahan	7,80	7,57	7,22	6,86	6,75

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2019

Penunjang Urusan

a. Perencanaan Pembangunan

Terdapat tujuh indikator penunjang urusan perencanaan pembangunan Kota Bukittinggi. Pada tahun 2018 dilakukan revisi terhadap dokumen perencanaan RPJPD yang yang pada tahun 2019 ini akan ditetapkan dengan Perda, RPJMD yang ditetapkan Perda/Perkada, RKPD yang ditetapkan Perkada, Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA, Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD. Dan Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.

Berikut tabel indikator penunjang urusan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut :

Tabel 2.99.
Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2018

NO	INDIKATOR	Tahun 2018
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada
4.	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada
5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	= $\frac{300}{310} \times 100\%$ = 96,77%
6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	= $\frac{255}{300} \times 100\%$ = 85,00%

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi, tahun 2019.

Kota Bukittinggi sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi tahun 2006-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006, dan pada tahun 2018 sedang dilakukan revisi dan direncanakan akan ditetapkan dengan Perda tahun 2019. Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017. Adapun perencanaan tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2018 tanggal 29 Juni 2018.

b. Keuangan

Dalam urusan keuangan terdapat tujuh indikator, yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan, Persentase SILPA, Persentase belanja pendidikan, Persentase belanja kesehatan dan Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung, Bagi hasil kota, Penetapan APBD.

Berikut tabel indikator urusan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2018 :

Tabel 2.100.
Indikator Urusan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2018

No.	Indikator	Tahun 2018
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP (wajar tanpa pengecualian)
2.	Persentase SILPA	11,93%
3.	Persentase belanja pendidikan	21,01%
4.	Persentase belanja kesehatan	11,24%
5.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	62,94%
6.	Bagi hasil kota	2,26
7.	Penetapan APBD	Tepat waktu

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2019

Pemerintah Kota Bukittinggi sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) semenjak tahun 2014. Dengan demikian, Pemerintah Kota Bukittinggi sudah siap untuk menerapkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) secara penuh dalam pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, perbendaharaan, pembukuan dan pengelolaan aset.

Dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (3) menyatakan “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional”. Kota Bukittinggi memiliki persentase belanja pendidikan sebesar 21,01% yang artinya sudah melebihi dari target yang ditetapkan oleh amandemen keempat UUD 1945.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, pada dasarnya Pemda wajib mengalokasikan minimal 10 persen dari belanja APBD-nya untuk anggaran kesehatan. Anggaran tersebut dapat diprioritaskan untuk mendukung program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang merupakan program strategis dan program nasional. Pada tahun 2018, belanja kesehatan Kota Bukittinggi sudah diatas yang diamanatkan UU kesehatan yaitu sudah 11,24%. Untuk indikator Bagi hasil kota 2,26 dan Penetapan APBD tepat waktu.

c. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1) Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Sebagai upaya dalam mengembangkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) telah diamanatkan bahwa setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki hal dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran

Pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota Bukittinggi adalah melalui diklat, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus dan sejenisnya. Kalau dilihat dari rata-rata lama pegawai dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan di dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.101.
Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	20 jam				

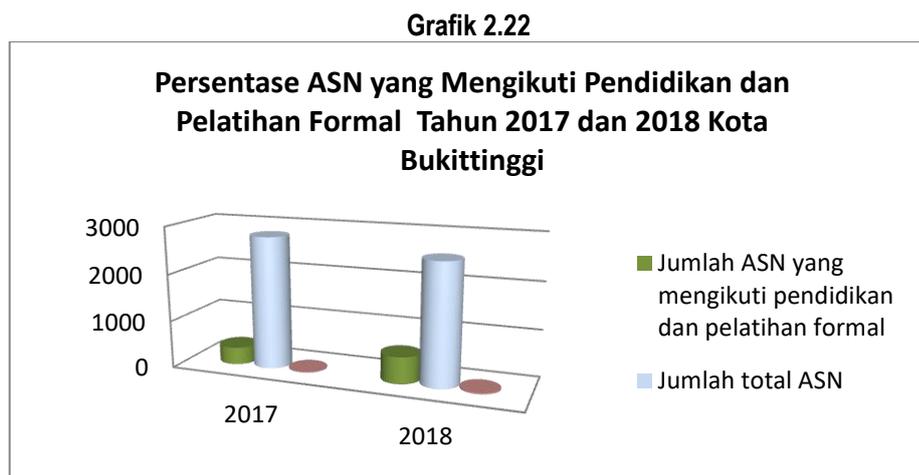
Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dari tabel tersebut di atas, kalau dilihat dari rata-rata pegawai yang masih rata-rata 20 jam dalam satu tahun yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan, dapat dilihat masih kurangnya kesempatan dari pegawai

untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Kota Bukittinggi. Sehingga upaya dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kota Bukittinggi belum memperlihatkan hasil yang signifikan.

2) Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pendidikan dan pelatihan formal untuk Aparatur Sipil Negeri (ASN) merupakan suatu kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas kualitas ASN tersebut. Salah satunya adalah dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kota Bukittinggi dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :



Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dari data tersebut di atas pada Tahun 2017 masih 13,10 % Aparatur Sipil Negara Kota Bukittinggi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, dan pada Tahun 2018 menunjukkan kenaikan yaitu 21,25%. Pada Tahun 2018, Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sebanyak 563 orang. Jumlah ini meliputi Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pengembangan kompetensi berupa diklat, bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya, baik yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota Bukittinggi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia maupun pengiriman peserta dengan biaya kontribusi melalui Kegiatan Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis sebanyak 515 orang. Sedangkan pengembangan kompetensi atau pendidikan dan pelatihan formal lainnya adalah melalui Tugas Belajar sebanyak 8 orang dan Izin Belajar sebanyak 40 orang. Adapun jumlah ASN Kota Bukittinggi yang dimaksud disini adalah ASN dari Pegawai Negeri Sipil yaitu 2649 orang.

3) Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi ASN dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan PNS. Diklat Struktural bagi ASN bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan dan sikap pegawai dalam melakukan jabatan secara professional dengan dilandasi oleh etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi dan menciptakan aparatur negara yang mampu sebagai pembaharu dan

perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.102.
Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	22	14	31	35	35
2.	Jumlah total jabatan ASN	589	589	589	595	560
3.	Persentase	3,74	2,38	5,26	5,88%	7,00%

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa masih sedikit/kecil persentase pejabat Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Pada tahun 2018 pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural sebanyak 35 orang, terdiri dari 5 orang Pim Tk. III dan 30 orang Pim Tk. IV. Mengingat keterbatasan dana yang tersedia pada Pemerintah Kota Bukittinggi sehingga untuk pelaksanaan atau pengiriman diklat struktural bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dilakukan secara bertahap setiap tahunnya.

4) Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi pemerintah:

Jabatan pimpinan tinggi adalah Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Sekretariat, Jabatan Administrasi adalah Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kasubag dan Kasubid. Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada instansi pemerintah adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan erat dengan satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan. Jumlah jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.103.
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017 dan 2018

NO	Uraian	2017	2018
1.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	26	26
2.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	558	558
3.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	999	984

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditindalajuti dengan Perda Kota Bukittinggi Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat perubahan dalam struktur jabatan Pimpinan Tinggi, yaitu menjadi 26. Demikian juga jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah sesuai Perda dimaksud, dihitung adalah eselon 3 dan 4 sehingga jumlahnya adalah 558 jabatan, sedangkan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada tahun 2018 sebanyak 984 jabatan.

d. Penelitian dan Pengembangan

Penunjang urusan penelitian dan pengembangan yang ada di Kota Bukittinggi berada pada Bapelitbang yang mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian ataupun telaahan akademis untuk menghasilkan rekomendasi bagi penetapan kebijakan dalam rangka problem solving. Berikut tabel indikator Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut :

Tabel 2.104.
Indikator Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2018

NO	INDIKATOR	Tahun 2018
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100%
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%
	Penerapan SIDA :	
3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	17,86%
4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	20,00%

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi, 2019

e. Pengawasan

Penunjang urusan pengawasan berada pada Inspektorat. Ada dua indikator yang ada seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.105.
Indikator Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2017

NO	INDIKATOR	Tahun 2017
1.	Persentase tindak lanjut temuan	$= \frac{114}{178} \times 100\% = 64,04\%$
2.	Jumlah Temuan BPK	14 Temuan

Sumber: Inspektorat, 2018

Dari tabel diatas dapat Persentase tindak lanjut temuan yang telah dilakukan yaitu sebesar 64,04 % dan jumlah temuan BPK sebanyak 14 temuan.

f. Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraannya bertugas melaksanakan fungsi penunjang. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, sekretariat memfasilitasi setiap kebutuhan DPRD Kota Bukittinggi. Terdapat 3 (tiga) indikator dalam melihat fungsi DPRD pada Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada Alat-Alat Kelengkapan Dewan, Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) serta Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, pembentukan Perda ke dalam Dokumen perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD. Selanjutnya tabel Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan adalah :

Tabel 2.106.
Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2018

No.	Indikator	Tahun 2018
1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota	Ada
2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada
3.	Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, pembentukan Perda ke dalam Dokumen perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota, seluruh fungsi dari DPRD Kota Bukittinggi selalu dijalankan dengan baik, mulai dari fungsi pengawasan, Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran. Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, pembentukan Perda ke dalam Dokumen perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD. Untuk Fungsi pembentukan Perda pada tahun 2017 lalu memang belum ada Perda inisiatif Dewan, namun tahun 2018 ini rencananya ada Perda inisiatif DPRD tersebut.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan daerah untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional.

Daya saing daerah di Kota Bukittinggi dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan daerah untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional.

Daya saing daerah di Kota Bukittinggi dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per-Kapita

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data yang ada menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB yang diciptakan di Kota Bukittinggi ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Artinya sebagian besar produk domestik yang dihasilkan di wilayah Kota Bukittinggi maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Tabel 2.107.
Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kota Bukittinggi 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (juta RP)	2.791.551,16	3.063.882,98	3.358.039,72	3.637.165,91	3.977.029,28
b. ADHK 2010 (juta RP)	2.340.260,83	2.439.042,59	2.547.416,35	2.667.402,73	2.814.669,87
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	55,63	54,36	54,43	53,63	53,36
Rata-rata Konsumsi per Kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB (Ribu Rp)	23.605,20	25.428,31	27.385,52	29.163,82	31.363,59
b. ADHK 2010 (Ribu Rp)	19.789,12	20.242,53	20.774,72	21.387,99	22.197,01
Pertumbuhan					
a. Total Konsumsi RT	4,93	4,22	4,44	4,71	5,52
b. Per Kapita	2,99	2,29	2,63	2,95	3,78
Jumlah Penduduk (org)	118.260	120.491	122.621	124.715	126.804

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sumber : BPS Kota Bukittinggi 2018

Data di atas menunjukkan bahwa periode tahun 2013-2017 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas harga berlaku) maupun harga rill (atas dasar harga Konstan). Pertambahan jumlah penduduk juga menjadi pendorong kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga, sehingga kenaikan tersebut juga kan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selama tahun 2013 – 2017 proporsi pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap total PDRB cenderung menurun dimana posisi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 55,63% dan terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 53,36 %. Untuk konsumsi per rumah tangga rata-rata meningkat dari tahun ke tahun baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, dimana pada tahun 2017 setiap rumah tangga menghabiskan dana sekitar 31.36 juta rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhannya meningkat sekitar 2,2 juta rupiah. Sementara atas dasar harga konstan (2010) rata-rata konsumsi per rumah tangga tumbuh pad kisaran 4 %, dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,78%. Dari table juga terlihat bahwa pertumbuhan rata-rata konsumsi perkapita menunjukkan peningkatan kisaran 2,29 s/d 3,78 persen.

b. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani sesuai data BPS tidak ada di Kota Bukittinggi karena Nilai Tukar Petani ini diberlakukan untuk Kabupaten yang tidak mengalami inflasi sedangkan di Kota Bukittinggi mempunyai laju inflasi dari tahun ke tahun.

c. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan

Jika dilihat dari Struktur komponen Konsumsi Rumah Tangga Kota Bukittinggi Tahun 2012 -2016 terlihat bahwa konsumsi Makanan, Minuman dan Rokok lebih dominan dari konsumsi lainnya, lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut

Tabel 2.108.
Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kota Bukittinggi Tahun 2012-2016

Kelompok Konsumsi	2012	2013	2014	2015*	2016**
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	59,71	63,61	69,10	75,08	81,50
b. Pakaian dan Alas Kaki	5,82	6,39	6,88	7,41	8,02
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	14,42	16,40	17,65	18,72	20,63
d. Kesehatan & Pendidikan	11,75	13,18	14,84	16,67	18,28
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	25,57	28,81	31,99	3,60	38,33
f. Hotel dan Restoran	6,04	6,87	7,57	8,33	9,13
g. Lainnya	11,71	12,93	14,39	15,10	16,47
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Sumber : BPS Kota Bukittinggi 2017

Dari data diatas terlihat bahwa pengeluaran untuk konsumsi makanan dan minuman meningkat dari tahun ketahun pemingkatan ini cukup signifikan dimana pada tahun 2016 adalah sebesar 81,50% meningkat 6,42% dibanding tahun 2015 hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pokok masih tinggi sehingga daya beli untuk kebutuhan lain tidak menjadi prioritas.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Ketaatan Terhadap RTRW Rencana Tata Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 -2030.

Ketaatan terhadap pemanfaatan ruang sesuai dengan Pola Ruang yang telah digariskan dalam Perda RTRW di Kota Bukittinggi belum terdata dengan baik namun tindakan kearah penertiban itu sudah dilakukan sejak dari penerbitan Advis Planning sebagai dasar dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dan pengawasan yang dilakukan terhadap IMB yang telah diterbitkan serta terhadap bangunan yang dibangun secara liar/belum mengontongi IMB.

Dalam Advis Planning dijelaskan pola ruang lahan yang dimohonkan oleh pemohon berikut intensitas kawasan tersebut sehingga dalam membangun akan meminimalkan penyimpangan pemanfaatan ruang yang akan terjadi. Dari tahun ke tahun permohonan Advis Planning cenderung meningkat, peningkatan ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap ketaatannya dalam pemanfaatan ruang sesuai aturan yang berlaku

b. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif dilihat dari jumlah luas produktif dibanding dengan jumlah keseluruhan wilayah budidaya. Luas wilayah budidaya Kota Bukittinggi sesuai RTRW (Perda 11 tahun 2019) adalah 1966.634 Ha sedangkan luas wilayah produktif berbeda-beda dari tahun ke tahun, sedangkan ratio dari tahun 2013 – 2017 tidak dapat disajikan secara utuh karena data tidak tersedia namun dari data yang ada terlihat bahwa luas wilayah produktif tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Tabel 2.109.
Rasio Luas Wilayah Produktif dan Luas Seluruh Wilayah Budidaya

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas Wilayah Produktif	1061	1015,13	998	1016,17	992,63
2	Luas Seluruh Wil. Budidaya	NA	NA	NA	NA	1966,63
	Rasio (1: 2)	-	-	-	-	50,47

Sumber : Data Olahan 2019

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka Kriminalitas

Rasa aman yang dirasakan masyarakat kota merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan kondisi ini dapat tergambarkan dari angka kriminalitas setiap tahunnya. Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat. Semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Angka kriminalitas Kota Bukittinggi dengan berbagai jenis tindak kriminal sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2.110.
Angka Kriminalitas yang Tertangani Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah kriminal yang tertangani	440	638	549	465	449
Jumlah penduduk	120.469	122.621	124.715	119.183	121.590
Angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk.	37,29	52,03	44,02	39,01	36,93

Sumber: Polres Bukittinggi, Data diolah

Perkembangan angka kriminalitas Kota Bukittinggi pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun angka ini tidak sepenuhnya merupakan tindak kriminal yang ada di wilayah Kota Bukittinggi saja karena wilayah hukum Polres Bukittinggi melingkupi Kota Bukittinggi dan Wilayah Agam Bagian Timur, sehingga tindak kriminalitas pada Wilayah Administratif Kota Bukittinggi tergabung juga dengan tindak kriminalitas di sebagian Wilayah Administratif Kabupaten Agam.

Dengan meningkatnya angka kriminalitas ini memberikan sinyal kepada pemerintah kota agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi munculnya tindak kriminal hal ini sangat penting karena Kota Bukittinggi adalah Kota Wisata dimana kunjungan wisatanya selalu meningkat sangat mengharapkan investor untuk dapat berperan dalam meningkatkan sarana prasarana pariwisata yang ada di Kota Bukittinggi.

Upaya peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas diperlukan koordinasi yang lebih intens dengan instansi terkait dan juga perlu diciptakan aktivitas-aktivitas ditengah-tengah masyarakat yang bertajuk mengangkat nilai-nilai agama dan budaya.

b. Jumlah Demonstran

Demonstrasi merupakan wujud protes dari sekelompok orang yang merasa tidak puas terhadap sebuah kebijakan yang disampaikan di depan umum.

Di Kota Bukittinggi demonstrasi yang cukup menarik perhatian sepanjang tahun 2016 – 2018 terjadi sebanyak 3 kali yang dilakukan oleh Mahasiswa, pedagang, forum keagamaan. Jumlah demonstran diikuti ratusan hingga ribuan massa. Mereka menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang etis, tidak anarkis dan tetap menjunjung tinggi hak-hak orang lain dan disampaikan melalui musyawarah yang diterima langsung oleh pemerintah Kota Bukittinggi dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga kondisi ini terkendali dan tidak akan mempengaruhi iklim investasi di Kota Bukittinggi

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

a. **Kualitas Tenaga Kerja**

Tenaga Kerja yang berkualitas merupakan sumber daya yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan merupakan faktor pendukung perekonomian di instansi pemerintah maupun swasta. Daya saing dan produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, salah satunya disebabkan oleh tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah dengan keterampilan dan keahlian yang juga masih minim. Selain itu kualitas tenaga kerja yang rendah juga dilatarbelakangi oleh faktor kondisi internal tenaga kerja seperti motivasi kerja, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan, inisiatif dan kreatifitas.

Salah satu cara yang harus diterapkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja antara lain dengan mendirikan berbagai pusat pelatihan tenaga kerja, menyusun dan melaksanakan program-program yang mendukung tercapainya system ketenagakerjaan yang ideal serta memberikan pelatihan-pelatihan secara gratis. Hal ini dimaksudkan untuk melatih seseorang menjadi manusia terampil, berinisiatif dan berkarakter serta kreatif.

Kualitas tenaga kerja di Kota Bukittinggi didasarkan pada jumlah tamatan S1, S2 dan S3 yang bekerja pada instansi pemerintah maupun swasta. Secara data dapat terlihat penduduk Kota Bukittinggi dari kualitas tenaga kerja adalah tamatan S1 dari berbagai disiplin ilmu. Disusul jumlah lulusan S2 namun dengan perbandingan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan antara lain, angkatan kerja pada tamatan S1, sangat terbatas untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan S2, karena sangat terbatasnya perguruan tinggi yang mempunyai program study S2 di Kota Bukittinggi dan juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan. Berikut dapat dilihat perkembangan kelulusan tingkat strata 1 s.d 3 tahun 2014 - 2018:

Tabel 2.111.
Rasio Lulusan S1 / S2 / S3 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah lulusan S1	7.443	8.544	10.063	9.622	10.454
2.	Jumlah lulusan S2/S3	812	978	1.322	893	956
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	8.255	9.522	11.385	10.515	11.410
5.	Jumlah penduduk	120.491	122.621	124.715	119.183	121.590
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	6,85	7,77	9,13	8.82	9.38

Dari tabel diatas tergambar bahwa rasio lulusan S1, S2, dan S3 sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas tenaga kerja di Kota Bukittinggi sudah semakin meningkat dan diharapkan bahwa mereka adalah tenaga-tenaga terampil yang tidak hanya mempunyai ilmu akademis namun juga memiliki keterampilan dan pengalaman kerja.

b. Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan yang sudah tidak produktif lagi.

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Penduduk muda usia dibawah 15 tahun disebut sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomi masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Penduduk usia 65 tahun ke atas juga dianggap sudah tidak produktif lagi. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap usia produktif. Berikut dapat dilihat rasio ketergantungan Kota Bukittinggi tahun 2013 s.d 2017:

Tabel 2.112.
Rasio Ketergantungan Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	33.148	33.597	33.999	34.375	34,710
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	5.728	5.399	5.557	5.751	5.982
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	38.426	38.996	39.556	40.126	40.692
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	79.834	81.495	83.065	84.589	86.112
5.	Rasio Ketergantungan	48,13	47,85	47,62	47,44	47,25

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka 2018

Pada tabel di atas terlihat bahwa rasio ketergantungan Kota Bukittinggi dari tahun 2013 – 2017 cenderung menurun hal ini menggambarkan bahwa beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk

belum produktif dan penduduk tidak produktif berkurang, kondisi ini akan berdampak positif bagi tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi.

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Bukittinggi dapat dirangkum dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.113.
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bukittinggi

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
	2014	2015	2016	2017	2018		
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan	4.592.478,19	4.874.254,56	5.169.275,87	5.483.598,44		+	Sesuai
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	5.635.927,99	6.169.750,95	6.781.886,09	7.453.106,84		+	Sesuai
PDRB per kapita Berdasarkan Harga Konstan	38,11	39,75	41,45	43,24		+	Sesuai
PDRB per kapita Berdasarkan Harga Berlaku	46,77	50,32	54,38	58,78		+	Sesuai
Indeks Gini	-	-	0,329	0,3196	-	< 0,3	Belum tercapai
Kesejahteraan Sosial							
Pendidikan							
Angka melek huruf	99,20	99,79	98,96	99,95	99,63	100	Belum Tercapai
Angka Partisipasi Murni SD/MI	108,52	112,29	112,37	108,67	100,82	110	Belum Tercapai
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	55,70	132,38	111,39	93,75	97,78	115	Belum Tercapai
Angka Partisipasi	136,47	101,39	117,98	129,45	128,59	110	Melampaui

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
	2014	2015	2016	2017	2018		
Murni SMA/MA/SMK							
Angka Partisipasi Kasar SD/MI	125,04	130,93	130,94	125,35	117,28	125	Belum Tercapai
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	133,69	139,58	132,38	126,43	115,33	145	Belum Tercapai
Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK	199,34	200,33	137,47	145,73	125,35	135	Belum Tercapai
Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) SD/MI	23,51	13,42	15,89	18,78	13,79	+	Sesuai
Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) SMP/MTs	23,51	16,21	18,26	19,20	6,80	+	Sesuai
Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) SMA/MA/SMK	11,06	27,79	19,82	35,66	7,96	+	Sesuai
Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Perguruan Tinggi	10,41	10	14,15	17,20	-	+	Sesuai
PELAYANAN UMUM							
Pelayanan Urusan Wajib							
Pendidikan							
Pendidikan dasar							
Angka partisipasi sekolah SD/MI	1.120,8	956,4	1.123,7	1.086,7	1.000,2		
Angka partisipasi sekolah SMP/MTs	925,4	1.294,9	1.114	937,52	977,8		
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	49,53	45,20	50,41	50,01	46,74		
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	26,21	27,55	25,37	25,17	22,92		
Rasio guru terhadap murid SD/MI	549,46	557,20	574,38	717,56	543,50		
Rasio guru terhadap murid SMP/ MTs	751,51	748,97	735,37	743,82	540,66		
Pendidikan menengah							
Angka partisipasi sekolah SMA/MA/SMK	1.279,01	1.303,38	1.267,63	1.294,53	1.426,35		

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
	2014	2015	2016	2017	2018		
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK	36,51	34,17	38,77	38,48	37,50		
Rasio Guru terhadap murid SMA/MA/SMK	1.115	1.292	1.205	1.287	946		
Kesehatan							
Rasio posyandu per satuan balita	15,16	14,14	13,80	11,14	11,06	13,5	Melampaui
Rasio puskesmas per satuan penduduk	0,055	0,054	0,062	0,062	0,059	1,32	Belum Tercapai
Rasio poliklinik per satuan penduduk	0,018	0,017	0,018	0,018	0,017	1,32	Belum Tercapai
Rasio pustu per satuan penduduk	0,129	0,125	0,123	0,122	0,118	1,32	Belum Tercapai
Rasio rumah sakit persatuan penduduk	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,05	Tercapai
Rasio dokter persatuan penduduk	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,030	Melampaui
Rasio tenaga medis persatuan penduduk	-	10,861	11,341	15,609	15,685		
Lingkungan Hidup							
Persentase penanganan sampah	64,74	78,49	79,27	85,15	84,95	71,8	Melampaui
Persentase RT yang mendapat akses air minum	39,42	37,188	35,91	35,37	33,80	59,41	Belum Tercapai
Pekerjaan Umum							
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,80	0,80	0,82	0,82	0,85	0,87	Belum Tercapai
Rasio jaringan irigasi	0,0016	0,0015	0,0016	0,0016	0,0015	0,0086	Belum Tercapai
Rasio Mesjid persatuan penduduk	0,41	0,39	0,41	0,39	0,38		
Rasio Mushalla persatuan penduduk	0,85	0,87	0,88	0,825	-		
Rasio Gereja Katolik persatuan penduduk	1,33	0,96	0,94	0,93	0,91		
Rasio Gereja Protestan persatuan penduduk	1,07	0,63	0,62	0,61	0,59		
Rasio tempat	1,08	3,24	3,50	3,58	3,41	0,61	Melampaui

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
	2014	2015	2016	2017	2018		
pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk							
Perhubungan							
Jumlah penumpang Antar Kota Dalam Propinsi	3.724.165	-	3.060.979	1.882.864	2.005.866	+	Belum Tercapai
Jumlah penumpang Antar Kota Antar Propinsi	2.631.863	-	2.907.143	928.096	514.725	+	Belum Tercapai
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1	1	1	1	1	5	Belum Tercapai
Rasio ijin trayek perjumlah penduduk	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	Sesuai
Rasio uji KIR perjumlah penduduk	68,38	73,19	69,55	71,03	70,75	100	Belum Tercapai
Koperasi							
Persentase koperasi aktif	79,81	70,75	75,49	82,18	81,19	100	Belum Tercapai
Kependudukan							
Jumlah penduduk laki-laki	53.234	53.045	54.933	55.287	57.261		
Jumlah penduduk perempuan	54.571	57.467	58.636	59.128	60.999		
Rasio penduduk yang memiliki KTP	71,32	29,33	41,98	48,01	67,59	100	Belum Tercapai
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
Rasio peserta KB baru	-	-	-	-	21,21		
Rasio peserta KB aktif	-	-	-	-	69,50	72,95	Belum Tercapai
Rasio keluarga pra sejahtera	-	-	-	-	0,0174	0,0171	Sesuai
Rasio keluarga sejahtera	-	-	-	-	0,119	0,171	Melampaui
Penanaman Modal							
Jumlah investor PMDN/PMN	-	-	-	-	12		
Jumlah investasi PMDN/PMN (juta)	-	-	-	-	65.934		

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
	2014	2015	2016	2017	2018		
rupiah)							
Kebudayaan							
Keperempuanan dan Olahraga							
Jumlah organisasi Pemuda	155	156	156	156	197	80	Melampaui
Jumlah organisasi Olahraga	53	56	56	60	60	180	Belum Tercapai
Jumlah kegiatan keperempuanan	61	63	63	72	72	84	Belum Tercapai
Jumlah kegiatan Olahraga	43	49	53	57	57	60	Belum Tercapai
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja perjumlah penduduk	8,25	8,80	9,06	8,82	7,86	+	Belum Tercapai
Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk	-	-	44,82	10,49	2,029	+	Belum Tercapai
Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur							
Aksesibilitas Daerah							
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1 : 4	1 : 4	1 : 3	1 : 4	1 : 3		
Penataan Wilayah							
Rasio luas Wilayah Industri per luas seluruh wilayah budi daya	-	-	-	-	1,48		
Rasio luas Wilayah Industri per luas seluruh wilayah budi daya	-	-	-	-	86,82		
Rasio jumlah pos Siskamling per kelurahan	3,41	3,41	3,41	3,54	4,08	7	Belum Tercapai
Pertumbuhan Ekonomi	5,51	6,12	6,23	6,39	6,45	+	Sesuai
Kemiskinan							
Jumlah KK Miskin berdasarkan data Susenas (orang)	-	-	-	6.700	6.400		
Petugas Linmas							
Rasio petugas Linmas per jumlah penduduk	-	-	-	0,0044	0,0010	0,0050	Belum Tercapai
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran							

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
	2014	2015	2016	2017	2018		
Rasio jumlah mobil pemadam kebakaran per jumlah penduduk	0,0037	0,0036	0,0035	0,0034	0,0033		
Tingkat waktu tanggap (Response Time) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)							
Rasio ketepatan waktu pemadaman kebakaran per jumlah kejadian kebakaran	-	-	100	100	100	100	Sesuai
Pemberdayaan Masyarakat							
Jumlah kelompok Dasa Wisma		281	282	288	288	+	Sesuai
Jumlah LSM							
PKK Aktif							
Pos Yandu Aktif	127	128	129	131	132	+	Sesuai
Statistika							
Komunikasi dan Informatika							
Jumlah surat kabar Nasional dan Lokal	-	-	26 jenis	29 jenis	29 jenis		
Perpustakaan							
Jumlah perpustakaan	1	1	1	1	1	0	Melampaui
Jumlah pengunjung perpustakaan	190.280	71.226	42.194	-	-		
Pelayanan Urusan Pilihan							
Ketahanan Pangan							
Ketersediaan pangan utama (angka konsumsi 123 kg/thn/org x jumlah penduduk – produksi beras x 10%)	0,85	0,92	0,99	0,86	1,01		
Pertanian							
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
Produktivitas Padi	-	53,97	51,61	68,40	54,24		

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
	2014	2015	2016	2017	2018		
(Ton/Ha)							
Produktivitas Jagung (Ton/Ha)	34,61	42,13	38,45	31,29	85,81		
Produktivitas Ketela Rambat (Ton/Ha)	164,35	140,00	202,98	145,04	258,17		
Produktivitas Ketela pohon (Ton/Ha)	1.505	1.776	2.542	3.738	3.314		
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	2,27	2,44	2,39	2,30	2,21		
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan	1,94	1,87	1,75	1,67	1,58		
Pariwisata							
Jumlah kunjungan wisata	306.413	326.413	358.875	386.993	436.212	+	Sesuai
Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	37,5	37,18	36,9	36,88	38,19	+	Sesuai
Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan	37,53	36,81	36,77	36,92	37,31	+	Sesuai
Perdagangan							
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	18,15	18,63	18,86	18,97	19,66	+	Sesuai
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan	17,42	17,36	17,42	17,53	17,78	+	Sesuai
Perindustrian							
Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	9,97	10,01	9,51	9,08	8,66		
Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan	10,37	10,22	9,94	9,69	9,43		

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
	2014	2015	2016	2017	2018		
DAYA SAING DAERAH							
Kemampuan Ekonomi							
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
Produktivitas total daerah							
Fasilitas Bank dan Non Bank							
Jenis dan jumlah Bank	16	19	20	21	19	16	Melampaui
Jumlah Bank Umum Konvensional	9	10	12	12	10		
Jumlah Bank Umum Syaria'ah	4	6	5	6	6		
Jumlah BPR Syaria'ah	3	3	3	3	3		
Jenis dan jumlah Perusahaan Asuransi	10	10	10	10	10	10	Sesuai
Jumlah Perusahaan Asuransi Kerugian Konvensional	5	5	5	5	5		
Jumlah Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional	5	5	5	5	5		
Ketersediaan jumlah Restoran/ Rumah Makan							
Jumlah Usaha Rumah Makan Kelas A	-	-	4	4	-		
Jumlah Usaha Rumah Makan Kelas B	-	-	2	2	-		
Jumlah Usaha Rumah Makan Kelas C	-	-	4	4	-		
Jumlah Usaha Rumah Makan Kelas D	-	-	8	8	-		
Jumlah Usaha Rumah Makan Kelas E	-	-	-	-	-		
Jumlah Usaha Rumah Makan Non Kelas	-	-	34	38	-		

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
	2014	2015	2016	2017	2018		
Jumlah Kursi Usaha Rumah Makan Kelas A	-	-	452	485	-		
Jumlah Usaha Rumah Makan Kelas B	-	-	450	465	-		
Jumlah Usaha Rumah Makan Kelas C	-	-	341	371	-		
Jumlah Usaha Rumah Makan Kelas D	-	-	472	485	-		
Jumlah Usaha Rumah Makan Kelas E	-	-	-	-	-		
Jumlah Usaha Rumah Makan Non Kelas	-	-	2.353	2.651	-		
Ketersediaan Penginapan							
Jumlah hotel	-	57	57	60	63	58	Melampaui
Jumlah hotel bintang	-	14	15	15	16		
Jumlah hotel non bintang	-	43	42	45	47		
Jumlah kamar hotel bintang	-	748	763	762	898		
Jumlah kamar hotel non bintang	-	618	616	831	732		
Jumlah tempat tidur hotel bintang	-	1.499	1.529	1.462	1.526		
Jumlah tempat tidur hotel non bintang	-	1.252	1.198	1.676	1.370		
Iklim Berinvestasi							
Keamanan dan Ketertiban							
Angka Kriminalitas yang tertangani	-	45,82	50,45	84,16	88,02	+	Sesuai
Jumlah Demonstrasi	-	4	0	0	1	-	Sesuai
Sumber Daya Manusia							
Kualitas Tenaga Kerja							
Rasio lulusan S1/S2/S3 per jumlah penduduk	-	729,264	787,769	804,221	815,736	1.278	Belum tercapai
Rasio ketergantungan (jumlah penduduk usia tidak produktif/jumlah penduduk usia produktif)	60,63	56	51,26	55,97	48,17	45	Belum tercapai

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2018 dan realisasi RPJMD Tahun 2016-2021 diuraikan sebagai berikut :

2.2.1. Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan setiap tahun dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi dan memberikan pelayanan sesuai kewenangan masing-masing. Keberhasilan pencapaian target dari kegiatan dan program akan mendorong tercapainya target sasaran perangkat daerah dan lebih lanjut akan memberikan dampak pada pencapaian target sasaran pembangunan Kota Bukittinggi. Penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan digunakan untuk mengetahui :

- a. Tingkat capaian kinerja yaitu dengan membandingkan antara realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD dengan rencana program dan kegiatan dalam RKPD; dan
- b. Tingkat capaian (penyerapan) anggaran yaitu membandingkan antara realisasi penyerapan dana/anggaran program dan kegiatan berdasarkan laporan realisasi APBD dengan pagu anggaran yang direncanakan dalam RKPD.

Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 ini mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pengendalian dan Evaluasi merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah untuk menjamin konsistensi pelaksanaan dan menilai sejauh mana capaian kinerja dan anggaran RKPD dapat direalisasikan serta merekomendasikan solusi bagi kegiatan-kegiatan SKPD yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya.

Pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD bertujuan agar SKPD mampu menyusun rencana Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan aktivitas/sub kegiatan sesuai jadwal yang tepat dan ketersediaan sumber daya, disamping itu dapat memaksimalkan pencapaian keluaran (output) kegiatan untuk pencapaian hasil yang optimal berdasarkan realisasi target kinerja sasaran per triwulannya. Hasil evaluasi ini juga akan digunakan sebagai bahan untuk membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD pada akhir tahun.

Monitoring dan Evaluasi RKPD dilaksanakan setiap akhir triwulan dengan Aplikasi e-monev berbasis Website terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) khususnya pelaporan Belanja Langsung APBD Kota Bukittinggi. Dimana setiap Admin operator masing-masing SKPD mengentrikan seluruh program/kegiatan dan rincian aktivitas dengan batas waktu pengentrian setiap akhir triwulan ditetapkan tanggal

10 setelah berakhirnya triwulan.

Program dan kegiatan yang dimonitoring dan evaluasi adalah Program dan Kegiatan yang dianggarkan pada Belanja Langsung SKPD Tahun 2018. Program dan Kegiatan tersebut dibagi pada 28 SKPD dengan rincian masing-masing sebagai berikut :

Tabel 2.114.
Jumlah Program dan Kegiatan SKPD Hasil Monitoring dan Evaluasi Tahun 2018

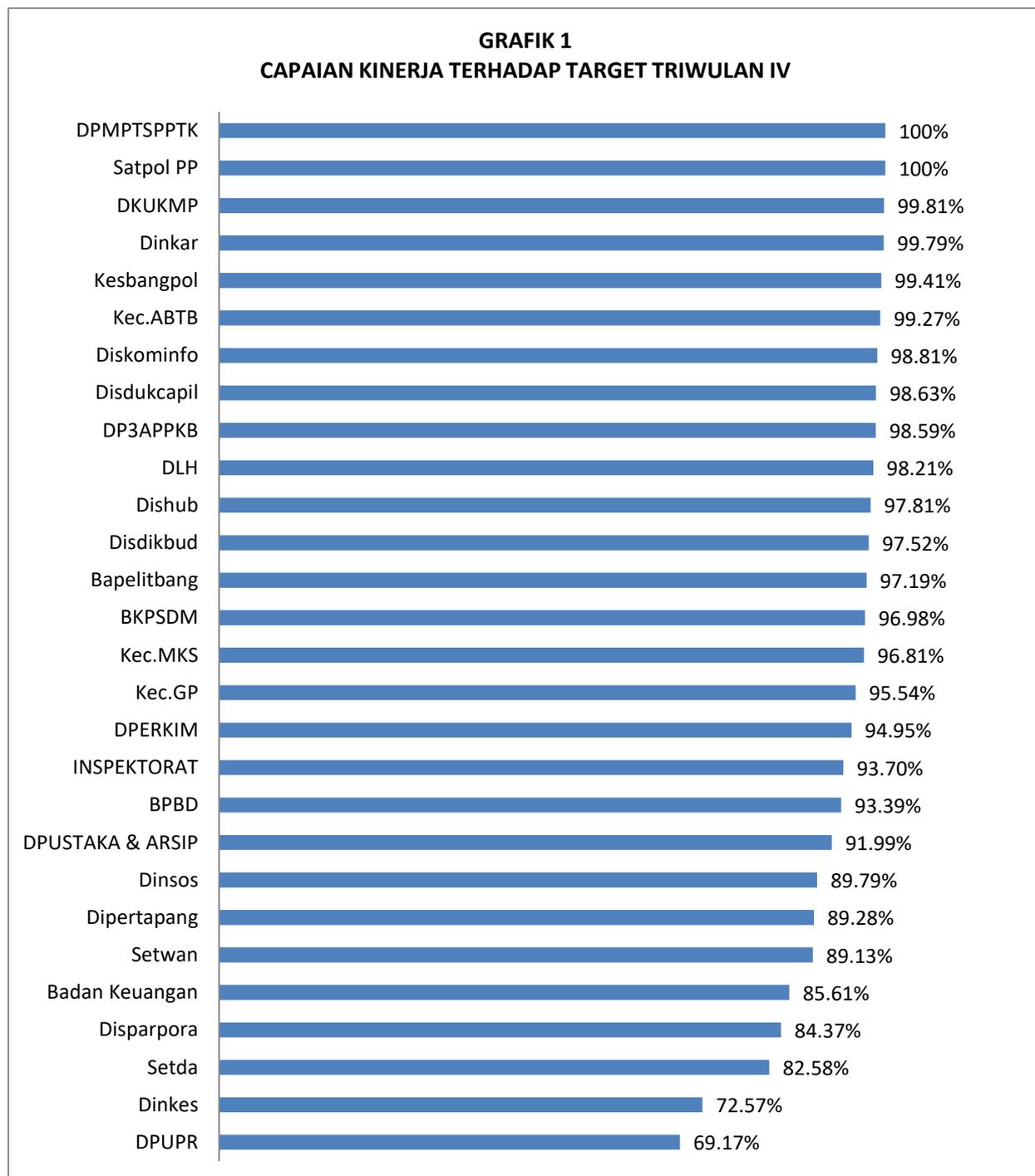
No	SKPD	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan
1	BKPSDM	7	45
2	Badan Keuangan	7	69
3	BPBD	5	22
4	Bapelitbang	10	47
5	Dinas Kebakaran	3	25
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	27
7	Dinas Kesehatan	19	92
8	Dinas Kominfo	9	29
9	Dinas KUKMP	9	39
10	Dinas Lingkungan Hidup	8	69
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	8	69
12	Dinas PUPR	21	92
13	Dinas P3APPKB	11	49
14	Dinas PMPTSPPTK	12	55
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12	170
16	Dinas Perhubungan	8	31
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8	37
18	Dinas Pertanian dan Pangan	16	65
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	33
20	Dinas Satpol PP	6	35
21	Dinas Sosial	10	40
22	Inspektorat	5	27
23	Kantor Kesbangpol	9	34
24	Sekretariat Daerah	15	108
25	Sekretariat DPRD	3	44
26	Kecamatan ABTB	7	109
27	Kecamatan Guguk Panjang	8	115
28	Kecamatan MKS	7	141
	JUMLAH	251	1718

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPd tahun 2018 keadaan sampai dengan Triwulan IV dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Capaian Realisasi Kinerja Triwulan IV

Dari 1718 Kegiatan yang dianggarkan pada Belanja Langsung di 28 SKPD pada APBD Perubahan 2018, jika

diukur dari Target Triwulan IV capaian Realisasi Kinerja tingkat Kota Bukittinggi sampai dengan akhir Triwulan IV adalah 93,24% yang berada pada kategori Tinggi. Pada umumnya semua SKPD telah mencapai realisasi kinerja dengan kategori Tinggi dan Sangat Tinggi. Capaian realisasi Kinerja kegiatan semua SKPD yang dapat dilihat pada Grafik I.



Berdasarkan Grafik diatas sebagian besar SKPD telah berada pada kategori Sangat Tinggi yaitu sebanyak 20 SKPD, sementara 6 SKPD berada pada kategori tinggi dan 2 SKPD lainnya masih berada pada kategori Sedang. SKPD dengan kategori sedang yaitu :

- 1) Dinas Kesehatan
- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dari data yang tersaji pada beberapa SKPD telah mencapai realisasi kinerja triwulanan dengan kategori sangat tinggi dan tinggi, yaitu :

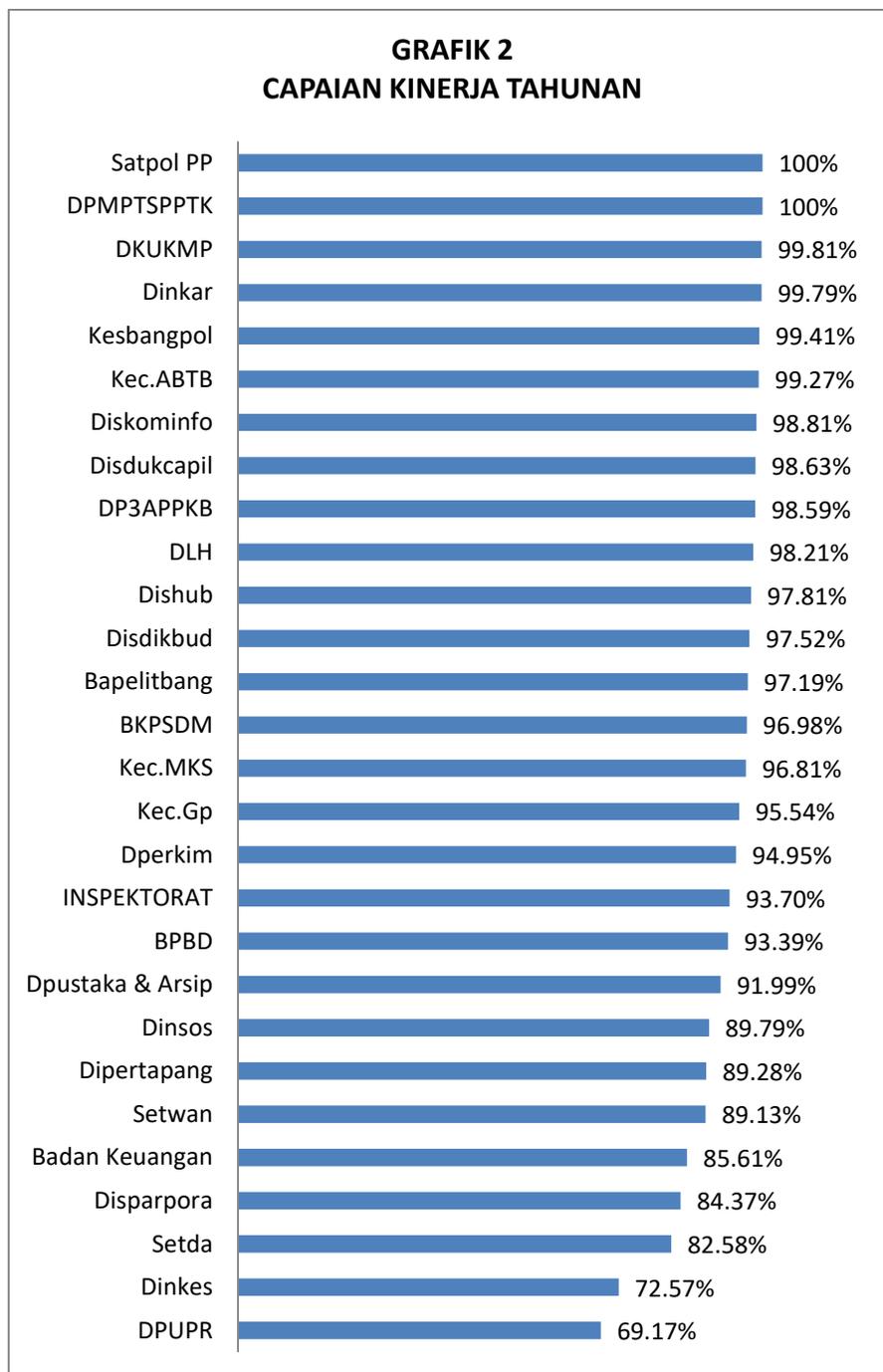
a. Kategori Sangat Tinggi

- 1) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
- 2) Dinas Satpol PP
- 3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
- 4) Dinas Kebakaran
- 5) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 6) Kecamatan ABTB
- 7) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 9) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
- 10) Dinas Lingkungan Hidup
- 11) Dinas Perhubungan
- 12) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 13) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
- 14) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 15) Kecamatan MKS
- 16) Kecamatan Guguk Panjang
- 17) Inspektorat
- 18) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 19) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 20) Dinas Perpustakaan dan Arsip

b. Kategori Tinggi

- 1) Dinas Sosial
- 2) Dinas Pertanian dan Pangan
- 3) Sekretariat DPRD
- 4) Badan Keuangan
- 5) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
- 6) Sekretariat Daerah

Sementara itu jika dilihat dari Kinerja Tahunan SKPD sampai Triwulan IV tercapai sebesar 85,68% (rata-rata tertimbang) atau berada pada kategori Sangat Tinggi. Selengkapnya capaian Kinerja Tahunan SKPD dapat dilihat pada Grafik berikut :



Dari Grafik Data Tahunan yang secara umum sama dengan data Triwulan IV terlihat bahwa sebagian besar SKPD telah berada pada kategori Sangat Tinggi yaitu sebanyak 20 SKPD, sementara 6 SKPD berada

pada kategori tinggi dan 2 SKPD lainnya masih berada pada kategori Sedang. SKPD dengan kategori sedang yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Kedua SKPD ini berada pada kategori sedang disebabkan karena :

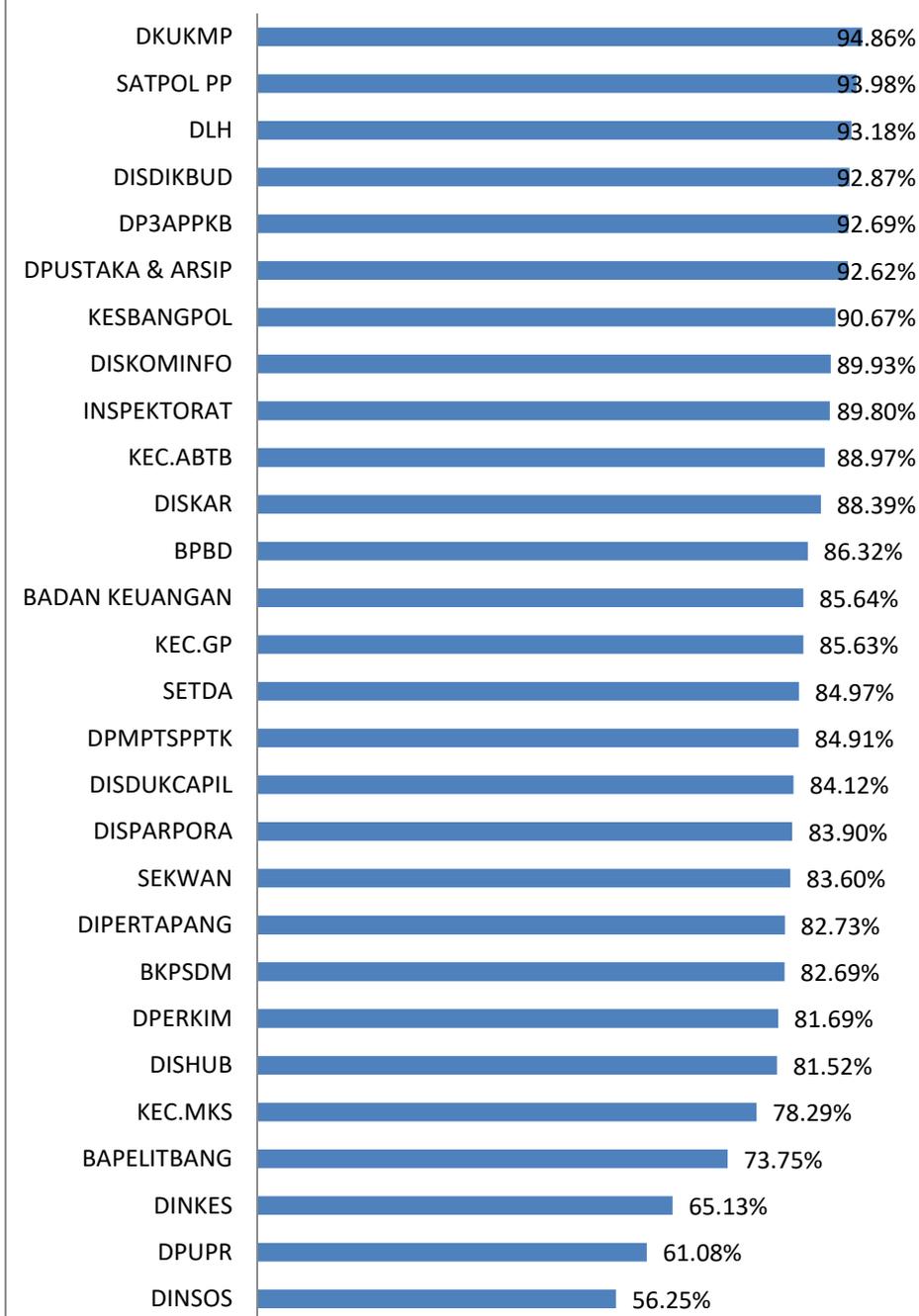
- 1) Dinas Kesehatan, beberapa kegiatan tidak terealisasi secara maksimal yaitu antara lain Pembangunan Rumah Sakit Daerah yang dianggarkan sebesar 40,48 Milyar hanya terserap 26,15 Milyar, selain itu kegiatan Rehabilitasi gedung Puskesmas, Pustu, Poskeskel (DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar 2018) tidak terealisasi karena pada tahun 2019 ada relokasi/pembangunan gedung baru puskesmas tersebut yang juga bersumber dari dana DAK.
- 2) Dinas PUPR, beberapa kegiatan tidak dapat direalisasikan/gagal karena kegiatan tersebut muncul pada APBD Perubahan dimana kegiatan tersebut bersifat Fisik sehingga waktu yang dapat digunakan untuk merealisasikan kegiatan tersebut terbatas.

b. Capaian Realisasi Keuangan

Jumlah Alokasi Belanja Langsung seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp.507.723.311.123,- dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 400.870.300.648,- atau 78,95%. Persentase realisasi belanja langsung pada Triwulan IV tertinggi pada SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dengan realisasi mencapai 94,86% dan yang terendah adalah Dinas Sosial dengan capaian realisasi 56,25%.

Permasalahan yang menjadi sebagian besar kendala terhadap pencapaian realisasi keuangan pada umumnya berkaitan dengan tidak optimalnya penyerapan anggaran akibat beberapa kendala teknis di lapangan. Secara keseluruhan tingkat capaian realisasi keuangan seluruh SKPD dapat dilihat pada grafik berikut :

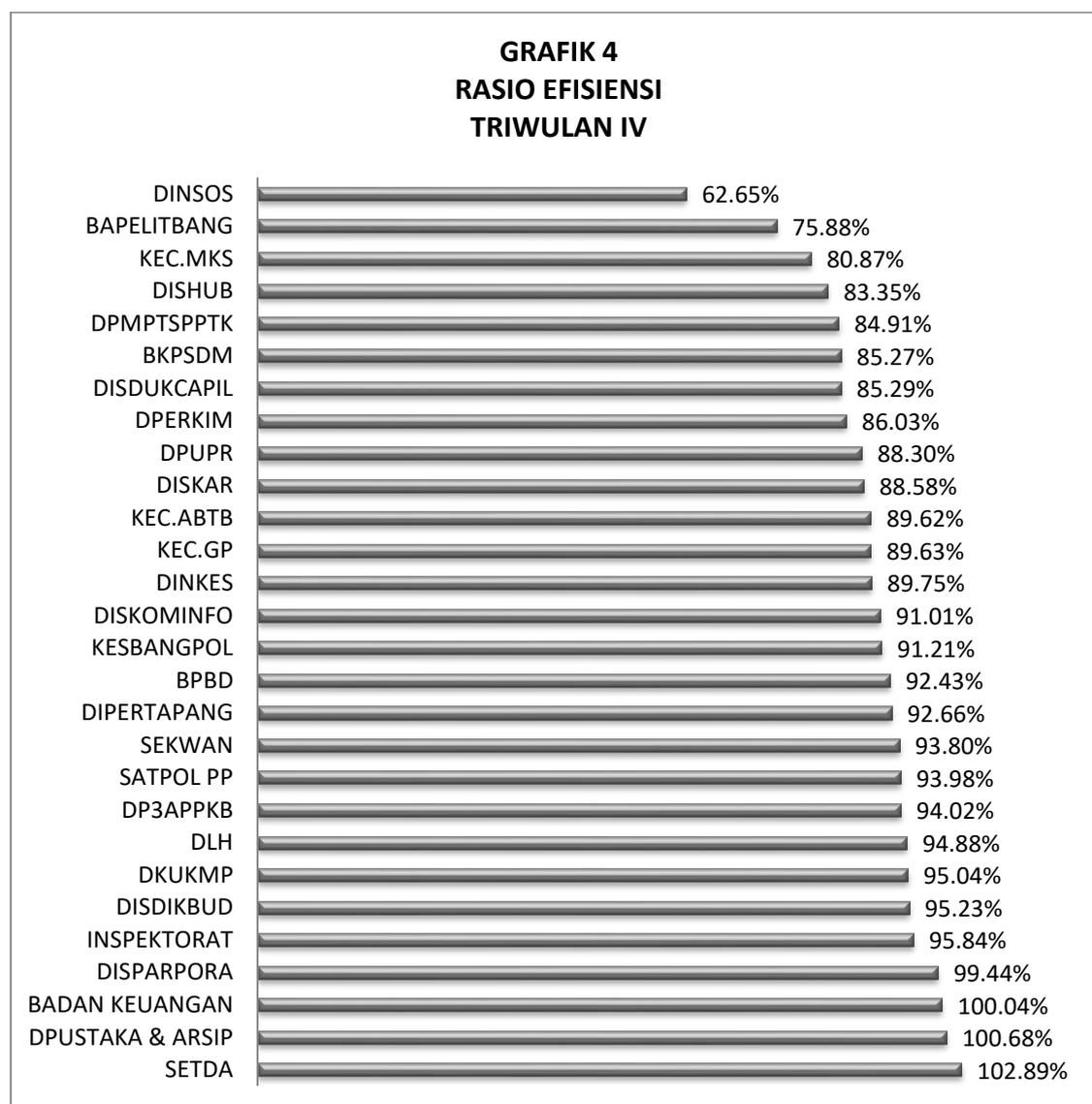
**GRAFIK 3
PERSENTASE REALISASI KEUANGAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV**



Capaian Realisasi keuangan merupakan hal yang berbeda dengan realisasi kinerja karena realisasi keuangan belum tentu menunjukkan kinerja. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari sejalannya realisasi fisik dan keuangan dengan capaian yang sesuai dengan target yang telah direncanakan.

c. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya persentase realisasi keuangan dengan realisasi kinerja fisik sampai dengan Triwulan IV. Kinerja Pemerintah Daerah dikatakan Efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan SKPD semakin baik dan efisien dalam penggunaan sumber daya.



Hasil Analisis Efisiensi menunjukkan bahwa sebagian besar SKPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi telah efisien dalam penggunaan anggaran sampai dengan Triwulan IV yang dilihat dari rasio efisiensi yang berada dibawah 100%. Adapun SKPD yang paling efisien adalah Dinas Sosial dengan rasio

efisiensi sebesar 62,65% dimana untuk mencapai 89,79% kinerja fisik, Dinas Sosial hanya menghabiskan 56,25% Anggaran keuangan.

Sedangkan 2 SKPD menunjukkan inefisiensi, sebagaimana terlihat dari rasio yang berada diatas 100%. SKPD yang inefisien adalah :

- 1) Badan Keuangan, dengan rasio 100,04%
- 2) Dinas Perpustakaan dan Arsip, dengan rasio 100,68%
- 3) Sekretariat Daerah, dengan rasio 102,89%

Capaian kinerja dan realisasi anggaran SKPD sampai dengan triwulan II untuk program dan kegiatan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2019 dapat dilihat dari tabel evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan daerah sampai dengan tahun berikut ini:

2.2.2 Evaluasi Capaian Target RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021

2.2.2.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama

Rencana dan target kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018, untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2018 yang terdiri dari 17 sasaran strategis yang pencapaiannya diukur dengan 26 indikator kinerja utama dan mengacu pada lima misi yang ingin diwujudkan dalam tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Misi pertama terdiri dari 2 sasaran dengan 2 indikator sasaran

Misi kedua terdiri dari 1 sasaran dengan 5 indikator sasaran

Misi ketiga terdiri dari 4 sasaran dengan 6 indikator sasaran

Misi keempat terdiri dari 2 sasaran dengan 5 indikator sasaran

Misi kelima terdiri dari 7 sasaran dengan 8 indikator sasaran

Pencapaian target Misi Renstra Tahun 2018

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	2	115	-	-	-	-
2	Misi 2	5	2	140	3	100	-	-
3	Misi 3	5	4	116	-	-	1	72
4	Misi 4	5	1	109	-	-	4	88
5	Misi 5	8	8	150	-	-	-	-
	Jumlah	25	17	126	3	100	5	80

- Capaian pada misi pertama, sebanyak 2 indikator kinerja melampaui target 2 indikator atau 115%, dan sesuai target dan yang belum tercapai tidak ada.
- Capaian pada misi kedua, sebanyak 5 indikator kinerja melampaui target 2 indikator atau 140% sesuai target ada 3 indikator atau 100% dan belum mencapai target tidak ada.
- Capaian pada misi ketiga, sebanyak 5 indikator kinerja melampaui target 4 indikator atau 116% sesuai target ada tidak ada dan belum mencapai target 1 indikator atau 72%.
- Capaian pada misi keempat, sebanyak 5 indikator kinerja melampaui target 1 indikator atau 109% sesuai target tidak ada dan belum mencapai target 4 indikator atau 88%.
- Capaian pada misi kelima, sebanyak 8 indikator kinerja melampaui target 8 indikator atau 150% sesuai target tidak ada dan belum mencapai target tidak ada.

Tabel 2.115.
Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	%
1	Melibatkan Pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah	1	Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	90%	98%	108,8%
2	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan	2	Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan	1,75%	1,58%	105%
3	Terlaksananya reformasi birokrasi	3	Nilai SAKIP	BB	BB	100%
		4	Peringkat LPPD	40	29	137,9%
		5	Indeks RB	B	BB	125%
		6	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	100%
		7	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public	75%	87,35%	116%
4	Terpenuhinya RTH Kota	8	Persentase RTH Publik	14%	1,079%	7,7%
5	Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan	9	Persentase Fasum yang representative dan memenuhi standar lingkungan	65%	67,94%	104
6	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	10	Persentase Penyediaan air minum layak	90%	92	102
7	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	11	Kawasan Kumuh	6 ha	8,2 ha	73
		12	Persentase sanitasi layak	95%	96	101
8	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	13	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	65%	60%	93
9	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	14	Pertumbuhan ekonomi	6,30%	6,04	95
		15	PDRB Perkapita	53,25 juta	58,73	110
		16	Indeks Gini	<0,3	0,32	93
		17	Jumlah Investasi	40%	27%	67
10	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	18	Tingkat Kemiskinan	3,5	5,48	68
11	Meningkatkan pelayanan pariwisata	19	Kunjungan Wisatawan	533.555	577.857	108
12	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	20	Harapan lama sekolah	14,9	14,92	100,8
13	Meningkatkan kualitas pendidikan	21	Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD	78,50%	72,88	92,8

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	
		22	Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	70,75%	61,53	86,9
14	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	23	Angka Harapan Hidup	72,85	72,88	92,8
15	Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan	24	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	70	61,53	86,9
16	Terjaganya stabilitas harga	25	Tingkat Inflasi	5	1,37	437,9
17	Terkendalnya jumlah penduduk	26	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,55	1,56	100

Dari tabel diatas dapat dilihat, capain rata-rata dari 25 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 15 sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2018 sebesar 115,99% Sesuai dengan Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan **Sangat baik**.

Untuk merealisasikan pembangunan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menetapkan target kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi dalam suatu penetapan kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi yang memuat sasaran strategis dan indikator sasaran untuk mengukur pencapaiannya. LKIP Pemerintah Kota Bukittinggi pada hakekatnya merupakan hasil dari pencapaian kinerja SKPD dalam mencapai sasaran berdasarkan program dan kegiatan pendukungnya yang dianggarkan dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.

Pencapaian kinerja sasaran selama tahun anggaran 2018 umumnya dapat dicapai sesuai target kinerja yang ditetapkan. Hal ini dapat diwujudkan karena program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung pencapaian sasaran strategis dan dapat dilaksanakan sesuai target kinerja.

Capaian kinerja yang belum atau kurang memenuhi target disebabkan antara lain kurang sesuai data yang tersedia dibandingkan dengan data yang dibutuhkan dalam indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD, perubahan kebijakan atau aturan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Beberapa persoalan yang ditemui dalam mewujudkan kinerja sasaran umumnya berkaitan dengan persoalan kebijakan teknis dari pemerintah, keterbatasan sumber dana dan SDM serta hal lainnya diluar perkiraan sebelumnya.

Untuk masa yang akan datang perlu kiranya diambil langkah-langkah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan antara lain: meningkatkan koordinasi lintas SKPD dalam penyusunan program perencanaan, peningkatan wawasan dan SDM aparatur melalui bimbingan teknis dan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan maupun dalam hal penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi perangkat daerah.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

A. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya

Permasalahan pada prioritas pertama adalah:

1. Belum optimalnya pengembangan seni dan budaya
2. Belum optimalnya pemanfaatan, peran dan fungsi pemangku dan lembaga adat dalam penanaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau,
3. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama

B. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik

Berbagai permasalahan dari prioritas Kota Bukittinggi yang kedua ini sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya Struktur Organisasi Tata Kerja dalam menjalankan tugas pokok dan kewenangan pemerintah daerah. Pembentukan SOTK Kota Bukittinggi belum efektif dan efisien karena belum mampu menyentuh seluruh aspek pelayanan masyarakat.
2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih belum optimal
3. masih terbatasnya kompetensi aparatur dalam memahami dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing
4. manajemen kepegawaian dalam hal penempatan aparatur belum merujuk sepenuhnya kepada kompetensi yang dimiliki oleh aparatur itu sendiri
5. gedung kantor yang masih bergabung dengan kantor lain, menumpang atau memanfaatkan gedung lain yang masih menjadi aset ataupun bukan aset pemerintah kota
6. luasan gedung yang belum maksimal menampung personil kantor, gedung satu kantor yang terpisah relatif jauh
7. sarana dan prasarana lainnya berupa mobiler, peralatan gedung kantor dan peralatan kerja juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektifitas kerja, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan publik
8. peningkatan sarana dan prasarana berupa hardware dan software serta peningkatan sumber daya manusia berupa brain ware.
9. belum memiliki dukungan yang memadai untuk pengembangan jaringan, aplikasi dan sumber daya manusia untuk memenhi Kota Bukittinggi sebagai smart city

C. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan

Secara umum permasalahan dalam peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan adalah:

1. Belum maksimalnya pendidikan berbasis aqidah sehingga belum mampu menjadi icon kota sebagaimana yang diharapkan
2. belum meratanya akses dan kualitas pendidikan tersebut bagi seluruh masyarakat.
3. Permasalahan tingkat kompetensi tenaga pendidik
4. manajemen pengelolaan lembaga pendidikan yang belum terkelola dengan baik

D. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Pada prioritas keempat masih terdapat permasalahan berupa:

1. Keterbatasan anggaran daerah untuk pengadaan alat kesehatan untuk operasional RSUD Kota Bukittinggi
2. Permasalahan penanganan penyakit yang relatif ekstra dan diakses secara cepat
3. belum terwujudnya masyarakat dan lingkungan hidup yang sehat berdasarkan indikator indonesia sehat
4. Permasalahan kualitas tenaga kesehatan
5. Masih kurangnya ketersediaan seluruh sarana dan prasarana kesehatan yang memadai guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

E. Pengembangan Pariwisata

Secara umum permasalahan dari pengembangan pariwisata adalah:

1. Sarana dan prasarana daerah destinasi pariwisata masih terbatas
2. Belum maksimalnya ikon wisata dan paket yang komprehensif dan daya saing
3. Tata kelola destinasi pariwisata masih bersifat parsial
4. Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan
5. Kelembagaan pengelolaan pariwisata belum maksimal
6. Belum berkembangnya ekonomi kreatif

F. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Secara umum permasalahan yang dihadapi pada prioritas keenam sebagai berikut:

1. belum terwujudnya ketangguhan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah.
2. permasalahan peningkatan kualitas produk, packaging, manajemen usaha pelaku UMKM dan pola pemasaran.
3. Keterbatasan penggunaan teknologi produksi karena spesifik masing-masing produk dan bahkan pelaku usaha.
4. Permasalahan modal usaha dalam kaitannya dengan kredit perbankan
5. Permasalahan manajemen dalam pengelolaan keuangan.

G. Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum permasalahan pada penanggulangan kemiskinan adalah:

1. Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan kerjasama perencanaan dengan lembaga pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya
2. Masih tinggi tingkat pengangguran
3. Masih rendahnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur

H. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur

Permasalahan pada prioritas nomor delapan adalah:

1. Masih banyaknya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni yang tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai
2. Masih tingginya *backlog* perumahan, serta berubahnya indeks kecukupan sehingga standar pembangunan rumah dan bangunan juga semakin mahal
3. Masih rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan sampah dan drainase)
4. Belum optimalnya sistem perencanaan penyediaan air minum dan penanganan sampah serta terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek penyediaan air minum dan pengelolaan sampah

I. Pelestarian lingkungan hidup

Permasalahan untuk pelestarian lingkungan hidup berupa:

1. Permasalahan kualitas air dan tanah menjadi perhatian serius, terutama dengan konversi lahan pertanian menjadi bangunan dan gedung, serta pemanfaatan irigasi sebagai drainase.
2. Permasalahan fungsi-fungsi drainase tidak berjalan baik, sehingga menimbulkan genangan air disamping luapan air dari luar kota.
3. Permasalahan kualitas sanitasi. Target pemerintah tahun 2019, kualitas sanitasi sudah 100% baik, dimana kualitas sanitasi sudah memenuhi standar nasional. Persoalan ini terkait erat dengan kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan hidup dengan berperilaku hidup bersih dan sehat.

Beberapa persoalan yang perlu diuraikan lebih mendalam antara lain adalah seperti berikut ini :

a. Persampahan

Tingginya tingkat aktifitas masyarakat di Kota Bukittinggi berimplikasi juga pada tingginya volume sampah yang harus ditanggulangi oleh Pemerintah Kota. Hal ini juga ditambah dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membuang sampah ataupun dalam pengelolaan pemanfaatan sampah hingga berdaya guna. Prilaku membuang sampah sembarangan tidak hanya bagi penduduk kota, tetapi juga para pengunjung, masyarakat yang tinggal diperbatasan serta dari aktifitas perdagangan.

Beroperasinya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional di Payakumbuh cukup membantu penyelesaian masalah persampahan untuk sementara, namun tidak dalam jangka panjang, hal ini disebabkan karena keterbatasan daya tampung dan daya dukungnya dari TPA tersebut. Untuk itu pemerintah kota perlu memikirkan TPA regional baru karena pembangunan TPA di dalam Kota Bukittinggi tidak memungkinkan yang disebabkan oleh keterbatasan lahan yang ada. Disamping itu, program 3 R (reduce, reuse and recycle) belum berjalan efektif, sehingga perlu lebih ditingkatkan dengan cara pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Permasalahan sampah juga erat hubungannya dengan permasalahan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri. Seiring dengan perkembangan dan pembangunan yang sangat pesat di Kota Bukittinggi, maka permasalahan limbah pun menjadi sorotan yang perlu mendapat penanganan yang serius oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Untuk mengatasi permasalahan sampah dan limbah ini perlu adanya kerjasama dengan daerah tetangga, yaitu Kabupaten Agam, dan juga mengembangkan pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan

b. Air bersih

Ketersediaan air bersih guna melayani kebutuhan masyarakat merupakan salah satu penunjang dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Kondisi eksisting prasarana air minum di Kota Bukittinggi saat ini dilayani oleh PDAM Tirta Jam Gadang. Sumber Air baku PDAM berasal dari Mata Air Sungai Tanang, Mata Air Cingkaring, Sumur Bor Tabek Gadang, Sumur Bor Birugo, Sumur Bor Palolok, Sumur Dangkal Kubang Putih.

Secara umum, distribusi air minum di Kota Bukittinggi menggunakan sistem gravitasi, namun setiap sumber air memiliki cara pendistribusian masing-masing hingga sampai ke daerah pelayanan. Hingga saat ini wilayah pelayanan air minum hampir memenuhi keseluruhan wilayah perencanaan walaupun terdapat beberapa kelurahan yang belum terlayani pelayanan air minum oleh PDAM. Guna mendukung pendistribusian air, saat ini telah dibangun beberapa reservoir dengan total kapasitas sebesar 3.180 m³. Namun karena keterbatasan produksi maka tidak semua reservoir tersebut berfungsi. Permasalahan penting lain juga terkait jaringan perpipaan di Bukittinggi yang sudah tua, sehingga efisiensinya masih rendah, dan tingkat kebocoran cukup tinggi.

Selain mencari sumber air baku baru dari luar kota, Bukittinggi juga sudah harus melakukan rehabilitasi jaringan perpipaan, terutama transmisi induk dari sumber air baku di Sungai Tanang hingga batas kota. Sementara jaringan dalam kota sudah dilakukan rehabilitasi dan penggantian pipa secara bertahap semenjak tahun 2011 sampai 2017 ini. Dengan demikian peta jaringan menjadi hal penting untuk melihat kondisi perpipaan PDAM di Bukittinggi.

c. Sanitasi Kota

Kondisi sanitasi Kota Bukittinggi belum didukung sarana dan prasarana yang memadai. Penanganan sanitasi perkotaan mestinya sudah mengarah untuk memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) yang komunal dan terpusat. Permasalahan yang dihadapi oleh Bukittinggi adalah keterbatasan lahan untuk pembangunannya. Sampai saat ini di Bukittinggi belum ada IPAL komunal ataupun

IPLT. Persoalan ini tentu akan sangat mengurangi daya dukung lingkungan kota. Pada tahap berikutnya ini akan menjadi persoalan lingkungan, munculnya kawasan kumuh dan persoalan lingkungan lainnya.

Sementara itu penanganan persoalan sanitasi telah menjadi target nasional untuk dituntaskan maksimal di tahun 2019. Sementara kondisi drainase kota belum sepenuhnya mampu mengendalikan pemasalahan titik genangan air pada beberapa kawasan yang akan berdampak pada kondisi kawasan tersebut. Dengan demikian penyelesaian masalah drainase di Bukittinggi perlu menjadi prioritas untuk ditangani untuk pencapaian universal access dan peningkatan pelayanan sanitasi di Kota Bukittinggi.

d. Genangan Air

Permasalahan genangan air sewaktu hari hujan menjadi sangat krusial dialami Bukittinggi. Permasalahan ini disebabkan oleh kondisi drainase kota yang belum mampu menampung luapan air sewaktu hujan karena endapan sedimen, dimensi dan jaringan yang tidak memadai. Persoalan lain juga diakibatkan oleh volume air hujan akibat luapan dari wilayah luar kota.

Penyelesaian persoalan ini perlu dukungan manajemen drainase terkait dengan penataan jaringan drainase primer, sekunder dan tersier beserta dukungan dimensinya. Yang paling mendesak dilakukan dalam waktu dekat adalah pengerukan sedimen untuk mendukung kelancaran aliran air. Sementara penyelesaian luapan air pada musim hujan dari luar kota perlu dilakukan pembenahan drainase luar kota dan pengalihan aliran drainase hingga ke drainase primer. Persoalan terkait lainnya yang perlu diseriuskan adalah pengawasan dan edukasi pada masyarakat kota, luar kota dan pengunjung untuk tidak membuang sampah ke dalam drainase.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

A. Urusan Wajib

1. Urusan Pendidikan

Permasalahan:

1. Kekurangan guru di Sekolah Dasar
2. Kekurangan guru bidang studi di SMP

2. Urusan Kesehatan

Permasalahan:

Keterbatasan anggaran daerah untuk pengadaan alat kesehatan untuk operasional RSUD Kota Bukittinggi

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan:

Pelaksanaan perbaikan drainase Jln. Padang Luar Bukittinggi sampai tahun 2017, mengakibatkan debit air menuju Kota Bukittinggi semakin besar. Drainase Kota Bukittinggi tidak mampu menampung debit air dari Padang Luar sehingga perlu solusi untuk pengalihan debit air dari hulu/padang luar dan Jambu Air menuju Batang Tambuo atau dihantar langsung ke Batang Sianok

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Permasalahan:

1. Masih banyaknya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni yang tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai
2. Masih tingginya *backlog* perumahan, serta berubahnya indeks kecukupan sehingga standar pembangunan rumah dan bangunan juga semakin mahal
3. Masih rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan sampah dan drainase)
4. Belum optimalnya sistem perencanaan penyediaan air minum dan penanganan sampah serta terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek penyediaan air minum dan pengelolaan sampah

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan:

- i. Belum adanya regulasi/peraturan dari provinsi tentang pemberian bantuan terhadap musibah kebakaran/bencana kepada kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Seringnya terjadi musibah di wilayah provinsi Sumatera Barat, dimana setiap kabupaten/kota diharapkan memberikan bantuan kepada kabupaten/kota yang terkena musibah, terutama kepada kabupaten/kota tetangga sementara aturan daerah untuk hal tersebut belum ada.
- ii. Masih banyaknya personil damkar yang belum mengikuti diklat tentang penanggulangan kebakaran. Meningkatnya pembangunan gedung/bangunan serta untuk mengantisipasi terhadap bahaya kebakaran di Kota Bukittinggi, diharuskan seluruh personil Damkar memiliki kemampuan/keahlian dalam penanggulangan kebakaran.
- iii. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional Damkar. Tingginya tingkat kebakaran di Kota Bukittinggi, sementara sarana dan prasarana pendukung operasional Damkar masih kurang dan sudah berumur tua.
- iv. Belum adanya regulasi atau peraturan dari Provinsi tentang pemberian bantuan terhadap musibah kebakaran atau bencana kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
- v. Masih banyaknya personil Damkar yang belum mengikuti Diklat tentang penanggulangan kebakaran
- vi. Masih kurangnya sarandan prasarana pendukung operasional Damkar.

- vii. Belum adanya kantor BPBD yang representatif
- viii. Belum adanya rencana induk penanggulangan bencana

6. Urusan Sosial

Permasalahan:

1. Meningkatnya jumlah Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Kota Bukittinggi. Dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Kota Bukittinggi belum ditangani secara maksimal. Hal ini dikarenakan belum ada rumah penampungan sementara untuk Gelandangan dan Pengemis tersebut.
2. Meningkatnya jumlah eks. Penderita penyakit kejiwaan. Penderita penyakit kejiwaan yang telah melewati perawatan di RSJ Saanin Padang dan Membutuhkan rehabilitasi lebih lanjut di Panti Rehabilitasi agar penyakit kejiwaan mereka tidak muncul lagi.
2. Jumlah eks Pengguna narkoba, cenderung meningkat setiap tahunnya. Penanganan Eks. Pengguna Narkotika, Napza dan Psikotropika di Kota Bukittinggi belum ditangani secara maksimal.

7. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan:

- i. Tidak ada data jumlah pencari tenaga kerja (pencaker)
- ii. tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja
- iii. terbatasnya kesempatan kerja
- iv. masih rendahnya kualitas pencari kerja,

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan:

- i. Masih rendahnya pemahaman perempuan dalam upaya perwujudan keluarga berkualitas agar terwujud ketahanan dalam keluarga
- ii. Didapatkan data-data dimana perempuan menjadi kepala keluarga di Kota Bukittinggi yaitu 629 perempuan kepala keluarga dengan jumlah anggota keluarga 2146 orang (data LKKS 2017), ini sangat berdampak kepada kesenjangan ekonomi.
- iii. Adanya perempuan korban kebakaran Pasar Ateh dan Pasar Aur Kuning
- iv. Rendahnya angka partisipasi perempuan di legislatif
- v. Belum tertanganinya perempuan korban kekerasan secara maksimal
- vi. Belum tertanganinya anak korban kekerasan secara maksimal

- vii. Masih minimnya sarana rumah anak dalam mendukung Kota Layak Anak dan 24 indikator kota layak anak belum terpenuhi.

9. **Urusan Pangan**

Permasalahan:

Tidak dapat digunakan dengan maksimal karena belum ada mesin penggiling padi dan peralatan jemur serta alat untuk menjahit karung beras.

10. **Urusan Pertanian**

Permasalahan:

- i. Pengadaan tanah selalu terkendala oleh masyarakat: 1.) Rencana lokasi pertama (1) ada 7 pemilik tanah, 4 sudah bersertifikat 3 belum bersertifikat dan tanah kaum atas nama Ir. H. Mursyid Dt. Mudo, hingga saat ini belum mengizinkan tanahnya untuk dijadikan pembangunan jalan kantor DPRD, 2. Rencana lokasi kedua (2) tidak jadi dilaksanakan karena banyak rumah msyarakat yang terkena dampak perencanaan jalan kantor DPRD, 3. Rencana lokasi ketiga (3) ada 6 pemilik, 2 bersertifikat, 4 tanah kaum, diantara 6 pemilik 1 tanah kaum atas nama ibuk Jus tidak setuju
- ii. Pengadaan tanah untuk instansi vertikal harus jelas. Tanah eks Lembaga Perumahan dan Permukiman Bukittinggi (Menhumkam RI) tersebut belum ada kejelasan MOU dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia

11. **Urusan Lingkungan Hidup**

Permasalahan:

- 1. Terjadinya longsor pada TPA Regional Payakumbuh
- 2. Tercemarnya Sungai Batang Agam
- 3. Sulitnya mengatasi sampah dari daerah tetangga

12. **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan:

- 1. Intensitas advokasi KIE yang masih rendah serta koordinasi yang terbarukan yang selama ini masih belum intensif antar lembaga dan institusi sehingga akan berdampak pada angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk.
- 2. Pengetahuan bidang kependudukan, petugas ini yang masih kurang, termasuk sistem intensitas serta kepanutan

3. Melemahnya kemitraan antar lembaga yang sifatnya bekerja bersama
4. Menu yang ada dipetunjuk operasional tidak semuanya memenuhi kebutuhan pada dana DAK sub bidang KB
5. Masih rendahnya akseptor baru MKJP
6. Kekurangan alat atau teknologi untuk produksi poktan UPPKS

13. Urusan Perhubungan

Permasalahan:

1. Dengan kondisi Traffick Light yang sudah berumur maka terjadi kerusakan yang tidak bisa diprediksi
2. Zona Selamat Sekolah yang ada tidak memadai
3. Kepemilikan gedung Pengujian Kendaraan Bermotor belum jelas
4. Kurangnya kesadaran pengemudi Angkutan Umum mengikuti Peraturan Berlalulintas, banyak pengemudi angkutan umum tidak melaksanakan kewajibannya terutama dalam retribusi angkutan
5. Bukittinggi tidak memiliki terminal angkutan barang
6. Ruas jalan By Pass yang melintasi Kota Bukittinggi belum bersambung sesuai trase jalan rencana awal
7. Kondisi pengelolaan parkir masih terdapat kendala dengan adanya gangguan keamanan dan ketertiban terhadap Jukir yang bertugas terutama gangguan premanisme. Lokasi parkir saat ini banyak yang masih on street sehingga berpengaruh terhadap kelancaran dan ketertiban lalu lintas

14. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan:

1. Masih kurang optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),
2. Belum terintegrasinya sistem komunikasi dan informatika instansi pemerintah

15. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan:

1. 414 UMKM anggota koperasi terkena dampak musibah kebakaran Lantai II Pasar Atas pada tanggal 30 Oktober 2017
2. Akses pemasaran produk UMKM masih relatif rendah.
3. Kurangnya SDM pembina koperasi baik kualitas maupun kuantitas
4. Biaya notaris terasa memberatkan bagi koperasi baru yang didirikan oleh para pengusaha mikro
5. Wirausaha baru mengalami kendala dalam hal kecukupan modal.

6. Koperasi pemula yang beranggotakan UMKM lambat berkembang karena kekurangan modal

16. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan:

1. Kurang kondusifnya iklim & minat investasi
2. Kurangnya dokumen informasi investasi seperti (FS, DED, dan lainnya).

17. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan:

1. Pada tahun 2013 dari dana APBD dibangun tiang-tiang sebanyak 32 buah dan tiang-tiang tersebut tidak dirancang untuk pembangunan bertingkat, tidak memiliki basement. Sehubungan dengan belum jelasnya status KDP Sporthall maka Pemko (Disparpora) akan memintakan pendapat hukum dari TP4-D pada Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi.
2. Bahwa kolam renang Atas Ngarai tidak bisa dimanfaatkan karena ukuran kedalam kolam tidak standar dan proses sterilisasi air tidak layak karena tidak mempunyai sistem penyaringan air. Pada saat ini keberadaan kolam renang Bantola dalam kawasan simpadan Ngarai Sianok 100m dari bibir ngarai dan lebih kurang 1/3 nya termasuk dalam kawasan 50m dari bibir ngarai.

18. Urusan Persandian

Permasalahan:

1. Tidak tersedianya dana untuk sosialisasi sertifikat transaksi elektronik
2. Permasalahan peningkatan kapasitas dan keahlian ASN fungsional persandian

19. Urusan Kebudayaan

Permasalahan:

1. Belum memiliki grand design kebudayaan
2. Rancangan pembangunan Hatta memorial Heritage di Istana Bung Hatta Bukittinggi
3. Pengembangan dan pemanfaatan LP
4. Kurang terkelolanya sanggar
5. Belum optimalnya ABS-SBK

20. Urusan Perpustakaan

Permasalahan:

1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai yaitu gedung kantor dan roll o pack
2. Kuantitas sumber daya manusia yang tidak memadai yaitu tenaga fungsional pustakawan

21. Urusan Kearsipan

Permasalahan:

1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai yaitu gedung kantor dan roll o pack
2. Kuantitas sumber daya manusia yang tidak memadai yaitu tenaga fungsional arsiparis.

B. Urusan Pilihan

1. Urusan Pariwisata

Permasalahan:

1. Banyaknya proposal kerjasama/promosi yang tidak dapat diikuti karena terbatasnya dana promosi yang berasal dari APBD
2. Permasalahan penanganan konservasi satwa liar. Belum tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung aktivitas Konservasi penanganan konservasi satwa liar.
3. Belum adanya persamaan persepsi/kesepakatan antara masyarakat dengan PEMKO Bukittinggi tentang Pengembangan Kawasan Panorama Baru
4. Belum adanya SK Gubernur tentang penetapan kawasan Ngarai Sianok sebagai Geo Area dalam pengembangan Geopark Ranah Minang dan
5. Belum adanya BKSDA untuk kawasan konservasi

2. Urusan Pertanian

Permasalahan:

1. Belum adanya perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
2. Batas wilayah pertanian belum sinkron dengan RTRW Kota Bukittinggi
3. Keterlambatan penyaluran pupuk dilapangan sering terjadi karena keterbatasan jumlah stok di gudang pengecer yang tidak memiliki modal, sehingga harus mengumpulkan uang dari petani sebelum melakukan penebusan ke distributor.

3. Urusan Perdagangan

Permasalahan:

1. Aset Kemetrolgian yang berada di Bukittinggi belum diserahkan kepada Kota Bukittinggi oleh Pemerintah Provinsi
2. Biaya Operasional Belum memadai untuk BPSK. Usulan untuk dibantu oleh Kabupaten/Kota belum didukung dengan Surat Gubernur
3. Permasalahan timbul setelah terjadi kebakaran Pasar atas
 - Pasca kebakaran hasil uji labor bangunan tidak layak
 - Jumlah penampungan tidak Cukup
 - Pakir kendaraan roda empat tidak tersedia

- Ruang terbuka hijau & rest area hanya berpusat di area jam gadang sehingga bagian blok c, blok e dan blok f sepi pengunjung
 - Kendaraan roda 4 yang parkir harian sangat banyak seharusnya ditata
 - Penegakan aturan masih lemah
 - Pengunjung sering tersesat karena tidak ada penunjuk arah (lantai dasar)
4. Permasalahan yang timbul setelah terjadi kebakaran di Pasar Simpang Aur:
- Pasca kebakaran hasil uji labor sebahagian stuktur bangunan tidak layak
 - Pasar tradisional tidak layak kurang luas
 - Tidak ada terminal bongkar muat barang (tempat khusus)
 - Draenase pasar tidak lancar
 - Parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 tidak memadai.
5. Pasar bawah Kurang bersih dan tidak layak sebagai Pasar Tradisional. Pengelompokan jenis dagangan tidak berjalan sesuai rencana. Drainase pasar sering bermasalah

4. **Urusan Perindustrian**

Permasalahan:

1. Inovasi dan diversifikasi produk industri mikro kecil masih rendah.
2. Kurangnya penguasaan teknologi dan kapasitas SDM.
3. Masih rendahnya daya saing, kualitas dan design produk.
4. Masih banyak produksi industri mikro kecil dan menengah yang belum memenuhi standarisasi dan sertifikasi
5. Keterbatasan akses pembiayaan untuk pengembangan industri
6. Masih terbatasnya jejaring kerjasama pemasaran produk industri, terutama industri rumah tangga

5. **Urusan Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan:

Belum ada juknis tentang pemanfaatan sisa DAK

C. **Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

1. **Fungsi Perencanaan**

Adapun permasalahan penyelenggaraan fungsi perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya ketersediaan dan belum optimalnya pemanfaatan SDM Perencana baik secara kuantitas dan kualitas
2. Belum optimalnya penyelenggaraan proses perencanaan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi
3. Belum optimalnya pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan

4. Belum optimalnya pemanfaatan pengendalian dan evaluasi program/kegiatan pembangunan yang dilakukan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang
5. Belum adanya pengintegrasian sistem informasi perencanaan dengan sistem informasi penganggaran dan sistem informasi pengendalian, monitoring dan evaluasi

2. Fungsi Kepegawaian

Adapun permasalahan penyelenggaraan fungsi kepegawaian adalah sebagai berikut:

1. Hasil Koordinasi pengawasan berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten
2. Rendahnya respon auditan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan sebagaimana mestinya
4. Jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional belum memadai Keterbatasan tenaga/aparat pengawas yang profesional sangat mempengaruhi kinerja dan kualitas pengawasan
5. Masih rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
6. Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja

3. Fungsi Pendidikan dan Pelatihan

1. Evaluasi pendidikan dan pelatihan aparatur belum dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
2. Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai kebutuhan yang nyata
3. Rendahnya waktu lama diklat yang diikuti aparatur
4. Belum maksimalnya upaya pengembangan Widyaiswara
5. Masih kurangnya sumber daya kediklatan yang modern dan profesional
6. Belum optimalnya analisis kebutuhan diklat
7. Belum adanya sistem informasi kediklatan

4. Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Adapun permasalahan penyelenggaraan fungsi penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:

1. Belum tersosialisasinya fungsi kelitbangan sebagai dasar penciptaan inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
2. Belum optimalnya SDM kelitbangan baik secara kuantitas, kapasitas maupun kualitas
3. Minimnya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Kelitbangan
4. Sarana dan prasarana kelitbangan yang masih minim

5. Jaringan kelitbangan yang masih terbatas
6. Minimnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan regulasi pada Pemerintahan
7. Minimnya fasilitasi penyaluran hasil inovasi teknologi kepada pengguna

5. Fungsi Pengawasan

Permasalahan:

1. Hasil Koordinasi pengawasan berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten
2. Rendahnya respon auditan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Bukittinggi
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan sebagaimana mestinya
4. Jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional belum memadai Keterbatasan tenaga/aparat pengawas yang profesional sangat mempengaruhi kinerja dan kualitas pengawasan
5. Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja

6. Fungsi lainnya

Permasalahan:

1. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun adanya kebijakan pusat yang menyatakan bahwa untuk dikota yang tidak mempunyai desa urusan tidak dilaksanakan. Dengan tidak adanya instansi khusus tersebut menyebabkan kesulitan juga bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat provinsi Sumatera Barat untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah kota khususnya yang tidak menyelenggarakan urusan tersebut. Kondisi saat ini bahwa bidang pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara parsial oleh beberapa SKPD atau bagian yakni dinas P3APPKB, bagian Pemerintahan dan kecamatan.
2. PP Nomor 84 tahun 1999 tentang perluasan Kota Bukittinggi sampai saat ini tidak dapat diimplementasikan namun PP tersebut tidak dicabut. Ini berakibat terhadap batas wilayah Kota Bukittinggi yang belum ada ketegasan, dimana untuk menetapkan batas segmen batas antar daerah harus ditetapkan dengan Permendagri, sampai saat ini Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam belum memiliki batas yang ditetapkan Permendagri. Hal ini berimplikasi juga terhadap penegasan batas kecamatan dan kelurahan di Kota Bukittinggi yang belum memiliki legalitas hukum yang pasti dan masih berpedoman pada batas-batas alam.
3. Bahwa berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 Pasal 364 menyatakan bahwa daerah yang berbatasan untuk meningkatkan pelayanan publik dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib melakukan kerjasama antar daerah. Kondisi saat ini bahwa banyaknya

permasalahan Kabupaten Agam yang berimbas dan menjadi permasalahan bagi kota diantaranya yakni terkait masalah persampahan yakni banyaknya sampah yang berasal dari wilayah Agam, masalah drainase yang berakibat bagi kota, permasalahan tata ruang dsb. Kalau terus dibiarkan permasalahan ini lama kelamaan akan menjadi beban bagi Kota Bukittinggi.

2.5 Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan dokumen dari berbagai masukan, khususnya konstituen dari masing-masing partai politik untuk menjadi acuan dalam penyusunan draf awal RKPD. Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan dokumen strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan visi. Pokok-pokok Pikiran DPRD memiliki peran penting baik dari sisi muatan substansi materi maupun ketepatan waktu penyelesaian dan penyampaiannya kepada Walikota, karena berpengaruh terhadap mekanisme penyusunan dokumen-dokumen turunan berikutnya, khususnya penyusunan RKPD

Adapun tujuan dari penyusunan pokok-pokok Pikiran DPRD adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bahan, arahan kebijakan, sekaligus masukan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menyusun dokumen awal draf RKPD Tahun 2020
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, dan RAPBD Tahun Anggaran 2020
3. Membuka ruang arah kebijakan dan usulan pembangunan yang dari DPRD KOTA BUKITTINGGI untuk RKPD 2020

Pada Pokok-pokok pikirean DPRD disampaikan permasalahan pembangunan dan juga rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

1. Bidang Pemerintahan dan Kesra

a. Pendidikan:

Permasalahan yang sering ditemui dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Daya tampung SLTP dan SLTA belum mencukupi untuk penduduk Bukittinggi.
2. Masih adanya pungutan yang dilakukan oleh Komite atau nama lainnya disetiap tingkatan sekolah
3. Belum maksimal upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Kota Pendidikan
4. Sarana Prasarana di sekolah-sekolah belum memadai, seperti sarana ibadah, alat-alat peraga edukasi, sarana olahraga, WC, sarana untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler.

Beberapa rekomendasi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Menambah ruang kelas baru untuk pendidikan Tingkat SLTP,

2. Mengusulkan ke Pemprov Sumbar untuk menambah Ruang Kelas Baru untuk Tingkatan SLTA, dengan demikian dapat menampung peserta didik baru.
3. Jumlah penerimaan siswa SLTP dan SLTA yang berasal dari luar Kota Bukittinggi, tidak melebihi ketentuan peraturan, sehingga penduduk Kota Bukittinggi dapat ditampung pada SLTP dan SLTA Negeri yang ada di Kota Bukittinggi.
4. Mendorong pemerintah membuat sistem yang jelas dan berkeadilan dalam penerimaan peserta didik baru
5. Mendorong pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel dengan didukung tenaga pendidik yang handal dan alat penunjang lain
6. Meningkatkan sarana dan prasarana di lingkungan Pendidikan untuk mendukung ekstra kurikuler bagi peserta didik, antara lain melalui revitalisasi kolam renang Bantola, Sport Hall, dan sarana olah raga lainnya.
7. Menyiapkan alokasi dana yang cukup untuk guru honorer dan anak-anak yang berprestasi terutama dari keluarga kurang mampu dan berkebutuhan khusus.
8. Memperkuat pendidikan berkarakter pada setiap jenjang pendidikan.
9. Membantu ketersediaan sarana dan prasarana MDTA dan TPQ serta pondok pesantren
10. Menjadikan seni budaya tradisi Minangkabau sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah.
11. Memfasilitasi pendirian Perguruan Tinggi, dan melakukan kerjasama dalam pembinaan antar Perguruan Tinggi.
12. Memberikan perhatian yang sungguh kepada peserta didik terhadap pengaruh negatif dari perkembangan teknologi informasi.

b. Kesehatan

Permasalahan yang sering ditemui dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu di Kota Bukittinggi yang belum mendapat jaminan kesehatan.
2. Pelaksanaan layanan kesehatan melalui BPJS banyak mengalami permasalahan di lapangan, antara lain belum tersedia data yang valid antara BPJS, jamkesmas dan jamkesda,
3. Rendahnya pelayanan bagi peserta BPJS di tingkat rujukan, serta permasalahan yang bersifat administratif dan tidak mengedepankan sisi kemanusiaan dan keselamatan pasien.
4. Pemberian Pelayanan kesehatan masyarakat belum optimal, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Beberapa rekomendasi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat tentang permasalahan administratif yang timbul selama ini terhadap pelayanan BPJS kepada masyarakat.
2. Menyediakan data yang valid antara BPJS, jamkesmas dan jamkesda,
3. Mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan seluruh tingkatannya.
4. Melakukan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan puskesmas, puskesmas, pustu, posyandu.
5. Mewujudkan pembangunan RSUD, sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.
6. Memberikan perhatian khusus kepada masyarakat lanjut usia guna meningkatkan kesehatan

c. Pariwisata

Permasalahan yang sering ditemui dalam penyelenggaraan pembangunan pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Masih rendah alokasi dana untuk kegiatan promosi wisata, workshop, dan pelatihan bagi SDM pariwisata di Kota Bukittinggi, guna pengembangan daya tarik wisata.
2. Belum ada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata serta target yang jelas sebagai arah untuk mewujudkan Bukittinggi sebagai Kota tujuan wisata.
3. Belum tersedia program dan kegiatan untuk mewujudkan Bukittinggi sebagai Wisata MICE (meetings, incentives, conventions, exhibitions)
4. Belum optimal kerjasama, pembinaan dan komunikasi pemerintah daerah terhadap pelaku usaha pariwisata.
5. Belum tersedianya sarana dan prasarana khusus untuk pengembangan seni budaya dalam bentuk atraksi seni dan budaya yang representatif.
6. Belum terbangun komitmen kerjasama dan koordinasi antar daerah dan provinsi untuk ketersediaan akses yang mudah dan nyaman bagi pengunjung menuju objek wisata.
7. Menginventarisir dan mengelola aset yang berpotensi untuk dijadikan destinasi wisata baru.

Beberapa rekomendasi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Segera membuat Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang akan dijadikan pedoman dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata di Kota Bukittinggi.
2. Menyediakan alokasi dana yang cukup untuk kegiatan promosi wisata, workshop dan pelatihan bagi SDM pelaku usaha pariwisata di Kota Bukittinggi, guna pengembangan daya tarik wisata sehingga pariwisata dapat dijadikan sektor unggulan di Kota Bukittinggi.
3. Mendorong pemerintah untuk mewujudkan wisata MICE (meetings, incentives, conventions, exhibition) di Bukittinggi.

4. Menyediakan sarana dan prasarana khusus untuk pengembangan seni budaya dalam bentuk atraksi seni dan pagelaran budaya yang representatif.
5. Meningkatkan koordinasi pemerintah Kota Bukittinggi dengan pelaku usaha pariwisata serta mendorong seluruh pelaku usaha pariwisata untuk berkembang dan mandiri.
6. Membangun pengamanan tebing yang ada di lokasi dan sekeliling objek wisata
7. Mengembangkan objek wisata baru untuk menambah daya tarik pengunjung, seperti di kawasan ngarai.
8. Revitalisasi seluruh objek wisata yang ada.
9. Menyediakan akses jalan yang lancar menuju objek wisata.

2. Bidang Ekonomi Pembangunan

Permasalahan yang sering ditemui dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. UMKM belum mampu bersaing, dan SDM pada UMKM belum berkualitas maksimal.
2. Belum tersedia lahan khusus yang representatif bagi pelaku UMKM.
3. Penataan pasar belum optimal, Pasar Bawah dan Pasar Simpang Aur tidak tertata dengan baik, begitu juga dengan Pasar Atas pasca kebakaran.

Beberapa rekomendasi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan ekonomi pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Mendorong pemerintah untuk pengembangan usaha dan meningkatkan daya saing UMKM melalui peningkatan kualitas SDM dengan menyediakan training atau pelatihan bagi UMKM yang dilaksanakan oleh trainer yang handal.
2. Perlunya keseriusan pemerintah dalam memacu pertumbuhan UMKM sehingga dapat mendorong produk unggulan daerah.
3. Menerbitkan regulasi yang mengatur dan melindungi produk unggulan daerah.
4. Peningkatan peran Lembaga Keuangan, Investasi, Koperasi dan ekonomi mikro.
5. Melakukan revitalisasi dan penataan ulang serta penertiban pasar secara komprehensif.

3. Bidang Infrastruktur dan Lainnya

Permasalahan yang sering ditemui dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi dengan daerah hinterland terutama terkait dengan permasalahan wilayah perbatasan yakni banjir kiriman, angkutan umum, masalah persampahan.
2. Cakupan layanan air bersih yang sangat rendah, serta sanitasi yang kurang memadai.

3. Banyak fasilitas umum yang tidak maksimal, seperti *traffic light* (lampu lalu lintas), lampu jalan, trotoar yang terletak pada bukan jalan utama, drainase, WC Umum, jalan raya, dan jalan lingkung, serta halte yang belum memenuhi jumlah sesuai kebutuhan
4. Permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang belum terselesaikan, seperti anak *punk*, orang gila, gelandangan dan pengemis, kejahatan yang tergolong kriminal.
5. Batas teritorial yang tidak jelas antara kelurahan dengan wilayah Kabupaten Agam.
6. Permasalahan penyelesaian pengelolaan Banto Trade Centre (BTC), dan Jembatan Penghubung Rumah Sakit Madina.
7. Masih terdapat tindakan yang tidak mendidik terhadap masyarakat, dalam penegakan peraturan oleh Tim penegak dan pengawal Perda.
8. Banyaknya pengangguran dan kurang ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat golongan usia produktif.
9. Lemahnya pengawasan terhadap juru parkir, yang berdampak kepada penurunan pendapatan di sektor retribusi.
10. Masih ada aset daerah yang belum diperhatikan.
11. Belum optimalnya penggalian dan pengembangan objek wisata baru.

Beberapa rekomendasi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan infrastruktur dan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bukittinggi perlu perencanaan yang fokus, jelas, terarah dan terukur serta tahapan evaluasi pembangunan dengan mengacu kepada RPJMD Kota Bukittinggi.
2. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah antara lain melakukan evaluasi terhadap seluruh SKPD yang mengelola Pendapatan Asli Daerah agar bekerja serius dalam menggali sumber potensi pendapatan asli daerah.
3. Perlunya kerjasama yang komprehensif dengan daerah hinterland terkait penanganan permasalahan yang berhubungan dengan Kabupaten Agam seperti Banjir, Angkutan Umum, sampah.
4. Mencarikan lahan per-Kelurahan atau setidaknya per-Kecamatan untuk pembuatan sumur bor yang bisa menjadi solusi pemenuhan air bersih di Kota Bukittinggi.
5. Mengoptimalkan penggunaan gedung parkir yang ada, disamping itu perlu dipikirkan lokasi parkir baru untuk menambah satuan ruang parkir.
6. Mengoptimalkan pengelolaan pasar, jika perlu mempertimbangkan urusan pasar dikelola oleh Perusahaan Daerah.
7. Melakukan renovasi sarana olahraga, seperti kolam renang Bantola, Gedung Olahraga Sport Hall dan lapangan tenis atas ngarai.

8. Menuntaskan persoalan Banto Trade Centre (BTC), Islamic Centre dan Jembatan Penghubung Rumah Sakit Madina.
9. Melakukan rekayasa lalu lintas untuk menghindari kemacetan.
10. Melakukan pembatasan usia kendaraan bermotor, khususnya angkutan umum untuk kenyamanan masyarakat Kota Bukittinggi dan pengunjung.
11. Mengupayakan pembentukan karakter siswa dan generasi muda antara lain memasukkan seni bela diri pencak silat dan Budaya serta Seni Tradisional Minang Kabau lainnya dalam kurikulum sekolah dan memberikan pelatihan kepada pemuda di setiap kelurahan.
12. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur utama dan penunjang untuk menjamin keberlangsungan pembangunan daerah, seperti jalan, trotoar, drainase, wc umum, *traffic light* (lampu lalu lintas) dan fasilitas umum lainnya.
13. Menyediakan sarana dan prasarana sebagai langkah preventif terhadap bencana alam dan kebakaran.
14. Memfungsikan lahan tidur, seperti dijadikan tempat budidaya lele, perkebunan buah, bunga serta tanaman obat keluarga, sehingga membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
15. Mewujudkan pembangunan Gedung Kantor DPRD.

2.6 Inovasi Dan Prestasi Penghargaan Daerah

A. Inovasi

Inovasi yang didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi daerah yang diwujudkan dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Bukittinggi dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik mengembangkan beberapa inovasi daerah sebagai berikut:

- 1 Nama Inovasi : BECAK MOTOR PENJEMPUT SAMPAH (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)
- Bentuk Inovasi : Bentuk inovasi lainnya
- Inovasi Dimulai : 18 Januari 2017
- Latar Belakang : Masih terjadinya penumpukan sampah di area pemukiman penduduk
- Tujuan dan Manfaat : Untuk meningkatkan kualitas lingkunganhidup dengan cara mengurangi dan menghilangkan penumpukan sampah di pekarangan rumah penduduk

- Hasil Inovasi : Bersihnya kawasan permukiman penduduk dari timbunan sampah, sehingga kualitas lingkungan juga meningkat
- 2 Nama Inovasi : SIPADEK (DINAS DUKCAPIL)
- Bentuk Inovasi : Bentuk Inovasi lainnya
- Inovasi Dimulai : 18 Januari 2018
- Latar Belakang : Meningkatkan jumlah penduduk yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan
- Tujuan dan Manfaat : Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan
- Hasil Inovasi : Efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan administrasi kependudukan
- 3 Nama Inovasi : SMS CENTER KECAMATAN ABTB
- Bentuk Inovasi : Bentuk Inovasi lainnya
- Inovasi Dimulai : 18 Mei 2017
- Latar Belakang : Terbatasnya akses Masyarakat terhadap pemerintah dalam menyampaikan informasi penting kepada Pemerintah daerah
- Tujuan dan Manfaat : Untuk mempermudah akses masyarakat terhadap perintah dalam menyampaikan informasi penting kepada Pemerintah daerah
- Hasil Inovasi : Dengan adanya layanan SMS Center, masyarakat dapat memberikan informasi secara lebih akurat dan cepat kepada Pemerintah daerah
- 4 Nama Inovasi : INOVASI PEMUTAKHIRAN MANDIRI (DINAS SOSIAL)
- Bentuk Inovasi : Bentuk inovasi lainnya
- Inovasi Dimulai : 18 Januari 2017
- Latar Belakang : Perlunya pemutakhiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial
- Tujuan dan Manfaat : Untuk meningkatkan kualitas data dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
- Hasil Inovasi : Meningkatkan kualitas data penyandang masalah kesejahteraan sosial di kota Bukittinggi
- 5 Nama Inovasi : KLINIK HERBAL TERINTEGRASI (HEBRING) PUSKESMAS RASIMAH AHMAD
- Bentuk Inovasi : Bentuk Inovasi lainnya
- Inovasi Dimulai : 9 Januari 2017
- Latar Belakang :
 - Adanya sebagian pasien puskesmas yang memiliki efek samping terhadap obat konvensional (obat farmasi)
 - Adanya beberapa obat yang tidak masuk pada formularium nasional

		<p>antara lain obat batuk anak dan dewasa yang sebelumnya selalu diberikan kepada pasien sehingga kesulitan untuk memberikan obat Pengganti</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya keinginan masyarakat untuk mendapatkan obat yang alami daripada obat farmasi ▪ Adanya permenkes nomor 21 tahun 2016 tentang penggunaan dana kapasitas JKN pada pasal 5 ayat 6 tentang puskesmas boleh menyediakan obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas ▪ Belum adanya puskesmas di kota Bukittinggi yang memberikan pelayanan herbal
	Tujuan dan Manfaat	: Menjadikan klinik herbal sebagai alternatif pilihan utama dalam pengobatan di puskesmas Rasimah Ahmad, sehingga dapat memberikan informasi dan konsultasi mengenai pemanfaatan tanaman herbal untuk beberapa penyakit
	Hasil Inovasi	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Klinik herbal telah menjadi alternatif utama pengobatan herbal ▪ Klinik herbal telah berhasil menggerakkan masyarakat untuk menanam obat keluarga melalui sosialisasi melibatkan Kelurahan Lurah dan Camat
6	Nama Inovasi	: GYSELA TERMANIS (PUSKESMAS MANDIANGIN)
	Bentuk Inovasi	: Pelayanan public
	Inovasi Dimulai	: 9 Juni 2016
	Latar Belakang	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fakta dan data menunjukkan bahwa penyakit tidak menular menjadi penyebab kematian terbanyak di Indonesia termasuk di kota Bukittinggi ▪ Peningkatan kejadian penyakit tidak menular berhubungan dengan resiko akibat perubahan gaya hidup seiring dengan perkembangan dunia yang makin modern dan pertumbuhan populasi
	Tujuan dan Manfaat	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk mensosialisasikan gaya hidup sehat ▪ Untuk meningkatkan dukungan stakeholder terkait dalam pencegahan faktor resiko penyakit tidak menular ▪ Meningkatnya aksi nyata dari berbagai komponen di masyarakat dalam pembudayaan gaya hidup sehat terkait perilaku tidak merokok, aktifitas fisik, dan peningkatan konsumsi sayur dan buah dalam upaya pengendalian penyakit tidak menular dan kronis
	Hasil Inovasi	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya jumlah posbindu yang menyelenggarakan implementasi ▪ Meningkatnya jumlah kunjungan posbindu

- 7 Nama Inovasi : SIP BESTARI (DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN SATU PINTU PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA)
- Bentuk Inovasi : Pelayanan Publik
- Inovasi Dimulai : 24 Januari 2017
- Latar Belakang :
 - Panjangnya antrian dalam pelayanan perizinan di kota Bukittinggi
 - Proses perizinan yang membutuhkan waktu relatif lama
- Tujuan dan Manfaat :
 - Untuk mengurangi jumlah antrian pelayanan perizinan di kota Bukittinggi
 - Untuk memangkas birokrasi perizinan
 - Memudahkan akses masyarakat dalam memperoleh layanan perizinan dan mendapatkan informasi tentang persyaratan perizinan
- Hasil Inovasi :
 - Berkurangnya antrian dalam pelayanan perizinan
 - Berkurangnya birokrasi yang harus dilalui masyarakat dalam mengurus izin
 - Mudahnya akses terhadap informasi peizinan
- 8 Nama Inovasi : IMC (INTEGRATED MEDIA CENTER) DINAS DUKCAPIL
- Bentuk Inovasi : Pelayanan Publik
- Inovasi Dimulai : 24 Januari 2017
- Latar Belakang :
 - Terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi administrasi kependudukan
 - Tingginya angka kunjungan ke Dinas kependudukan Pencatan Sipil Kota Bukittinggi yang menyebabkan banyaknya jumlah antrian, sehingga kualitas pelayanan menurun
 - Relatif lamanya waktu yang dibutuhkan untuk updating data kependudukan
- Tujuan dan Manfaat :
 - Untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi administrasi kependudukan
 - Mengurangi jumlah antrian pelayanan adminduk
 - Untuk memudahkan updating data kependudukan
- Hasil Inovasi :
 - Terciptanya akses yang lebih baik terhadap masyarakat untuk mendapat informasi kependudukan
 - Berkurangnya antrian layanan administrasi kependudukan di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 9 Nama Inovasi : DIGITALISASI DOKUMEN KEPENDUDUKAN (DINAS DUKCAPIL)
- Bentuk Inovasi : Tata kelola
- Inovasi Dimulai : 24 Januari 2017
- Latar Belakang :
 - Mudah nya pelaksanaan updating data penduduk melalui aplikasi whatsapp
 - Dokumen kependudukan Kota Bukittinggi belum tertata rapi
 - Kesulitan petugas pelayanan administrasi kependudukan dalam mencari dokumen persyaratan administrasi kependudukan
- Tujuan dan Manfaat :
 - Untuk meningkatkan kualitas arsip data kependudukan
 - Untuk memudahkan petugas dalam menemukan arsip / dokumen kependudukan
 - Untuk meningkatkan tata kelola arsip kependudukan
- Hasil Inovasi :
 - Meningkatnya kualitas arsip data kependudukan
 - Mudah nya petugas dalam menemukan arsip / dokumen kependudukan
 - Meningkatnya tata kelola arsip kependudukan
- 10 Nama Inovasi : PEREKAM KELILING (DINAS DUKCAPIL)
- Bentuk Inovasi : Pelayanan Publik
- Inovasi Dimulai : 24 Januari 2017
- Latar Belakang :
 - Masih banyaknya penduduk berusia 17 tahun keatas yang belum terdata dan belum memiliki dokumen kependudukan (KTP, Akte kelahiran, dll)
- Tujuan dan Manfaat :
 - Percepatan perekaman data penduduk yang telah berusia 17 tahun keatas , untuk meningkatkan akurasi data Kependudukan Kota Bukittinggi
 - Membantu masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan
- Hasil Inovasi :
 - Meningkatnya hasil rekam data kependudukan
 - Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan terhadap penduduk Kota Bukittinggi

B. Prestasi dan Penghargaan Daerah

Sebagai salah satu wujud keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Bukittinggi, dan sebagai bukti komitmen pemerintah daerah untuk selalu memberikan yang terbaik dalam memajukan Kota Bukittinggi dengan kerja nyata, beberapa prestasi dan penghargaan telah diraih oleh Kota Bukittinggi baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Adapun prestasi dan penghargaan tersebut adalah:

A. Tingkat Internasional

Juara II Paralayang Asian Games diraih oleh Rinas Suma Ningrum

B. Tingkat Regional

Juara II Tapak Perkemahan Putri Terbaik Perkemahan Bhakti Saka Warabakti dan Saka Kalpataru Tingkat Regional Sumatera Tahun 2018

C. Tingkat Nasional

1. Finalis Lomba Sekolah Sehat (SSH) diraih oleh SMAN 5
2. Koperasi Berprestasi Tahun 2018 Jenis Konsumen diraih oleh KPN Dinas Pendidikan
3. Pastika Awya Pariwara diberikan kepada Walikota Bukittinggi yakni Penerapan kebudayaan/ peraturan tentang larangan iklan rokok di luar gedung
4. Juara III Lomba Sekolah Sehat diraih oleh TK Pembina
5. Predikat B SAKIP Kota Bukittinggi Tahun 2017
6. Penghargaan dari Menteri Keuangan RI yakni Penghargaan diberikan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan capaian opini WTP. Penghargaan tsb diterima atas keberhasilan Pemko Bukittinggi telah meraih opini WTP dari BPK selama 5 tahun berturut-turut, diantaranya WTP secara murni selama 3 tahun berturut-turut
7. Top 100 BPR diraih BPR Jam Gadang
8. Peringkat 5 Smart Sanitation Award Kategori Best of The Best
9. Kota Layak Anak Kategori Pratama
10. Manggala Karya Kencana diraih oleh HM. Ramlan Nurmatias, SH dan Ny. Hj. Yesi Ramlan Nurmatias Penghargaan atas prestasi, komitmen, dukungan dan dharma bahti yang besar serta kepemimpinan dalam pelaksanaan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga di wilayahnya
11. Prediket Sangat Tinggi Dengan Atribut Bintang Dua Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
12. Pakarti Madya I Tingkat Nasional Pelaksana Terbaik PKK KKBPK Kesehatan Kategori Kota Tahun 2018 diraih oleh Kota Bukittinggi, Kec. ABTB, Kel. Belakang Balok
13. Pakarti Madya II Tingkat Nasional Pelaksana Terbaik Tertib Administrasi PKK Kategori Kota diraih oleh Kelurahan ATTS
14. Juara I Kube FM (Kelompok Usaha Bersama) diraih oleh Sinar Rezeki
15. Juara I Pendamping Kube FM diraih oleh Siciliya Mala Eka Asmara
16. Juara I Pemutakhiran Data diraih oleh Dinas Sosial
17. Sertifikat Geopark Nasional Ngarai Sianok
18. Juara II Pengelola LKP Berprestasi diraih oleh LKP Widyaloka (Warniyati, SE)

19. Juara Harapan III Instruktur Komputer diraih oleh LKP Dynasti Komputer (Yendrizal, S.Kom, M.Kom)
20. Juara I Inobel Pengelola PAUD diraih oleh TK Islam Al Azhar (Doni Aizus Idris, AMKg)
21. Juara I Inobel Pendidik PAUD diraih oleh KB Islam Al Azhar (Fatma Erlina, S.Pd Paud)
22. Juara III Inobel Pengelola LKP diraih oleh LKP Widyaloka (Warniyati, SE)
23. Juara 2 Minuman Tradisional Terpopuler Aia Aka Kota Bukittinggi
24. Juara II Kepala Sekolah Berprestasi diraih oleh TK Evawati, S.Pd
25. Juara I Guru Berdedikasi SLB diraih oleh Ezi Mulia, S.Pd
26. Finalis Guru Lomba Inobel diraih oleh Rahmi Fitria, S.PdI
27. Terbaik I Lomba Seni Tari diraih oleh Tim SMPN 2
28. Ranking Nasional Lomba OSN SD Matematika diraih oleh Zafran Abqary Faisal (SDN 01 Benteng Pasar Atas)
29. Ranking Nasional Lomba OSN SD IPA diraih oleh Daffa Falvino (SDS Al Islah)
30. Terbaik I Lomba Seni Tari Tradisional diraih oleh Tim SDS Al Azhar
31. JPI Bakti Pemuda antar Provinsi dan Nasional diraih oleh Isra Fauzan
32. Anugrah Parahita Eka Praya (APE) kategori Utama
33. Piagam Penghargaan dari Menteri Sosial RI kepada Walikota Bukittinggi sebagai daerah penggerak pemberdayaan usaha ekonomi produktif masyarakat miskin wilayah I Tahun 2018
34. Anugerah Kihajar 2018 Kategori Khusus Diberikan kepada kepala daerah yang telah menunjukkan kepedulian dan komitmennya terhadap pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk dunia pendidikan dan kebudayaan.
35. Juara III Lomba Marchingband devisi Street Parade Indonesia Drum Corp Championship (IDCC) 2018 diraih oleh Marchingband Gita Jam Gadang
36. Kota Peduli Hak Asasi Manusia
37. Walikota Entrepreneur Award Bidang Pendidikan

D. Tingkat Provinsi

1. Peringkat II Anugrah Keterbukaan Informasi Publik
2. Keluarah Terbaik I Tingkat Provinsi Sumbar Belakang Balok, Kec. ABTB
3. Camat Terbaik II Camat ABTB, Drs. Hendry, ME
4. Juara Harapan Lomba Didikan Subuh diraih oleh DDS Masjid Darussalam Pakan Kurai
5. Juara III Tingkat TK/RA Lomba Sekolah Sehat (LSS) diraih oleh STK Pembina Belakang Balok
6. Koperasi Berprestasi Berpotensi Tahun 2018 diraih oleh KPRI RSUD DR. Achmad Muchtar Dari Gubernur Sumbar
7. KPN Berprestasi 2 diraih oleh KPRI RSUD DR. Achmad Muchtar Dari PKP-RI Sumbar
8. Harapan III Penampilan Stand Terbaik dalam rangka Sumbar Expo di Makasar Sulawesi Selatan

9. UKM Penjualan Tertinggi dalam rangka Sumbar Expo di Makasar Sulawesi Selatan diraih oleh Yenie Bordir
10. Juara I Lomba Kelompok Asman dan Akupresur diraih oleh Kelompok Asman dan Akupresur Dahlia Kel. CGB
11. Juara II Tenaga Kesehatan Teladan Kategori Tenaga Gizi diraih oleh Devira, S.Gz
12. Juara I Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Pemenang I Kategori Kota diraih oleh Kelurahan Ladang Cakiah Kec. ABTB
13. Juara I Lomba Implementasi Gemarikan pada PAUD diraih oleh PAUD Excelent
14. Harapan III Lomba Implementasi Kinerja Forikan Nagari/Kelurahan diraih oleh Kelurahan Ladang Cakiah
15. Harapan III Lomba Jingle Gemarikan diraih oleh SMAN 2
16. Harapan III Lomba Masak Menu Balita diraih oleh Kelurahan ATTS
17. Harapan II Lomba Masak Inovasi Menu Kudapan SMKN 2
18. Juara I Sapi Simental Jantan Dewasa diraih oleh FMA Dt. Palindih
19. Juara I Anak Sapi Simental Jantan diraih oleh Yesnovan
20. Juara I Anak Sapi Simental Betina diraih oleh Haryanto Rahmat
21. Juara III Asah Terampil diraih oleh Tia Febriana Cs
22. Juara Harapan I Stand Pameran Dinas Pertanian dan Pangan
23. Juara II Solo Song dan Duet diraih oleh Yetti Asra
24. Juara III Voli Pantai diraih oleh Ahmad Fauzi Cs
25. Juara III Gapoktan Berprestasi diraih oleh Gapoktan Pulau Sepakat
26. Sekolah Adiwiyata diraih oleh Tim (SD 01 Campago Ipuh, SD 10 Sapiran, SD 07 Belakang Balok dan SD 09 Belakang Balok)
27. Juara III Lomba Ustadz/ah Genre pada Jambore dan ajang tamu kreatifitas genre dan perkemahan bhakti saka kencana Tk. Prov. Sumbar
28. Juara III Lomba Pionering
29. Juara I Lomba Ranking I Hebat
30. Juara I Lomba Fun Cooking Genre
31. Juara III Lomba Flashmob Genre
32. Juara II Apresiasi Kelompok PIK Remaja Jalur Pendidikan diraih oleh Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK Remaja) MCC Arrahman MAN 1 Bukittinggi Dalam rangka peringatan Harganas XXV Tk. Provinsi Sumbar Tahun 2018
33. Juara Umum Kategori Kota Pelaksana Terbaik Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumbar
34. Terbaik I Kategori Kota Pelaksana Terbaik Kegiatan PKK KB Kes diraih oleh Kel. Belakang Balok
35. Terbaik I Kategori Kota Pelaksana Terbaik Gerakan PKK Bidang Pemanfaatan Lahan Pekarangan (Hatinya PKK) Kel. Campago Guguk Bulek

36. Juara I Lomba Penyuluhan Pengolahan Sampah TP PKK Kota Bukittinggi
37. Terbaik II Kategori Kota Pelaksana terbaik Gerakan PKK Bidang Tertib Administrasi PKK Kel. Puhun Tembok
38. Terbaik II Kategori Kota Pelaksana Terbaik Kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Kel. Belakang Balok
39. Terbaik II Kategori Kota Pelaksana Terbaik Gerakan PKK Bidang Pola Asuh Anak dan Remaja Kel. Belakang Balok
40. Terbaik III Kategori Kota Pelaksana Terbaik Kegiatan Posyandu Kel. Belakang Balok
41. Harapan I Kategori Kota Pelaksana Terbaik Gerakan PKK Bidang Pelaksanaan IVA Test Kec. Guguk Panjang
42. Harapan II Kategori Kota Pelaksana Terbaik Gerakan PKK Bidang Kelompok UP2K-PKK Kel. Aur Kuning
43. Juara I Tagana Teladan Salehan
44. Juara I TKSK Berprestasi Mailinda
45. Juara I Penyandang Disabilitas Ria Deviana
46. Juara II Tokoh Pemerhati Disabilitas Dedi Fatria, SH
47. Juara II Organisasi Sosial Aisyiyah
48. Piagam Penghargaan Produktifitas SIDDHA KARYA Walikota Bukittinggi
49. Penghargaan Kualitas dan Produktifitas SIDDHA KARYA Perusahaan Nuri Chocolate
50. Juara II The Best Performance Peduli Wisata Awards 2018 Walikota Bukittinggi
51. Juara I Instruktur Komputer LKP Widyaloka (Benny Eka Putra, S.Kom)
52. Juara I Tutor Paket A diraih oleh SPNF SKB (Monica Yulia, SE)
53. Juara I Tutor Paket B diraih oleh SPNF SKB (Melda Yeni, S.Pd)
54. Juara I Tutor Paket C diraih oleh SPNF SKB (Loza Marlona, SIP)
55. Juara I Instruktur Otomotif Teknik Sepeda Motor LKP INGG (Deno Saputra)
56. Juara II Pengelola LKPKKW Srikandi (Rahmadina Putri Z, SE)
57. Juara II Instruktur Tata Kecantikan Rambut LKP Eryanti Beauty (Eryanti B. Syamsudin)
58. Juara II Instruktur Tata Busana LKW Modeste Dolly (Mega Novita Sari)
59. Juara III Guru KB, TPA dan SPSKB Duta Wahana (Miswirda, S.Pd)
60. Juara III Pamong Belajar SPNF SKB (Rahmawati, SIQ)
61. Juara I Guru Berprestasi SD diraih oleh Putri Mayadesti
62. Juara I Guru Berprestasi SMP diraih oleh Eldawati, S.Si
63. Juara III Lomba Gitar Solo diraih oleh Rizky Wahyudi
64. Juara III Lomba Musik Tradisional diraih oleh Tim SMPS Xaverius
65. Juara III Lomba Seni Tari diraih oleh Tim SDS Al Azhar
66. Perwakilan ke Nasional Lomba IPA diraih oleh Muhammad Fathan Khalilullah Hasnil (SMPIT Al Islah)

67. Juara I Lomba Renang diraih oleh Syevilla Ilda Aulia Putri (SDIT Syahrial Ilmi)
68. Juara II Lomba Bulu Tangkis diraih oleh Tommy Saputra (SDN 02 CGB)
69. Juara II Lomba Atletik diraih oleh Rehan Pratama (SDn 16 Campago Ipuh)
70. Juara III Lomba Karate diraih oleh Sri Rozak Hidayatullah (SDN 02 Percontohan)
71. Juara II Lomba Renang diraih oleh Adhitia Rendi (SMPN 4 Bukittinggi)
72. Juara III Lomba Karate diraih oleh Chelse Lexem (SMPN 1 Bukittinggi)
73. Juara II Lomba Bulu Tangkis diraih oleh Rian Aldi Putra (SMPN 4 Bukittinggi)
74. Juara II Lomba Atletik diraih oleh Rama Nanda Putri (SMPn 3 Bukittinggi)
75. Juara II Lomba Atletik M. Chairil Al Amin (SMPN 3 Bukittinggi)
76. Paskibraka Tingkat Provinsi Dea Ainul Fadhila (SMAN 1) dan M. Hilmy Rafly Gautama (SMAN 1) Derri Wibisono (SMAS Pembangunan) Nessa Huriyah Adirlan (SMAS Xaverius) Fidelia Aprilia Emilia Tamba (SMAS Xaverius)
77. Juara II Pemuda Pelopor Bidang Pendidikan diraih oleh Rahmadina Putri Zulkarnain, SH
78. Juara II Pemuda Pelopor Bidang Pengelolaan SDA dan Pariwisata diraih oleh Iznillah, S.Pd
79. Juara II Pemuda Pelopor Bidang Inovasi dan Teknologi diraih oleh Muhammad Irfan Tasrid, SE
80. Juara I Atletik Lari 400 m diraih oleh Ramadan
81. Juara I Tolak Peluru diraih oleh Rizkiy Ramadan
82. Juara II Lempar Cakram diraih oleh M. Riski
83. Juara II Atletik Lari 100 m diraih oleh Dinda Fanesia
84. Juara II Atletik Lari 800 m diraih oleh Giska Dwi P
85. Juara III Lompat Jauh diraih oleh Dian Putri
86. Juara III Atletik Lari 400 m diraih oleh Fadila Indra
87. Juara I Bulu Tangkis Ganda Campuran Difabel diraih oleh Edo Saputra Agus dan Tari Ananda Putri
88. Juara II Bulu Tangkis Ganda Putri Difabel diraih oleh Isma Aini Fakhira dan Tari Ananda Putri
89. Juara III Bulu Tangkis Tunggal Putra Difabel diraih oleh Rahmat Hidayat
90. Juara III Bulu Tangkis Tunggal Putri Difabel diraih oleh Isma Aini Fakhira
91. Juara III Bulu Tangkis Tunggal Putri Difabel Tari Ananda Putri
92. Juara III Bulu Tangkis Ganda Putra Difabel diraih oleh Rahmat Hidayat dan Edo Saputra Agus
93. Juara III Bulu Tangkis Ganda Campuran Difabel diraih oleh Ragnat Hidayat dan Isma Aini Fakhira
94. Juara II Pencak Silat diraih oleh Dimas Al Fajri
95. Juara II Bulu Tangkis Tunggal Putra diraih oleh Azhari Hidayat
96. Juara II Basket Putra diraih oleh Rahul Sang Fajar Cs
97. Juara III Basket Putri diraih oleh Olivia Permata Sanda Cs

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2020 memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2019 dan perkiraan tahun 2020, yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka ekonomi daerah ini memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Bukittinggi baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2020. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2020 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Bukittinggi melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah. Sasaran kinerja tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan daerah yang diikuti dengan kerangka regulasi guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan tahun 2020.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bukittinggi

Arah kebijakan ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2020 disusun berdasarkan analisa terhadap factor internal dan eksternal serta berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dan arah kebijakan pada RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025, serta RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021.

Dalam rangka keselarasan dan terintegrasinya Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Nasional, arah kebijakan ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2020 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Tahun 2020. Disamping itu arah pembangunan

perekonomian diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB, dan juga pada sektor yang memiliki prospek ke depan yang baik serta tahan terhadap gejolak ekonomi.

Disamping itu arah Kebijakan Ekonomi Kota Bukittinggi untuk Tahun 2020 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2018, proyeksi Tahun 2019 dan prospek serta tantangan perekonomian Tahun 2020. Diharapkan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2020

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024. Oleh karenanya, tahun 2020 merupakan tahun kunci untuk kesuksesan transformasi perekonomian Indonesia. Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan dicapai melalui reformasi struktural yang terus berlanjut, serta penguatan permintaan domestik dengan investasi sebagai ujung tombak dan perbaikan kinerja perdagangan internasional melalui upaya diversifikasi ekspor. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,3-5,6 persen pada tahun 2020 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD4.340 – 4.390 per kapita pada tahun 2020.

Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas makroekonomi tetap menjadi prioritas. Tingkat inflasi ditargetkan sebesar $3,0 \pm 1$ persen. Di tengah tekanan eksternal, pergerakan nilai tukar diupayakan tetap stabil sesuai fundamentalnya, mencapai rata-rata Rp14.000-15.000 per USD pada tahun 2020.

Kondisi makro yang menguat dan stabil diiringi peningkatan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 8,5 – 9,0 persen dan 4,8 – 5,1 persen, dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,375 – 0,380 pada tahun 2020. Sementara, IPM diharapkan meningkat menjadi 72,51, yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi makroekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi. Sasaran ekonomi makro untuk tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.
Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2020

Indikator	2018	2019*)	2020**)
Perkiraan Besar-besaran Pokok			
Pertumbuhan PDB (%)	5,2	5,3	5,3 - 5,6
Laju inflasi, IHK (%): Akhir Periode	3,13	2,5 - 4,5	2,0 - 4,0
Nilai Tukar Nominal (Rp/USD): Rata-Rata	14,247	15	14.000 - 15.000
Neraca Pembayaran			
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas	6,4	8,0	7,8 - 9,7
Pertumbuhan Impor Nonmigas	19,5	11,0	10,5 - 12,3
Cadangan Devisa (USD miliar)	120,7	125,5 - 127,8	124,8 - 130,6
- dalam bulan impor (termasuk utang LN Pemerintah)	6,5	6,6 - 6,8	6,1 - 6,2
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (%PDB)	3,0	2,5 - 2,7	2,2 - 2,5
Keuangan Negara			
Penerimaan Perpajakan (%PDB)	10,30	11,10	10,60 - 11,20
Belanja Modal (%PDB)	1,25	1,18	1,43 - 1,58
Subsidi Energi (%PDB)	1,10	0,99	0,82 - 0,83
Keseimbangan Primer (%PDB)	(0,01)	(0,13)	0,00 - 0,23
Surplus/Defisit APBN (%PDB)	(1,76)	(1,84)	(1,75) - (1,52)
Stok Utang Pemerintah (%PDB)	29,98	30,00	29,40 - 30,10
Investasi			
Peringkat Indonesia pada EODB	73	Menuju 40	Menuju 40
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,7	7,0	7,0 - 7,4
Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	721,3	833,0 - 870,0	875,1 - 890,3
Target pembangunan			
tingkat kemiskinan (%)	9,8	8,5 - 9,5	8,5 - 9,0
tingkat pengangguran (%)	5,3	4,8 - 5,2	4,8 - 5,1
Rasio Gini (nilai)	0,389	0,380 - 0,385	0,375 - 0,380
Indeks Pembanguna Manusia (IPM) (nilai)	71,39	71,98	72,51

Kerangka besar arah kebijakan ekonomi makro Indonesia untuk tahun 2020 dapat digambarkan dalam skema pada Gambar dibawah ini

Gambar 3.1
Arah Kebijakan Makro 2020



3.1.2. Arah Pengembangan Wilayah Sumatera

Pengembangan wilayah Sumatera diarahkan untuk memantapkan perannya dalam perekonomian nasional sebagai sentra produksi komoditas dan industri pengolahan berbasis sumber daya alam, serta sebagai salah satu lumbung pangan dan lumbung energi nasional. Wilayah Sumatera merupakan penghasil terbesar komoditas kelapa sawit, karet, kopi, dan kayu, serta salah satu wilayah penghasil utama batubara, migas, dan timah.

Pada tahun 2020, pengembangan wilayah Sumatera dilakukan dengan mempercepat pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan wilayah dan pembangunan jaringan jalan tol Lintas Sumatera yang dipadukan dengan jaringan multi moda pelabuhan, bandara, dan jaringan jalan non-tol untuk memperkuat konektivitas dan memantapkan sistem logistik wilayah dalam mendukung industrialisasi khususnya di koridor pesisir timur Wilayah Sumatera. Di samping itu, pengembangan wilayah Sumatera dilakukan dengan meningkatkan jaringan irigasi dan transportasi untuk mendukung produksi pangan beras dan palawija di Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, dan Sumatera Barat.

Pengembangan wilayah Sumatera juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi perkotaan, sanitasi dan air bersih, serta pengelolaan sampah dan limbah di Metropolitan Medan dan Palembang, serta kota-kota besar lainnya seperti Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Tanjung Pinang, Batam dan Pangkal Pinang. Pengembangan sistem transportasi perkotaan diarahkan pada terbentuknya sistem transportasi massal multi moda yang efisien dan

terintegrasi, khususnya di kawasan metropolitan Medan dan Palembang.

Peningkatan pemerataan pembangunan wilayah Sumatera diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, permukiman, air bersih dan listrik di kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan dan kawasan kepulauan seperti Nias, Simeuleu, Mentawai, Anambas; serta memperkuat konektivitas antarkawasan dengan meningkatkan aksesibilitas kota-kota kecil dan menengah, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal; serta memperkuat keterkaitan antara kawasan penghasil komoditas di perdesaan dan kawasan industri pengolahan serta pasar di kota-kota besar.

Wilayah Sumatera merupakan wilayah rawan bencana terutama ancaman gempa tektonik khususnya jalur patahan di pesisir barat dan di sepanjang Bukit Barisan, tsunami, erupsi gunung berapi, dan kebakaran lahan yang menurunkan kualitas udara dan memicu infeksi saluran pernapasan. Oleh sebab itu, pengembangan wilayah Sumatera pada tahun 2020 diarahkan untuk mempercepat pemulihan daerah pasca bencana, mengurangi risiko kerugian ekonomi, meningkatkan mitigasi bencana, dan memperkuat kesiapsiagaan bencana dengan mengembangkan sistem dan peralatan deteksi dini bencana, meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat, serta memperluas kerjasama dalam pengembangan pendidikan dan budaya sadar bencana.

Sasaran utama pengembangan wilayah Sumatera pada tahun 2020 adalah:

- (1) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah;
- (2) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan;
- (3) menciptakan kesempatan kerja; dan
- (4) meningkatkan pembangunan manusia,

Pengembangan wilayah Sumatera pada tahun 2020 diprioritaskan antara lain pada:

- (1) pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) komoditas unggulan di kawasan ekonomi khusus (KEK) Arun-Lhokseumawe, KEK Sei Mangke, KEK Tanjung Api-Api, KEK Galang Batang, kawasan industri (KI) Bintan, KI Tanggamus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang, serta KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun;
- (2) pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Danau Toba, KSPN/KEK Tanjung Kelayang, destinasi potensial Sabang, Padang-Bukittinggi, Batam-Bintan, dan Palembang;
- (3) percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- (4) pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi;

- (5) pengembangan kawasan kepulauan Nias, Mentawai, Simeuleu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung; dan
- (6) penguatan ketahanan dan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana sepanjang Pantai Barat Sumatera, dan daerah rawan bencana lainnya.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2020 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional maka arah kebijakan dan program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1: Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dengan arah kebijakan yaitu:
 - a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan.
 - b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
 - c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk.
 - d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.
 - e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan.
 - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
 - c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
 - d. Pengentasan kemiskinan.
 - e. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.
2. Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan arah kebijakan yaitu:
 - a. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.
 - b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan

karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.

- c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.
- d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik.
- e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.
- f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perluasan infrastruktur dasar.
 - b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana.
 - c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi.
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan.
 - e. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Prioritas Nasional 3: Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan yaitu:
- a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
 - b. Mempercepat transformasi struktural.
 - c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.
 - d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
 - e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM.

- b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil.
 - c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
 - d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
 - e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
4. Prioritas Nasional 4: Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan yaitu:
- a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.
 - b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.
 - c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
 - d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.
 - e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
 - b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
 - c. Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbarukan (EBT).
 - d. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan.
 - e. Penguatan ketahanan bencana.
5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan arah kebijakan yaitu:
- a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.
 - b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional.
 - c. Menegakkan hukum dan anti korupsi.
 - d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas.
 - e. Meningkatkan keamanan siber.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan pertahanan.
- b. Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.
- d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut.
- e. Penanggulangan narkoba dan penguatan Kamtibmas.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Propinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Perekonomian Sumatera Barat pada Triwulan I Tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 4,78%. Sumber pertumbuhan ekonomi Sumbar pada Tahun 2018 tertinggi pada industri pengolahan sebesar 0,91%. Untuk triwulan I Tahun 2019, sumber pertumbuhan tertinggi pada perdagangan besar dan eceran, dan reparasi sebesar 0,87% terlihat naiknya penyaluran kredit konsumsi dan investasi serta pembelian kendaraan baru dari penerimaan PKB baru kendaraan bermotor (plat hitam)

Ekonomi Sumbar tumbuh moderat, dengan realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2019 sebesar 4,78% (yoy) atau menurun dibandingkan triwulan IV tahun 2018 sebesar 5,50% (yoy). Perlambatan bersumber dari antara lain inflasi Kota Padang pada triwulan I sebesar 0,13%% (y-o-y), tanaman pangan mengalami pertumbuhan positif karena naiknya produksi padi, industri makanan dan minuman berkontraksi dibanding triwulan sebelumnya karena berkurangnya output industri pengolahan sawit (CPO), jumlah penumpang angkutan udara berkurang karena naiknya tarif tiket pesawat dan kargo berbayar, adanya pemilu Presiden dan Legislatif. Realisasi belanja pemerintah (APBN) triwulan I Tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding realisasi triwulan I tahun 2018, adanya kegiatan PKH dan bantuan pangan non tunai (BPNT), naiknya ekspor barang Sumbar pada triwulan I tahun 2019 mengalami kontraksi baik secara (q-to-q) maupun secara (y-o-y).

Secara keseluruhan tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat diproyeksikan tumbuh dalam rentang 4,89% – 5,8% (yoy) atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya tumbuh 5,14%. Masifnya kebijakan pemerintah untuk mendukung terjaganya daya beli masyarakat merupakan kunci pertumbuhan ekonomi Sumbar di tahun 2019. Di tahun ini, pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh tetap kuat ditengah ketidakpastian ekonomi global.

Momentum masih menguatnya konsumsi rumah tangga tersebut dimanfaatkan oleh perbankan untuk meningkatkan pertumbuhan kreditnya ditengah lesunya gairah investasi swasta. Faktor lain yang memiliki andil dalam pertumbuhan konsumsi rumah tangga adalah penyelenggaraan pemilu serentak untuk legislatif dan presiden. Meningkatnya anggaran untuk partai politik menggerakkan konsumsi LNPRT pada level yang lebih tinggi dari biasanya, yang selanjutnya ditransmisikan ke pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Di sisi lain, pemerintah pusat maupun daerah berusaha menggerakkan maksimal agar pertumbuhan investasi tetap dapat tumbuh, dengan menganggarkan lebih dari 1 triliun rupiah hanya untuk anggaran belanja infrastruktur. Namun demikian, dampak dari pembangunan infrastruktur tersebut masih relatif terbatas, tidak lebih tinggi dari perlambatan investasi swasta yang saat ini masih enggan untuk merealisasikan anggarannya untuk melakukan investasi dengan skala besar. Peningkatan anggaran pembangunan infrastruktur tersebut akan berdampak pada meningkatnya impor barang modal di Sumatera Barat selama tahun 2019. Komponen ekspor diyakini akan kembali tertekan karena semakin panasnya perang dagang yang mempengaruhi perlambatan perdagangan internasional.

Dari sisi sektoral, lapangan usaha konstruksi diprediksi akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya realisasi anggaran belanja modal pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Beberapa proyek infrastruktur yang tengah berjalan antara lain renovasi Pasar Atas Bukittinggi, pembangunan sejumlah jalan serta dermaga, lanjutan pembangunan infrastruktur penunjang di Pelabuhan Teluk Tapang Kabupaten Pasaman Barat dan pembangunan *Main Stadium* Pasaman Barat dan pembangunan *Main Stadium* Sumatera Barat. Lapangan usaha yang berhubungan erat dengan sektor pariwisata diproyeksikan juga akan menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi pada saat-saat tertentu, seperti perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional dan libur akhir tahun. Namun demikian, melonjaknya harga tiket angkutan udara menjadi faktor penahan kinerja LU transportasi pergudangan yang pada akhirnya juga mempengaruhi kinerja LU perdagangan dan LU penyediaan akomodasi makan minum secara tidak langsung. Oleh karenanya, pertumbuhan sektor-sektor tersebut dirasa tidak akan setinggi perkiraan sebelumnya. LU pertanian yang mempunyai pangsa pasar terbesar dalam pembentukan PDRB sisi lapangan usaha diyakini juga akan terus terakselerasi namun dengan laju yang melambat, terutama disebabkan oleh kinerja sub LU perkebunan sebagai dampak diteruskannya program peremajaan kembali kelapa sawit baik oleh negara maupun swasta, serta pengelolaan mayoritas lahan pertanian yang masih tradisional atau belum menerapkan mekanisasi pertanian. Pelaksanaan *replanting* tersebut menjadi salah satu penyebab pertumbuhan moderat LU industri olahan, disamping masih belum membaiknya proyeksi harga komoditas dunia yang menjadi disinsentif bagi pengusaha pengolahan CPO.

Laju IHK terjaga pada level rendah sampai dengan triwulan I tahun 2019 yakni sebesar 1,94%, Angka realisasi inflasi di triwulan I tahun 2019 tersebut lebih rendah dari realisasi pada triwulan sebelumnya yang mencapai 2,60% dan triwulan I tahun 2018 sebesar 2,33%. Faktor utama penurunan laju inflasi di triwulan awal Tahun 2019 ialah cukup dalamnya laju deflasi pada kelompok bahan makanan yakni sebesar 1,21% didukung oleh menurunnya harga komoditas cabai merah di pasaran karena masuknya masa panen dari dalam dan luar Sumatera Barat. Di sisi lain, penghapusan tiket promo oleh operator angkutan udara sejak akhir triwulan IV tahun 2018 berdampak pada melonjaknya laju inflasi komoditas angkutan udara menjadi 28,84% dari sebelumnya deflasi 7,08% di triwulan IV tahun 2018. Kenaikan laju inflasi komoditas tersebut menggerakkan inflasi kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan menjadi 4,02% di triwulan I tahun 2019.

Laju inflasi Sumbar di tahun 2019 diproyeksikan pada kisaran 3,5%. Dari sisi eksternal, faktor yang mempengaruhi inflasi di tahun ini masih berasal dari volatilitas nilai tukar dan pembentukan harga komoditas internasional seperti harga minyak dunia, harga emas internasional dan harga jual jagung untuk pakan ternak. Sementara dari sisi internal, risiko inflasi berasal dari terjaganya daya beli masyarakat pada tingkat yang cukup tinggi dan maraknya alih fungsi lahan pertanian berdasarkan data SOUT BPS tahun 2018 sehingga berdampak pada produksi bahan pangan yang diperkirakan sedikit mengalami penurunan. Tekanan inflasi di tahun 2019 diperkirakan berasal dari hampir seluruh kelompok inflasi terutama kelompok bahan makanan; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan; dan kelompok sandang. Namun demikian tekanan inflasi dapat diredam oleh beberapa kebijakan pemerintah yang telah diambil, antara lain golongan rumah tangga mampu di awal tahun 2019.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 diperkirakan berada pada rentang 4,7% - 5,7% (yoy), melambat dibandingkan perkiraan terkini tahun 2019 yakni pada kisaran 4,8% - 5,8%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 tersebut ditopang oleh masih terjaganya daya beli masyarakat sehingga menggerakkan sektor usaha lainnya. Selain itu, meningkatnya anggaran belanja daerah yang dibarengi dengan perbaikan. Masih berjalannya program pembangunan infrastruktur juga menjadi pendorong utama tumbuhnya PMTB di Sumatera Barat. Sementara pertumbuhan ekspor diprediksi masih akan tertekan terutama karena melambatnya pertumbuhan ekonomi global sehingga mempengaruhi kinerja perdagangan internasional. Dari sisi lapangan usaha, sektor utama sumber seperti LU pertanian, LU perdagangan, LU transportasi pergudangan, LU konstruksi dan Lu industri olahan diyakini masih menjadi mesin penggerak utama perekonomian Sumatera Barat.

Laju inflasi Sumbar tahun 2020 diproyeksikan pada kisaran 3,0% ± 1%, sedikit melambat dibandingkan proyeksi terakhir tahun 2019. Dari sisi eksternal, faktor yang menahan inflasi di tahun 2020 seiring dengan proyeksi penurunan harga minyak dan emas dunia. Sementara tekanan inflasi diperkirakan berasal dari tren kenaikan harga jual jagung global yang dapat mempengaruhi gejala

harga daging ayam ras dan telur ayam ras. Sementara dari sisi internal, resiko inflasi tetap berasal dari daya beli masyarakat yang teja, penurunan luas lahan pertanian terutama tabama karena alih fungsi yang beresiko mengurangi produksi. Tarif angkutan udara yang secara khusus memberikan andil cukup besar pada laju inflasi tahun 2019 diprediksi tetap akan berada pada kondisi “*New normal*” mendekati tarif batas atas (TBA). Berdasarkan kelompoknya, tekanan inflasi masih berasal dari kelompok bahan makanan; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; serta kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan.

Proyeksi perekonomian Sumatera Barat tahun 2020 dari sisi pengeluaran didorong oleh terjaganya konsumsi masyarakat dan peningkatan anggaran belanja pemerintah. Sementara bertambahnya anggaran belanja modal, diperkirakan masih akan menjadi faktor pendorong utama tetap tumbuhnya komponen PMTB. Di sisi lain, pertumbuhan ekspor diperkirakan masih tertekan seiring dengan banyak restriksi dagang internasional, terutama untuk komoditas unggulan ekspor Sumatera Barat, yakni CPO. Dari komponen impor, diyakini akan tumbuh dalam skala moderat karena terus meningkatnya insentif untuk sektor pertanian dan perkebunan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, namun tertahan oleh menurunnya pertumbuhan kendaraan bermotor sehingga mempengaruhi kebutuhan bahan bakar minera yang merupakan komoditas utama impor Sumatera Barat dari Singapura.

Proyeksi perekonomian Sumatera Barat tahun 2020 dari sisi lapangan usaha sektoral diprediksi masih akan ditopang oleh lapangan usaha unggulan Sumatera Barat, yakni LU pertanian, LU perdagangan, LU transportasi pergudangan, LU konstruksi dan LU industri pengolahan.

Selanjutnya dalam memperbaiki kinerja perekonomian di tahun 2020 nanti, sesuai dengan Tema RKPD tahun 2020 yaitu “*Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, Investasi dan Pemerataan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas*”, dari sisi produksi, maka sektor pertanian, industri pengolahan, ekonomi kreatif, perdagangan hotel dan restoran, jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi serta investasi haruslah mendapat perhatian lebih besar, karena berkontribusi besar terhadap pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat selama ini. Sektor pariwisata perlu dikembangkan dengan peningkatan aksesibilitas melalui pengembangan akses jalan raya; penyediaan sarana dan transportasi publik yang layak dan nyaman menuju destinasi wisata; penambahan rute internasional dan percepatan penyelesaian perluasan Bandara Internasional Minangkabau dan bandara Rokot di Mentawai. Diperlukan juga adanya pemfokusan agenda wisata yang memberikan dampak besar bagi perekonomian daerah maupun publisitas skala global. Perbaikan iklim investasi juga diperlukan dan perbaikan infrastruktur penunjang pariwisata.

Sektor pertanian yang memberikan sumbangan besar terhadap pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat adalah sub sektor perkebunan, peternakan, tanaman pangan, dan perikanan. Ke empat sub sektor ini perlu dikembangkan ke arah peningkatan nilai tambah produknya. Dengan

mendorongnya melangkah ke agroprosesing dalam pengembangan agrobisnis dan bahkan agroindustri. Hal ini sejalan dengan prioritas dan sasaran pembangunan di bidang pertanian pada RPJMD tahun 2016-2021 yang menekankan pada peningkatan kualitas teknis pengelolaan agribisnis, pengembangan balai-balai penelitian untuk hortikultura dan bahan makanan, pengembangan kawasan agropolitan dan *agrocit*y, pengembangan zona pengolahan ekspor yang semuanya mengarah kepada peningkatan peluang pasar untuk produk olahan pertanian, baik pasar di dalam negeri sendiri maupun pasar luar negeri. Diharapkan pada tahun 2020 sebagai tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 telah berhasilnya upaya peningkatan industri kreatif Sumatera barat, terutama dari ekonomi kreatif yang berbasis budaya, dan lebih khusus kepada produk hasil perkebunan, hortikultura, produk industri makanan, dan produk olahan hasil perikanan tangkap, yang selama ini mendominasi peningkatan kualitas perekonomian Sumatera Barat. Produk pertanian unggulan dan industri unggulan ini diharapkan mampu bersaing dengan produk komoditi utama yang dikembangkan pula pada pusat-pusat koridor ekonomi. Peningkatan daya saing produk pertanian yang menjadi andalan ekspor selama ini semakin penting, mengingat berlakunya pasar bersama ASEAN sehingga persaingan komoditi ekspor negara-negara ASEAN akan semakin ketat.

Upaya ke arah pematapan agrobisnis dan agroindustri pada sektor pertanian dalam arti luas, tentunya memerlukan dukungan dari infrastruktur sosial ekonomi yang cukup memadai, seperti infrastruktur fisik jalan raya menuju kawasan pertanian, farm road pada kawasan-kawasan andalan produk unggulan pertanian yang berorientasi agro-prosesing dan agroindustri. Disamping itu, diperlukan pula pengembangan kelembagaan produksi dan pemasaran produk unggulan pertanian yang mampu menopang ke arah pengembangan agro bisnis dan agro industrinya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah pengembangan standarisasi komoditi ekspor pemasaran produk industri unggulan yang ada, sehingga dapat dengan mudah memasuki pasar bersama ASEAN. Pada sisi pengeluaran, komponen konsumsi lembaga swasta yang dapat berupa investasi swasta dalam pembangunan ekonomi Sumatera Barat harus didorong agar peran investasi pihak swasta dalam pembangunan perekonomian Sumatera Barat akan terus mengalami perbaikan. Oleh karena itu, perbaikan suprastruktur dan infrastruktur perekonomian Sumatera Barat kedepan. Pembangunan *Short cut* jalur kereta api menuju Kota padang dari Dharmasraya, lunang Silaut dan Simpang Empat Pasaman sangatlah mendesak untuk dilaksanakan. Tidak kalah pentingnya adalah pembangunan jalan tol Padang – Payakumbuh menuju Riau sebagai pusat pertumbuhan koridor Sumatera.

Usaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor barang dan jasa luar negeri harus terus dilakukan melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata, sehingga permintaan terhadap barang-barang domestik akan semakin tibggi. Besarnya kontribusi impor barang dan jasa terhadap pembentukan nilai PDRB ternyata berasal dari pembelian barang-barang golongan kertas/karton, mesin-mesin mekanik, keramik, serta barang-barang dari besi dan baja. Oleh karena itu,

pembangunan ekonomi Sumatera Barat harus mampu mengarah kepada perubahan struktural terutama mengembangkan industri pengganti substitusi impor ini, sebab komponen konsumsi rumah tangga yang harus meningkat ternyata juga sejalan dengan peningkatan impor. Keadaan ini tentu memperlemah kinerja perekonomian Sumatera Barat di masa depan.

Penyusunan program untuk tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Tahun 2020 ini merupakan tahun yang sangat menentukan untuk terjadinya perubahan struktur perekonomian menuju kepada ekonomi yang berbasis pengolahan produk pertanian dan ekonomi kreatif. Selama dua periode RPJMD 2011-2015 dan RPJMD 2016-2021 telah banyak dilakukan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dan pada tahun keempat dalam RPJMD ini hendaknya lebih fokus kepada pengolahan produk pertanian dan ekonomi kreatif pendukung kegiatan pariwisata dan perdagangan, hotel dan restoran. Keberhasilan pembangunan Provinsi Sumatera Barat selama ini telah dapat terlihat dengan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat; upah buruh yang terus meningkat, angka kemiskinan yang semakin rendah, terus tumbuhnya konsumsi masyarakat, semakin tingginya aktifitas perdagangan, hotel dan restoran, serta pergerakan aktifitas jasa-jasa di tengah masyarakat.

Demikian pula pada sisi penawaran, keberhasilan pembangunan pertanian ditandai dengan semakin besarnya volume produksi barang produk pertanian. Namun keberhasilan perekonomian dalam wilayah sendiri saja tidaklah cukup, karena perekonomian Sumatera Barat sangat tergantung kepada aktifitas perekonomian dari luar, terutama kondisi perekonomian nasional dan perekonomian global umumnya yang tengah mengalami perubahan kearah penurunan pertumbuhan. Sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah nasional adalah melakukan kebijakan stabilisasi keuangan oleh BI untuk mengurangi *deficit current account* dan *capital account* hal ini tentunya akan berdampak kepada *capital inflow* di dalam negeri sendiri. Pada sisi lain, pemulihan perekonomian negara-negara tujuan ekspor yang melakukan kebijakan proteksi terhadap komoditi perdagangan negara berkembang yang belum terstandarisasi produknya melalui standardisasi yang diatur dalam perdagangan dunia, disamping kebijakan pelonggaran keuangan (*floating financial policy*) yang diberlakukan untuk menghindari krisis perekonomian di beberapa negara-negara ini dengan mitra dagangnya seperti negara Indonesia umumnya dan wilayah provinsi Sumatera Barat umumnya.

Berdasarkan kondisi ekonomi Sumatera Barat diatas, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan sektor ekonomi yang kuat yang berbasis kepada sumberdaya daerah, peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan ekonomi kreatif yang mendukung kegiatan pariwisata yang menciptakan lapangan kerja yang lebih luas melalui peningkatan peran investasi swasta dalam negeri (PMDN) dan swasta asing (PMA) serta investasi pemerintah serta BUMD melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung kepada

kegiatan ekspor komoditi utama, serta mengurangi jumlah pengangguran dengan mengembangkan sistem pelayanan publik yang mendorong semakin berkembangnya investasi swasta, perluasan ekspor melalui pembentukan zona prosesing ekspor pada wilayah koridor ekonomi yang ada, pemberdayaan usaha mikro menengah, peningkatan kualitas teknis pengelola agribisnis dengan pengembangan kluster agrobisnis dan agroindustri dalam konteks pengembangan kawasan agropolitan serta pengembangan agriwisata dan ekowisata, pengembangan balai-balai penelitian untuk tanaman komoditi unggulan daerah, peningkatan badan sertifikasi produk ekspor untuk melakukan standardisasi komoditi perdagangan, pengembangan kawasan sentra industri masyarakat, memperbesar peluang pasar untuk produksi unggulan baik antar wilayah maupun eksternal wilayah, pembangunan konektivitas dengan pusat-pusat koridor ekonomi Sumatera, melalui perdagangan daerah terutama produk pertanian dan ekonomi kreatif. Adapun langkah-langkah kebijakan yang harus dilakukan adalah:

1. Meningkatkan nilai ekspor dan integrasi ekonomi dengan koridor ekonomi Sumatera dan dengan negara-negara ASEAN dengan mengembangkan industri pengolahan produk pertanian unggulan dan memperluas negara tujuan ekspor dan mendorong peningkatan permintaan internal dan eksternal wilayah;
2. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan Sumatera Barat melalui pengembangan zona prosesing ekspor pada koridor ekonomi yang ada, kawasan agribisnis, agropolitan dan kawasan unggulan industri pengolahan dan harus dapat terkoneksi dengan koridor ekonomi Sumatera;
3. Mengatasi pengangguran dengan mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif pada setiap kawasan utama, kawasan strategis dan kawasan potensial pariwisata daerah;
4. Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru untuk mendorong dilakukannya investasi yang padat karya, terutama dari pelaksanaan proyek-proyek APBN dan APBD, disamping proyek investasi lembaga swasta dalam negeri dan luar negeri;
5. Mengurangi konsumsi barang-barang impor dengan menggunakan produk dalam negeri sendiri melalui peningkatan perdagangan antar daerah, peningkatan penggunaan hasil kerajinan rumah tangga yang spesifik lokal;
6. Mengembangkan produk komoditi ekspor yang berbasis ekonomi lokal seperti produk Hortikultura, perkebunan, perikanan, ternak besar dan kecil, industri kerajinan lokal, industri makanan tradisional dan industri garmen lokal;
7. Memperkuat jejaring bisnis lokal dengan badan usaha daerah (BUMD) melalui penyusunan kontrak-kontrak bisnis (*kontrak farming*) antara pengusaha lokal dan nasional dengan gabungan kelompok tani produsen komoditi unggulan, lembaga keuangan daerah, koperasi

untuk menciptakan terjadinya persaingan di tingkat lokal dalam rangka menuju kepada keunggulan persaingan secara global;

8. Mengembangkan sistem pengaturan yang baik (*good governance*) dalam sistem pengelolaan pemerintah yang kondusif bagi peningkatan peluang investor dalam negeri dan luar negeri untuk menanamkan investasinya di Sumatera Barat;
9. Meningkatkan pembangunan SDM melalui pendidikan, kesehatan, perumahan dan pembentukan karakter, sehingga sumber potensial tenaga kerja ahli di daerah perantauan;
10. Memprioritaskan pembangunan sumberdaya kelautan dan perikanan (*maritime & marine*) untuk mendukung kegiatan pariwisata, ekonomi kreatif dan industri kerajinan melalui pembangunan infrastruktur dasar pada kemaritiman dan konektivitas diantara destinasi pariwisata utama, strategis dan potensial.

3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas.

Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut :

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta prioritas utama.

Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan:

- a. Program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2016-2021, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/ kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya serap yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.

- b. Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: dana pendamping DAK, tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasiannya Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

3.1.5. Kondisi Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2019 dan Perkiraan Tahun 2020

Kondisi ekonomi makro Kota Bukittinggi tahun 2018 dan 2019 dan perkiraannya pada tahun 2020 lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemajuan tersebut antara lain ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas yang terjaga. Beberapa indikator makro ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2014 - 2017 berikut dengan proyeksi tahun 2019- 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun				Tahun	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	PDRB atas dasar Harga Berlaku (Rp milyar)	6.169,75	6.783,09	7.453,11	8.068,88	8.919,40	9.449,30
2.	PDRB atas dasar Harga Konstan (Rp milyar)	4.874,25	5.168,98	5.483,69	5.814,43	6.649,80	7.282,80
3.	Tingkat pertumbuhan Ekonomi/ PDRB harga konstan tahun 2010 (%)	6,14	6,05	6,09	6,03	6,4	6,5
4.	Tingkat Inflasi akhir tahun (%)	1,8	-0,57	0,37	0,41	0,50	0,51
5.	Struktur PDRB atas dasar harga berlaku (%)						
	• Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,42	1,37	1,29	1,24	1,39	1,39
	• Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Industri Pengolahan	6,77	6,45	6,07	5,63	6,98	7,08
	• Pengadaan Listrik dan Gas	0,67	0,7	0,72	0,72	0,70	0,70

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun				Tahun	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang • Konstruksi • Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor • Transportasi dan Pergudangan • Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum • Informasi dan Komunikasi • Jasa Keuangan dan Asuransi • Real Estat • Jasa Perusahaan • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib • Jasa Pendidikan • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial • Jasa lainnya 	0,15	0,15	0,15	0,14	0,15	0,15
		6,38	6,22	6,52	6,60	6,92	7,02
		33,9	33,98	33,87	34,00	53,49	61,60
		10,78	10,61	10,73	10,84	12,30	12,64
		5,41	5,71	5,82	5,98	6,07	6,15
		5,92	5,9	6,18	6,29	6,48	6,57
		6,09	6,2	5,81	5,57	6,51	6,60
		3,27	3,52	3,47	3,42	3,57	3,60
		0,67	0,66	0,65	0,64	0,67	0,67
		5,27	6,12	6,06	6,09	6,27	6,35
		5,27	5,36	5,58	5,62	5,95	6,02
		3,02	3,06	3,24	3,28	3,23	3,25
		3,87	3,93	3,83	3,95	4,07	4,11
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,04	6,04	6,94	7,15	6,89	6,99
7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	78,72	79,11	79,80	80,11	79,93	80,28

Sumber: Data tahun 2015 -2018 dari BPS Kota Bukittinggi
Data tahun 2019 s/d 2020 hasil proyeksi dari Bapelitbang

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB mencerminkan *output* yang dihasilkan masyarakat pada suatu daerah tertentu dan indikator ini digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan data dari BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Bukittinggi selalu mengalami peningkatan. Meskipun secara riil terjadi kenaikan yang cukup signifikan, namun kenaikan tersebut belum bisa dikatakan terjadinya peningkatan produktivitas, karena di dalamnya masih terdapat pengaruh inflasi yang menyebabkan koreksi negatif terhadap daya beli masyarakat.

B. Tingkat pertumbuhan ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi sedikit mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai dengan 2016 namun masih diatas target pertumbuhan provinsi Sumatera Barat. Secara rata-rata, pertumbuhan tertinggi pada pembentukan PDRB Kota Bukittinggi berada pada kategori Perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini merupakan hasil dari semakin berkembangnya perkonomian Kota Bukittinggi yang merupakan penunjang utama dalam perkembangan perdagangan dan jasa.

C. Pendapatan perkapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan domestik suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah, semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur daerah tersebut.

Pendapatan perkapita Kota Bukittinggi memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena cukup tingginya peningkatan nilai nominal PDRB dan sekaligus relatif rendahnya pertumbuhan penduduk.

D. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan suatu besaran yang menggambarkan persentase perubahan harga pada suatu waktu dengan harga pada waktu sebelumnya. Laju inflasi juga sering dipakai sebagai indikator untuk mengamati stabilitas ekonomi khususnya dari sisi harga.

E. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Walaupun angka TPT di Kota Bukittinggi tidaklah besar akan tetapi meningkatnya angka TPT dari tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa ini perlu menjadi perhatian agar pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan dan lebih memberikan stimulan agar tingkat pengangguran bisa menjadi semakin berkurang.

F. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat

mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen yang digunakan dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Arah dan kebijakan keuangan daerah yang setiap tahunnya dituangkan dalam APBD memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang didasari oleh berbagai kondisi objektif dan aspirasi yang berkembang di daerah guna mewujudkan rencana-rencana pembangunan daerah berdasarkan isu strategis dan permasalahan mendesak yang berkembang di masyarakat.

Agar pembangunan di daerah dapat berjalan secara optimal, maka dukungan pendanaan daerah dan penetapan anggaran belanja daerah harus disusun secara terukur dalam bentuk *input*, *output* dan *outcome* yang mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Sehingga arah dan kebijakan umum daerah dijabarkan dalam:

- 1) proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan,
- 2) arah kebijakan pendapatan daerah,
- 3) arah kebijakan belanja daerah, dan
- 4) arah dan kebijakan pembiayaan yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Dimana kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah.

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah serta menggunakan data-data tahun sebelumnya dan tahun berjalan, proyeksi

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar 116,6 miliar rupiah dengan rincian pajak daerah dapat tercapai sebesar 47,4 miliar rupiah, retribusi daerah 49,96 miliar rupiah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan sebesar 4,94 miliar rupiah serta dari sumber lain-lain PAD yang sah sebesar 14,29 miliar rupiah. Rincian proyeksi pendapatan tahun 2020 diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3.
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi

Rek	Uraian	Proyeksi Tahun 2020 (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	716.857.409.799
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	147.810.934.799
1.1.1.	Pajak Daerah	47.413.135.193
1.1.2.	Retribusi Daerah	80.009.202.400
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	6.100.000.000
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	14.288.597.206
1.2.	Dana Perimbangan	483.336.844.000
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	13.045.593.000
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	470.291.239.000
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	85.709.631.000
1.3.1	Hibah	0
1.3.2	Dana Darurat	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.885.438.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	62.824.193.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2019

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah tidak terlepas dari kebijakan penganggaran untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Penyusunan APBD merupakan fasilitasi pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah yang terbagi kedalam seperangkat urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan karakteristik, potensi, dan permasalahan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta strategi dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2013 difokuskan kepada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan tanpa mengabaikan porsi belanja tidak langsung.

Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Memenuhi pelaksanaan program prioritas dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- 2) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
- 4) Belanja daerah diprioritaskan untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan pelayanan publik antar daerah.
- 5) Melaksanakan kebijakan reformasi anggaran meliputi: a) rancangan anggaran yang dirumuskan tidak selalu bagi rata, b) anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat, c) kebijakan *money follow program* dengan menajamkan prioritas daerah, memperkuat pengendalian program dan menajamkan integrasi sumber pendanaan.
- 6) Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam tingkat daerah, perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
- 7) Dalam rangka meningkatkan capaian output kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah Kota Bukittinggi perlu menganggarkan kembali kegiatan-kegiatan yang bersumber dari sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun-tahun sebelumnya. (Pasal 132 PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa).

Belanja tidak langsung lainnya untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung. Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah selanjutnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2020

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi 2018	Proyeksi/Target pada Tahun 2019	Proyeksi/Target pada Tahun 2020
1	2	3	4	5	6
2.1.	Belanja Tidak Langsung	285.762.968.858,00	304.175.581.134,89	333.782.919.921,00	333.385.543.082,00
2.1.1	Belanja Pegawai	263.665.444.864,00	284.870.090.003,00	311.823.688.624,00	292.175.603.206,00
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	14.978.563.326,00	16.165.519.500,89	15.308.252.629,00	37.774.292.350,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.001.142.000,00	1.655.929.463,00	4.033.160.000,00	700.000.000,00
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	617.818.668,00	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	-	1.467.818.668,00	617.818.668,00	735.647.526,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00	16.223.500,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2.2.	Belanja Langsung	107.757.401.000,00	87.815.781.339,00	102.876.489.000,00	567.562.721.487,00
	Belanja DAK	100.257.401.000,00	59.565.781.339,00	76.863.265.000,00	-
	Belanja DID	7.500.000.000,00	28.250.000.000,00	26.013.224.000,00	26.013.224.000,00
	Pagu Indikatif				

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2019

3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
6. Penerimaan Piutang Daerah; dan
7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir.

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui:

1. Pembentukan dana cadangan;
2. Penyertaan modal /investasi pemerintah daerah;
3. Pembayaran pokok utang; dan
4. Pemberian pinjaman daerah;

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Bukittinggi yaitu sebagai berikut:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam

rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

b. Optimalisasi penerimaan dana bergulir sebagai sumber pembiayaan daerah.

Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2017 dan 2018 serta Proyeksi 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5.
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2017 s.d. 2018
dan Proyeksi / Target Tahun 2019 dan 2020

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi 2018	Tahun 2019	Proyeksi/Target pada Tahun 2020
1	2	3	4	5	6
1	PEMBIAYAAN DAERAH	71.220.682.946,00	105.574.028.769,22	128.552.400.871,00	184.090.854.770,00
1.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	75.220.682.946,00	110.574.028.769,22	128.552.400.871,00	184.090.854.770,00
1.1.1	Silpa Tahun sebelumnya	75.220.682.946,00	84.419.892.263,22	75.000.000.000,00	99.132.153.710,00
1.1.2	Pencairan dana cadangan	-	26.154.136.506,00	53.552.400.871,00	84.958.701.060,00
	Pembangunan RSUD	-	26.154.136.506,00	53.552.400.871,00	84.958.701.060,00
	Revitalisasi Kawasan Jam Gadang dan sekitarnya	-	-	-	-
1.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-
1.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
1.2.2	Revitalisasi Kawasan Jam Gadang dan sekitarnya	-	-	-	-
1.2.3	Penyertaan Modal	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2019

Penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun 2020 sebesar Rp.184.090.854.770,- yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp. 99.132.153.710,- dan pencairan dana cadangan untuk pembangunan RSUD sebesar Rp. 84.958.701.060,- Sementara untuk pengeluaran pembiayaan tidak dialokasikan pada Tahun 2020.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 dilakukan berdasarkan pada analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2018, mempedomani target capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, identifikasi isu strategis dan permasalahan di tingkat daerah dan nasional serta kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020

Dari perspektif pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, RPJMN 2020-2024 merupakan RPJMN terakhir dari empat tahap RPJMN yang harus disusun untuk mewujudkan visi jangka panjang nasional 2005-2025. Selaras dengan RPJPN 2005-2025 sebagaimana dimaksud di atas, RPJMN 2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sementara itu, di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas kementerian/ lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Oleh karena itu, selain sebagai pelaksanaan tahap terakhir dari RPJPN Periode 2005-2025, RPJMN Periode 2020-2024 merupakan penjabaran visi dan misi dari calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Ma'ruf Amin atau calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Shalahudin Uno yang terpilih pada Pemilihan Presiden 17 April 2019 untuk masa bakti 2019-2024.

Visi Pembangunan Nasional 2020-2024

(Visi dan Misi dikutip dari dua pasangan calon Presiden RI peserta Pemilihan Presiden 2019 dan akan

disesuaikan setelah penetapan resmi Presiden terpilih untuk masa bakti 2019-2024)

Calon Presiden Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin

Visi pembangunan nasional 2020-2024 berdasarkan visi dan misi dari calon Presiden Joko Widodo dan calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini diwujudkan melalui sembilan Misi Pembangunan, sebagai berikut: (1) peningkatan kualitas manusia Indonesia; (2) struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; (3) pembangunan yang merata dan berkeadilan; (4) mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; (5) kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (6) penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (7) perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; (8) pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan (9) sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. Kesembilan misi tersebut merupakan percepatan, pengembangan, dan pemajuan dari Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia.

Gambar 4.1.
Misi Pembangunan Nasional 2020 – 2024



Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Sandiaga Shalahudin Uno

Visi pembangunan nasional 2020-2024 berdasarkan visi dan misi dari Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Sandiaga Shalahudin Uno adalah “Terwujudnya Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang Adil, Makmur, Bermartabat, Relijius, Berdaulat di Bidang Politik, Berdiri di Atas Kaki Sendiri di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian Nasional yang Kuat di Bidang Budaya, serta Menjamin Kehidupan yang Rukun Antarwarga Negara Tanpa Memandang Suku,

Agama, Latar Belakang Sosial dan Rasnya Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Visi ini diwujudkan melalui lima Misi Pembangunan, sebagai berikut: (1) Membangun perekonomian nasional yang adil, makmur, berkualitas, dan berwawasan lingkungan dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia melalui jalan politik-ekonomi sesuai Pasal 33 dan 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Membangun masyarakat Indonesia yang cerdas, sehat, berkualitas, produktif, dan berdaya saing dalam kehidupan yang aman, rukun, damai, dan bermartabat serta terlindungi oleh jaminan sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi; (3) Membangun keadilan di bidang hukum yang tidak tebang pilih dan transparan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang berkualitas sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (4) Membangun kembali nilai-nilai luhur kepribadian bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, dan bersahabat, yang diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa; dan (5) Membangun sistem pertahanan dan keamanan nasional secara mandiri yang mampu menjaga keutuhan dan integritas wilayah Indonesia. Kelima misi tersebut diwujudkan melalui program-program aksi yang terbagi ke dalam empat pilar, yaitu: (1) Pilar Ekonomi, (2) Pilar Kesejahteraan Rakyat, (3) Pilar Budaya dan Lingkungan Hidup, dan (4) Pilar Politik, Hukum, dan Hankam.

Gambar 4.2.
Misi Pembangunan Nasional 2020 – 2024



4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2020 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu

“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”.

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2020 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tabel 4.1.
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

VISI		
Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah	Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat
		Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama
		Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)
	Penguatan kelembagaan agama dan adat.	Meningkatnya Kesalehan social masyarakat dalam masalah sosial
		Meningkatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat
		Meningkatnya Pemahaman dan Penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat.
Misi 2: Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional	Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme.	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur
		Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur
	Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
		Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan
Meningkatkan pelayanan public yang prima, transparan, aspiratif, dan partisipatif	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	
Misi 3: Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi	Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas dan berkarakter serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter	Meningkatnya tingkat Pendidikan masyarakat
		Meningkatnya integritas peserta didik

	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan
	Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat	Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar kerja Meningkatnya minat baca dan budaya membaca
	Meningkatkan kemampuan Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna	Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolahraga Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak
Misi 4: Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah	Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah
	Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan
	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan kemaritiman secara berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman
	Menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
	Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal	Menurunnya jumlah penduduk miskin Menurunnya tingkat pengangguran terbuka Menuntaskan penanganan daerah tertinggal Menurunnya tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Misi 5: Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan	Meningkatnya kualitas jalan Provinsi Meningkatnya pelayanan

dan berwawasan lingkungan	wilayah	perhubungan/ transportasi
		Meningkatnya keselamatan lalu lintas
		Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air
		Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung
		Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)
	Meningkatkan Pelaksanaan Tata Ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan
	Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana	Berkurangnya resiko bencana
		Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/ daerah pasca bencana
	Meningkatkan kualitas Kawasan konservasi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	Terpeliharanya debit sungai
		Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, “Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” terkait dengan isu strategis Pembangunan Mental dan Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Adat dan Agama.

Tujuan Misi Pertama diwujudkan dengan pencapaian sasaran yang diukur dengan implementasi pemahaman dan pengamalan keagamaan dan budaya yang baik akan melahirkan pengamalan agama dan budaya yang baik pula. Untuk sasaran penerapan nilai-nilai agama dan budaya, diperlukan keselarasan antara tujuan, sasaran dengan program-program budaya yang lebih memfokuskan pada penerapan nilai-nilai ABS-SBK ke dalam perilaku masyarakat Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, “Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional” terkait dengan isu strategis Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan daerah di Sumatera Barat, dan terkait pula dengan isu Pelaksanaan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan dan peranan pemerintah daerah yang semakin besar dalam menggerakkan proses pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, “Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi” terkait dengan isu strategis Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan isu strategis tentang jiwa dan semangat kewirausahaan yang cukup tinggi

dan ulet masyarakat Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, “Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah” terkait dengan isu strategis daya beli masyarakat, daya saing daerah untuk menghadapi globalisasi, akses dengan daerah tetangga, prasarana dan sarana daerah, daerah tertinggal dan ketimpangan pembangunan serta dukungan pemerintah pusat.

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, “Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” terkait dengan isu strategis bencana alam dan kualitas lingkungan hidup.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2020

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah harus terarah dan mengacu kepada visi dan misi yang dijabarkan dalam RPJMD. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016–2021, visi kota adalah “Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa, Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi yang termuat dalam Perubahan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.2.
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

VISI: “TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA, BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA”			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan	Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan	Melibatkan Pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan Melibatkan Pemangku kepentingan dalam mengawal dan mengawasi

	Masyarakat).		pelaksanaan pembangunan daerah
2.	Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara Profesional, Transparan, Akuntabel dan mempunyai Jiwa Kewirausahaan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terlaksananya reformasi birokrasi Meningkatkan kewirausahaan dalam pengelolaan pemerintahan
3.	Meningkatkan Pembangunan, Penataan dan Pengelolaan sarana dan Prasarana Kota secara Terpadu Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan	Terpenuhinya RTH Kota Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)
		Peningkatan Penataan Ruang Kota	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota
		Menjadikan Bukittinggi sebagai kota Pusaka Nasional dan Dunia	Meningkatkan pelestarian cagar budaya
		Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu	Terciptanya keselamatan dan kelancaran berlalu lintas
		Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintahan terhadap bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintahan terhadap bencana
4.	Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Lebih Berdaya Guna	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Perkotaan Yang Berkualitas	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
		Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran	Menurunnya Tingkat Kemiskinan
			Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
5.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Meningkatkan pelayanan pariwisata
		Layanan Pendidikan yang Berkualitas dan Berkarakter Unggul	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan
			Meningkatkan kualitas pendidikan
			Terwujudnya pengintegrasian nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam pendidikan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas layanan kesehatan
			Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan
Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan			

		Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa	Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan dan jasa
			Terjaganya stabilitas harga
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kota Bukittinggi	Terkendalnya jumlah penduduk
			Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat
			Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2020

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

RKP 2020 merupakan RKP tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024, dan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia. Tema RKP 2020 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

Dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 telah disepakati Prioritas Nasional yaitu :

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Pelaksanaan program pembangunan tahun-tahun sebelumnya, terutama bidang infrastruktur diharapkan sudah menampakkan hasil. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan tahun 2020 difokuskan kepada peningkatan kualitas pelayanan dan mempercepat pengembangan investasi dengan tetap meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Pada tahun 2020 merupakan waktu evaluasi pertengahan jalan RPJMD tahun 2016-2021 guna mengetahui perkembangan pelaksanaan dan target capaian RPJMD serta permasalahan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menetapkan langkah-langkah percepatan pencapaian target yang belum dapat direalisasikan dan melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah bila diperlukan.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD tersebut dan penetapan Tema RKP Tahun 2020 maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat “Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, Investasi dan Pemerataan Infrastruktur

untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Penyusunan prioritas dengan memperhatikan beberapa kriteria antara lain korelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, dengan demikian Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020
1	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat
2	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
3	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
4	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5	Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis	Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis
6	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi
7	Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan	Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan
8	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal
9	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur
10	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas terkait, sebagai berikut:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat

Pembangunan mental dan pengamalan agama dan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) diarahkan untuk pencapaian: 1) Masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya serta punya etos kerja tinggi dan produktif, 2) Kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan cinta damai, 3) Pengamalan nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan sosial ekonomi, 4) Penurunan tingkat konflik dan kekerasan dalam masyarakat, 5) Pewarisan nilai-nilai kearifan adat Minangkabau, 6) Optimalisasi peran lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga adat, dan 7) Penurunan perbuatan maksiat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat,
2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama,
3. Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekak),
4. Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat dalam penanganan masalah sosial,
5. Penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat,
6. Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat.

2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan

Prioritas ini diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dapat dicapai. Dengan reformasi birokrasi akan dicapai : 1) Tata pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, 2) Pemerintahan yang bersih dan profesional, 3) Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas KKN, 4) Tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif, 5) Penyediaan data statistik yang handal dan berdayaguna tinggi, 6) Perencanaan yang partisipatif dan akuntabel, 7) Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dan pembangunan lintas sektor.

Sasaran yang hendak dicapai Prioritas ini adalah:

1. Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur,
2. Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur,
3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,
4. Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan,
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan

Prioritas ini diarahkan pada penuntasan wajib belajar 9 tahun, perintisan wajib belajar 12 tahun, dan peningkatan standar pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan

persyaratan lapangan kerja dan atau dapat menciptakan lapangan kerja. Dengan prioritas tersebut diharapkan akan dicapai: 1) Penuntasan wajib belajar 9 tahun, 2) Perintisan wajib belajar 12 tahun, 3) Peningkatan angka partisipasi pendidikan, 4) Pelaksanaan pola pendidikan berkarakter dan berkualitas, 5) Lahirnya sentra Pendidikan unggul di Sumatera Barat, 6) Pendidikan spesifik sesuai dengan bakat sumberdaya manusia, 7) Lembaga pendidikan penghasil sumberdaya manusia yang profesional, 8) Wirausahawan baru yang berkapasitas nasional dan global, 9) Pengembangan penelitian dan penerapan IPTEK, 10) Peningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga, 11) Peningkatan kualitas pemuda dan pembangunan olah raga, 12) Sumatera Barat sebagai daerah tujuan pendidikan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat,
2. Meningkatnya integritas peserta didik,
3. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan,
4. Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar bekerja,
5. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca,
6. Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi,
7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata,
8. Meningkatnya kualitas kependudukan, pem-bangunan keluarga dan Keluarga Berencana,
9. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolah raga,
10. Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan,
11. Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak.

4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkecukupan gizi. Dengan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Penurunan angka kesakitan dan kematian, 2) Peningkatan angka harapan hidup, 3) Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan, 4) Menurunnya tingkat kematian bayi, 5) Penurunan persentase masyarakat gizi kurang, 6) Peningkatan pola hidup bersih dan sehat, 7) Peningkatan layanan rumah sakit dengan standar pelayanan yang terakreditasi paripurna.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata,
2. Meningkatnya kualitas kependudukan, pem-bangunan keluarga dan Keluarga Berencana,
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolah raga,

4. Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan,
 5. Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak.
5. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis

Prioritas ini diarahkan pada pengembangan dan peningkatan produksi pangan untuk menunjang kebijakan nasional dibidang kedaulatan pangan serta mengembangkan sistem agribisnis dalam pembangunan pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan dan perkebunan) yang dapat memberikan nilai tambah (added value) tinggi, sehingga masyarakat dapat menikmati tingkat keuntungan yang tinggi dari gabungan hasil usaha pertaniannya melalui berbagai komoditi unggulan. Dengan prioritas tersebut diharapkan dapat dicapai: 1) Peningkatan ketahanan dan keragaman konsumsi pangan, 2) Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, 3) Pengembangan agroindustri dan agribisnis sesuai potensi daerah, 4) Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi penghasil pangan nasional, 5) Penerapan teknologi pertanian tepat guna, 6) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian, 7) Pola pembangunan pertanian berbasis kawasan dan berbasis komoditi unggulan.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan,
 2. Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis,
 3. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan.
6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi.
- Prioritas ini diarahkan untuk mengembangkan pariwisata, industri skala kecil dan menengah dan pengembangan Koperasi dan UMKM serta peningkatan investasi. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan dicapai: 1) Pengembangan objek dan kawasan wisata yang potensial, 2) Peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kepariwisataan, 3) Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya, 4) Pengembangan sentra industri dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi, 5) Peningkatan daya saing produk industri dan jasa, 6) Peningkatan jenis, volume dan nilai ekspor serta ekspor produk industri, 7) Peningkatan kesempatan kerja pada sektor industri dan jasa, 8) Peningkatan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah, 8) Peningkatan Investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan kesempatan kerja.

Sasaran yang hendak dicapai :

1. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah,
2. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan

Prioritas ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan untuk peningkatan pembangunan daerah. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan dicapai: 1) Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, 2) Peningkatan produksi perikanan laut baik tangkap maupun budidaya, 3) Pengembangan wisata bahari, 4) Optimalisasi pengelolaan ruang laut dan pulau-pulau kecil, 5) Peningkatan kerjasama regional lintas pesisir wilayah laut.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman.

8. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal

Prioritas ini diarahkan untuk mengurangi tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pembangunan daerah. Dengan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Penurunan jumlah penduduk yang menganggur, 2) Penurunan jumlah penduduk miskin, 3) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin 4) Penurunan tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial, 5) Peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal untuk bisa lepas dari ketertinggalan.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Menurunnya jumlah penduduk miskin,
2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka,
3. Menuntaskan penanganan daerah tertinggal,
4. Menurunnya tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial.

9. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur

Prioritas ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan dan daya saing daerah. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dengan mendorong investasi dibidang energi baru dan terbarukan serta pembangunan sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk pembangkit listrik, 2) Peningkatan penyediaan listrik di daerah terpencil, terisolir dan perbatasan, 3) Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, 4) Peningkatan pelayanan transportasi dan keselamatan lalu lintas, 5) Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan sumber daya air, 6) Peningkatan prasarana umum pada kawasan pemukiman

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi,

2. Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi,
3. Meningkatnya keselamatan lalu lintas,
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air,
5. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung,
6. Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).

10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam

Prioritas ini diarahkan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan menekan kerugian akibat bencana. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, 2) Peningkatan kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang, 3) Peningkatan kualitas lahan dan fungsi ekosistem, 4) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, 5) Peningkatan penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah atau daerah pasca bencana, 6) Peningkatan kearifan lokal dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang,
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup,
3. Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan,
4. Berkurangnya resiko bencana,
5. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana,
6. Terpeliharanya debit sungai,
7. Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi

Berdasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Sumatera Barat yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka tema RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah: **“Peningkatan Sumberdaya Manusia Melalui Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas”**

Prioritas pembangunan Kota Bukittinggi untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik
3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5. Pengembangan Pariwisata

6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
7. Penanggulangan Kemiskinan
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
9. Pelestarian lingkungan hidup

Tabel 4.4.
Keterkaitan Misi dan Prioritas Kota Bukittinggi Tahun 2020

MISI	PRIORITAS
MISI 1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat).	PRIORITAS 1 Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya
MISI 2. Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara Profesional, Transparan, Akuntabel dan mempunyai Jiwa Kewirausahaan	PRIORITAS 2. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan yang Lebih baik
MISI 3. Meningkatkan Pembangunan, Penataan dan Pengelolaan sarana dan Prasarana Kota secara Terpadu Berwawasan Lingkungan	PRIORITAS 8. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur
	PRIORITAS 9. Pelestarian Lingkungan Hidup
MISI 4. Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Lebih Berdaya Guna	PRIORITAS 6. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
	PRIORITAS 7. Penanggulangan Kemiskinan
MISI 5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat	PRIORITAS 1. Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya
	PRIORITAS 3. Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan
	PRIORITAS 4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
	PRIORITAS 5. Pengembangan Pariwisata

Tabel 4.5.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Bukittinggi Tahun 2020

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT	NO	PRIORITAS KOTA BUKITTINGGI
1	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	3	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	3	Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan
		4	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	4	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
		1	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat	1	Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya
		8	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	7	Penanggulangan Kemiskinan
2	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	9	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	8	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur
3	Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja	6	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi	5	Pengembangan Pariwisata
		7	Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan		
4	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	5	Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis.	6	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
		10	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	9	Pelestarian Lingkungan Hidup
5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	2	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	2	Peningkatan tata Kelola Pemerintahan yang Lebih baik

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini berisikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Pada matrik rencana kerja ini memuat program pembangunan Kota Bukittinggi tahun 2020 dan perkiraan maju 2020 yang mempedomani Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dan sudah dikelompokkan berdasarkan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.

Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di Kota Bukittinggi, pada tahun 2020 telah ditetapkan pagu indikatif menurut indikator sasaran yang diformulasikan untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia telah dialokasikan untuk pencapaian sasaran. Penetapan pagu indikatif ini dilakukan dengan memperhitungkan :

- a. Realisasi terhadap target indikator sasaran sampai dengan tahun 2018
- b. Kontribusi SKPD dalam pencapaian sasaran
- c. Besaran alokasi dana yang telah di anggarkan melalui Prioritas, Musrenbang dan Pokok Pikiran DPRD.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung Perangkat Daerah sebagaimana pada tabel 5.1

Tabel 5.1
Alokasi Anggaran Belanja Langsung Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020

NO	SKPD	URUSAN	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		55,801,739,610
		Pendidikan	54,765,879,610
		Kebudayaan	1,035,860,000
2	Dinas Kesehatan		147,728,997,900
		Kesehatan	147,728,997,900
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		109,910,245,277
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	109,202,459,877
		Pertanahan	707,785,400
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		15,329,160,212.91
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	15,329,160,212.91

NO	SKPD	URUSAN	JUMLAH
5	Dinas Kebakaran		5,499,461,110
		Kebakaran	5,499,461,110
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1,845,541,000
		Bencana	1,845,541,000
7	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja		12,108,989,445
		Ketentraman dan Ketertiban Umum	12,108,989,445
8	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		3,978,553,874
		Ketentraman dan Ketertiban Umum	3,978,553,874
9	Dinas Sosial		4,467,939,150
		Sosial	4,467,939,150
10	Dinas PM, PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja		15,098,643,206
		Penanaman Modal	13,830,957,456
		Tenaga Kerja	224,543,200
		Industri	1,043,142,550
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4,069,860,494
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,609,100,994
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,460,759,500
12	Dinas Pertanian dan Pangan		8,961,963,781
		Pangan	247,130,750
		Pertanian	8,350,094,881
		Kelautan dan Perikanan	364,738,150
13	Dinas Lingkungan Hidup		21,389,504,751
		Lingkungan Hidup	21,389,504,751
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		2,351,622,550
		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,351,622,550
15	Dinas Perhubungan		8,330,637,811
		Perhubungan	8,330,637,811
16	Dinas Komunikasi dan Informatika		3,924,258,470
		Komunikasi dan Informatika	3,834,196,970
		Statistik	13,073,000
		Persandian	76,988,500
17	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan		9,180,617,011
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2,306,680,171
		Perdagangan	6,873,936,840

NO	SKPD	URUSAN	JUMLAH
18	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga		34,384,874,904
		Kepemudaan dan Olahraga	3,862,574,600
		Pariwisata	30,522,300,304
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		1,364,198,170
		Perpustakaan	1,243,307,920
		Kearsipan	120,890,250
20	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan		5,642,274,191
		Perencanaan	4,545,078,341
		Penelitian dan Pengembangan	1,097,195,850
21	Badan Keuangan		13,825,540,504
		Keuangan	13,825,540,504
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia		4,522,561,875
		Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	4,522,561,875
23	Inspektorat		2,960,993,950
		Pengawasan	2,960,993,950
24	Sekretariat Daerah		29,298,909,977
		Administrasi Pemerintahan	29,298,909,977
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		21,099,432,600
		Administrasi Pemerintahan	21,099,432,600
26	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan		10,557,851,063
		Administrasi Pemerintahan	10,557,851,063
27	Kecamatan Guguk Panjang		10,467,544,118
		Administrasi Pemerintahan	10,467,544,118
28	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh		7,528,583,460
		Administrasi Pemerintahan	7,528,583,460
	TOTAL		571,630,500,465

Secara rinci Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 beserta pagu indikatif dan prakiraan maju sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah. Indikator kinerja utama merupakan indikator yang paling menentukan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Pemilihan indikator kinerja utama ini merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator yang dimiliki organisasi tersebut.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Langkah penetapan Indikator Kinerja Utama:

1. Tahap Pertama, Klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (*result statement*) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai.
2. Tahap kedua, Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama yang mungkin dapat digunakan.
3. Tahap Ketiga, Melakukan penilaian setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja
4. Tahap keempat, Memilih Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan uraian diatas dan mengacu pada Perubahan RPJMD tahun 2016-2021, indikator kinerja utama Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Kota Bukittinggi

NO	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	DEFENISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA	
			KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5
1	Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	Jumlah usulan pemangku kepentingan/jumlah usulan pemangku kepentingan yang diakomodir pada RKPD	80	100
2	Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan	Jumlah anggaran CSR/ jumlah belanja langsung APBD	1%	2,5%
3	Nilai SAKIP	Peringkat yang diperoleh dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	SAKIP C	SAKIP A
4	Peringkat LPPD	Skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	LPPD RANKING 65	LPPD RANKING 30
5	Indeks RB			B
6	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Hasil Evaluasi / Opini BPK RI	WTP	WTP
7	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	30	80
8	Persentase RTH Publik	Jumlah RTH publik/jumlah RTH	8%	17%
9	Persentase Fasum yang representative dan memenuhi standar lingkungan	Jumlah Fasum yang representative dan memenuhi standar lingkungan/Jumlah fasum	55%	85%
10	Penyediaan air minum layak	Jumlah air minum layak yang tersedia	85	100
11	Kawasan Kumuh		30,60 ha	0
12	Persentase sanitasi layak	Persentase sanitasi layak yang tersedia	85	100
13	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	Jumlah pemanfaatan ruang kota yang sesuai peraturan/jumlah pemanfaatan ruang kota	55%	70%
14	Pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu	6,12%	6,50%

NO	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	DEFENISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA	
			KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
15	PDRB Perkapita	jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun	49,88 Juta	56 Juta
16	Indeks Gini	distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi	0,34	<0,3
17	Jumlah Investasi	Jumlah pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi)	25% (80 Perusahaan)	65% (120 Perusahaan)
18	Tingkat Kemiskinan	Jumlah penduduk miskin	4,23	2,84
19	Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara per tahun	460.905 orang	588.245 orang
20	Harapan lama sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.	14,7	15
21	Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD	Jumlah sekolah yang ber akreditasi A tingkat SD/jumlah SD	72,88%	81,35%
22	Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	Jumlah sekolah yang ber akreditasi A tingkat SMP/jumlah SMP	54,50%	90,90%
23	Angka Harapan Hidup	rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x.	72,36	73,14
24	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah puskesmas yang terakreditasi/jumlah puskesmas	30	100
25	Tingkat Inflasi	kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara.	6,50	3,00
26	Laju Pertumbuhan Penduduk	perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya	1,71	1,38

Lebih lanjut Indikator Kinerja Utama ini dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 45 tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.2
Target Kinerja Tahunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2016-2021

NO	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	KONDISI AWAL	Target Kinerja					KONDISI AKHIR
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	80	85	90	95	100	100	100
2	Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan	1%	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,5%
3	Nilai SAKIP	SAKIP C	B	BB	BB	A	A	SAKIP A
4	Peringkat LPPD	LPPD RANKING 65	55	40	35	35	30	LPPD RANKING 30
5	Indeks RB		B	B	B	B	B	B
6	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public	30	70	75	75	80	80	80
8	Persentase RTH Publik	8%	10%	14%	17%	17%	17%	17%
9	Persentase Fasum yang representative dan memenuhi standar lingkungan	55%	60%	65%	75%	80%	85%	85%
10	Penyediaan air minum layak	85	85	90	95	95	100	100
11	Kawasan Kumuh	30,60 ha	16ha	6ha	0	0	0	0
12	Persentase sanitasi layak	85	90	95	100	100	100	100
13	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	55%	60	65	70	70	70	70%
14	Pertumbuhan ekonomi	6,12%	6,20%	6,30%	6,40%	6,50%	6,50%	6,50%
15	PDRB Perkapita	49,88 Juta	52,50	53,25	54,50	55,75	56	56 Juta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Indeks Gini	0,34	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
17	Jumlah Investasi	25% (80 Perusahaan)	30%	40%	50%	60%	65%	65% 20 Perusahaan)

NO	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	KONDISI AWAL	Target Kinerja					KONDISI AKHIR
			2017	2018	2019	2020	2021	
18	Tingkat Kemiskinan	4,23	3,75	3,5	3,35	3	2,84	2,84
19	Kunjungan Wisatawan	460.905 orang						588.245 orang
20	Harapan lama sekolah	14,7	14,8	14,9	15	15	15	15
21	Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD	72,88%	75,25%	78,50%	79,50%	80,50%	81,35%	81,35%
22	Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	54,50%	65,50%	70,75%	80,50%	85,50%	90,90%	90,90%
23	Angka Harapan Hidup	72,36	72,75	72,85	73	73,1	73,14	73,14
24	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	30	50	70	80	90	100	100
25	Tingkat Inflasi	6,50	6	5	4,5	4	3	3,00
26	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,71	1,6	1,55	1,45	1,4	1,38	1,38

Berdasarkan target kinerja utama untuk tahun 2018, dapat dilihat target dan realisasi dari Indikator Kinerja Utama sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 6.3
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kota Bukittinggi Tahun 2018

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	%	85	100	125
2	Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan	%	1,5	1,58%	105
3	Nilai SAKIP	nilai	B	B	100
4	Peringkat LPPD	peringkat	55	33	166
5	Indeks RB	nilai	B	B	100
6	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	nilai	WTP	WTP	100
7	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public	%	70	80,45	114,92
8	Persentase RTH Publik	%	10	7,2	72
9	Persentase Fasum yang representative dan memenuhi standar lingkungan	%	60	*)	*)
10	Penyediaan air minum layak	%	85	88	103,5
11	Kawasan Kumuh	ha	16	23,4	146
12	Persentase sanitasi layak	%	90	90,05	100
13	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	%	60	62,3	103,8
14	Pertumbuhan ekonomi	%	6,20%	6,04	97
15	PDRB Perkapita	jumlah	52,50	54,12	99
16	Indeks Gini	jumlah	<0,3	0,329	109
17	Jumlah Investasi	%	30	27	90
18	Tingkat Kemiskinan	nilai	3,75	5,48	68
19	Kunjungan Wisatawan	jumlah	460.905 orang	478.839 orang	103,89
20	Harapan lama sekolah	%	14,8	14,92	100,8
21	Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD	%	75,25	75,44	100,2
22	Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	%	65,50	72,73	100,8
23	Angka Harapan Hidup	%	72,75	73,36	100,8
24	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	%	50	71,43	142,8
25	Tingkat Inflasi	%	6	1,37	437,9
26	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,6	1,71	106,8

Keterangan: *) data tidak tersedia

6.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro (*outcome*). Indikator kinerja daerah ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi : Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Aspek Pelayanan Umum meliputi : Pelayanan Urusan Wajib dan Pelayanan Urusan Pilihan, sedangkan aspek daya saing meliputi : Nilai Tukar Petani, Produktivitas total daerah dan Rasio Ekspor terhadap PDRB. Penetapan indikator kinerja daerah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bukittinggi

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2016	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1.	Laju inflasi	2,84	4,00	4,00	4,00
2.	PDRB per kapita (riil)/juta	39.763	47.200	49.296	51.496
3.	Tingkat Kemiskinan	4,58	3,33	3,08	2,84
5.	Laju Perumbuhan Ekonomi (LPE)	6,1	6,9	7	7
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,04	5,28	5,10	4,93
5.	Harapan Lama Sekolah	14,92	14,85	14,90	15
6.	Tingkat pengeluaran per Kapita disesuaikan (Ribu/Kapita/Bulan)	12.330	12.950	13.110	13.271
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,84	73,84	74,84	75,84
	Urusan Pendidikan				
8.	Angka melek huruf	99,94	99,95	99,95	99,95
9.	Angka rata-rata lama sekolah	10,79	11,10	11,15	11,20
10.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	136,75	>100%	>100%	>100%
11.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS/Paket B	140,02	>100%	>100%	>100%
12.	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	165,41	>100%	>100%	>100%
13.	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	121,93	>100%	>100%	>100%
14.	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/Paket B	110,30	>100%	>100%	>100%
15.	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/ Paket C	123,48	>100%	>100%	>100%
	KESEHATAN				

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN TAHUNAN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2016	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	
16.	Angka harapan hidup	73,52	74,25	74,52	74,70	
17.	Persentase balita gizi buruk	<0.15	15	<0.15	<0.15	
	KETENAGAKERJAAN					
18	Rasio penduduk yang bekerja	0,94	0,97	0,98	0,98	
	Pemuda dan Olahraga					
19	Jumlah gedung olahraga	6	7	7	7	
A	ASPEK PELAYANAN UMUM					
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
a.	URUSAN PENDIDIKAN					
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	85,57%	87,50%	88%	88,50%	
	Pendidikan Dasar					
	Angka partisipasi sekolah	127,36	128	128,50	129	
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1:243	1:243	1:243	1:243	
	Rasio guru/murid	1:28	1:30	1:30	1:30	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	120,95	128,32	130,88	132,17	
	Pendidikan menengah:					
	Angka partisipasi sekolah	144,96	145,15	145,20	145,30	
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	1:273	1:280	1:281	1:282	
	Rasio guru terhadap murid	1:11	1:15	1:15	1:16	
	Fasilitas Pendidikan:					
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100%	100%	100%	100%	
	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	100%	100%	100%	100%	
	Angka Putus Sekolah:					
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,01%	<1%	<1%	<1%	
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,10%	<1%	<1%	<1%	
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,30%	<1%	<1%	<1%	
	Angka kelulusan					
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%	100%	
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100%	100%	100	100%	
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	124%	>100%	>100%	>100%	
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	178%	>100%	>100%	>100%	
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	92%	95%	100%	100%	
b.	URUSAN KESEHATAN					
	Rasio posyandu per satuan penduduk	0.1	0.1	0.1	0.1	
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	4.9	5.7	5.7	5.7	
	Rasio dokter per satuan penduduk	1.75	1.75	1.75	1.75	
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk Perawat & bidan)	12.95	12.95	12.95	12.95	
	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	5.7	5.7	5.7	5.7	
	Pelayanan Kesehatan Dasar					
	- Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	91	93	94	95	
	- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	96.7	98	99	100	89.2
	- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	89.2	90.6	90.8	91	
	- Cakupan pelayanan nifas	83.6	88	90	90	
	- Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	70.6	78	80	80	

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2016	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	- Cakupan kunjungan bayi	83.8	88	90	90
	- Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)				
	- Cakupan pelayanan anak balita	54.8	88	90	90
	- Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	96.97	100	100	100
	- Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100
	- Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100	100	100	100
	- Cakupan peserta KB aktif	53.4	70	70	70
	- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular:	100	100	100	100
	- Cakupan Acute Flacid Paralysis (AFP)	0.0025	<1	<1	<1
	- Cakupan Penemuan Penderita pneumonia Balita	57.57	90	100	100
	- Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	80	90	90	90
	- Cakupan penderita DBD yang ditangani	100	100	100	100
	- Cakupan Penemuan Penderita Diare	100	100	100	100
	- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	100	100	100
	- Jumlah puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	1	1	1	1
	- Persentase balita ditimbang berat badan D/S	59.72	80	80	80
	- Peersentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Rujukan				
	- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100
	- Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100	100	100	100
	cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100
	Cakupan Desa Siaga Aktif	100	100	100	100
	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	100	100	100	100
	Persentase kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100	100	100	100
	Persentase orang yang berumur 15 Th atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV	10	10	10	10
	Persentase Kecamatan yang melaksanakan advokasi dan sosialisasi pencegahan dan penularan	100	100	100	100
	Cakupan Penderita penyakit menular lainnya yang ditangani	100	100	100	100
c.	URUSAN PEKERJAAN UMUM				
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	85.20%	92%	94%	95%
	Panjang jalan kota dalam kondisi baik (> 20 Km/Jam)	167,16	178,12	181,99	183,93

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2016	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	53.478 km	69.478 km	74.478 km	79.478 km
	Sempah dan sungai yang dipakai bangunan liar	90 m	50 m	-	-
	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	47670.35 m	61971,43m	66738.49 m	71505.53
	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	0 titik	1 titik	1 titik	4 titik
	Penurunan jumlah wilayah/titik yang terkena dampak genangan (banjir) dan longsor	8 titik	2 Titik	0	0
	Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	7,7%	11%	13%	14%
d.	URUSAN PERUMAHAN				
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	65%	93%	100%	100%
	Kawasan Kumuh	2	0	0	0
	Luas kawasan pemukiman kumuh	30.60 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
e.	URUSAN PERHUBUNGAN				
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	325.000.000	355.000.000	360.000.000	365.000.000
	Jumlah uji kir angkutan umum	2700	3100	3200	3300
	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis				
	Kepemilikan KIR angkutan umum	2676	3000	3100	3200
	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	25 menit/1 unit	25 menit/1 unit	25 menit/1 unit	25 menit/1 unit
	Pemasangan Rambu-rambu	489	10	0	0
f.	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
	Prosentase Penanganan sampah	90%	100%	100%	100%
	Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol.B (Dari tercemar berat menjadi tercemar ringan)	20%	60%	70%	80%
g.	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL				
	Kepemilikan KTP	52.135	71.923	77.94	84.476
	Kepemilikan akta kelah	61.349	67.378	68.97	62.803
h.	URUSAN SOSIAL				
	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	80%	84%	86%	88%
i.	URUSAN TENAGA KERJA				
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	67,59	73,45	76,33	77
	Rasio Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	64	94	94	94
	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjia Bersama (PB)	24	34	36	38
		18	18	18	18
	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	7536	8200	8500	8500
	Pelayanan Pengawasan ketenagakerjaan				
	- Besaran Pemeriksaan perusahaan	180	Ke provinsi	Ke provinsi	Ke provinsi
	- Besaran Pengujian peralatan di perusahaan	360	Ke provinsi	Ke provinsi	Ke provinsi

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2016	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
j.	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	Persentase Koperasi aktif	82	85	87	88
	Usaha Mikro dan Kecil	9.527	9.914	10.013	10.113
	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	9.478	9.865	9.964	10.064
	Jumlah BPR/LKM	49	49	49	49
k.	URUSAN KEBUDAYAAN				
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	61	63	65
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	5%	20%	25%	30%
l.	URUSAN PEMUDA DAN OLARAHAGA				
	Gelanggang/balai remaja/lapangan olahraga (selain milik	6	7	7	7
m.	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM & PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	Jumlah organisasi pemuda	27	27	27	27
	Jumlah organisasi olahraga	33	33	33	33
	Jumlah kegiatan kepemudaan	10	10	10	10
	Jumlah kegiatan olahraga	10	10	10	10
	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	3	3	3	3
	Kegiatan Pembinaan LSM, Ormas & OKP	3	3	3	3
	Jumlah kasus pelanggaran gangguan Ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat yang tertangani	722	450	250	250
	PKK aktif	28	28	28	28
	Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	100%	100%	100%	100%
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100%	100%	100%	100%
	LPM Berprestasi	100%	100%	100%	100%
n.	URUSAN KETAHANAN PANGAN				
	Score Pola Pangan Harapan	90	92	92	93
	Regulasi ketahanan pangan				
o.	URUSAN KEARSIPAN				
	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	3 SKPD	15 SKPD	18 SKPD	24 SKPD
	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	1keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg
p.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	Web site milik pemerintah daerah	12 bh	21 buah	23 Buah	27 Buah
	Jumlah jaringan komunikasi	21 green field, 40 rooftop	21 green field 41 rooftop	21 green field 41 rooftop	21 green field 41 rooftop
	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0.365	0.365	0.365	0.365
	Jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk daerah	27	31	31	31
q.	URUSAN PERPUSTAKAAN				
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	9.536	17.536	19.536	21.536
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	3.750	3.800	3.850	3.850
	Jumlah perpustakaan	1	1	1	1
II.	URUSAN PILIHAN				
a.	URUSAN PERTANIAN				
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	66,7	65,3	65,4	65,5
	Produksi perikanan	355 ton	353,68 ton	354,68 ton	355 ton
b.	URUSAN INDUSTRI				
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	6.9	7.3	7.4	7.5
	Pertumbuhan Industri		5%	5%	5%
	Kontribusi industri rumah tangga thd PDRB sektor Industri				
	Cakupan bina kelompok pengrajin	20 KUB	25 KUB	30 KUB	30 KUB
III.	FUNGSI PENUNJANG				

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2016	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
a.	PERENCANAAN				
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada
	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada
b.	KEUANGAN				
	Peningkatan PAD (%)	66.027.359.716	105.087.802.438	118.034.619.698	1.077.173.651.980

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi tahun 2020 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 yang memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai dokumen tahunan, penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 merupakan dokumen yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lain, baik dokumen perencanaan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, hasil analisis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2019. RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 bersifat sangat strategis karena merupakan pelaksanaan rencana kerja Walikota terpilih yang dilaksanakan secara langsung dan demokratis.

Berdasarkan hal di atas, RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Bukittinggi Tahun 2020. RKPD ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020. RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 disusun dengan melibatkan berbagai pihak melalui koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dengan demikian, karena RKPD merupakan komitmen dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Bukittinggi.

Akhirnya harapan kita bersama, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan bermanfaat. Dokumen perencanaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, khususnya dalam pencapaian Visi Kota Bukittinggi ***“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”***

WALIKOTA BUKITTINGGI,

M. RAMLAN NURMATIAS

Formulir E-19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kota Bukittinggi

No	Sasaran RPKD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12				15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Pendidikan																					
		Program Pendidikan Anak Usia Dini																			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		Penyelenggaraan TK N Pembina	lancarnya Proses Belajar Mengajar TK Negeri Pembina Kota Bukittinggi (Bulan)					12	60,000,000	3	9,116,328	3	-	6	9,116,328	50.00%	15.19%						
		Penyelenggaraan TK N 1 Bukittinggi	lancarnya proses belajar mengajar TKN 1 Kota Bukittinggi (bulan)					12	75,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
		Kegiatan Lomba Anak Usia Dini Dalam Rangka Hari Anak	terpilihnya pemenang lomba pendidik dan anak usia dini kota bukittinggi (Cabang Lomba)					6	35,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
		Kegiatan Reward PAUDNI Berpretasi (tingkat provinsi dan nasional)	Tersedianya reward bagi anak didik, pendidik dan tenaga kependidikan PAUD PNF Bukittinggi (orang)					15	40,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
		Pelaksana Apresiasi PTK PAUDNI	Terpilihnya utusan Kota Bukittinggi mengikuti Lomba tk Provinsi dan Nasional (Cabang Lomba)					13	59,467,670	-	25,152,500	13	10,765,000	7	35,917,500	50.00%	60.40%						
		Pengelolaan Izin Operasional PAUDNI, PKBM, LKP	Terbitnya izin,perpanjangan izin operasional lembaga PAUDNI, PKBM dan LKP (lembaga)					40	4,736,500	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
		Fasilitasi penunjang program HIMPAUDI	jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan anggota HIMPAUDI Kota Bukittinggi (orang)					100	84,314,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
		Penunjang program Bunda PAUD	Bunda PAUD berwawasan (orang)					60	31,670,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
		Orientasi Program PAUD	Jumlah peserta pelatihan orientasi Program PAUD (orang)					60	30,634,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.						
							I		II			12			13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
							K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp	K	Rp		
		Penunjang DAK PAUD PNF	lancarnya DAK BOP PAUD (lembaga)			2	19,698,200	-	-	1	2,886,200	1	2,886,200	50.00%	14.65%									
		Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri-TK N 1 (DAK Non Fisik Tahun 2019 BOP PAUD)	Tersedianya Sarpras TK N 1 Bukittinggi (Bulan)			12	30,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%									
		Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri-TK Pembina (DAK Non Fisik Tahun 2019 BOP PAUD)	Tersedianya Sarpras TK N Pembina (bulan)			12	119,400,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%									
							589,920,370																	
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun																						
		Penyelenggaraan SMP N 1 Bukittinggi	Lancarnya pelaksanaan belajar mengajar di SMPN 1 (bulan)			12	75,476,175	3	7,090,720	3	-	6	7,090,720	50.00%	9.39%				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
		Penyelenggaraan SMP N 2 Bukittinggi	Lancarnya pelaksanaan belajar mengajar di SMPN 2 (bulan)			12	90,714,000	3	1,018,190	3	-	6	1,018,190	50.00%	1.12%									
		Penyelenggaraan SMP N 3 Bukittinggi	Lancarnya pelaksanaan belajar mengajar di SMPN 3 (bulan)			12	64,248,750	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%									
		Penyelenggaraan SMP N 4 Bukittinggi	Lancarnya pelaksanaan belajar mengajar di SMPN 4 (bulan)			12	62,053,000	3	7,265,000	3	-	6	7,265,000	50.00%	11.71%									
		Penyelenggaraan SMP N 5 Bukittinggi	Lancarnya pelaksanaan belajar mengajar di SMPN 5 (bulan)			12	60,883,700	3	16,113,160	3	-	6	16,113,160	50.00%	26.47%									
		Penyelenggaraan SMP N 6 Bukittinggi	Lancarnya pelaksanaan belajar mengajar di SMPN 6 (bulan)			12	112,507,900	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%									
		Penyelenggaraan SMP N 7 Bukittinggi	Lancarnya pelaksanaan belajar mengajar di SMPN 7 (bulan)			12	63,656,200	3	43,815,100	3	-	6	43,815,100	50.00%	68.83%									
		Penyelenggaraan SMP N 8 Bukittinggi	Lancarnya pelaksanaan belajar mengajar di SMPN 8 (bulan)			12	92,980,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%									
		Penyelenggaraan SD Negeri 01 Campago Ipuh	Lancarnya pelaksanaan belajar mengajar di SD 01 Campago Ipuh (bulan)			12	15,632,025	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%									

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.					
							I		II		12			13=12/7x100%			14 = 6 + 12				15=14/5 x100%		16		17
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp	K	Rp	K
		Penyelenggaraan SD Negeri 02 Campago Guguk Bulek	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 02 Campago Guguk Bulek (Bulan)			12	19,348,000	3	3,000,000	3	-	6	3,000,000	50.00%	15.51%										
		Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pulau Anak Air	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 03 Pulau Anak Air (Bulan)			12	127,287,000	3	2,300,000	3	-	6	2,300,000	50.00%	1.81%										
		Penyelenggaraan SD Negeri 04 Garegeh	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 04 Garegeh (Bulan)			12	24,213,400	3	4,213,400	3	-	6	4,213,400	50.00%	17.40%										
		Penyelenggaraan SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 05 Puhun Pintu Kabun (Bulan)			12	116,100,000	3	4,050,000	3	-	6	4,050,000	50.00%	3.49%										
		Penyelenggaraan SD Negeri 06 Pulau Anak Air	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 06 Pulau Anak Air (Bulan)			12	25,683,000	3	1,858,000	3	-	6	1,858,000	50.00%	7.23%										
		Penyelenggaraan SD Negeri 07 Kubu Gulai Banchah	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 07 Kubu Gulai Banchah (Bulan)			12	21,922,200	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%										
		Penyelenggaraan SD Negeri 08 Campago Ipuh	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 08 Campago Ipuh (Bulan)			12	16,200,000	3	2,700,000	3	-	6	2,700,000	50.00%	16.67%										
		Penyelenggaraan SD Negeri 09 Manggis Ganting	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 09 Manggis Ganting (Bulan)			12	21,300,000	3	3,400,000	3	-	6	3,400,000	50.00%	15.96%										
		Penyelenggaraan SD Negeri 10 Puhun Pintu Kabun	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 10 Puhun Pintu Kabun (Bulan)			12	19,260,000	3	3,860,000	3	-	6	3,860,000	50.00%	20.04%										
		Penyelenggaraan SD Negeri 11 Campago Guguk Bulek	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 11 Campago Guguk Bulek (Bulan)			12	20,769,600	3	2,000,000	3	-	6	2,000,000	50.00%	9.63%										
		Penyelenggaraan SD Negeri 12 Puhun Pintu Kabun	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 12 Puhun Pintu Kabun (Bulan)			12	18,000,000	3	12,750,000	3	-	6	12,750,000	50.00%	70.83%										
		Penyelenggaraan SD Negeri 13 Kubu Gulai Banchah	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 13 Kubu Gulai Banchah (Bulan)			12	19,808,625	3	1,700,000	3	-	6	1,700,000	50.00%	8.58%										

No	Sasaran RPKD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.				
					6			7		8			9		12		13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
					K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
		Penyelenggaraan SD Negeri 14 Tanjung Alam	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 14 Tanjung Alam (Bulan)				12	15,448,000	3	2,000,000	3	-	6	2,000,000	50.00%	12.95%								
		Penyelenggaraan SD Negeri 15 Pulau Anak	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 15 Pulau Anak Aia (Bulan)				12	18,815,600	3	1,775,000	3	-	6	1,775,000	50.00%	9.43%								
		Penyelenggaraan SD Negeri 16 Campago Ipuh	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 16 Campago Ipuh (Bulan)				12	18,885,000	3	7,385,000	3	-	6	7,385,000	50.00%	39.11%								
		Penyelenggaraan SD Negeri 17 Manggis Gantiang	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 17 Manggis Gantiang (Bulan)				12	71,303,500	3	1,800,000	3	-	6	1,800,000	50.00%	2.52%								
		Penyelenggaraan SD Negeri 18 Campago Guguak Bulek	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 18 Campago Guguak Bulek (Bulan)				12	19,128,300	3	10,100,000	3	-	6	10,100,000	50.00%	52.80%								
		Penyelenggaraan SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 01 Benteng Pasar Atas (Bulan)				12	119,607,300	3	1,700,000	3	-	6	1,700,000	50.00%	1.42%								
		Penyelenggaraan SD Negeri 02 Percontohan	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 02 Percontohan (Bulan)				12	27,004,650	3	9,990,000	3	-	6	9,990,000	50.00%	36.99%								
		Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Kurai	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 03 Pakan Kurai (Bulan)				12	93,027,000	3	14,199,300	3	-	6	14,199,300	50.00%	15.26%								
		Penyelenggaraan SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 04 Bukit Apik Puhun (Bulan)				12	19,498,200	3	2,000,000	3	-	6	2,000,000	50.00%	10.26%								
		Penyelenggaraan SD Negeri 05 Tarok Dipo	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 05 Tarok Dipo (Bulan)				12	70,950,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%								
		Penyelenggaraan SD Negeri 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 06 Aua Tajungkang Tengah Sawah (Bulan)				12	21,704,600	3	4,050,000	3	-	6	4,050,000	50.00%	18.66%								
		Penyelenggaraan SD Negeri 07 Bukit Cangang	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 07 Bukit Cangang (Bulan)				12	23,109,600	3	1,400,000	3	-	6	1,400,000	50.00%	6.06%								

No	Sasaran RPKD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.											
					5			6		7			8			9				12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
					K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyelenggaraan SD Negeri 08 Tarok Dipo	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 08 Tarok Dipo (Bulan)				12	20,481,525	3	3,122,000	3	-	6	3,122,000	50.00%	15.24%														
		Penyelenggaraan SD Negeri 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 10 Aua Tajungkang Tengah Sawah (Bulan)				12	21,038,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%														
		Penyelenggaraan SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 11 Bukik Apik Puhun (Bulan)				12	19,650,000	3	5,122,000	3	-	6	5,122,000	50.00%	26.07%														
		Penyelenggaraan SD Negeri 12 Bukit Cangang	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 12 Bukik Cangang (Bulan)				12	16,716,300	3	1,500,000	3	-	6	1,500,000	50.00%	8.97%														
		Penyelenggaraan SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 13 Bukik Apik Puhun (Bulan)				12	18,604,950	3	6,400,000	3	-	6	6,400,000	50.00%	34.40%														
		Penyelenggaraan SD Negeri 14 Aur	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah (Bulan)				12	53,521,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%														
		Penyelenggaraan SD Negeri 16 Tarok Dipo	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 16 Tarok Dipo (Bulan)				12	24,472,500	3	15,840,000	3	-	6	15,840,000	50.00%	64.73%														
		Penyelenggaraan SD Negeri 17 Pakan Kurai	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 17 Pakan Kurai (Bulan)				12	15,030,000	3	1,800,000	3	-	6	1,800,000	50.00%	11.98%														
		Penyelenggaraan SD Negeri 18 Tarok Dipo	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 18 Tarok Dipo (Bulan)				12	20,534,250	3	3,550,000	3	-	6	3,550,000	50.00%	17.29%														
		Penyelenggaraan SD Negeri 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah						20,341,000		4,200,000		-																		
		Penyelenggaraan SD Negeri 01 Ladang Cakiah	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 01 Ladang Cakiah (Bulan)				12	17,932,500	3	1,850,000	3	-	6	1,850,000	50.00%	10.32%														

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.			
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
			Lancarnya proses belajar mengajar SDN 19 Aua Tajungkang Tengah Sawah (Bulan)					12		3		3		6		50.00%										
		Penyelenggaraan SD Negeri 02 Aur Kuning	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 02 Aua Kuning (Bulan)					12	18,409,500	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%									
		Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Labuah	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 03 Pakan Labuah (Bulan)					12	86,307,000	3	4,100,000	3	-	6	4,100,000	50.00%	4.75%									
		Penyelenggaraan SD Negeri 04 Birugo	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 04 Birugo (Bulan)					12	75,460,000	3	4,400,000	3	-	6	4,400,000	50.00%	5.83%									
		Penyelenggaraan SD Negeri 05 Birugo	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 05 Birugo (Bulan)					12	56,985,200	3	1,800,000	3	-	6	1,800,000	50.00%	3.16%									
		Penyelenggaraan SD Negeri 06 Parit Antang	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 06 Parik Antang (Bulan)					12	17,444,400	3	2,100,000	3	-	6	2,100,000	50.00%	12.04%									
		Penyelenggaraan SD Negeri 07 Belakang Balok	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 07 Belakang Balok (Bulan)					12	60,300,000	3	11,300,000	3	-	6	11,300,000	50.00%	18.74%									
		Penyelenggaraan SD Negeri 08 Kubu Tanjung	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 08 Kubu Tanjung (Bulan)					12	20,094,750	3	2,050,000	3	-	6	2,050,000	50.00%	10.20%									
		Penyelenggaraan SD Negeri 09 Belakang Balok	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 09 Belakang Balok (Bulan)					12	18,311,200	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%									
		Penyelenggaraan SD Negeri 10 Sapiran	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 10 Sapiran (Bulan)					12	19,922,250	3	1,964,000	3	-	6	1,964,000	50.00%	9.86%									
		Penyelenggaraan SD Negeri 11 Aur Kuning	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 11 Aua Kuning (Bulan)					12	71,300,000	3	2,300,000	3	-	6	2,300,000	50.00%	3.23%									
			Lancarnya proses belajar mengajar SDN 11 Aua Kuning (Bulan)					12		3		3		6		50.00%										
		Penyelenggaraan US Sd/MI	Lancarnya US SD/MI (siswa)					2692	98,000,800	-	3,096,200	2,692	-	1,346	3,096,200	50.00%	3.16%									
		Penyelenggaraan UN SMP/MTs	Lancarnya UN SMP/MTs (sekolah)					19	26,523,000	-	10,517,000	19	-	19	10,517,000	100.00%	39.65%									

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.				
							I		II			12			13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
							8		9			K			Rp				K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16	17								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Program BOS																				
		Kegiatan BOS SD N 01 Campago Ipuh (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (Bulan)			12	152,800,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%							
		Kegiatan BOS SD N 02 Campago Guguak Bulek (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)			12	159,200,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%							
		Kegiatan BOS SD N 03 Pulau Anak Air (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)			12	108,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%							
		Kegiatan BOS SD N 04 Garegeh (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)			12	276,800,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%							
		Kegiatan BOS SD N 05 Puhun Pintu Kabun (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)			12	149,600,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%							
		Kegiatan BOS SD N 06 Pulau Anak Air (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)			12	131,200,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%							
			Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)			12		3	-	3	-	6	-	50.00%								
		Kegiatan BOS SD N 07 Kubu Gulai Bancah (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)			12	190,400,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%							
		Kegiatan BOS SD N 08 Campago Ipuh (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)			12	113,600,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%							
		Kegiatan BOS SD N 09 Manggis Ganting (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)			12	160,800,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%							
		Kegiatan BOS SD N 10 Puhun Pintu Kabun (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)			12	108,800,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%							
		Kegiatan BOS SD N 11 Campago Guguak Bulek (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)			12	128,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%							
		Kegiatan BOS SD N 12 Puhun Pintu Kabun (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)			12	99,200,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%							
		Kegiatan BOS SD N 13 Kubu Gulai Bancah (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)			12	112,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%							
		Kegiatan BOS SD N 14 Tanjung Alam (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)			12	155,200,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%							
		Kegiatan BOS SD N 15 Pulau Anak Air (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)			12	128,800,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%							
		Kegiatan BOS SD N 16 Campago Ipuh (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)			12	119,200,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%							
		Kegiatan BOS SD N 17 Manggis Ganting (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)			12	123,200,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%							

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Jumlah kegiatan review PMBA dan pembantuan Pos tuntas BGM (2 angkatan) (Kali)					2		-		-			-		0.00%								
			Jumlah kegiatan sosialisasi Pelaksanaan Asuhan Gizi (PAG) (Kali)					1		-		-			-		0.00%								
			Pembentukan Pos Tuntas BGM (Peserta)					40		-		-			-		0.00%								
								206,717,800									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	3.24%	0.00%						

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.			
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
			Jumlah peserta Sosialisasi Pelaksanaan Survey Tas (Orang)					30			-		-			-		0.00%								
			Jumlah petugas yang mengikuti pertemuan/pelatihan di tingkat propinsi (Orang)					20		20		20		20		20		100.00%								
			Jumlah bahan cetak, fotokopi, KIE pencegahan penyakit menular (ls)					1		1		-		1		1		100.00%								
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan program lpa, Diare, Filariasis/Kecacingan, Hepatitis, TB, HIV/AIDS (Puskesmas)					7		7		7		7		7		100.00%								
			Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program Diare (Puskesmas)					7		7		7		7		7		100.00%								
			Jumlah peserta Workshop Peningkatan Peran kelompok Masyarakat dalam Penemuan Kasus TB (Orang)					70		-		-		-		-		0.00%								
		Peningkatan dan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Persentase pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdsarkan hasil survey epidemiologi (%)					0	36,361,220	-	-	-	-	3,514,000	-	3,514,000	0.00%	9.66%								
			Jumlah puskesmas yang mengikuti pembinaan SKD-KLB (Puskesmas)					7		7		7		7		7		100.00%								
			Jumlah puskesmas, Pustu dan poskeskel yang dimonitoring program surveilans epidemiologi (Pustu)					14		14		14		14		14		100.00%								
			Dokumen data surveillance epidemiologi yang tersedia (Dokumen)					1		1		-		1		1		100.00%								

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPDP Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengendalian penyakit tidak menular	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan skrining FR PTM dan gangguan mental dan perilaku (Puskesmas)					7	45,000,000	7	-	7	3,912,500	7	3,912,500	100.00%	8.69%						
			Jumlah Puskesmas melaksanakan PTM terpadu (Puskesmas)					7		7		7		7		100.00%							
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM (Kelurahan)					24		24		24		24		100.00%							
			Persentase perempuan usia 30 sampai 50 th yg dideteksi dini kanker servik dan kanker payudara (%)					12		12		12		12		100.00%							
		Peningkatan imunisasi	Jumlah orang lintas sektor yang mendapatkan informasi/sosialisasi program imunisasi (Orang)					30	117,000,000	30	-	30	30,345,650	30	30,345,650	100.00%	25.94%						
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan program imunisasi (Puskesmas)					7		7		7		7		100.00%							
			Jumlah narasumber non PNS yang memberikan penyuluhan imunisasi (Orang)					15		-		-		-		0.00%							
			Jumlah sekolah / kelurahan / BPS yang mendapatkan informasi / sosialisasi program imunisasi (Sekolah)					64		64		64		64		100.00%							
			Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program imunisasi (Puskesmas)					7		7		7		7		100.00%							
		Pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS	Terlaksananya pertemuan dengan LSM Peduli AIDS, Jaringan ODHA dan Kelompok Resti (Kali)					1	274,660,660	1	-	1	42,732,860	1	42,732,860	100.00%	15.56%						
			Terlaksananya kegiatan KPA Goes to School (Kali)					1		-		1		1		50.00%							

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.							
				5		6		7		8		9			12			13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Terlaksananya kegiatan pemulihan dan perubahan perilaku pada kelompok resti (Kali)					12		3		3		6		50.00%												
			Terlaksananya kegiatan pembentukan WPA (Kali)					1		1		1		1		100.00%												
			Terlaksananya kegiatan fokus group diskusi pada kelompok beresiko (Kali)					4		1		1		2		50.00%												
			Terlaksananya pertemuan dengan Pemangku Kebijakan (Kali)					2		2		2		2		100.00%												
			Terlaksananya kegiatan KPA Goes To Campus (Kali)					1		1		1		1		100.00%												
			Terlaksananya kegiatan pertemuan dan koordinasi denga pihak swasta (Kali)					1		-		-		-		0.00%												
			Terlaksananya orientasi program kepada staf KPAK Bukittinggi (Kali)					1		1		1		1		100.00%												
			Terlaksananya kegiatan pelatihan HIV/AIDS bagi tokoh kunci dan komunitas (Kali)					2		-		-		-		0.00%												
			Terlaksananya kegiatan kampanye Hari AIDS se Dunia (Kali)					1		-		-		-		0.00%												
			Tersedianya media sosialisasi informasi melalui media cetak dan KIE (Kali)					1		1		1		1		100.00%												
			Terlaksananya kegiatan pemetaan titik hotspot (Kali)					2		-		1		1		50.00%												
			Terlaksananya kegiatan pertemuan dan koordinasi dengan layanan kesehatan (Kali)					2		-		1		1		25.00%												

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.			
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
									2,043,691,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				66.67%	0.00%											
										Predikat Kinerja				Sedang	Sangat Rendah											
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia																					DINAS KESEHATAN			
		Peningkatan kesehatan Lansia	Jumlah kegiatan pertemuan evaluasi program lansia (Kegiatan)					1	40,444,900	-	-	-	4,852,000	-	4,852,000	0.00%	12.00%									
			Jumlah pertemuan pembentukan kelas lansia (4)					0		1		1		2	0.00%											
			Lomba senam lansia (Kelompok)					6		-		-		-	0.00%											
			Jumlah kegiatan pertemuan review program lansia (Kegiatan)					1		-		-		-	0.00%											
									40,444,900	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%											
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan																					DINAS KESEHATAN			
		Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Jumlah Sampel Pangan yang Diperiksa (Kali)					1	27,731,000	-	-	1	10,771,700	1	10,771,700	50.00%	38.84%									
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan tentang Keamanan Pangan (Orang)					30		-		30		30	100.00%											
			Jumlah Industri Rumah Tangga yang Diaudit (Sarana)					50		50		50		50	100.00%											
									27,731,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				83.33%	0.00%											
										Predikat Kinerja				Tinggi	Sangat Rendah											
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak																					DINAS KESEHATAN			
		Peningkatan Kesehatan Ibu	Jumlah kegiatan pertemuan evaluasi fasilitator bidan koordinator dan jejaring (Kali)					1	100,000,000	-	-	-	1,106,875	-	1,106,875	0.00%	1.11%									

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.
					6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																						
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan																				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Peningkatan Trotoar	Trotoar yang ditingkatkan (Paket)			14	9,457,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%					
			Dokumen perencanaan (Dokumen)			1		-	-	1		1		1		100.00%						
			Laporan pengawasan (laporan)			4		-	-							0.00%						
		Pembangunan Jalan Dalam Kota	Laporan pengawasan (Laporan)			1	4,200,000,000	-	-	1		1		1		100.00%	0.00%					
			Jalan yang dibangun (Paket)			1		-	-	1		1		1		100.00%						
			Dokumen perencanaan (Dokumen)			1		-	-	1		1		1		50.00%						
		Pembangunan Trotoar	Dokumen perencanaan (Dokumen)			1	110,000,000	-	-	1		1		1		50.00%	0.00%					
			Trotoar yang dibangun (Paket)			1		-	-							0.00%						
			Laporan pengawasan (Laporan)			1		-	-							0.00%						
		Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Laporan monitoring dan evaluasi (Laporan)			1	10,000,000	-	-	1		1		1		50.00%	0.00%					
		Perencanaan DAK Jalan	Dokumen perencanaan (Dokumen)			1	100,000,000	-	-	-		-		-		0.00%	0.00%					
							13,877,400,000									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	48.11%	0.00%				
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong																				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Laporan pengawasan (Laporan)			1	909,713,900	-	-	-		-		-		0.00%	0.00%					
			Saluran drainase / gorong-gorong yang dibangun (Paket)			5		-	-							0.00%						
			Dokumen perencanaan (Dokumen)			1		-	-	1		1		1		100.00%						
		Peningkatan Drainase	Dokumen perencanaan (Dokumen)			1	1,247,723,425	-	-	1		1		1		100.00%	0.00%					
			Laporan pengawasan (Laporan)			1		-	-							0.00%						
			Saluran drainase / gorong-gorong yang ditingkatkan (Paket)			6		-	-							0.00%						
		Pemeliharaan, pembersihan, pengerukan Drainase Dalam Kota	Drainase dipelihara, dibersihkan dan dikeruk (Bulan)			12	350,000,000	3	-	3		3		3		25.00%	0.00%					
							2,507,437,325									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	32.17%	0.00%				

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.			
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong																						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan	Laporan pengawasan (Laporan)					4	1,452,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									
			Batu bronjong / dam jalan yang dipasang (Paket)					5		-	-	-	-	-	-	0.00%										
			Dokumen perencanaan (Dokumen)					3		-	-	-	-	-	-	0.00%										
									1,452,000,000							0.00%	0.00%									
		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan																						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dalam Kota	Jalan yang direhabilitasi / dipelihara (Paket)					3	2,826,679,575	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									
			Laporan pengawasan (Laporan)					3		-	-	-	-	-	-	0.00%										
			Dokumen perencanaan (Dokumen)					1		-	-	-	-	-	-	0.00%										
		Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	Jalan dalam kota yang direhab / dipelihara (Bulan)					12	400,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%									
		Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam kota	Jembatan dalam kota yang direhabilitasi / direhab (Bulan)					12	75,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%									
		Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Trotoar dalam kota yang dipelihara (Bulan)					12	225,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%									
		pemeliharaan berkala jalan dalam Kota Bukittinggi (DAK fisik tahun 2019 bidang jalan)	Jalan yang direhabilitasi (Paket)					1	9,164,681,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									
			Laporan pengawasan (Laporan)					1		-	-	-	-	-	-	0.00%										
									12,691,360,575							2.76%	0.00%									
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan																						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		Pengadaan alat-alat berat	Alat berat yang disediakan (r)					0	250,000,000	-	15,028,670	-	-	-	15,028,670	0.00%	6.01%									
		Pemeliharaan Alat Berat dan Operasionalisasi	Alat berat yang dipelihara (Unit)					12	690,408,500	-	-	12	-	6	-	50.00%	0.00%									
		Peralatan bengkel	Peralatan bengkel yang diadakan (Jenis)					9	60,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.			
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
		Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum																					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
		Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi (Lanjutan)	Bangunan rumah dinas (lanjutan) (Paket)					1	8,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
			Pengawasan berkala (Dokumen)					1									0.00%									
			Pagar rumah dinas (Paket)					1									0.00%									
			Laporan pengawasan (Laporan)					2									0.00%									
			Dokumen perencanaan (Dokumen)					1									0.00%									
		Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun I (Pertama)	1 Unit gedung kantor DPRD (Unit)					1	51,179,106,870	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
			Dokumen UKL/UPL (Dokumen)					1									0.00%									
			Pengawasan berkala (Laporan)					1									0.00%									
			Dokumen Andai/Lain (Dokumen)					1									0.00%									
			Dokumen MK (Dokumen)					1									0.00%									
			Laporan Dokumen DED jalan (Laporan)					1									0.00%									
		Penunjang Pembangunan Kembali Pasar Atas	Dokumen andal lain (Dokumen)					1	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
			Dokumen DED kawasan pasar atas (Dokumen)					1									0.00%									
			Dokumen Amdal (Dokumen)					1									0.00%									
		Event-Event Daerah dan Nasional	Jumlah even yang dilaksanakan (Even)					5	70,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
		Rehabilitasi Gedung Kantor KPU	Laporan pengawasan (Laporan)					1	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
			Gedung kantor yang direhab (Paket)					1									0.00%									
			Dokumen perencanaan (Dokumen)					1									0.00%									
		Pembangunan Rumah Dinas dan Bangunan Lainnya	Dokumen perencanaan (Dokumen)					1	3,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
									63,049,106,870																	
		Program Pengelolaan Pembangunan gedung																						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.			
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
		Operasionalisasi Perda Bangunan gedung	Jumlah kegiatan operasionalisasi perda yang dilaksanakan (Kali sidang)					14	90,000,000	-	10,477,000	-	-	-	10,477,000	0.00%	11.64%									
			Jumlah kegiatan operasionalisasi perda yang dilaksanakan (SLF)					18		-		-	-	-		0.00%										
									90,000,000								0.00%	0.00%								
		Program Pengelolaan Penerangan Lampu Jalan																						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	Pemeliharaan lampu jalan dan fasilitas umum lainnya (Bulan)					12	575,095,630	-	98,920,162	6	-	3	98,920,162	25.00%	17.20%									
		Penunjang Operasional UPTD Penerangan Fasilitas Umum	terlaksananya operasionalisasi dan administrasi kegiatan di UPTD penerangan fasilitas umum (Bulan)					12	50,000,000	-	-	6	-	3	-	25.00%	0.00%									
		Penambahan Jaringan Penerangan Lampu Jalan	Dokumen perencanaan (Dokumen)					1	650,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									
			Laporan pengawasan (Laporan)					1		-		-	-	-		0.00%										
			Pengadaan lampu jalan (Paket)					1		-		-	-	-		0.00%										
		Pembayaran Listrik Rekening PJU	Rekening listrik PJU dan fasilitas umum yang dibayar (Bulan)					12	2,500,000,000	-	532,636,214	6	-	3	532,636,214	25.00%	21.31%									
		Revitalisasi Jaringan Penerangan Jalan Umum	Laporan pengawasan (Laporan)					1	300,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									
			Pengadaan lampu jalan, jaringan PJU yang direvitalisasi (Paket)					1		-		-	-	-		0.00%										
			Dokumen perencanaan (Dokumen)					1		-		-	-	-		0.00%										
		Penyusunan Database Penerangan Fasilitas Umum	Database penerangan fasilitas umum (Dokumen)					1	20,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									
									4,095,095,630								19.08%	15.42%								
		Program Pengaturan Jasa Konstruksi																						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPDP Tahun 2018 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.						
							I		II			12			13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
							8		9			12			13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penunjang Penyelenggaraan Manunggal Sakato/ BBGRM							130,980,480		2,993,800		520,000											
		Pembangunan Gedung/ Gapura							1,149,198,000		-		-											
		Pendamping Kegiatan KOTAKU/ P2KPKP							302,446,550		4,771,000		6,911,400											
		Pendamping Kegiatan BSPS	Jumlah rumah BSPS (rumah)					220	126,000,400	-	1,185,500	-	34,234,500	-	35,420,000	0.00%	28.11%							
		Pendamping Penyusunan Perda RP3KP	Perda dan Sosialisasi RP3KP (Perda)					1	75,000,000	1	-	1	-	1	-	100.00%	0.00%							
		penunjang DAK bidang perumahan dan	Honor tenaga fasilitator BSPS (orang)					3	126,000,000	3	-	3	-	3	-	100.00%	0.00%							
									1,909,625,430								1.85%							
		Program pengelolaan areal pemukiman																						DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Pembuatan Pagar TPU	Pagar TPU (paket)					3	119,000,000	-	-	3	5,000,000	2	5,000,000	50.00%	4.20%							
		Perawatan dan Pemeliharaan TPU Kota Bukittinggi	Terpeliharanya TPU kota Bukittinggi (TPU)					1	36,520,000	1	-	1	-	1	-	100.00%	0.00%							
									155,520,000															
		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran																						DINAS KEBAKARAN
		Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	Jumlah Pengawasan Ketersediaan sarana dan prasarana kebakaran (kegiatan)					60	45,162,000	-	-	10	-	10	-	16.67%	0.00%							
		Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Peserta Sosialisasi (orang)					160	65,223,690	-	-	20	10,471,000	20	10,471,000	12.50%	16.05%							
		Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasaran Terbeli (Jenis)					19	325,000,000	2	64,445,000	12	91,499,750	14	155,944,750	73.68%	47.98%							
		Pelaksanaan Kegiatan Operasional Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Penanggulangan Kebakaran yang ditangani (kejadian)					80	400,000,000	18	1,614,000	27	121,170,000	45	122,784,000	56.25%	30.70%							
		Peringatan HUT Damkar	Terlaksananya Kegiatan HUT Damkar (Kegiatan)					2	50,000,000	2	37,285,387	-	10,920,000	2	48,205,387	100.00%	96.41%							
		Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat	Jumlah Penyemprotan Permintaan Pemda dan masyarakat (Kegiatan)					31	28,479,950	8	670,000	7	10,282,000	15	10,952,000	48.39%	38.46%							

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.				
					5		6		7		8			9		12		13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
		Penyidikan Perkara Pelanggaran PERDA dengan Sistem Yustisial/ Acara Pemeriksaan Cepat/ Tipiring					94,859,500						778,500												
		Operasionalisasi Sekretariat Bersama PPNS Lingkungan Pemerintah daerah Kota Bukittinggi					75,000,000					1,518,825													
		Pemusnahan Barang Bukti/Barang Temuan					29,996,145						1,336,500												
		Operasionalisasi Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4)					3,339,999,030					504,258,400													
		Pengamanan hari besar keagamaan, pejabat dan tamu negara serta operasi yang diarahkan pimpinan					817,753,200																		
		Penerbitan alat peraga kampanye pemilu					45,465,300						37,940,950												
							9,268,541,285																		
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan																					DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
		Pembinaan dan operasional Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat					347,005,600					2,673,000													
		Pembentukan/Pembekalan Satlinmas Pemilu					299,275,000					25,376,800													
							646,280,600																		
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam																					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		Operasional Pusdalops	Jumlah honorarium operasional pusdalops, upah tenaga kontrak, BBM yang terbayar (bulan)				12	937,890,000			3	46,000,000		3	245,596,657		6	291,596,657	50.00%	31.09%					
		Pendampingan ke BPBD Prov Jambore PRB	Peningkatan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam (even)				2	80,380,000			-	-		-	-		-	-	0.00%	0.00%					

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.			
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
		Peningkatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional						20,000,000					19,417,364													
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah Pompa, alat angkut apung bermotor khusus, alat pengolahan tanah dan tanaman dan meubelair terbeli (item)					4	645,800,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									
								1,684,070,000								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	27.85%	17.31%								
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar																						KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	Pelaksanaan Upacara (kegiatan)					4	156,285,375	-	-	2	5,480,500	2	5,480,500	50.00%	3.51%									
								156,285,375								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	50.00%	3.51%								
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada																						KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Paket Iklan Layanan Masyarakat (paket)					2	272,536,800	-	7,648,750	-	32,113,360	-	39,762,110	0.00%	14.59%									
			Peserta Sosialisasi (orang)					1000								0.00%										
		Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Laporan Sosialisasi dan Pemantauan Pemilu/Pilpres (Laporan)					5	176,300,750	3	1,146,250	2	148,210,000	5	149,356,250	100.00%	84.72%									
		Desk Pemilu / Pilkada	Laporan Fasilitas Pelaksanaan Pemilu 2019 (Laporan)					1	66,100,000	1	63,800,000	-	800,000	1	64,600,000	50.00%	97.73%									
								514,937,550								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	40.66%	41.55%								
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama																						KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat	Peserta Sosialisasi Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat (orang)					100	182,708,700	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPDP Tahun 2018 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)	SKPD Penanggungjawab	Ket.										
							I		II								12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
							K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelayanan Bagi Anak dan Bayi Terlantar yang membutuhkan Perlindungan Khusus	Jumlah pelayanan kasus anak terlantar (bulan)			12	45,000,000	3	1,325,000	3	5,513,171	6	6,838,171	50.00%	15.20%											
							45,000,000							50.00%	15.20%											
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma			-												DINAS SOSIAL									
		Penanganan Eks. Penyakit Kejiwaan	Eks. Penyandang Penyakit Kejiwaan yang terfasilitasi (bulan)			12	50,246,500	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%											
		Fasilitasi Organisasi Penyandang Cacat	Organisasi penyandang cacat terfasilitasi (Organisasi)			3	130,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%											
							180,246,500							13.94%	0.00%											
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			-												DINAS SOSIAL									
		Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial. Organisasi Sosial dan Yayasan	Jumlah organisasi sosial yang terbina (Organisasi Sosial)			25	90,000,000	-	27,417,250	25	30,449,880	13	57,867,130	50.00%	64.30%											
			Jumlah lembaga yang terbina (LKS)			2		-		2		1		50.00%												
			Jumlah yayasan yang terbina (Yayasan)			5		-		5		3		50.00%												
		Fasilitasi Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kota Bukittinggi	Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) terfasilitasi (Lembaga)			1	45,000,000	-	-	1	-	1	-	50.00%	0.00%											
							135,000,000							50.00%	0.00%											
		Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial			-												DINAS SOSIAL									
		Pembinaan Pilar-pilar sosial (PSM, TKSK, Karang Taruna)	Terlaksananya pembinaan pilar-pilar sosial (Pilar (PSM dan TKSK))			2	350,000,000	-	-	2	79,821,000	1	79,821,000	50.00%	22.81%											
		Operasional dan Penguatan Tagana dan Kampung Siaga Bencana	Operasional untuk kegiatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) (bulan)			12	60,761,000	3	6,056,600	3	4,468,750	6	10,525,350	50.00%	17.32%											
							410,761,000							50.00%	21.99%											

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.				
							I		II			12			13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
							8		9			K			Rp				K		Rp	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17	
		Pelatihan Montir Sepeda Motor	Jumlah peserta pelatihan montir sepeda motor (orang)			16	100,157,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							
		Pelatihan Pembuatan Dendeng Singkong	umlah peserta pelatihan dendeng singkong (orang)			16	39,401,150	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							
		Pelatihan Modeste Dasar untuk Pemula	Jumlah peserta pelatihan modeste dasar untuk pemula (orang)			16	77,293,610	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							
							408,915,220							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	14.68%	9.29%						
														Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja																				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		Pelayanan dan Penempatan Tenaga kerja	Laporan informasi pasar kerja (laporan)			12	13,685,290	3	-	6	8,229,300	9	8,229,300	75.00%	60.13%							
							13,685,290							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	75.00%	60.13%						
														Predikat Kinerja	Sedang	Rendah						
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan																				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		Penanganan Kasus PHI	Jumlah kasus PHK yang tertangani (kasus)			30	25,931,850	-	596,250	11	3,632,600	11	4,228,850	36.67%	16.31%							
		Penerapan Sistem Deteksi Dini kasus PHI di Perusahaan	umlah antisipasi masalah ketenagakerjaan sedini mungkin (perusahaan)			10	11,209,850	-	-	2	1,109,850	2	1,109,850	20.00%	9.90%							
		Asistensi dan Pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja bersama (PKB)	Jumlah PP dan PKB di perusahaan (laporan)			10	11,092,750	1	-	2	3,083,750	3	3,083,750	30.00%	27.80%							
		Pembentukan Tim khusus Ketenagakerjaan	Jumlah posko khusus ketenagakerjaan (posko)			1	6,869,000	-	-	1	4,833,975	1	4,833,975	100.00%	70.37%							
		Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan	Jumlah diklat teknis yang diikuti (diklat)			4	80,150,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							
							135,253,450							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	16.23%	9.80%						
														Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.		
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12				15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																							
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak																			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
		Perkuatan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah kasus yang ditangani. (Kasus)					40	216,140,036	10	22,403,036	11	64,875,024	21	87,278,060	52.50%	40.38%						
		Penguatan Kota Layak Anak.	Jumlah Sekolah ramah anak (buah)					9	35,000,000	9	-	9	10,734,890	9	10,734,890	100.00%	30.67%						
			Jumlah fasilitas publik ramah anak. (buah)					1			1		1		1	100.00%							
			Jumlah Puskesmas ramah anak (buah)					7			7		7		7	100.00%							
			Jumlah Kelurahan ramah anak. (buah)					6			6		6		6	100.00%							
		Pengembangan dan Perkuatan Forum Anak Daerah (Forda) Kota Bukittinggi dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)	Jumlah Forum Anak Kelurahan Aktif (buah)					6	91,170,500	6	-	6	846,250	6	846,250	100.00%	0.93%						
			Jumlah Forum Anak Kota Aktif (buah)					1			1		1		1	100.00%							
			Jumlah Forum Anak Kecamatan Aktif (buah)					3			3		3		3	100.00%							
									342,310,536							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	70.01%	25.50%					
																Predikat Kinerja	Sedang	Sangat Rendah					
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan																			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
		Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah keluarga yang di bina (Keluarga)					360	261,764,000	360	4,988,000	360	56,697,000	360	61,685,000	100.00%	23.57%						
									261,764,000							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	23.57%					
																Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah					

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.				
					6		7		8		9			12			13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp	K	Rp
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																								
		Program Penataan Administrasi Kependudukan																		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
		Pengelolaan administrasi kependudukan dengan aplikasi SIAK dan AFIS	Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan jaringan SIAK (bulan)			12	9,271,040	3	618,600	3	3,755,182	6	4,373,782	50.00%	47.18%									
		Pelayanan Identitas Penduduk	Jumlah KIA yang diterbitkan (dokumen)			5000	142,994,780	-	10,499,120	-	25,909,020	-	36,408,140	0.00%	25.46%									
			Jumlah KK yang diterbitkan (dokumen)			8000		2,087		1,926		4,013		50.16%										
			Jumlah KTP yang diterbitkan (dokumen)			10000		4,921		3,481		8,402		84.02%										
		Pelayanan Akta Kelahiran	Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan (dokumen)			3000	115,867,080	840	15,298,680	776	17,099,120	1,616	32,397,800	53.87%	27.96%									
		Pelayanan Pindah Datang Penduduk	Jumlah dokumen pindah datang penduduk yang diterbitkan (dokumen)			4000	6,348,230	1,221	-	700	-	1,921	-	48.03%	0.00%									
		Pelayanan Akta Kematian	Jumlah akta Kematian yang diterbitkan (dokumen)			500	5,181,000	154	-	138	-	292	-	58.40%	0.00%									
		Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Jumlah laporan kependudukan yang tersedia (laporan)			12	4,667,600	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%									
		Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian	Jumlah akta perkawinan dan perceraian yang diterbitkan (dokumen)			50	1,937,800	9	-	4	-	13	-	26.00%	0.00%									
			Jumlah data perkawinan dan perceraian yang dihimpun (orang)			800		203		150		353		44.13%										
		Peningkatan Sistem Pendataan Bidang Kependudukan	Jumlah penduduk yang didata (orang)			2000	7,442,260	-	-	838	4,282,300	419	4,282,300	20.95%	57.54%									
		Penataan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen pendataan penduduk yang diarsipkan (KK)			8000	3,225,400	2,087	-	1,926	340,000	4,013	340,000	50.16%	10.54%									
		Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik 2019 Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Pengumuman publikasi yang tersedia (jenis)			2	809,090,000	-	43,350,650	-	306,054,690	-	349,405,340	0.00%	43.18%									
			Jumlah dokumen perkembangan kependudukan yang tersedia (dokumen)			2		-		2		2		100.00%										
			Persentase koordinasi dan konsultasi yang terlaksana (%)			100		25		50		75		75.00%										

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.							
							I		II			12			13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
							K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
			Jumlah barang cetakan yang terbeli (jenis)			7	-		3		3		42.86%												
			Ketersediaan jaringan komunikasi data (bulan)			12	3		-		3		25.00%												
			Jumlah peserta sosialisasi (orang)			200	-		-		-		0.00%												
			Jumlah data biometrik yang direkam (orang)			500	-		300		300		60.00%												
			Jumlah peralatan SIAK dan KTP-el yang terpelihara (jenis)			4	4		4		4		100.00%												
								1,106,025,190					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	49.79%	3.74%										
													Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah										
			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																						
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan																AUR BIRUGO TIGO BALEH							
		Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kecamatan	Laporan kegiatan (bulan)			12	32,000,000	3	5,895,000	3	3,970,500	3	9,865,500	25.00%	30.83%										
		Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Parit Antang	laporan kegiatan (bulan)			12	46,000,000	3	-	3	9,165,000	3	9,165,000	25.00%	19.92%										
		Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Belakang Balok	laporan kegiatan (bulan)			12	42,400,000	3	-	3	21,745,000	3	21,745,000	25.00%	51.29%										
		Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Pakan Labuah	laporan kegiatan (bulan)			12	48,400,000	3	15,750,000	3	-	3	15,750,000	25.00%	32.54%										
		Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Birugo	laporan kegiatan (bulan)			12	120,000,000	3	-	3	26,375,000	3	26,375,000	25.00%	21.98%										
		Pembinaan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Kubu Tanjung	laporan kegiatan (bulan)			12	36,400,000	3	-	3	11,550,000	3	11,550,000	25.00%	31.73%										
		Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Sapiran	laporan kegiatan (bulan)			12	54,400,000	3	-	3	10,350,000	3	10,350,000	25.00%	19.03%										
		Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Aur Kuning	laporan kegiatan (bulan)			12	54,400,000	3	6,000,000	3	11,700,000	3	17,700,000	25.00%	32.54%										
		Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Ladang Cakiah	laporan kegiatan (bulan)			12	40,500,000	3	8,317,500	3	6,300,000	3	14,617,500	25.00%	36.09%										
		Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda kecamatan	Laporan kegiatan (bulan)			12	15,000,000	-	13,993,280	12	-	12	13,993,280	100.00%	93.29%										

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.					
							I		II			12			13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
							8		9			12			13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Koto Selayan	Jenis kegiatan yang diselenggarakan (jenis)			2	6,500,000	2	-	2	-	2	-	2	-	100.00%	0.00%						
		Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Campago Ipuh	Jenis kegiatan yang diselenggarakan (jenis)			2	7,500,000	2	-	2	-	2	-	2	-	100.00%	0.00%						
		Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Manggis Ganting	Jenis kegiatan yang diselenggarakan (jenis)			2	7,500,000	2	-	2	3,300,000	2	3,300,000	2	3,300,000	100.00%	44.00%						
		Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Pulau Anak Air	Jenis kegiatan yang diselenggarakan (jenis)			2	7,500,000	2	-	2	2,229,000	2	2,229,000	2	2,229,000	100.00%	29.72%						
		Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Puhun Pintu Kabun	Jenis kegiatan yang diselenggarakan (jenis)			2	7,500,000	2	-	2	3,570,000	2	3,570,000	2	3,570,000	100.00%	47.60%						
		Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Puhun Tembok	Jenis kegiatan yang diselenggarakan (jenis)			2	7,500,000	2	-	2	-	2	-	2	-	100.00%	0.00%						
		Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Kubu Gulai Banchah	Jenis kegiatan yang diselenggarakan (jenis)			2	7,500,000	2	-	2	-	2	-	2	-	100.00%	0.00%						
		Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Campago Guguk Bulek	Jenis kegiatan yang diselenggarakan (jenis)			2	7,500,000	2	3,223,000	2	-	2	-	2	3,223,000	100.00%	42.97%						
		Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Garegeh	Jenis kegiatan yang diselenggarakan (jenis)			2	6,500,000	2	-	2	-	2	-	2	-	100.00%	0.00%						
		Pembinaan dan fasilitasi KAMTIBMAS kecamatan	Satlinmas dan Poskamling terbina (kelurahan)			9	30,000,000	9	-	9	-	9	-	9	-	100.00%	0.00%						
		Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Laporan monitoring (kelurahan)			9	40,000,000	9	6,210,150	9	-	9	-	9	6,210,150	100.00%	15.53%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.					
							I		II			12			13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
							8		9			12			13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Musrenbang Tk Kelurahan ATTS	Memorandum program MUSRENBANG Kelurahan (dokumen)			1	12,897,000	1	12,197,000	-	-	-	-	1	12,197,000	50.00%	94.57%						
		Manunggal Sakato di Kelurahan Tarok Dipo	Proyek Manunggal Sakato (proyek)			3	65,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
		Manunggal Sakato di Kelurahan Bukit Apit Puhun	Proyek Manunggal Sakato (proyek)			3	65,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
		Manunggal Sakato di Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Proyek Manunggal Sakato (proyek)			3	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
		Manunggal Sakato di Kelurahan Benteng Pasar Atas	Proyek Manunggal Sakato (proyek)			3	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
		Manunggal Sakato di Kelurahan Pakan Kurai	Proyek Manunggal Sakato (proyek)			3	59,749,600	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
		Manunggal Sakato di Kelurahan Kayu Kubu	Proyek Manunggal Sakato (proyek)			3	65,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
		Manunggal Sakato di Kelurahan Aur Tajung Tang Tengah Sawah	Proyek Manunggal Sakato (proyek)			3	65,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
		Pembinaan dan Fasilitasi Olah Raga Masyarakat Kelurahan Tarok Dipo	Tim olah raga yang dibina (tim)			2	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
		Pembinaan dan Fasilitasi Olah Raga Masyarakat Kelurahan Bukit Apit Puhun	Tim olah raga yang dibina (tim)			2	40,000,000	1	5,834,000	-	1,610,000	1	7,444,000	25.00%	18.61%								
		Pembinaan dan Fasilitasi Olah Raga Masyarakat Kelurahan BCKR	Tim olah raga yang dibina (tim)			2	38,000,000	-	-	-	1,335,000	-	1,335,000	0.00%	3.51%								
		Pembinaan dan Fasilitasi Olah Raga Masyarakat Kelurahan Benteng Pasar Atas	Tim olah raga yang dibina (tim)			2	30,648,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
		Pembinaan dan Fasilitasi Olah Raga Masyarakat Kelurahan Pakan Kurai	Tim olah raga yang dibina (tim)			2	34,805,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
		Pembinaan dan Fasilitasi Olah Raga Masyarakat Kelurahan Kayu Kubu	Tim olah raga yang dibina (tim)			2	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
		Pembinaan dan Fasilitasi Olah Raga	Tim olah raga yang dibina (tim)			2	42,281,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
		Rehab Lapangan Futsal Kel. Tarok Dipo	Terperbaikinya lapangan futsal (lapangan)			1	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
		Bantuan Pompa air untuk masyarakat Bukit Apit Puhun	Tersedianya Pompa air (unit)			2	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
		Penyediaan Mebeuler Posyandu di Kelurahan Pakan Kurai	Tersedianya Meubelair posyandu (paket)			1	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.				
							I		II			12			13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
							8		9			K			Rp				K		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Penyediaan Mebeuler Posyandu dikelurahan ATTS	Tersedia mebeuler posyandu (paket)			1	50,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							
		Penyediaan Mebeuler Posyandu dikelurahan Tarok Dipo	Tersedia mebeuler posyandu (paket)			1	50,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							
		Penyelesaian Gedung Serba Guna (Dekat Mesjud Banto Laweh)	Terselesaikannya fisik bangunan serbaguna (bangunan)			1	50,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							
		Rehab/Perbaikan Balai Pemuda Simpang Ateh Ngarai	Jumlah kelompok keuangan mikro yang didata (kelompok)			7	75,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							
							1,507,559,670							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	6.25%	7.44%						
														Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa																MANDIANGIN KOTO SELAYAN				
		Musrenbang tingkat Kecamatan	Usulan dan partisipasi masyarakat tertampung (kelurahan)			9	15,000,000	9	12,162,350	9	1,159,200	9	13,321,550	100.00%	88.81%							
		Musrenbang Kelurahan Koto Selayan	Usulan Rencana Pembangunan tertampung (usulan)			11	9,245,000	11	9,110,400	11	-	11	9,110,400	100.00%	98.54%							
		Musrenbang Kelurahan Campago Ipuh	Usulan Rencana Pembangunan tertampung (usulan)			11	9,570,000	11	9,545,000	11	-	11	9,545,000	100.00%	99.74%							
		Musrenbang Kelurahan Manggis Ganting	Usulan Rencana Pembangunan tertampung (usulan)			11	9,279,975	11	6,411,400	11	1,934,900	11	8,346,300	100.00%	89.94%							
		Musrenbang Kelurahan Pulau Anak Air	Usulan Rencana Pembangunan tertampung (usulan)			11	10,000,000	11	9,304,000	11	-	11	9,304,000	100.00%	93.04%							
		Musrenbang Kelurahan Puhun Pintu Kabun	Usulan Rencana Pembangunan tertampung (usulan)			11	10,350,000	11	8,415,000	11	-	11	8,415,000	100.00%	81.30%							
		Musrenbang Kelurahan Puhun Tembok	Usulan Rencana Pembangunan tertampung (usulan)			11	10,841,000	11	10,178,000	11	-	11	10,178,000	100.00%	93.88%							
		Musrenbang Kelurahan Kubu Gulai Bancah	Usulan Rencana Pembangunan tertampung (usulan)			11	9,410,000	11	8,262,500	11	-	11	8,262,500	100.00%	87.81%							
		Musrenbang Kelurahan Campago Guguak Bulek	Usulan Rencana Pembangunan tertampung (usulan)			11	11,110,000	11	9,225,800	11	-	11	9,225,800	100.00%	83.04%							
		Musrenbang Kelurahan Garegeh	Usulan Rencana Pembangunan tertampung (usulan)			11	10,296,000	11	6,657,500	11	-	11	6,657,500	100.00%	64.66%							
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato Kecamatan	Kegiatan manunggal Sakato terdukung (kelurahan)			9	15,000,000	9	-	9	-	9	-	100.00%	0.00%							

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.					
							I		II			12			13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
							8		9			12			13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Manunggal Sakato Kel. Koto Selayan	Kegiatan pembangunan terlaksana (proyek)			3	57,500,000	3	-	3	-	3	-	3	-	100.00%	0.00%						
		Manunggal Sakato Kel. Campago Ipuh	Kegiatan pembangunan terlaksana (proyek)			3	57,500,000	3	-	3	-	3	-	3	-	100.00%	0.00%						
		Manunggal Sakato Kel. Manggis Ganting	Kegiatan pembangunan terlaksana (proyek)			3	57,500,000	3	-	3	2,880,000	3	2,880,000	3	2,880,000	100.00%	5.01%						
		Manunggal Sakato Kel. Pulau Anak air	Kegiatan pembangunan terlaksana (proyek)			3	57,500,000	3	-	3	-	3	-	3	-	100.00%	0.00%						
		Manunggal Sakato Kel Puhun Pintu Kabun	Kegiatan pembangunan terlaksana (proyek)			3	57,500,000	3	-	3	-	3	-	3	-	100.00%	0.00%						
		Manunggal Sakato Kel Puhun Tembok	Kegiatan pembangunan terlaksana (proyek)			3	57,500,000	3	-	3	-	3	-	3	-	100.00%	0.00%						
		Manunggal Sakato Kel Kubu Gulai Banchah	Kegiatan pembangunan terlaksana (proyek)			3	57,500,000	3	-	3	-	3	-	3	-	100.00%	0.00%						
		Manunggal Sakato Kel. Campago Guguak Bulek	Kegiatan pembangunan terlaksana (proyek)			3	57,500,000	3	-	3	-	3	-	3	-	100.00%	0.00%						
		Manunggal Sakato Kelurahan Garegeh	Kegiatan pembangunan terlaksana (proyek)			3	57,500,000	3	-	3	-	3	-	3	-	100.00%	0.00%						
		Penilaian dan pembinaan Kelurahan berprestasi	Penilaian kelurahan berprestasi terlaksana (kelurahan)			9	30,000,000	9	-	9	420,000	9	420,000	9	420,000	100.00%	1.40%						
		MTQ tingkat Kecamatan	Khalifah terbaik di Kec. MKS terpilih ()			0	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
		Penunjang acara kecamatan dan keikutsertaan dalam kegiatan tingkat kota, propinsi dan nasional	Acara/lomba tingkat Kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional (acara)			10	10,000,000	10	2,101,000	10	2,112,000	10	4,213,000	10	4,213,000	100.00%	42.13%						
							827,601,975									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	81.88%	12.07%					
																Predikat Kinerja	Tinggi	Sangat Rendah					
		Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																					GUGUAK PANJANG
		Penguatan Kelompok Keuangan Mikro Pedesaan/ Kelurahan	Jumlah kelompok keuangan mikro yang didata (kelompok)			7	19,412,750	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
							19,412,750									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%					
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa																					MANDIANGIN KOTO SELAYAN
		Penunjang operasional PATEN	Pelayanan terpadu (bulan)			12	13,999,920	12	4,611,400	12	-	12	4,611,400	12	4,611,400	100.00%	32.94%						
		Rapat koordinasi kecamatan dengan unsur terkait	Rapat koordinasi dan evaluasi (pertemuan)			3	10,000,000	3	420,000	3	1,692,950	3	2,112,950	3	2,112,950	100.00%	21.13%						

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.						
							I		II			12			13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
							K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp	K	Rp		
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Wirausaha Muda Pemula	Jumlah usaha wisausaha muda pemula yang terfasilitasi (orang)			30	100,000,000	10	-	10	11,174,750	10	11,174,750	33.33%	11.17%									
							100,000,000							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	33.33%	11.17%								
														Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga			-														DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA					
		Kejurda Cabang olahraga	Jumlah cabang olahraga yang diikuti (cabang olahraga)			5	85,000,000	5	-	5	-	5	-	100.00%	0.00%									
		Kegiatan Pekan olahraga Pelajar daerah Tingkat Propinsi dan Nasional	Jumlah cabang olahraga yang diikuti (cabang olahraga)			5	160,000,000	5	48,329,100	5	-	5	48,329,100	100.00%	30.21%									
		Fasilitasi kegiatan olahraga masyarakat	Terlaksananya kerjasama event olahraga (kegiatan)			5	500,000,000	2	8,647,000	2	32,396,250	4	41,043,250	80.00%	8.21%									
		Invitasi Bola Basket (Walikota Cup)	Jumlah tim yang mengikuti pertandingan (tim)			24	80,000,000	-	-	24	78,900,000	24	78,900,000	100.00%	98.63%									
		Fasilitas Kegiatan Pacu Kuda	Terfasilitasinya pacu kuda (kegiatan)			1	599,999,990	1	-	1	518,059,450	2	518,059,450	200.00%	86.34%									
		Fasilitas Lomba/ Pertandingan Olahraga Tradisional (Car free day)	Terlaksananya cabang olahraga masyarakat (macam)			6	100,000,000	1	-	3	-	2	-	33.33%	0.00%									
		kegiatan olahraga berkebutuhan khusus	Jumlah atlet berkebutuhan khusus yang mengikuti pertandingan (orang)			40	180,242,000	40	-	40	37,949,700	80	37,949,700	200.00%	21.05%									
		Kejurda FORKI Walikota Cup	Terfasilitasinya kegiatan Forki Walikota cup (klub)			25	250,000,000	25	-	-	-	25	-	100.00%	0.00%									
							1,955,241,990							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	131.38%	37.04%								
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah								
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga			-														DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA					
		Pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga	Jumlah sarana prasarana yang dipelihara (lapangan)			5	281,954,500	5	15,649,300	5	80,446,684	5	96,095,984	100.00%	34.08%									
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat	Terfasilitasinya olahraga masyarakat (kelurahan)			24	350,000,000	5	-	5	-	10	-	41.67%	0.00%									
		revitalisasi sarana dan prasarana olahraga	Revitalisasi kolam renang Bantola (Dokumen)			3	1,800,000,000	1	-	1	-	2	-	66.67%	0.00%									
							2,431,954,500							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	66.93%	3.95%								

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.							
					5		6		7		8			9		12		13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		fasilitasi pelatihan pencak silat	Pencak silat yang melatih (Perguruan Silat)				24	12,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%												
		Pembuatan Pendopo silat/Pasambaham di RW II	Pendopo Silat yang dibangun (unit)				1	80,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%												
								222,000,000							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%											
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya																					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
		Fasilitasi dan Koordinasi Tim Ahli Cagar Budaya	Cagar Budaya yang ditetapkan (Rekomendasi)				3	25,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%												
		Operasional Rumah Kelahiran Bunga Hatta	Terjaganya koleksi museum (bulan)				12	130,000,000	3	18,823,000	3	-	6	18,823,000	50.00%	14.48%												
		Jasa Pengamanan Rumah Kelahiran Bung Hatta	Terjaganya keamanan RKBH (Bulan)				12	75,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%												
		Jasa Kebersihan Rumah Kelahiran Bung Hatta	Terjaganya kebersihan RKBH (Bulan)				12	72,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%												
		Renovasi (Cagar Budaya) Mushalla Tuo Pakak Gulai Bancah	Cagar Budaya yang direnovasi (Kegiatan)				1	150,000,000	-	2,234,750	1	-	1	2,234,750	50.00%	1.49%												
		Rehabilitasi Balai Adat Pakan Kurai (eks Balai Adat Pakan Kurai)	Terlaksananya rehabilitasi/perbaikan balai adat pakan kurai (balai adat)				1	100,000,000	-	-	1	-	1	-	50.00%	0.00%												
		Renovasi Balaiung Sari	Balaiung Sari yang direnovasi (Kegiatan)				1	215,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%												
		Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum (DAK Non Fisik Tahun 2019 Museum)	Terlaksananya kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum (Museum)				2	900,000,000	-	-	2	-	1	-	50.00%	0.00%												
								1,667,000,000							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	42.80%	1.26%											
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya																					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
		Pelaksanaan Pawai Alegoris HUT RI	Pelaksanaan Pawai Alegoris (kegiatan)				1	50,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%												
		Memperingati Milad Bung Hatta	Lomba Menulis dan Seminar (kegiatan)				2	83,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%												
								133,000,000							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%											
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya																					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				16	17	
			Kegiatan pelayanan Kesehatan Hewan (ekor)					2750		980			1,645		2,625		95.45%									
								205,898,500									48.46%	0.00%								
																		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program Peningkatan Produksi Peternakan																						DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
		Operasional Pengelolaan Kuda Bibit Pejantan	Jumlah kuda bibit pejantan yang dipelihara (ekor)					1	52,600,000	1	10,980,050	1	13,352,950	1	24,333,000	100.00%	46.26%									
		UPSUS SIWAB	Laporan upsus siwab (IB, PKB dan lahir (laporan)					12	15,000,000	3	1,926,500	3	1,153,500	6	3,080,000	50.00%	20.53%									
								67,600,000									88.91%	40.55%								
																		Tinggi	Sangat Rendah							
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan																						DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
		Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Jumlah acr promosi peternakan tingkat provinsi Sumatera Barat yang diikuti (kali)					1	60,000,000	-	1,525,000	1	22,322,500	1	23,847,500	50.00%	39.75%									
		Penunjang Operasional RPH	Jumlah pemotongan sapi dan kerbau (ekor)					6150	213,100,045	1,284	30,150,618	3,315	42,182,564	4,599	72,333,182	74.78%	33.94%									
		Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan RPH	Perencanaan lanjutan pembangunan RPH (dokumen)					1	255,403,000	-	-	-	79,225,950	-	79,225,950	0.00%	31.02%									
			Dokumen lalu lintas untuk pembangunan RPH Kota Bukittinggi (dokumen)						1									0.00%								
			Perencanaan pembangunan RPH Kota Bukittinggi (Dokumen)						1				1		1			100.00%								
			Perencanaan lanjutan pembangunan RPH (dokumen)						1										0.00%							
			Dokumen lingkungan hidup (UKL/UPL) pembangua RPH Kota Bukittinggi (dokumen)						1										0.00%							
			Pengawasan pembangunan RPH Kota Bukittinggi (dokumen)						1										0.00%							

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.											
					5			6		7			8			9				12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
					K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembinaan Sadar Wisata (DAK Non Fisik 2019 Dana Pelayanan Kepariwisataaan)	Pembinaan terhadap pelaku usaha kepariwisataan (kelurahan)			3	390,000,000	3	-	3	4,130,500	6	4,130,500	200.00%	1.06%															
							2,901,676,650																							
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata																				DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA								
		Pengelolaan Jam Gadang	Objek wisata Jam gadang yang terkelola (kawasan)			1	570,076,550	1	42,561,650	1	15,240,000	1	57,801,650	100.00%	10.14%															
		Operasional Bidang Destinasi	Jenis lembur yang dibayarkan (kategori)			3	375,000,000	3	56,701,000	3	160,146,000	3	216,847,000	100.00%	57.83%															
			Jenis lembur yang dibayarkan (kategori)			3			3		3		3		100.00%															
		Pengelolaan Taman Panorama Lobang Jepang	Taman panorama dan lobang jepang terpelihara (kawasan)			1	188,898,100	1	33,118,800	1	51,621,706	1	84,740,506	100.00%	44.86%															
		Jasa Kebersihan dan Pengamanan Taman Panorama Lobang Jepang	Jasa Kebersihan dan Pengamanan (bulan)			12	900,000,000	3	149,931,100	3	134,652,117	6	284,583,217	50.00%	31.62%															
		Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Obyek Wisata	Asuransi kecelakaan pengunjung di objek wisata yang dibayarkan (bulan)			12	50,000,000	3	282,480	3	54,615	6	337,095	50.00%	0.67%															
		Pemeliharaan Objek Wisata	Terpeliharnya Obyek Wisata Jenjang seribu (kawasan)			1	150,000,000	1	19,541,500	1	33,204,485	1	52,745,985	100.00%	35.16%															
		Jasa Kebersihan TMS-BK	Tenaga Kebersihan TMS-BK (bulan)			12	750,000,000	3	115,615,500	3	210,756,700	6	326,372,200	50.00%	43.52%															
		Jasa Pengamanan TMS-BK	Tenaga Pengamanan TMS-BK (bulan)			12	750,000,000	3	116,873,900	3	-	6	116,873,900	50.00%	15.58%															
		Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Adat Nan Baanjuang	Rumah adat yang terpelihara (unit)			1	399,390,862	1	-	1	6,507,000	1	6,507,000	100.00%	1.63%															
		Pemeliharaan dan Perawatan Satwa	Jumlah satwa yang dirawat dan dipelihara (spesies)			113	2,820,192,300	113	443,127,570	113	753,299,765	113	1,196,427,335	100.00%	42.42%															
		Revitalisasi TMS-BK	Pembangunan kandang satwa (kadang)			7	10,000,000,000	7	-	7	1,939,712,600	7	1,939,712,600	100.00%	19.40%															
		Revitalisasi Rumah Adat Nan Baanjung	Rumah adat yang direvitalisasi (unit)			1	400,000,000	-	-	1	-	1	-	50.00%	0.00%															
		Penyediaan Iuran Organisasi/Keanggotaan	Iuran keanggotaan PKBSI yang terbayarkan (tahun)			1	11,000,000	-	-	1	-	1	-	100.00%	0.00%															
		Pemeliharaan Aquarium Ikan	Aquarium ikan terpelihara (unit)			1	24,131,150	1	-	1	-	1	-	100.00%	0.00%															

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Operasional dan Pengamanan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan	Jenis lembur yang dibayarkan (kategori)			3	749,002,000	3	83,752,000	3	282,808,000	3	366,560,000	100.00%	48.94%									
		Revitalisasi Jembatan Limpapeh	Jembatan limpapeh yang direvitalisasi (unit)			1	150,000,000	1	-	1	-	1	-	100.00%	0.00%									
		DED Pembangunan Fasilitas Destinasi Wisata Benteng	DED fasilitas wisata Benteng (dokumen)			1	40,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									
		Perencanaan Kawasan Benteng Fort de Dock	DED Fasilitas Destinasi Wisata Benteng (dokumen)			1	250,000,000	-	-	1	-	1	-	50.00%	0.00%									
		Pengembangan kawasan Ngarai Sianok Menjadi Kawasan Geopark Nasional	DED Geopark Ngarai Sianok (dokumen)			1	100,000,000	-	-	1	-	1	-	100.00%	0.00%									
		Pemeliharaan Kandang Satwa	Jumlah kandang yang dipelihara (unit)			25	185,250,000	25	33,955,000	25	26,737,000	25	60,692,000	100.00%	32.76%									
		Revitalisasi Kawasan Destinasi (DAK Fisik Tahun 2019 Bidang Pariwisata)	Jumlah sarana prasarana yang terbangun/terevitalisasi (paket)			3	2,435,021,000	-	-	3	-	2	-	50.00%	0.00%									
							21,297,961,962	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				86.82%	21.10%											
											Predikat Kinerja		Tinggi	Sangat Rendah										
Kelautan dan Perikanan																								
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan				-																	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		Penunjang Operasional BBIH	Jumlah produksi benih ikan (ekor)			389000	206,780,900	76,876	44,351,447	78,411	38,732,765	155,287	83,084,212	39.92%	40.18%									
		Peningkatan produksi ikan air tawar	Pengadaan benih ikan (ekor)			95000	260,000,000	-	3,383,000	34,000	20,950,900	34,000	24,333,900	35.79%	9.36%									
			Pengadaan pakan ikan (Kg)			3000		-		1,200		1,200		40.00%										
			Peningkatan SDM (org)			50		-		-		-		0.00%										
		Pengembangan budidaya lele	Pembangunan/rhab kolam, pengadaan induk, benih ikan, pakan ikan, peningkatan SDM Kelompok (paket)			1	150,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									
							616,780,900	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				24.03%	13.47%											
											Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				-																	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.		
					5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12				15=14/5 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			Jumlah sertifikasi label halal (lembar)			10		-		-			-		0.00%									
		Penunjang Operasional Pengelolaan UPTD Kerajinan Industri	Tingkat pemenuhan operasional pengelolaan UPTD Kerajinan Industri (bulan)			12	139,731,200	3	21,573,500	6	24,659,500	9	46,233,000	75.00%	33.09%									
		Pelatihan Rendo Koto Gadang	Jumlah peserta pelatihan rendo koto gadang (orang)			20	49,035,000	-	-	20	44,835,000	20	44,835,000	100.00%	91.43%									
		Perkuatan Organisasi Mitra UPTD Kerajinan*	Jumlah organisasi mitra UPTD kerajinan industri (organisasi)			1	248,680,000	1	1,141,250	1	46,379,000	1	47,520,250	100.00%	19.11%									
							472,896,200							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	86.24%	29.31%								
														Predikat Kinerja	Tinggi	Sangat Rendah								
		Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial																				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
		Penumbuhan Sentra Potensial	Jumlah IKM yang mengikuti pameran Inacraft (IKM)			1	100,000,000	-	850,000	-	83,109,239	-	83,959,239	0.00%	83.96%									
			Jumlah KUB yang dibina (KUB)			15		-	-	-	-	-	-	0.00%										
		Perkuatan Asosiasi Makanan	Jumlah KUB yang dibina (KUB)			4	54,980,000	-	-	4	-	4	-	100.00%	0.00%									
			Jumlah pameran pangan nusantara yang diikuti (event pameran)			1		-	-	1		1		100.00%										
							154,980,000							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	35.48%	0.00%								
														Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Perencanaan Pembangunan																						
		Program Pengembangan data/informasi																				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
		Updating Data Website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Forum Data					92,101,000		-		550,500													
							92,101,000							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%								
														Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah								

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.							
							I		II			12			13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
							K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		Penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD	Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dihasilkan (perda)			1	345,482,500	-	-	1	258,790,050	1	258,790,050	50.00%	74.91%										
		Penyediaan dan penyampaian informasi keuangan daerah	Jumlah informasi keuangan daerah yang disusun (informasi)			12	56,895,000	3	6,782,214	3	9,744,700	6	16,526,914	50.00%	29.05%										
		Penyusunan Perwako tentang Standar Biaya	Dokumen Perwako Standar Biaya (perwako)			2	72,592,600	1	2,356,550	1	49,944,100	2	52,300,650	100.00%	72.05%										
		Pengelolaan administrasi perbendaharaan umum daerah	Dokumen SP2DSKPD selain gaji (SP2D)			388	67,226,000	97	23,831,883	97	15,991,000	194	39,822,883	50.00%	59.24%										
		Penyusunan buku standar harga barang dan Jasa Kebutuhan Kota Bukittinggi					139,569,560		650,000		-														
		pengelolaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah					59,970,000		-		-														
		Penyusunan rancangan Perwako tentang pertanggungjawaban APBD	Perwako Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dihasilkan (perwako)			1	37,882,500	-	-	1	22,331,650	1	22,331,650	50.00%	58.95%										
		Peningkatan akuntansi berbasis akrual	Jumlah dokumen LK yang disusun sesuai SAP (laporan)			6	130,150,000	6	-	6	-	6	-	100.00%	0.00%										
		Pengelolaan administrasi penerimaan keuangan daerah	Laporan pengendalian penerimaan (laporan)			12	30,134,000	3	2,276,250	3	1,746,250	6	4,022,500	50.00%	13.35%										
		Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	Laporan semester 1 tersusun (laporan)			1	69,267,500	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%										
			prognosis 6 bulan berikutnya tersusun (laporan)			1		-	-	-	-	-	-	-	0.00%										
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Penganggaran	Jumlah aparatur penganggaran yang mengikuti studi komparatif (orang)			50	150,000,000	-	11,071,852	10	92,781,500	10	103,853,352	20.00%	69.24%										
		Asistensi Pengesahan DPA dan DPPA	Jumlah DPA yang ditetapkan dan disahkan sesuai dengan APBD (DPA)			2670	84,621,600	2,600	39,914,800	-	-	2,600	39,914,800	97.38%	47.17%										
			Jumlah DPPA yang ditetapkan dan disahkan sesuai dengan APBD (DPPA)			1150		-	-	-	-	-	-	-	0.00%										
							2,681,485,740							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	36.54%	27.07%									

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.		
					5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12				15=14/5 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			Jumlah Rekomendasi Kenaikan Pangkat Pilihan (Rekomendasi)			1		1		-		1		50.00%										
		Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama	Rekomendasi untuk PNS yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tinggi pratama (rekomendasi)			3	164,814,545	2	101,182,166	-	8,159,100	2	109,341,266	66.67%	66.34%									
		Pemetaan Potensi Aparatur Sipil Negara	Tersediannya data tentang potensi ASN (orang)			100	76,348,400	77	14,277,500	24	-	101	14,277,500	101.00%	18.70%									
		Penyusunan Formasi PNS	Usulan formasi PNS daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 (dokumen)			1	35,899,500	-	-	1	24,270,875	1	24,270,875	50.00%	67.61%									
		Pengadaan dan Pengurusan NIP CPNS	Pengadaan CPNS, Pemberkas dan Pengurusan NIP CPNS (kegiatan)			1	400,000,000	-	26,428,500	-	29,037,975	-	55,466,475	0.00%	13.87%									
		Fasilitasi Pindah/Masuk ASN	Rekomendasi pindah masuk/keluar PNS dari dan ke Pemerintah Kota Bukittinggi (orang)			100	6,319,040	-	-	15	77,625	15	77,625	15.00%	1.23%									
		Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN	laporan pelanggaran disiplin ASN (Laporan)			9	8,501,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									
		Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN	Rekomendasi/alternatif penyelesaian kasus pelanggaran disiplin melalui sidang MPP (paket rekomendasi)			12	32,716,000	-	1,235,800	6	7,098,450	6	8,334,250	50.00%	25.47%									
		Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling	Rekomendasi psikologis kasus kepegawaian, surat keterangan telah mengikuti Konseling Pra nikah (laporan)			1	47,741,600	-	-	-	3,414,600	-	3,414,600	0.00%	7.15%									
		Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP	Sasaran Kinerja Pegawai Individu pada SKPD dan sekolah yang dievaluasi (laporan)			2	30,992,060	2	-	-	6,999,500	2	6,999,500	100.00%	22.58%									
							906,300,200																	
		Program Pendidikan Kedinasan																						
		Kegiatan Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Pim	PNS yang mengikuti Diklat Pim Tk II (orang)			1	238,820,500	-	163,169,750	-	1,473,250	-	164,643,000	0.00%	68.94%									

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Sasaran RKPd	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.							
					5		6		7		8			9		12		13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Standarisasi tunjangan transportasi pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah dokumen APPraisal tunjangan transportasi anggota DPRD (dokumen)			1	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%											
		Penunjang kegiatan kerjasama Asosiasi DPRD Se Indonesia dan Asosiasi Sekretaris DPRD Se Indonesia	Jumlah iuran adeksi dan asdeski yang terbayar (paket)			2	975,000,000	-	399,399,700	1	370,241,950	1	769,641,650	50.00%	78.94%													
		Penyusunan produk hukum inisiatif DPRD	Jumlah produk hukum DPRD yang terfasilitasi (produk)			4	535,826,850	1	2,940,450	1	10,344,685	2	13,285,135	50.00%	2.48%													
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas anggota DPRD dan kelengkapannya tersedia (stel)			300	726,000,000	-	-	150	-	150	-	50.00%	0.00%													
		Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD (bulan)			12	210,000,000	3	-	3	52,401,500	6	52,401,500	50.00%	24.95%													
		penyelenggaraan pengawasan dan penganggaran	Jumlah rapat - rapat penganggaran dan pengawasan terfasilitasi (kali)			15	4,697,199,000	3	1,085,841,930	5	779,517,082	8	1,865,359,012	53.33%	39.71%													
		penyelenggaraan kegiatan persidangan, risalah dan publikasi	Jumlah risalah rapat yang terdokumentasi tepat waktu (rapat)			120	4,418,470,270	15	772,163,211	15	493,506,094	30	1,265,669,305	25.00%	28.64%													
			Jumlah jasa publikasi kegiatan dewan yang terlaksana (kali)			200		50	50	100	50.00%																	
			Jumlah rapat - rapat alat kelengkapan dewan yang difasilitasi (rapat)			120		20	20	40	33.33%																	
		penunjang operasional pimpinan DPRD Kota Bukittinggi	Pembayaran honorarium ajudan, staf TUP dan sopir pimpinan DPRD (orang)			5	67,239,600	5	-	5	16,800,000	5	16,800,000	100.00%	24.99%													
							16,551,343,450																					
		Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat																					SEKRETARIAT DAERAH					

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.									
					5		6		7		8				9		12				13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penunjang Operasional Kegiatan Tim Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Kota Bukittinggi					46,960,525		90,000			-																	
		Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Ekonomi					49,943,000		2,131,000			-																	
		Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan BUMD					26,000,000		8,326,000			-																	
		Fasilitasi Tim Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan					40,658,100		1,000,000			-																	
							163,561,625																						
		Program Penataan Organisasi dan Perangkat Daerah					-																SEKRETARIAT DAERAH						
		Pembuatan aplikasi anjab abk					99,815,000		8,759,377			-																	
		Penyusunan revisi Anjab ABK sesuai hasil evaluasi					19,620,000		2,002,500			-																	
							119,435,000																						
		Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan					-																SEKRETARIAT DAERAH						
		Monitoring Evaluasi dan Pengendalian					20,561,360		2,610,920			-																	
		Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah					572,739,700		27,260,740			-																	
		Asistensi Penyusunan RUP terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah					45,352,000		3,111,500			-																	
		Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kegiatan APBD Kota Bukittinggi					19,000,000		599,875			-																	
							657,653,060																						
		Bidang Penunjang Lainnya																											
		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan					-																KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12				15=14/5 x100%		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (orang)			100	18,350,500	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
		Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Peserta Pelatihan Bela Negara (orang)			40	45,240,800	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
							63,591,300									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%							
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program pendidikan politik masyarakat																							KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi	Laporan Diskusi (Laporan)			24	2,228,841,000	6	377,312,220	6	478,862,760	12	856,174,980	50.00%	38.41%										
		Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	Verifikasi Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Parpol (parpol)			10	6,528,500	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
		Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Peserta Pelatihan dan Sosialisasi (orang)			150	51,657,500	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
		Bimtek Pengajuan dan Pertanggung jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	Peserta Bimtek (orang)			50	31,831,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
		Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi	Buku Data Ormas (eks)			40	35,524,000	-	-	-	7,113,000	-	7,113,000	0.00%	20.02%										
							2,354,382,000									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	47.33%	36.67%							
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
							435,278,849,983									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PR	33.23%	8.28%							
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Sangat Rendah	Sangat Rendah							

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah